

# **PROSIDING SEMINAR NASIONAL**

**Laboratorium Administrasi Publik 2017**

**“Pengembangan Kawasan Berbasis  
Pembangunan Berkelanjutan”**

Serang, 14 Desember 2017



**PENERBIT :**

**UNTIRTA PRESS**

**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL  
Laboratorium Administrasi Publik 2017  
“Pengembangan Kawasan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan”**

Auditorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Gedung A lt. 3  
Serang, Banten

14 Desember 2017



PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL  
Laboratorium Administrasi Publik 2017  
Pengembangan Kawasan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

All right reserved  
Hak cipta dilindungi Undang-Undang.  
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari penulis/penerbit.

Cetakan Pertama:  
Januari 2018

Editor:  
Anis Fuad

Desain Sampul & Tata Letak:  
Ridvan Maulana

Panitia :  
Hasuri Waseh, M.Si  
Dr. Arenawati  
Rina Yulianti, M.Si  
Titi Stiawati, M.Si

Reviewer :  
Abdul Hamid, Ph.D  
Dr. Ismanto, M.M  
Riswanda, Ph.D

Diterbitkan oleh  
Untirta Press  
Jl. Raya Jakarta, Km. 4, Telp. (0254) 280330 Ext 111 Serang  
E-mail: [up@untirta.ac.id](mailto:up@untirta.ac.id) Website: <http://www.up.untirta.ac.id>

ISBN 978-602-5587-12-2

## KATA PENGANTAR

Isu pembangunan berkelanjutan menjadi topik penting di seluruh dunia. Pemimpin di seluruh dunia dituntut untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim. Isu tersebut ditindaklanjuti oleh pimpinan dunia dengan merumuskan agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 di Markas PBB pada 25 September 2015.

Isu pembangunan berkelanjutan juga menjadi isu penting di Indonesia. Indonesia sebagai Negara dengan cakupan wilayah yang sangat luas dengan potensi sumber daya Alam yang sangat kaya juga terdampak permasalahan pembangunan. Pembangunan berkelanjutan bukan saja focus pada perubahan iklim dan lingkungan namun yang lebih penting bagaimana menjaga keberlangsungan umat manusia bias berdampingan dengan lingkungannya untuk mendapatkan kesejahteraan.

Menangkap urgensi kajian mengenai Pembangunan Berkelanjutan, Laboratorium Administrasi Publik Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP Untirta menyelenggarakan Seminar Nasional bertemakan “Pengembangan Kawasan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan.” Tema ini penting untuk didiskusikan karena pengembangan kawasan menjadi salah satu strategi pembangunan yang dapat dilakukan secara komprehensif dibandingkan strategi lain dalam mengembangkan semua aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh suatu kawasan. Selain itu pengembangan kawasan bersifat spesifik dengan melihat kondisi lingkungan dikawasan tersebut seperti lingkungan sosial budaya, lingkungan ekonomi, serta lingkungan fisik yang memiliki kekhasan dikawasan tersebut. Strategi Pengembangan Kawasan menjadi cocok dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Kesesuaian tersebut karena Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah pendekatan yang sangat memperhatikan pengembangan potensi alam dan sosial dengan mempertimbangkan keberlangsungan lingkungan dalam waktu yang panjang.

Seminar ini memiliki sembilan sub tema yang terdiri dari 1) Pembangunan Masyarakat, Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan, dengan beberapa judul yang membahas mengenai Penyusunan Grand Desain Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Garut, Upaya Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Wilayah Provinsi Banten Melalui Intervensi Kebijakan Pemerintah Provinsi, Responsivitas dan Ketepatan Dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan Pada Masyarakat Adat Baduy Kabupaten Lebak, Analisa Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di dalam Penanganan Korban kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) Provinsi Banten, Pemanfaatan Teknologi Internet Dalam

Pemberdayaan Masyarakat di Kota Serang, Implementasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Provinsi Banten, Respon Hiperspektoral dari Tumbuhan Perairan Pesisir Terhadap Peningkatan Konsentrasi Kadar Nutrien Di Perairan. 2) Alih Fungsi Lahan, Pembangunan Sektor Pertanian dan Politik Agraria dan Komunikasi Pembangunan, dengan beberapa judul yang membahas tentang Kebijakan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Subang, Implementasi Kebijakan Lahan Lestari di Kota Sukabumi, Strategi Komunikasi Dalam Pengembangan Kampung Wisata Karodangan Sepang Kota Serang, Komunikasi Guyub dalam Pembangunan Swadaya Masyarakat Walantaka Kota Serang, Strategi Forum Dalam Membangun Kota Serang Sehat. 3) Energi Terbarukan, Kebijakan Ketahanan Pangan dan Keuangan Daerah, dengan beberapa kajian mengenai Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Banten Selatan, Peluang dan Harapan Menjadikan Pajak Hotel dan Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Yang Potensial di Kabupaten Pandeglang, Analisis Administrasi Pembuatan Izin Trayek AKDP Pada Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat. 4) Kajian Pembangunan dan Pengembangan Wilayah, Dampak Pembangunan, dengan beberapa kajian mengenai Proses Rekrutmen Terbuka di Pemerintahan Kota Bandung, Development Of Teaching Modules In Overcoming Obstacles in Learning English For Public Elementary Students Cikeusik, Manajemen Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan di Kota Serang, Identifikasi Bencana Industri Di Kota Cilegon, Aspek Penting Penilaian Dalam Evaluasi program Pemberdayaan Nelayan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Karangantu (PPN) Kota Serang, Analisis Komparatif Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Ipkm) Di Provinsi Banten dan Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pada Divisi Emca Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Laboratorium Administrasi Publik FISIP Untirta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya seminar nasional ini. Kami juga memohon masukan dan saran atas kekurangan penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga dimasa yang akan datang dapat terselenggara dengan baik lagi.

Editor

**SAMBUTAN DEKAN**  
**SEMINAR NASIONAL**  
**LABORATORIUM ADMINISTRASI PUBLIK FISIP UNTIRTA**  
**TEMA : “PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS**  
**PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”**

*Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarokaatuh*

Pertama – tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan Seminar Nasional Laboratorium Administrasi Publik FISIP Untirta. Sholawat dan salam tidak lupa kita limpahkan curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang ini. Selanjutnya kami menghaturkan terima kasih banyak kepada Rektor Untirta dan jajarannya yang telah memberikan dukungan dan fasilitas sehingga seminar nasional ini dapat terlaksana dengan lancar. Kemudian, kami juga menghaturkan terima kasih yang setinggi – tingginya kepada *keynote speakers* dalam semiar nasional ini kepada Gubernur Banten Bapak Dr.,Drs.,H. Wahidin Halim.,M.Si dan Narasumber : Dr. Suwaib Amiruddin.,M.Si, Dr. Sintaningrum.,MT, dan Dr. Dianta Sebayang serta para pemakalah dan peserta yang berpartisipasi dalam seminar nasional ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada penyelenggara dari seminar nasional ini yang telah berinisiasi terselenggaranya seminar nasional LAB Adm Publik FISIP Untirta ini.

Seminar Nasional ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh LAB Adm. Publik FISIP Untirta sebagai bagian dari pertanggungjawaban akademik di dalam mengkaji dan menganalisis isu – isu terkini sehingga turut memperkaya khasanah ilmu sosial khususnya Ilmu Administrasi Publik.

Diambilnya tema seminar nasional yaitu : “Pengembangan Kawasan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan” merupakan tema yang sangat *up to date* mengingat pengembangan kawasan menjadi salah satu strategi pembangunan yang lebih komprehensif untuk mengembangkan semua aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh kawasan tersebut. Di samping itu pengembangan kawasan bersifat spesifik dengan kondisi lingkungan yang juga sangat spesifik baik lingkungan sosial budayanya, lingkungan ekonominya, serta lingkungan fisiknya yang khas juga. Sedangkan pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah pendekatan yang sangat memperhatikan pengembangan potensi alam dan sosial dengan mempertimbangkan keberlangsungan lingkungan dalam waktu yang panjang.

Akhir kata kita semua berharap agar seminar nasional ini dapat memberikan secercah harapan untuk menyumbangkan pemikiran kritis terhadap proses pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

*Wassalaamu 'alaikum Wr Wb.*

***Selamat berseminar, semoga lancar dan sukses***

Dekan FISIP Untirta

ttd

Dr. Agus Sjafari, S.Sos.,M.Si  
NIP. 197108242005011001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Sambutan Dekan FISIP .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Judul dan Peserta Seminar.....	ix
Jadwal sesi Paralel .....	xii
Penyusunan Grand Desain Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten	
Garut .....	1
Upaya Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Wilayah	
Provinsi Banten Melalui Intervensi Kebijakan Pemerintah Provinsi .....	31
Responsivitas dan Ketepatan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan	
pada Masyarakat Adat Baduy Kabupaten Lebak .....	47
Kebijakan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Subang .....	71
Implementasi Kebijakan Lahan Lestari Di Kota Sukabumi .....	87
Strategi Komunikasi dalam Pengembangan Kampung Wisata	
Karodangan Sepang Kota Serang .....	105
Komunikasi Guyub Dalam Pembangunan Swadaya Masyarakat	
Walantaka Kota Serang .....	121
Strategi Forum Dalam Membangun Kota Serang Sehat .....	151
Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor di Banten Selatan .....	191
Manajemen Rehabiltasi Sosial Anak Jalanan di Kota Serang .....	215
Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pada Divisi EMCA	
Kantor Pusat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) .....	237



Implementasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Provinsi Banten .....	253
Proses Rekrutmen Terbuka di Pemerintahan Kota Bandung .....	271
Identifikasi Potensi Bencana Industri Di Kota Cilegon Provinsi Banten .....	287
Analisis Administrasi Pembuatan Izin Trayek AKDP Pada Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat .....	303
Analisis Komparatif Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Di Provinsi Banten .....	325
Analisa Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) terhadap Korban KDRT di Provinsi Banten .....	345
Peran Mantri Tani Desa (MTD) Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Kabupaten Lebak.....	381
Fungsi Partai Politik Dalam Mendorong Ketahanan Wilayah di Provinsi Banten.....	397
Partisipasi Pemuda Dalam Pelestarian Seni Budaya Tradisional Debus Banten .....	413

## SEMINAR NASIONAL

### Laboratorium Administrasi Publik FISIP Untirta

Tema : Pengembangan Kawasan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

Sub Tema Call Paper :

1. Dampak pembangunan Terhadap Masyarakat dan lingkungan
2. Pembangunan Sektor pertanian
3. Alih Fungsi Lahan pertanian
4. Komunikasi Dalam Pembangunan
5. Kebijakan dan Politik Agraria
6. Pemberdayaan Masyarakat
7. Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan
8. Ketahanan Pangan Daerah
9. Kajian Pembangunan dan Pengembangan Wilayah

No	Judul	Penyaji
1	Penyusunan Grand Desain Pengentasan Kemiskinan di kabupaten Garut	M.Widaningsih Maya Puspita
2	Upaya Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Wilayah Provinsi Banten Melalui Intervensi Kebijakan Pemerintah Provinsi	Oki Oktaviana Devi Triady Bachruddin
3	Kebijakan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Subang	Zainal Hirawan
4	Proses Rekrutmen Terbuka di Pemerintahan Kota Bandung	Mia Rosmiati
5	Responsivitas dan Ketepatan Dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan Pada Masyarakat Adat Baduy Kabupaten Lebak	Harits Hijrah Wicaksana
6	Implementasi Kebijakan Lahan Lestari di Kota Sukabumi	Dian Purwanti
7	Aspek Penting Penilaian Dalam Evaluasi program Pemberdayaan	Ipah Ema Jumiati

	Nelayan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Karangantu (PPN) Kota Serang	
8	Development Of Teaching Modules In Overcoming Obstacles In Learning English For Public Elementary Students cikeusik 1	Amanda Kenshi Nurfitri
9	Manajemen Rehabiltasi Sosial Anak Jalanan di Kota Serang	Titi Stiawati
10	Analisa Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di dalam Penanganan Korban kekerasan Dalam Rumahangga (KDRT) Provinsi Banten	Ima Maesaroh Titi Stiawati
11	Komunikasi Guyub Dalam Pembangunan Swadaya Masyarakat Walantaka Kota Serang	Nina Yuliana
12	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Banten Selatan.	Anis Fuad, Shanti Kartika, Arenawati
13	Strategi Komunikasi Dalam Pengembangan Kampung Wisata Karodangan Sepang Kota Serang	Rina Yulianti
14	Identifikasi Bencana Industri Di Kota Cilegon.	Pramudi Harsono
15	Implementasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Di Provinsi Banten	Listyaningsih
16	Peluang dan Harapan Menjadikan Pajak Hotel dan Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Yang Potensial di Kabupaten Pandeglang.	Julianes Cadith

17	Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pada Divisi Emca Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Heni Rohaeni Risma Oktaviana
18	Respon Hiperspektral Dari Tumbuhan Perairan Pesisir Terhadap Peningkatan Konsentrasi Kadar Nutrien Di Perairan	Endan Suwandan
19	Strategi Forum Dalam Membangun Kota Serang Sehat	Rahmi Winangsih
20	Pemanfaatan Teknologi Internet Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Serang	Ari Pandu Witantra
21	Analisis Komparatif Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Ipkm) Di Provinsi Banten	Agus Sjafari

**JADWAL SESI PARAREL SEMINAR NASIONAL LABORATORIUM  
ADMINISTRASI PUBLIK**

**FISIP UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Hari /Tanggal : Kamis 14 Desember 2017

Gedung D FISIP Untirta

Sub Tema 1: Pembangunan Masyarakat, Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan

Ruang	Ruang 1	
Moderator	Riswanda., P.hD	
Notulis	Riswanda.,P.hD	
Waktu	Judul	Penyaji
13.00-15.30	1. Penyusunan Grand Desain Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Garut	M.Widaningsih,Maya Puspita Pascasarjana Universitas Padjadjaran
	2. Upaya Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Wilayah Provinsi Banten Melalui Intervensi Kebijakan Pemerintah Provinsi	Oki Oktaviana Devi Triady Bachruddin Balitbangda Provinsi Banten
	3. Responsivitas dan Ketepatan Dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan Pada Masyarakat Adat Baduy Kabupaten Lebak	Dr. Harits Hijrah Wicaksana STISIP Rangkasbitung
	4. Analisa Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di dalam Penanganan Korban kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) Provinsi Banten	Ima Maesaroh Titi Stiawati Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
	5. Pemanfaatan Teknologi Internet Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Serang	Ari Pandu Witantra Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
	6. Implementasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Di Provinsi Banten	Listyaningsih Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

	7. Respon Hiperspektral Dari Tumbuhan Perairan Pesisir Terhadap Peningkatan Konsentrasi Kadar Nutrien Di Perairan	Endan Suwanda Widyaiswara Ahli Madya, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Banten
--	---	---

Sub Tema 2 : Alih Fungsi Lahan, Pembangunan Sektor Pertanian dan Politik Agraria dan Komunikasi Pembangunan

Ruang	Ruang 2	
Moderator	Anis Fuad, M.Si	
Notulis	Anis Fuad, M.Si	
Waktu	Judul	Penyaji
13.00-15.30	1. Kebijakan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Subang	Zainal Hirawan Universitas Subang
	2. Implementasi Kebijakan Lahan Lestari di Kota Sukabumi	Dian Purwanti Universitas Muhamadiyah Sukabumi
	3. Strategi Komunikasi Dalam Pengembangan Kampung Wisata Karodangan Sepang Kota Serang	Rina Yulianti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
	4. Komunikasi Guyub Dalam Pembangunan Swadaya Masyarakat Walantaka Kota Serang	Nina Yuliana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
	5. Strategi Forum Dalam Membangun Kota Serang Sehat	Rahmi Winangsih Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Sub Tema 3 :Energi Terbarukan , Kebijakan Ketahanan Pangan dan Keuangan Daerah

Ruang	Ruang 3	
Moderator	Kandung Sapto Nugroho.,M.Si	
Notulis	Kandung Sapto Nugroho.,M.Si	
Waktu	Judul	Penyaji
13.00-15.30	1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Banten Selatan	Anis Fuad, Shanti Kartika, Arenawati Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
	2. Peluang dan Harapan Menjadikan Pajak Hotel dan Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Yang Potensial di Kabupaten Pandeglang	Juliannes Cadith Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
	3. Analisis Administrasi Pembuatan Izin Trayek AKDP Pada Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat	Yani Restiani Widjaya Selina Universitas BSI Bandung

Sub Tema 4 : Kajian Pembangunan dan Pengembangan Wilayah, Dampak Pembangunan

Ruang	Ruang 4	
Moderator	Dr. Ismanto, S.Sos, MM	
Notulis	Dr. Ismanto, S.Sos, MM	
Waktu	Judul	Penyaji
13.00-15.30	1. Proses Rekrutmen Terbuka di Pemerintahan Kota Bandung	Mia Rosmiati Poiteknik Negeri Bandung
	2. Development Of Teaching Modules In Overcoming Obstacles In Learning English For Public Elementary Students Cikeusik 1	Amanda Kenshi Nurfitri

	3. Manajemen Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan di Kota Serang	Titi Stiawati Universitas Sultan Ageng Tiryasa
	4. Identifikasi Bencana Industri Di Kota Cilegon	Pramudi Harsono Universitas Bina Bangsa
	5. Aspek Penting Penilaian Dalam Evaluasi program Pemberdayaan Nelayan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Karangantu (PPN) Kota Serang	Dr. Ipah Ema Jumiati Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
	6. Analisis Komparatif Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Ipkm) Di Provinsi Banten	Dr. Agus Sjafari Universitas Sultan Ageng Tiryasa
	7. Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pada Divisi Emca Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Heni Rohaeni Risma Oktaviana Akademi Sekretari dan Manajemen BSI Bandung



# **ABSTRAK**

## **Penyusunan Grand Desain Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Garut**

M. Widaningsih dan Maya Puspita  
FE Univeristas Garut, STIAMI Jakarta  
widamalizal@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Garut pada tahun 2014 adalah sebesar 12,79%. Angka ini masih berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 9,61%. Berdasarkan hal ini, perlu dilakukan terobosan agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai. Adapun Tujuan penelitian ini adalah, (1) Mengetahui kondisi yang mempengaruhi penanggulangan kemiskinan yang paling memungkinkan untuk ditangani, (2) Menginventarisasi *best practice* penanggulangan kemiskinan dari kabupaten/ kota lain yang memiliki kemiripan karakteristik, (3) Menyusun alternative kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan, (4) Menyusun langkah-langkah Rencana Tindak Lanjut Penanggulangan Kemiskinan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian, menunjukkan titik berat kebijakan dan program pemerintah daerah tersebut dapat terlaksana dengan optimal, bila terdapat payung hukum yang jelas. Payung hukum dimaksud dapat berupa Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan; yang mengatur tentang: 1) ketentuan umum Penanggulangan Kemiskinan; 2) tujuan, ruang lingkup, arah kebijakan, dan asas; 3) identifikasi warga miskin; 4) hak dan kewajiban warga miskin; 5) penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan; 6) kewajiban pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha; 7) pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; 8) TKPKD; 9) pengawasan, monitoring, dan evaluasi; 10) pembiayaan; dan 11) peran serta masyarakat.

Kata Kunci : Grand Desain, Kemiskinan, Pengentasan, kebijakan

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan RPJMN 2010-2014 dan MDG's maka pada tahun 2010 telah diterbitkan kebijakan operasional berupa Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan memuat 4 (empat) pokok strategi yaitu (1) perbaikan program perlindungan sosial; (2) peningkatan

akses terhadap pelayanan dasar; (3) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan (4) pembangunan inklusif; yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah. Tujuan Perpres No. 15 Tahun 2010 adalah meningkatkan efektivitas upaya pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dan sektor swasta dalam penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Perpres ini, maka telah dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K) di tingkat pusat, yang diketuai oleh Wakil Presiden. Perpres yang sama juga mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat propinsi, kabupaten dan kota, yang masing-masing diketuai oleh Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota. TKPK daerah ini merupakan mitra kerja TNP2K dalam mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan. Di tingkat Kabupaten garut, legalitas ini ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Bupati Garut Nomor 400/Kep.505-Bappeda/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Garut.

Berbagai kebijakan disusun untuk mengurangi masalah yang timbul, dalam hal ini tingginya angka kemiskinan. Berbagai formulasi penanganan kemiskinan sudah banyak dikerjakan, mulai dari yang rumit sampai yang sangat sederhana. Mulai dari Jaring Pengaman Sosial (JPS), Instruksi Presiden mengenai Desa Tertinggal (IDT), Program Pembangunan Keluarga Sejahtera melalui Tabungan Keluarga Sejahtera / Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Takesra/Kukesra), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani - Nelayan Kecil (P4K), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan

pemberian Dana Kompensasi BBM atau lebih dikenal dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan-bantuan langsung atau semi langsung, semuanya disusun untuk menanggulangi penyebaran masalah kemiskinan.

Namun demikian, belum semua kebijakan tersebut bisa memberikan hasil yang memuaskan. Beberapa program ternyata kurang sesuai dengan kondisi wilayah setempat, bahkan disinyalir bantuan untuk masyarakat miskin sering tidak tepat sasaran. Kebijakan pengentasan kemiskinan kebanyakan belum bisa mengakomodasikan potensi wilayah serta karakteristik penduduk miskin sebagai sasaran utama.

Berkaitan dengan tanggungjawab dan permasalahan diatas, maka Pemerintah Kabupaten Garut memandang penting dilakukannya penyusunan Roadmap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Garut agar orientasi kegiatan penanggulangan kemiskinannya memiliki arah yang jelas, fokus dan terukur.

### **Perumusan Masalah**

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Garut pada tahun 2013 adalah sebesar 12,79%. Angka ini masih berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 9,61%, maupun Nasional sebesar 11,47%. Posisi relatif Kabupaten Garut berada pada rangking ke 20 dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dari Kab. Bandung Barat, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, dan Kota Tasikmalaya. Dengan kondisi kemiskinan seperti tersebut di atas, maka perlu dilakukan upaya-upaya terobosan agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai.

## **Tujuan**

Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk menyusun alternatif kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut dengan poin-poin penting sebagai berikut.

1. Mengetahui kondisi yang mempengaruhi penanggulangan kemiskinan yang paling memungkinkan untuk ditangani.
2. Menginventarisasi best practice penanggulangan kemiskinan dari kabupaten/ kota lain yang memiliki kemiripan karakteristik, sehingga memungkinkan untuk diterapkan.
3. Menyusun alternatif kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan.
4. Menyusun langkah-langkah Rencana Tindak Lanjut Penanggulangan Kemiskinan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Desain penelitian yang dipergunakan dalam kajian ini adalah descriptive analysis. Desain ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang gejala-gejala yang diteliti pada saat sekarang. Dari hasil gambaran tersebut, selanjutnya dicari jawaban bagi pemecahan masalah atau fenomena-fenomena yang ada.

### **Tempat Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan terhadap seluruh kecamatan , sejumlah 42 kecamatan di Kabupaten Garut. Sedangkan jangka waktu penelitian ini dilakukan selama 4 bulan di tahun 2015

## **Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara. Pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan serta berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak tertentu yang berkompeten. Hal ini dilakukan sebagai dasar untuk menentukan tahapan serta pencarian informasi mengenai penyelesaian masalah sesuai dengan tujuan penelitian yang dilaksanakan.

Dalam rangka mendapatkan gambaran untuk melakukan analisa maka data yang digunakan adalah: yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer diperoleh dengan cara wawancara mendalam (in-depth interview). Data sekunder diperoleh dari Dinas Badan Pusat Statistik, Bappeda dan instansi terkait. Seluruh data sekunder merupakan data time series untuk Kabupaten Garut.

Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumentasi yaitu mempelajari teori, aturan-aturan atau dokumen-dokumen tertulis yang ada kaitannya dengan materi yang dikaji. Sumber pustaka juga dapat digunakan untuk mendukung data objek penelitian sebagai data sekunder penelitian (data BPS atau penyedia data lainnya).

### **Analisis Data**

Teknik analisis dilakukan dengan cara deskriptif terhadap arah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan di Kabupaten Garut yang dapat menggambarkan bagaimana tingkat kemampuan ekonomi di Kabupaten Garut berdasarkan pedoman dari Bappenas, RPJMD Kab. Garut dan RTRW Kabupaten Garut serta kebijakan lainnya yang mendukung.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan data kemiskinan dan data penunjang lainnya yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan kemudian dikompilasi dengan dukungan teori serta best practice yang dilakukan di daerah lain; maka pembahasan akan dibatasi pada aspek kelembagaan, Optimalisasi pemanfaatan Basis Data Kemiskinan, dan regulasi di bidang penanggulangan kemiskinan.

### **Kelembagaan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka di setiap kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah. Di Kabupaten Garut sendiri, telah diterbitkan Keputusan Bupati Garut Nomor 400/Kep.505–Bappeda/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Garut. Tugas Pokok yang diemban oleh TKPKD adalah: 1) Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/ Kota; dan 2) Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/ Kota.

Keputusan Bupati Garut tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Garut dibuat 5 (lima) tahun yang lalu. Di sisi lain, ada himbauan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang meminta daerah untuk melakukan pembaharuan surat keputusan dimaksud setiap tahun. Hal ini juga diperkuat dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut. Dengan demikian, maka seiring perkembangan pembangunan yang semakin dinamis, maka sudah sepatutnya dilakukan restrukturisasi kelembagaan (TKPKD) sesuai dengan keperluan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dibantu oleh Sekretariat TKPK, Kelompok Kerja dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan. Kelompok Kerja terdiri dari 1) kelompok kerja Pendataan dan Sistem Informasi, 2) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan, 3) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan, dan 4) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat. Sedangkan Kelompok Program terdiri dari: 1) kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, 2) kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, 3) kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan 4) Kelompok Program lainnya.

Selain karena adanya perubahan SOTK, keanggotaan pada kelompok kerja maupun kelompok program juga perlu ditinjau kembali kesesuaiannya, termasuk menambahkan unsur terkait yang diperlukan.

Mengingat luasnya wilayah kerja Kabupaten Garut yang terdiri dari 42 kecamatan dan 442 kelurahan/desa, maka rentang cakupan penanggulangan



kemiskinan dirasakan sangatlah luas. Jika hal ini dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang telah berhasil menanggulangi kemiskinan, maka akan kelihatan perbandingan yang sangat mencolok. Beberapa Kabupaten seperti Kabupaten Sragen, Kota Surakarta, Kabupaten Sleman, dan Kota Banjar; memiliki luas wilayah yang jauh lebih sempit.

Untuk mengatasi luasnya wilayah ini ada baiknya bila TKPKD yang berkedudukan di tingkat kabupaten dibantu dengan pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TPK-K) dan nantinya akan diikuti dengan pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa (TPKDes).

Di Kota Surakarta, telah dibentuk Tim Kemiskinan Desa, tanpa adanya Tim Kemiskinan Kecamatan. Alasan yang mereka kemukakan bahwa hal ini dilakukan untuk memangkas alur birokrasi, sehingga Tim Kemiskinan Desa bisa langsung berkoordinasi dengan TKPKD. Hal ini dapat dipahami, mengingat Kota Surakarta hanya terdiri dari 5 (lima) kecamatan dengan 51 kelurahan.

### **Optimalisasi Pemanfaatan Basis Data Kemiskinan**

Agar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dan tingkat keberhasilannya dapat diukur, maka adanya data yang akurat dan mutakhir sejak proses perencanaan mutlak diperlukan.

Data tentang warga miskin yang digunakan saat ini masih bersumber dari Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011. Namun data PPLS 2011 tersebut tidak luput dari terjadinya kesalahan seperti orang tidak miskin masuk dalam data PPLS (inclusion error) atau orang miskin tetapi tidak masuk dalam data PPLS (exclusion error). Disamping itu data PPLS

2011 sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun pada tahun 2015, sehingga data tersebut memiliki margin kesalahan yang tinggi karena adanya dinamika sosial selama jangka waktu tersebut. Dinamika sosial tersebut antara lain perubahan status penduduk miskin menjadi tidak miskin, kematian, perpindahan penduduk dan lain lain.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan kegiatan pemutakhiran yang disebut dengan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dengan dukungan aktif dari TNP2K. Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 bertujuan mendapatkan data akurat mengenai jumlah rumah tangga penerima manfaat terhadap kepesertaan program pemerintah yang terdiri dari Kartu Keluarga Sehat (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kegiatan PBDT terdiri dari tiga bagian besar yaitu forum konsultasi publik, pencacahan, serta pemeringkatan dan pengelompokan status kesejahteraan rumah tangga. Forum konsultasi publik (FKP) merupakan inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat. Namun demikian, hasil pendataan Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 sampai saat ini (Bulan Desember 2015) belum diterbitkan.

Guna menjamin ketersediaan data yang valid dan tepat sasaran, maka diperlukan up dating data kemiskinan melalui verifikasi dan validasi. Namun demikian, penentuan tentang siapa yang harus melakukan verifikasi dan validasi ini, masih menjadi perdebatan.

Dari segi peraturan perundangan, Kementerian Sosial RI memiliki kewenangan untuk menetapkan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 bahwa “Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga terkait”. Disamping itu, Kemensos juga berwenang untuk menetapkan kriteria fakir miskin untuk kepentingan penetapan sasaran program penanggulangan fakir miskin yang lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 8 ayat (1) bahwa “Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin”. Penetapan kriteria dimaksudkan sebagai dasar dalam menseleksi dan menetapkan sasaran program secara tepat sesuai dengan tujuan program.

Di sisi lain, dalam struktur TKPKD seperti tercantum pada Keputusan Bupati Garut Nomor 400/Kep.505–Bappeda/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Garut; terdapat Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi yang memiliki fungsi: 1) pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan; 2) pengembangan indikator kemiskinan daerah; 3) pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan 4) penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.

Kelompok kerja Pendataan dan Informasi yang ada dalam Keputusan Bupati tersebut di atas terdiri dari:

Ketua : Kepala Bidang Data Bappeda

: Kepala BPS

Wakil Ketua

Anggota : 1. Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil,

2. Kepala Bagian Informatika Setda,

3. Unsur Perguruan Tinggi

Dilihat dari kondisi di atas, maka verifikasi dan validasi data kemiskinan juga menjadi tugas Kelompok kerja Pendataan dan Informasi di TKPKD karena menyangkut fungsi 1) pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan; dan 2) pengembangan indikator kemiskinan daerah.

Agar terjalin kerjasama yang lebih harmonis dan menghindari tumpang tindih kegiatan, maka diperlukan restrukturisasi TKPKD antara lain dengan memasukkan unsur Dinas Sosial Nakertrans yang merupakan turunan dari Kemensos, di Kelompok kerja Pendataan dan Informasi TKPKD.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah pengembangan indikator kemiskinan lokal. Setiap daerah mungkin memiliki karakteristik khusus kemiskinan yang membedakan dengan daerah lain, karena kemiskinan memang bersifat relatif sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Jika memang diperlukan, Kabupaten Garut dapat mengembangkan indikator lokal kemiskinan. Pengembangan indikator lokal ini telah dikembangkan oleh TKPKD Kota Surakarta.

Pemetaan masalah kemiskinan diawali dengan pendataan kondisi dan jumlah penduduk miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar-waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Pengukuran kemiskinan yang valid merupakan prasyarat mutlak bagi pengambilan kebijakan untuk memperbaiki kondisi hidup orang miskin.

Pemetaan kelompok sasaran dilakukan berdasarkan indikator kemiskinan yang digunakan. Penggunaan indikator akan mempengaruhi jumlah kelompok sasaran dan tingkat keparahan kondisi kemiskinannya. Oleh karena itu, TKPKD perlu menggunakan komposit indikator dari berbagai sumber supaya lebih komprehensif dalam menjangkau kelompok penduduk miskin. Logika yang mendasari adalah bahwa kemiskinan itu sebagai lingkaran setan; dimana sentra masalahnya saling terkait dan sangat kentara dalam area pendidikan; pendapatan/ daya beli/ pekerjaan/ keterbatasan menanggung beban tanggungan keluarga; perumahan/ permukiman/ prasarana dasar; ketahanan pangan; dan kesehatan.

Proses penetapan indikator kemiskinan yang akan digunakan untuk verifikasi penduduk miskin dilakukan dalam proses diskusi dengan stakeholder terkait bidang prioritas fokus penanggulangan kemiskinan di antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum (urusan perumahan/permukiman/prasarana dasar), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan KUMKM, dan unsur stakeholder non pemerintah lainnya.

Data yang sudah diverifikasi dan divalidasi tadi dapat digunakan untuk meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan bagi masyarakat miskin. Salah satu contoh adalah yang terjadi di Kabupaten Sragen.

Pemkab Sragen telah mengeluarkan 3 buah kartu untuk Pelayanan Kesehatan yang diberi nama Kartu Saraswati (Sarase Warga Sukowati), yaitu Saraswati Melati, Saraswati Menur dan Saraswati Kenanga.

Kartu Saraswati Melati adalah kartu yang diperuntukkan bagi warga miskin yang namanya telah tercatat di data base TNP2K. Pemegang kartu ini identik dengan peserta Jamkesmas. Kartu Saraswati Menur Diperuntukkan untuk warga miskin yang tidak terdaftar dalam Database TNP2K, tetapi terdaftar dalam Data PPLS BPS, atau di luar 2 database di atas, tetapi terbukti miskin dari hasil Survey UPTPK. Pemegang kartu ini identik dengan Peserta Jamkesda. Kartu Saraswati Kenanga Diperuntukkan untuk semua warga Sragen yang mampu, memakai dana Jamkesda dengan pembatasan-pembatasan. Pemilik Kartu Saraswati Melati dan Menur ini bisa mendapatkan pelayanan gratis ketika menjalani rawat jalan dan rawat inap kelas III baik di Puskesmas ataupun di RSUD. Sedangkan bagi pemilik Kartu Saraswati Kenanga hanya akan digratiskan saat menjalani rawat inap dan rawat jalan di Puskesmas.

Sedangkan untuk pelayanan pendidikan, Pemkab Sragen telah menerbitkan Kartu Siswa Pintar Warga Sukowati (*Sintawati*) meliputi pelayanan: 1) Keringanan Biaya Pendidikan KK Miskin (SMK), 2) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi (PTN pulau Jawa), 3) Penanganan Pekerja Anak dan Anak Putus Sekolah, dan 4) Bantuan Biaya Pendidikan Non Formal (DIKLAT).

Guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Garut, maka hendaknya dilakukan pengkajian tentang kemungkinan peluncuran kartu penerima manfaat program kemiskinan daerah (Kartu Intan).

Peluncuran kartu penerima manfaat program kemiskinan daerah tentunya memerlukan kesediaan base data daerah tentang kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Data yang tersedia harus bermutu, handal, cepat, tepat waktu dan akurat. Untuk memenuhi tuntutan ini antara lain dapat ditempuh dengan cara mengembangkan suatu Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan kemiskinan (SIMPK).

Sasaran dari Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan (SIMPK) adalah sebagai media informasi bagi pengambil keputusan khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dan sebagai database kemiskinan.

Agar suatu Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan (SIMPK) yang dibangun dapat berhasil guna, maka beberapa hal minimal yang harus dipenuhi oleh sistem penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut.

- a. Sistem harus menyajikan informasi tentang data kemiskinan secara umum dan dapat merekomendasi kebutuhan tentang data penduduk miskin untuk wilayah kabupaten yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi setiap pihak atau instansi terkait yang membutuhkan informasi tentang data kemiskinan di kabupaten yang bersangkutan.

- b. Sistem harus dapat mendokumentasikan data–data utama yang berkaitan dengan data kemiskinan seperti data bantuan, entri data keluarga miskin dan indikator kemiskinan.
- c. Sistem harus dapat menyajikan laporan yang spesifik. Tidak semua informasi dalam sistem yang menyangkut data kemiskinan secara detail (*by name by address*) dipublikasikan sebagai informasi publik. Informasi yang menyangkut detail penduduk miskin hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang/ memiliki hak penuh terhadap data. Sedangkan untuk konsumsi publik data yang disajikan hanya berupa data summary yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik.

### **Regulasi Penanggulangan Kemiskinan Di Daerah**

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mengurangi jumlah penduduk miskin, perlu adanya upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat.

Agar kebijakan dan program pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan memiliki payung hukum yang jelas, maka minimal pemerintah daerah memiliki regulasi untuk hal berikut ini:

- a. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Garut.

Di Kabupaten Garut, telah diterbitkan Keputusan Bupati Garut Nomor 400/Kep.505–Bappeda/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Garut.



### Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)

Dokumen SPKD ini merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat kebijakan pembangunan dan rencana kerja Pemerintah Daerah selama lima tahun. Dokumen SPKD merupakan bahan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam melakukan upaya penanggulangan kemiskinan Kabupaten Garut. Dokumen SPKD Kabupaten Garut tahun 2014 – 2019 telah disusun pada tahun 2014, tapi sampai saat ini belum memiliki payung hukum.

Beberapa daerah lain telah meregulasikan SPKD dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota maupun Peraturan Daerah. Beberapa daerah lainnya memasukkan SPKD kedalam Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

#### b. Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan

Karena kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan pertimbangan seperti ini, maka Pemerintah Daerah sudah seyogyanya membuat Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.

Dalam Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan diatur tentang 1) ketentuan umum Penanggulangan Kemiskinan; 2) tujuan, ruang lingkup, dan asas; 3) identifikasi warga miskin; 4) hak dan kewajiban warga miskin; 5) penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan; 6) pelaksanaan

penanggulangan kemiskinan; 7) TKPKD; 8) pengawasan, monitoring, dan evaluasi; 9) pembiayaan; dan 10) peran serta masyarakat.

c. Surat Keputusan tentang Data Warga Miskin

Pemetaan masalah kemiskinan diawali dengan pendataan kondisi dan jumlah penduduk miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar-waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Pengukuran kemiskinan yang valid merupakan prasyarat mutlak bagi pengambilan kebijakan untuk memperbaiki kondisi hidup orang miskin.

Pendataan Warga Miskin dapat dimulai dengan menentukan kriteria Warga Miskin berdasarkan Indikator Nasional dan Indikator Lokal, yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan pendataan Warga Miskin dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan di tingkat Desa. Selanjutnya Daftar calon Warga Miskin sementara dipublikasikan untuk mendapatkan tanggapan atau sanggahan dari masyarakat; dan kemudian didata menggunakan indikator yang telah ditetapkan.

Setelah pendataan selesai dilaksanakan, maka dilakukan Penetapan Calon Warga Miskin. Daftar calon Warga Miskin diverifikasi dan divalidasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati. Tim pemutakhiran data terdiri dari: 1) unsur SKPD terkait, 2) unsur masyarakat, dan 3) unsur pemangku kepentingan lainnya. Data Warga Miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Tindak lanjut ini menggambarkan langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilaksanakan berdasarkan pembahasan sebelumnya. Secara keseluruhan, rencana tindak lanjut disusun untuk periode 3 (tiga) tahun, yakni 2016 – 2018. Selain karena faktor relevansi dengan kondisi yang dinamis, hal ini juga disesuaikan dengan periodisasi RPJMD.

### **Restrukturisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka di setiap kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah. Di Kabupaten Garut, telah diterbitkan Keputusan Bupati Garut Nomor 400/Kep.505–Bappeda/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Garut. Tugas Pokok yang diemban oleh TKPKD adalah: 1) Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten; dan 2) Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.

Karena sejak tahun 2010 telah terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut, serta perlunya penyesuaian seiring dengan perkembangan pembangunan yang semakin dinamis, maka sudah sepantasnya dilakukan revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan (TKPKD) sesuai dengan keperluan.

Revitalisasi dilakukan antara lain melalui: 1) evaluasi menyeluruh kegiatan TKPKD yang telah lalu, 2) penyusunan rencana kerja, 3) koordinasi dengan SKPD

terkait secara rutin dan terencana, 4) pengaktifan sekretariat bersama, dan 5) penyediaan dukungan dana yang memadai guna mendukung kinerja TKPKD.

Kemudian, mengingat luasnya wilayah kerja Kabupaten Garut yang terdiri dari 42 kecamatan dan 442 kelurahan/desa, maka rentang cakupan penanggulangan kemiskinan dirasakan sangatlah luas.

Untuk mengatasi luasnya wilayah ini serta untuk lebih mengefektifkan kinerja TKPKD, maka sudah dirasakan menjadi kebutuhan jika TKPKD yang berkedudukan di tingkat kabupaten dibantu dengan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TPK-K). Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TPK-K) nantinya akan diikuti dengan pembentukan dengan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa (TPK-Des), setelah sebelumnya dilakukan pilot project pada desa-desa yang merupakan kantong kemiskinan.

Hal ini juga didasari pemikiran bahwa Penanggulangan Kemiskinan akan berhasil bila seluruh masyarakat ikut berpartisipasi. Untuk itulah maka Pemerintah Daerah harus mengorientasikan, menggerakkan partisipasi masyarakat dan menggali kesadaran masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan

**Tabel Rencana Kerja Penguatan Kelembagaan TKPKD**

No	KEGIATAN	Tahun Pelaksanaan		
		2016	2017	2018
1	Revitalisasi TKPKD	X		
2	Sosialisasi Rencana Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TPK-K)	X		
3	Inventarisasi Sumber Daya yang bisa didayagunakan di Kecamatan	X		
4	Persiapan payung hukum pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TPK-K)	X		
5	Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan		X	

Kecamatan (TPK-K) di setiap Kecamatan		
6	Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa (TPK-Des) di wilayah percontohan sebagai <i>pilot project</i> ; dibawah binaan SKPD pembina wilayah.	X

Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TPK-K) di setiap Kecamatan ini dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut.

- a. Mensinergikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan lintas SKPD untuk Penanggulangan Kemiskinan dengan memperhatikan permasalahan khusus tiap kecamatan;
- b. Mensinergikan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber pendanaan; pemerintah, swasta (*Corporate Social Responsibility*), dan swadaya masyarakat untuk Penanggulangan Kemiskinan dengan memperhatikan permasalahan khusus tiap kecamatan;
- c. Mengaktifkan fasilitator lingkungan untuk memberdayakan masyarakat, basis memasukkan permasalahan kemiskinan komunitasnya ke dalam rencana strategis Kecamatan.

### **Penyusunan Data Terpadu Kemiskinan**

Pemetaan masalah kemiskinan diawali dengan pendataan kondisi dan jumlah penduduk miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar-waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Pengukuran kemiskinan yang valid merupakan

prasyarat mutlak bagi pengambilan kebijakan untuk memperbaiki kondisi hidup orang miskin.

Pendataan Warga Miskin dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah menentukan kriteria Warga Miskin berdasarkan Indikator Nasional dan Indikator Lokal;
- b. Kriteria Warga Miskin yang telah disepakati diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. Pelaksanaan pendataan Warga Miskin dengan melibatkan pemangku kepentingan di tingkat Desa;
- d. Daftar Warga Miskin sementara diperoleh dari:
  - 1) Data PPLS 2011 atau Data hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 bila telah ada;
  - 2) Data jumlah penduduk miskin yang dipakai pada tahun terakhir;
  - 3) Usulan dari masyarakat melalui musyawarah berjenjang dari tingkat RT sampai Desa.
- e. Daftar calon Warga Miskin sementara dipublikasikan untuk mendapatkan tanggapan atau sanggahan dari masyarakat;
- f. Daftar calon Warga Miskin didata menggunakan indikator yang telah ditetapkan;
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan Warga Miskin diatur dalam peraturan Bupati.

Setelah pendataan selesai dilaksanakan, maka dilakukan Penetapan Calon Warga Miskin; dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Daftar calon Warga Miskin diverifikasi dan divalidasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati. Tim pemutakhiran data terdiri dari: 1) unsur SKPD terkait, 2) unsur masyarakat, dan 3) unsur pemangku kepentingan lainnya.
- b. Data Warga Miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Data Warga Miskin diperbaharui sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun untuk menentukan apakah tetap berstatus miskin atau sudah meningkat menjadi tidak miskin.
- d. Data Warga Miskin dikelola dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan.
- e. Data Warga Miskin menjadi dasar penyusunan program Penanggulangan Kemiskinan.

Setelah dilakukan penetapan Data Warga Miskin, maka langkah selanjutnya adalah penandaan warga miskin, menggunakan ketentuan sebagai berikut.

- a. Warga Miskin yang sudah masuk dalam data Warga Miskin yang sudah ditetapkan oleh Bupati diberikan penandaan.
- b. Penandaan Warga Miskin dapat berupa sticker yang ditempelkan di rumah/tempat tinggal, atau berupa kartu Warga Miskin.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penandaan Warga Miskin diatur dalam peraturan Bupati.

Strategi utama penyusunan data terpadu kemiskinan adalah dengan cara mengembangkan dan memperbaharui (*up dating*) data pokok (*base data*) secara periodik (tahunan) untuk menghasilkan data yang valid, reliabel, akurat, dan terstruktur; serta dikelola dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan.

**Tabel Rencana Kerja Penyusunan Data Terpadu Kemiskinan**

No	KEGIATAN	Tahun Pelaksanaan		
		2016	2017	2018
1	Pendataan Warga Miskin	X		
	a. Penentuan kriteria Warga Miskin	X		
	b. Penetapan Kriteria Warga Miskin dalam Peraturan Bupati	X		
	c. Pelaksanaan pendataan Warga Miskin	X		
	d. Publikasi Daftar calon Warga Miskin	X		
2	Penetapan Calon Warga Miskin			
	a. Verifikasi dan validasi Daftar calon Warga Miskin oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.	X		
	b. Penerbitan Keputusan Bupati tentang penetapan data Warga Miskin	X		
3	Penandaan Warga Miskin			
	a. Penandaan Warga Miskin berupa sticker yang ditempelkan di rumah/tempat tinggal, atau berupa kartu Warga Miskin	X		
4.	Pembangunan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan	X		
5	Pengembangan dan pemperbaharuan ( <i>up dating</i> ) data pokok ( <i>base data</i> ) secara periodik (tahunan)	X	X	X

Data pokok kemiskinan yang diupayakan untuk disajikan adalah data kelompok sasaran (rumah tangga/individu) dari indikator kemiskinan dari sisi kemampuan pendapatan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan kemampuan ketahanan pangan. Kondisi kemiskinan merupakan hasil kumulatif dari banyak variabel, sehingga dalam pembaruan data kemiskinan ini juga akan



dikembangkan basis data pendukung mengenai karakteristik lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya yang berkontribusi meningkatkan/ menurunkan tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan.

### **Penyusunan Regulasi Penanggulangan Kemiskinan**

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mengurangi jumlah penduduk miskin, perlu adanya upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat.

Agar kebijakan dan program pemerintah daerah tersebut dapat terlaksana dengan optimal, maka perlu adanya payung hukum yang jelas. Sampai saat ini, di bidang penanggulangan kemiskinan baru ada Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan TKPK Daerah Kabupaten Garut dan Surat Keputusan tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Payung hukum dimaksud dapat berupa Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan; yang didalamnya mengatur tentang: 1) ketentuan umum Penanggulangan Kemiskinan; 2) tujuan, ruang lingkup, arah kebijakan, dan asas; 3) identifikasi warga miskin; 4) hak dan kewajiban warga miskin; 5) penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan; 6) kewajiban pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha; 7) pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; 8) TKPKD; 9) pengawasan, monitoring, dan evaluasi; 10) pembiayaan; dan 11) peran serta masyarakat.

**Tabel Rencana Kerja Penyusunan Regulasi Penanggulangan Kemiskinan**

No	KEGIATAN	Tahun Pelaksanaan		
		2016	2017	2018
1	Penerbitan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan	X		
2	Pembaharuan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Garut	X		
3	Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Warga Miskin	X		
4.	Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Pembangunan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan	X		
5	Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TPK-K)		X	
6	Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa (TPK-Des)			X

### Upaya Terobosan

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Garut pada setiap tahunnya selalu berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Barat maupun Nasional. Posisi relatif Kabupaten Garut berada pada rangking ke 20 dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dari Kab. Bandung Barat, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, dan Kota Tasikmalaya.

Dengan fenomena seperti di atas, sudah seharusnya ada upaya-upaya terobosan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin secara cepat. Sebab jika tidak dilakukan hal demikian, maka penurunan jumlah penduduk miskin akan tetap bergerak lambat. Guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Garut, maka hendaknya dilakukan pengkajian tentang kemungkinan peluncuran kartu penerima manfaat program kemiskinan daerah (Kartu Intan).

Peluncuran kartu penerima manfaat program kemiskinan daerah tentunya memerlukan kesediaan base data tentang kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Data yang tersedia harus bermutu, handal, cepat, tepat waktu dan akurat. Untuk memenuhi tuntutan ini antara lain dapat ditempuh dengan cara mengembangkan suatu Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan kemiskinan (SIMPK) seperti telah dibahas pada bagian sebelumnya.

Secara sederhana, pengelompokkan kartu penerima manfaat program kemiskinan daerah (Kartu Intan) dapat dibagi menjadi kartu untuk bidang pendidikan, kesehatan, maupun bidang lain yang diperlukan kemudian. Pada setiap kartunya warga masyarakat dibagi lagi kedalam kelompok berikut: 1) Warga Miskin yang sudah terdaftar dalam data PPLS/PBDT dan sudah mendapatkan bantuan program-program dari pusat, 2) Warga Miskin yang sudah terdaftar dalam data PPLS/PBDT atau terdaftar dalam Data Warga Miskin Kabupaten, tetapi belum mendapatkan bantuan program-program dari pusat sehingga diarahkan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, dan 3) Warga Miskin yang belum pernah terdaftar baik di data Pusat maupun data Daerah.

Upaya terobosan berikutnya adalah yang berhubungan langsung dengan tingkat kesadaran masyarakat tentang kemiskinan. Ketidakakuratan data antara lain dipicu oleh adanya pemalsuan data baik oleh yang bersangkutan maupun oleh petugas, dengan tujuan merubah data dari yang seharusnya tidak termasuk kedalam kategori miskin menjadi masuk kedalam kategori miskin. Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan bantuan penanggulangan kemiskinan dari pemerintah.

Hal diatas berkaitan erat dengan pemahaman dan sikap masyarakat mampu terhadap kemiskinan. Perlu diadakan upaya untuk “mendidik” masyarakat mampu agar memahami makna kemiskinan yang sebenarnya, serta memberikan pemahaman tentang bagaimana “bahaya” yang akan ditimbulkan akibat tindakannya, baik dari segi sosial maupun segi agama. Sosialisasi dan penyuluhan tentang kemiskinan ini dapat disampaikan dalam acara-acara resmi pemerintahan maupun acara-acara non formal masyarakat seperti pengajian dan sejenisnya. Selain berguna untuk menekan jumlah penerima bantuan dan mengalihkannya kepada yang lebih berhak, kegiatan ini juga berguna untuk menggugah partisipasi mereka dalam penanggulangan kemiskinan.

Upaya terobosan lainnya yang dapat diupayakan adalah yang berhubungan dengan pendanaan. Karena penanggulangan kemiskinan bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah karena memang pemerintah tidak akan mampu melakukannya sendirian, maka perlu upaya untuk mengorientasikan, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan menggali kesadaran masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan.

Dengan demikian, disamping mengupayakan peningkatan pendanaan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), pendanaan ini juga harus didukung dengan penggerakan dana dari masyarakat, CSR (*Corporate Social Responsibility*), pejabat, PNS (Pegawai Negeri Sipil), Bazis (Badan Amal Zakat Infaq dan Shodaqoh), lembaga keagamaan lain, serta dana desa.

Dana desa merupakan salah satu sumber yang potensial untuk digali, karena dengan perundangan yang baru dana ke desa mengalir lebih besar. Untuk itu harus

ada upaya untuk mengarahkan dana desa ke arah penanggulangan kemiskinan. Misal untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi data sebesar Rp. 5 juta/ semester. Dalam hal ini, TKPKD hanya bertindak sebagai koordinator, serta pelaksana monitoring dan evaluasi. Namun tentu saja hal ini harus didukung dengan ketentuan perundangan yang diperlukan.

**Tabel 4**  
**Rencana Kerja Upaya Terobosan Penanggulangan Kemiskinan**

No	KEGIATAN	Tahun Pelaksanaan		
		2016	2017	2018
1	Pengkajian tentang kemungkinan peluncuran kartu penerima manfaat program kemiskinan daerah (Kartu Intan)	X		
2	Peluncuran kartu penerima manfaat program kemiskinan daerah (Kartu Intan)		X	X
3	Sosialisasi dan penyuluhan tentang kemiskinan kepada masyarakat	X	X	X
4	Penggerakan Dana Masyarakat	X	X	X

## PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka di setiap kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah. Di Kabupaten Garut, telah diterbitkan Keputusan Bupati Garut Nomor 400/Kep.505–Bappeda/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Garut. Karena sejak tahun 2010 telah terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut, serta perlunya

penyesuaian seiring dengan perkembangan pembangunan yang semakin dinamis, maka sudah sepatutnya dilakukan revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan (TKPKD) sesuai dengan keperluan.

Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program pemerintah daerah hendaknya dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat; dan didukung dengan payung hukum yang jelas.

### **Daftar Pustaka**

- Bappenas. 2000a. Konsep Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam Proenas 2000-2001. Makalah dalam diskusi Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Operasional Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tingkat Pusat, Jakarta 13 Juni 2000.
- Bappenas. 2000b. Program Pembangunan Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Makalah dalam diskusi Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Operasional Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tingkat Pusat, Jakarta 13 Juni 2000.
- BPS 1998, Crisis Poverty and Human Development in Indonesia, BPS-UNDP, Jakarta.
- Daud, R. 2000. Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam. Makalah dalam Seminar Kemiskinan, Solusi dan Strategi Penanggulangannya. Jakarta, 6 Juni 2000.
- Irawan and Sutanto, A. 1999. Impact of the Economic Crisis on Number of Poor People. Paper presented in International Seminar on Agricultural Sector During the Turbulence of Economic Crisis; Lesson and Future Directions, CASER AARD, Ministry of Agriculture, Bogor 1718 february 1999.
- Irawan,.B. dan H. Romdiati. 2000. The Impact of Economic Crisis on Poverty and Its Implications For Development Strategies (draft for discussion). Makalah dipresentasikan pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, Jakarta 29 Febuari - 2 Maret 2000.
- Kasryno, F. and A. Suryana. 1992. Long-Term Planning for Agricultural Development Related to Poverty alleviation in Rural Areas. Dalam Pasandaran, E. et al (Eds) Poverty Alleviation with Sustainable Agricultural and Rural Development in Indonesia. Proceedings of National Seminar and

Workshop. Pp 60-70.

- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. BPFE-UGM Yogyakarta.
- Masdar, F. M. 2000. Kemiskinan, Dampak dari Ketimpangan Sosial, Ditinjau dari Sudut Sejarah Kerasulan. Makalah dalam Seminar Kemiskinan, Solusi dan Strategi Penanggulangannya, Jakarta, 6 Juni 2000.
- Otsuka, K. 1993. Land Tenure and Rural Poverty. Dalam Quibria, M.G. (Ed.) *Rural Poverty in Asia: Priority, Issues and Policy Options*. Oxford University Press, Hongkong. Pp 260-315.
- Pakpahan, A., Hermanto dan M.H. Sawit. 1995. Kemiskinan di Pedesaan: Konsep, Masalah dan Penanggulangannya. Dalam: Hermanto dkk (Eds): *Prosiding Hasil Penelitian: Kemiskinan di Pedesaan, Masalah dan Alternatif Penanggulangannya*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Prasetyawan, W. 1998. Periu Langkah kongkrit Mengatasi Penduduk Miskin. *Bisnis Indonesia*, Sabtu 8 agustus 1998.
- Quibria, M.G. and T.N. Srinivasan. 1993. *Rural Poverty in Asia*. Oxford University Press. Hongkong.
- Rachbini, D.J. 2000. Agenda Ekonomi-Politik dan Masalah Ekonomi Rakyat. Makalah Seminar Kemiskinan, Solusi dan Strategi Penanggulangannya, Jakarta 6 Juni 2000.
- Sajogyo. 1977. *Gans Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Mimeograf. Institut Pertanian Bogor
- Siamwalla, A. 1993. Rural Credit and Rural Poverty. Dalam Quibria, M.G. (Ed.) *Rural Poverty in Asia: Priority, Issues and Policy Options*. Oxford University Press, Hongkong. Pp 259-287.
- Sofwani, A. 1998. *Membangun Ekonomi Pedesaan untuk Mengentas Kemiskinan*. Sinar Tani, Rabu 18 Februari 1998.
- Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Tjiptoherijanto, P. 1998. Tentang Kemiskinan. *Harian Republika*, Rabu 14 Januari 1998.

## **Upaya Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Wilayah Provinsi Banten Melalui Intervensi Kebijakan Pemerintah Provinsi**

**Oki Oktaviana dan Devi Triady Bachruddin**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten  
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
oki.oktaviana@bantenprov.go.id, dvon.triady@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan variabel rendahnya nilai IDM desa-desa di wilayah provinsi Banten dan mengetahui intervensi kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai IDM tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif berdasarkan data IDM masing-masing desa di wilayah Indonesia yang telah dikeluarkan oleh kementerian Desa, Pembangunan Daerah Terpencil dan Transmigrasi serta studi literatur yang berhubungan dengan program pembangunan desa atau pun pengalaman empiris daerah lain terkait upaya peningkatan IDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan nilai IDM, lebih dari separuh desa (74,41%) yang ada di wilayah kabupaten Lebak termasuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal, serta 64,65% desa di wilayah kabupaten Pandeglang termasuk kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal. Secara rata-rata nilai IDM Provinsi Banten berada di atas nasional, namun pada nilai Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) masih menunjukkan nilai di bawah rata-rata nasional. Capaian Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Provinsi Banten sudah di atas nasional, namun jika melihat klasifikasi desa berdasarkan IDM, capaian nilai tersebut (0,4963) masih tergolong dalam klasifikasi desa tertinggal. Sesuai batas kewenangan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, Pemerintah Provinsi Banten perlu melakukan intervensi kebijakan bagi agar pemerintah desa memiliki inisiatif pembangunan sektor yang dapat meningkatkan capaian dimensi ekonomi dan lingkungan (IKE dan IKL).

Kata kunci: IDM, Indeks Desa Membangun, Provinsi Banten



## PENDAHULUAN

### **Latar Belakang**

Tujuan bernegara sebagaimana di amanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini merupakan salah satu kebijakan afirmatif sebagai bentuk reorientasi perlakuan dari pemerintah kepada tata kelola pemerintahan terkecil yang disebut dengan desa (Irawan, 2017;17).

Lahirnya Undang-Undang nomor 6 tentang Desa telah memberikan ruang lebih bagi pemerintahan desa dibanding dengan masa sebelumnya. Pengambilan keputusan oleh komunitas desa dan berlangsung diluar pengaruh negara atau pemerintah merupakan faktor penting yang menjadi pembeda dengan tata kelola pemerintahan desa sebelumnya (Agusta, Tetiani dan Fujiartanto, 2014). Desa sebagai unit administrasi pemerintahan terkecil memegang peranan penting dan diharapkan menjadi titik awal berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan perekonomian masyarakat (Pusdatin Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015). Pembangunan perdesaan dilaksanakan dalam rangka intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemajuan antara wilayah perdesaan dan perkotaan sebagai akibat dari pembangunan ekonomi sebelumnya yang cenderung berorientasi pada wilayah perkotaan (Bappenas dan BPS, 2015).

Meski diundangkannya regulasi tentang Desa pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun keberpihakan pemerintah akan proses pembangunan

desa juga dapat dilihat dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain tertuang dalam salah satu program nawa cita yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, keberadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan wujud prioritas pembangunan agar desa bisa kuat, berdaya dan mampu melaksanakan pemerintahannya secara mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (Haryatama, Hananto, & Indarja, 2016). Keberpihakan ini juga nampak dari anggaran dana desa yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam APBN 2016, anggaran dana desa dialokasikan sebesar Rp 46,9 triliun atau enam persen dari transfer daerah, nilai ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan APBN tahun 2015 dimana anggaran dana desa hanya mencapai Rp 20,7 triliun atau tiga persen dari transfer daerah. Dana desa kembali mengalami peningkatan menjadi 60 triliun pada APBN 2017 ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)). Dengan adanya dana langsung dari APBN melalui skema dana desa diharapkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa lebih optimal, karena anggaran langsung dikelola oleh pemerintah desa (Sofianto, 2017).

Desa Membangun Indonesia dihadapkan pada kenyataan kemiskinan akibat rendahnya produktivitas masyarakat dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman desa (Kolopaking, 2011). Data Badan Pusat statistik menunjukkan bahwa wilayah desa adalah tempat di mana sebagian besar penduduk miskin tinggal. Untuk itu, ketersediaan data dan pengukuran dalam konteks ini sangat dibutuhkan, terutama dalam pengembangan intervensi kebijakan yang mampu

menjawab persoalan dasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015).

Berbagai program afirmatif dari pemerintah untuk mewujudkan pembangunan di desa tentu harus ditindaklanjuti dengan penghitungan capaian keberhasilan kemajuan pembangunan. Untuk tujuan tersebut beberapa lembaga pemerintah telah mengeluarkan penghitungan indikator dengan output kategorisasi desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Menteri tentang Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai acuan data dasar untuk mengukur pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan (Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016). Dengan indikator inilah maka desa dapat menjadikannya sebagai instrumen atau alat ukur capaian pembangunan desa, sehingga pada indikator mana yang dinilai belum maupun telah tercapai dapat diketahui (Setyobakti, 2017). Berdasarkan data yang ada, persentase desa dengan kategori tertinggal dan sangat tertinggal di wilayah Provinsi Banten menunjukkan nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Secara lengkap disajikan pada tabel 1. berikut ini:

Tabel Jumlah dan Prosentase kategori Desa di Pulau Jawa Berdasarkan Indeks Desa Membangun

	Prov	IDM	Mandiri		Maju		Berkembang		Tertinggal		Sgt Tertinggal		$\Sigma$ Desa
			$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	
1	JABAR	0,639	39	0,73	726	13,64	3141	59,0	1355	25,5	60	1,1	5.321
2	JATENG	0,629	21	0,27	868	11,12	4335	55,5	2535	32,5	50	0,6	7.809
3	D.I.Y	0,694	32	8,16	136	34,69	175	44,6	49	12,5	0	-	392

4	JATIM	0,634	33	0,43	929	12,03	4458	57,7	2262	29,3	39	0,5	7.721
5	BANTEN	0,583	4	0,32	53	4,28	396	32,0	675	54,5	110	8,9	1.238

Sumber: (Kementrian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015)

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas, terlihat bahwa persentase desa dengan status tertinggal di wilayah Provinsi Banten mencapai 54,5%, dan persentase desa dengan kategori sangat tertinggal mencapai 8,9% dari total seluruh desa yang ada di wilayah Provinsi Banten. Tabel 1 juga memperlihatkan nilai IDM di wilayah Provinsi Banten hanya mencapai 0,583 yang merupakan nilai terendah jika dibandingkan dengan nilai IDM provinsi lainnya di pulau Jawa. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum kemajuan dan kemandirian desa yang ada di wilayah Provinsi Banten masih tertinggal dibandingkan dengan desa-desa lainnya yang ada di wilayah pulau Jawa.

Status ketertinggalan desa di wilayah provinsi merupakan permasalahan yang harus di tangani secara bersama-sama baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten termasuk pemerintah desa itu sendiri sesuai dengan kewenangan yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Pasal 112 dan 113 Undang-Undang tersebut menyebutkan peran pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Disisi lain, bagian penjelasan Undang-Undang ini menyebutkan bahwa meningkatnya wewenang pemerintah desa untuk berinisiatif memutuskan kegiatan dan anggaran pembangunan atau dikenal sebagai kaidah “desa membangun” (Irawan, 2017). Dengan demikian kewenangan pembinaan dan

pengawasan yang dilakukan tidak lepas dari koridor desentralisasi dan otonomi desa.

Desentralisasi dan otonomi desa pada hakekatnya adalah memandirikan masyarakat dan desa yang ditujukan dengan terbentuknya efektifitas dan efisiensi pembiayaan pembangunan sesuai dengan kondisi dan keperluan desa, membangkitkan kepercayaan dan tanggung jawab masyarakat dan desa untuk berprakarsa memanfaatkan potensi desa bagi pencapaian kesejahteraan (Kolopaking, 2011;137). Efektifitas penggunaan dana desa yang diberikan pemerintah tentu harus bisa mengangkat derajat ketertinggalan desa di wilayah Provinsi Banten yang dicirikan dengan meningkatnya nilai IDM di masing-masing desa. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui intervensi kebijakan daerah pemerintah provinsi bagi peningkatan nilai IDM desa-desa yang ada di Provinsi Banten.

### **Tujuan Penelitian**

1. Memetakan indikator rendahnya nilai IDM desa-desa di wilayah Provinsi Banten.
2. Mengetahui intervensi kebijakan untuk meningkatkan nilai IDM desa di wilayah Provinsi Banten.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif berdasarkan data IDM masing-masing desa di wilayah Indonesia yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Terpencil dan transmigrasi. Untuk keperluan perumusan intervensi

kebijakan, dilakukan study literatur yang berhubungan dengan program pembangunan desa terkait upaya peningkatan IDM.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran IDM Desa di Wilayah Provinsi Banten**

Ketertinggalan sebuah kabupaten dapat ditandai dengan banyaknya desa tertinggal di daerah tersebut, Bappenas dalam hal ini menggunakan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang membagi menjadi tiga tipologi yaitu Desa Tertinggal, Desa Berkembang dan Desa Mandiri, sementara itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang membagi desa kedalam lima kategori yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri (Pusdatin Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, 2015).

Provinsi Banten memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa sebesar 59,89 dengan jumlah desa sebanyak 1.238 desa. Dari keseluruhan jumlah desa tersebut, jumlah desa tertinggal sebanyak 158 desa (12,76%), jumlah desa berkembang sebanyak 1.022 desa (82,55%), dan jumlah desa mandiri sebanyak 58 desa (4,68%) (Bappenas dan BPS, 2015). Meski data dasar yang digunakan sama yakni data potensi desa tahun 2014, kategorisasi ini berbeda dengan Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Sebagaimana disampaikan pada bagian latar belakang, dari total 1238 desa di Banten, hanya 4 desa yang tergolong desa Mandiri (0,32%), 53 desa tergolong dalam kategori sebagai desa maju (4,28%), 396 desa berkembang (32,0%), 675 desa tertinggal (54,5%) dan sisanya sebanyak 110 desa tergolong sebagai desa sangat tertinggal

(8,9%) (Kementrian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015). Perbedaan nilai ini sangat dimungkinkan mengingat adanya perbedaan metode penghitungan dan indikator yang dijadikan penilaian masing-masing indeks. Dalam pembahasan selanjutnya peneliti fokus pada kategori desa berdasarkan penilaian IDM.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi. IDM didasarkan pada 3 (tiga) indeks tersebut dan dikembangkan lebih lanjut dalam 22 dimensi serta beberapa indikator sebagai turunannya. Lebih jelasnya tersaji dalam tabel berikut ini:

**Tabel Indeks Desa Membangun dan Dimensinya**

IDM	Dimensi	
Indeks Ketahanan Sosial	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan, Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan, Jaminan Kesehatan
	Pendidikan	Akses Pendidikan Dasar dan Menengah, Akses Pendidikan Non Formal, Akses ke Pengatahuan
	Modal Sosial	Memiliki Solidaritas Sosial, Toleransi, Rasa Aman Penduduk, Kesejahteraan Sosial
	Permukiman	Rasa Aman Penduduk, Kesejahteraan Sosial, Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak, Akses ke Sanitasi, Akses ke Listrik, Akses Informasi dan Komunikasi
Indeks Ketahanan Ekonomi	Keragaman Produksi Masyarakat Desa, Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan, Akses Distribusi/Logistik, Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan Wilayah	
Indeks Ketahanan Ekologi	Kualitas Lingkungan, Potensi/Rawan Bencana Alam	

Sumber: Kementrian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015

Berdasarkan tabel 2 di atas, masing-masing Indeks pada IDM diturunkan dalam dimensi yang kemudian dijabarkan dalam indikator untuk mengukurnya. Hasil penghitungan indikator berdasarkan data potensi desa tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik menghasilkan kategorisasi desa-desa yang ada di Indonesia. Untuk provinsi Banten, jumlah desa dengan kategori tertinggal dan sangat tertinggal paling banyak terdapat di wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Kondisi ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019 yang memasukan Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebagai Daerah Tertinggal. Secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan IDM 2015**

No	Kabupaten	Tingkat Perkembangan Desa					$\Sigma$
		Mandiri	Maju	Berkem-Bang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
1	Serang	3	20	98	183 (56,13%)	22 (6,75%)	326
2	Lebak	0	4	83	212 (62,35%)	41 (12,06%)	340
3	Pandeglang	1	13	98	175 (53,68%)	39 (11,96%)	326
4	Tangerang	0	16	117	105 (42,68%)	8 (3,25%)	246
	Jumlah	4	53	396	675 (54,52%)	110 (8,89%)	1238

Sumber: (Kementrian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015)

Berdasarkan data pada tabel 3 terlihat bahwa lebih dari separuh desa (74,41%) yang ada di wilayah Kabupaten Lebak termasuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Kondisi yang sama dapat dilihat dari data desa di wilayah



Kabupaten Pandeglang. Dari total 326 desa yang ada di wilayah Pandeglang, sekitar 64,65% termasuk dalam kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pusdatin Kementerian Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi (2015) yang menyebutkan bahwa ketertinggalan sebuah kabupaten dapat ditandai dengan banyaknya desa tertinggal di daerah tersebut. Meski demikian, banyaknya jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di suatu wilayah tidak selalu berkorelasi dengan penetapan daerah tertinggal. Meski jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kabupaten Serang mencapai 62,88% dari total seluruh desa yang ada, namun Perpres 131 tahun 2015 tidak memasukan Kabupaten Serang dalam daftar daerah tertinggal. Penetapan daerah tertinggal didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Daerah Tertinggal Secara Nasional, yang menyebutkan bahwa penetapan daerah tertinggal berdasarkan pada kriteria: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Seluruh kriteria ini diturunkan dalam 27 (dua puluh tujuh) indikator yang digunakan untuk menilai satu wilayah kabupaten secara keseluruhan bukan menilai desa.

### **Intervensi Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten Untuk Pembangunan Desa**

Sebagaimana dijelaskan pada bagian awal tulisan ini, nilai Indeks Desa Membangun tersusun atas, tiga yaitu Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS). Masing-masing nilai indeks memberikan kontribusi bobot yang sama dalam penentuan nilai IDM suatu desa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai IDM diperlukan langkah

kebijakan yang tepat yang diwujudkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan capaian masing-masing indeks. Berdasarkan data Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (2015) diketahui bahwa secara rata-rata nilai IDM desa-desa di wilayah Provinsi Banten sebesar 0,583. Nilai ini berada di atas rata-rata nasional yakni 0,5656. Namun jika dibandingkan dengan nilai IDM masing-masing kabupaten di wilayah Provinsi Banten, nilai IDM Kabupaten Lebak (0,5654) masih menunjukkan nilai sedikit di bawah nasional. Secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel Nilai IDM Kabupaten di Provinsi Banten tahun 2015**

No	Kabupaten	IKL	IKE	IKS	IDM	Keterangan
1.	Pandeglang	0,6305	0,4698	0,6139	0,5714	Klasifikasi Desa berdasarkan IDM
2.	Lebak	0,6127	0,4930	0,5904	0,5654	
3.	Tangerang	0,6003	0,5332	0,6980	0,6105	Sangat Tertinggal : < 0,491 Tertinggal : > 0,491 Dan < 0,599
4.	Serang	0,6288	0,4891	0,6404	0,5861	
	Banten	0,6181	0,4963	0,6357	0,5834	Berkembang : > 0,599 Dan < 0,707
	Rata-Rata Nasional	0,6473	0,4564	0,5931	0,5656	Maju : > 0,707 Dan < 0,815; Mandiri : > 0,815

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015 (*diolah*)

Berdasarkan data pada tabel 4, terlihat bahwa meski nilai IDM Provinsi Banten berada di atas nasional namun pada nilai Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) masih menunjukkan nilai di bawah rata-rata nasional. Hal lain yang menjadi perhatian adalah meski capaian Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Provinsi Banten sudah di atas nasional, namun jika melihat klasifikasi desa berdasarkan IDM, capaian nilai 0,4963 masih tergolong dalam klasifikasi desa tertinggal. Karena itu,

pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan kewenangan dalam Pasal 112 dan 113 Undang-Undang nomor 6/2014 dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu melakukan intervensi kebijakan bagi desa-desa agar melahirkan inisiatif pembangunan sektor yang dapat meningkatkan capaian indeks ekonomi dan lingkungan (IKE dan IKL). Sebagaimana pendapat Irawan (2017) lahirnya UU Desa memberikan wewenang bagi pemerintah desa untuk berinisiatif memutuskan kegiatan dan anggaran pembangunan, atau pendapat lainnya (Kolopaking, 2011) yang menyebutkan bahwa kemandirian masyarakat dan desa ditujukan dengan terbentuknya efektifitas dan efisiensi pembiayaan pembangunan sesuai dengan kondisi dan keperluan desa, membangkitkan kepercayaan dan tanggung jawab masyarakat dan desa untuk berprakarsa memanfaatkan potensi desa bagi pencapaian kesejahteraan.

Pemetaan dimensi sebagai turunan masing-masing indeks sebagaimana disajikan pada tabel 2, memberikan arah tentang program ataupun kegiatan yang dapat di inisiasi pemerintah desa, kabupaten, provinsi bahkan pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan pendapat Setyobakti (2017) yang menyebutkan bahwa IDM dapat digunakan sebagai instrumen atau alat ukur capaian pembangunan desa, sehingga pada indikator mana yang dinilai belum maupun telah tercapai dapat diketahui. Untuk meningkatkan nilai IKE, beberapa kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan dengan lokus wilayah desa harus diarahkan pada peningkatan keragaman produksi masyarakat desa, penyediaan pusat pelayanan perdagangan, peningkatan akses distribusi/logistik, peningkatan akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, pembentukan lembaga ekonomi seperti koperasi, serta penyediaan

infrastruktur untuk menunjang keterbukaan wilayah seperti pembangunan jalan desa atau penghubung desa dan pemenuhan moda transportasi antar desa.

Selain nilai IKE, permasalahan yang harus menjadi perhatian dalam upaya pembangunan desa di wilayah Provinsi Banten adalah nilai IKL yang masih dibawah rata-rata nasional. Berdasarkan pada tabel 2, penentu nilai IKL (Ketahanan Lingkungan) tergantung dari dimensi kualitas lingkungan dan antisipasi potensi kebencanaan. Untuk itu, intervensi kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan menggulirkan program dan kegiatan untuk peningkatan kualitas lingkungan seperti penanaman kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan hidup atau pun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hal lain yang harus mendapat perhatian adalah masalah pemberian ijin usaha baik oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Pemberian ijin usaha hendaknya mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan sehingga proses pembangunan bisa berkelanjutan. Nilai indeks ketahanan lingkungan juga ditentukan dari potensi kebencanaan yang mungkin terjadi di desa. Untuk itu diperlukan program kesiapsiagaan desa dalam menghadapi bencana. Pemerintah Provinsi, Kabupaten termasuk pemerintah desa perlu menyediakan anggaran agar program desa siaga dapat terimplementasi secara baik.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dikeluarkan oleh Bappenas, dari keseluruhan desa yang ada di wilayah Provinsi Banten, 158

desa (12,76%) tergolong dalam kategori Desa Tertinggal, Desa Berkembang sebanyak 1.022 desa (82,55%), dan Desa Mandiri sebanyak 58 desa (4,68%).

2. Berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, di wilayah Provinsi Banten terdapat 4 Desa Mandiri (0,32%), 53 Desa Maju (4,28%), 396 Desa Berkembang (32,0%), 675 Desa Tertinggal (54,5%) dan sisanya sebanyak 110 desa masuk dalam kategori Desa Sangat Tertinggal (8,9%).
3. Berdasarkan nilai IDM, lebih dari separuh desa (74,41%) yang ada di wilayah Kabupaten Lebak masuk ke dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal, serta 64,65% desa di wilayah Kabupaten Pandeglang masuk kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal.
4. Secara rata-rata nilai IDM Provinsi Banten berada di atas nasional, namun pada nilai Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) masih menunjukkan nilai di bawah rata-rata nasional. Capaian Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Provinsi Banten sudah di atas nasional, namun jika melihat klasifikasi desa berdasarkan IDM, capaian nilai tersebut (0,4963) masih tergolong dalam klasifikasi desa tertinggal.

### **Rekomendasi**

1. Sesuai batas kewenangan dalam Undang-Undang Desa, Pemerintah Provinsi Banten perlu melakukan intervensi kebijakan bagi desa-desa agar melahirkan inisiatif pembangunan sektor yang dapat meningkatkan capaian dimensi ekonomi dan lingkungan (IKE dan IKL).

2. Untuk meningkatkan nilai IKE, beberapa kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan dengan lokus wilayah desa harus diarahkan pada peningkatan keragaman produksi masyarakat desa, penyediaan pusat pelayanan perdagangan, peningkatan akses distribusi/logistik, peningkatan akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, pembentukan lembaga ekonomi seperti koperasi, serta penyediaan infrastruktur untuk menunjang keterbukaan wilayah seperti pembangunan jalan desa atau penghubung desa dan pemenuhan moda transportasi antar desa.
3. Untuk meningkatkan nilai IKL, intervensi kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan menggulirkan program dan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kualitas lingkungan serta program kesiapsiagaan desa dalam menghadapi dan pencegahan bencana.

### **Daftar Pustaka**

- Agusta Ivanovich, Ani Tetiani dan Fujiartanto.2014. *Teori dan Kebijakan Desa Untuk Indonesia*. Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil dan Alokasi Program Pembangunan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. 13-32
- Bappenas dan BPS. (2015). *Indek Pembangunan Desa 2014*. Jakarta: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasiona/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionall dan Badan Pusat Statistik.
- Haryatama, N., Hananto, D. U., & Indarja. (2016). Diponegoro law journal. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–21.
- Kementrian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2015). *Indeks Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Kolopaking,L.M. (2011). *Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Struktur Kelembagaan Otonomi Desa*. Menuju Desa 2030. Crestpent Press KAntor Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB,

Bogor. 133-146.

Irawan, Nata (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 382 hlm

Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. 2015. Buku Data dan Informasi Penyiapan Pembangunan Daerah Tertinggal. Jakarta

Setyobakti, H. M. (2017). Identifikasi masalah dan potensi desa berbasis indek desa membangun (idm) di desa gondowangi kecamatan wagir kabupaten malang. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, 7, 1–14.

Sofianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Matra Pembaruan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah. Jl. Pemuda No, 1(1)*, 23–32.

[www.djpk.depkeu.go.id/alokasi\\_dana\\_desa](http://www.djpk.depkeu.go.id/alokasi_dana_desa) diakses 11 november 2017

### **Regulasi**

Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Daerah Tertinggal Secara Nasional

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

## **Responsivitas dan Ketepatan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan pada Masyarakat Adat Baduy Kabupaten Lebak**

**Harits Hijrah Wicaksana**

STISIP Setia Budhi Rangkasbitung  
haritshijrah@gmail.com

### **ABSTRAK**

Masalah dalam penelitian ini terkait dengan aspek responsivitas dan aspek ketepatan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam evaluasi kebijakan pendidikan khususnya pada masyarakat adat Baduy. Dasar hukum pelaksanaan sistem pendidikan di Kabupaten Lebak ini tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, pemilihan informan dilakukan secara *purposive*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan responsivitas dan ketepatan. Hasil dari penelitian, informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Koordinasi dan komunikasi yang kurang antara instansi terkait karena belum didukung oleh aksesibilitas dan fasilitas. Kebijakan diterbitkan melalui pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik hendaknya mencerminkan nilai keadilan, pemerataan dan kearifan lokal.

Kata Kunci : Responsivitas, Ketepatan dan Kebijakan Publik

### **PENDAHULUAN**

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lebak hanya 6,2 Tahun pada tahun 2010, dan turun menjadi 5,8 tahun pada tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Lebak mengidentifikasi permasalahan pendidikan di Kabupaten Lebak tidak akan pernah berhasil 100% dikarenakan keberadaan suku Baduy. Selama ini yang menjadi alasannya karena suku Baduy melarang penduduknya untuk sekolah formal, namun yang sesungguhnya masyarakat adat Baduy tidak melarang bagi warga masyarakat



Baduy untuk belajar. Masalah responsivitas birokrasi yang rendah juga banyak disebabkan oleh belum adanya pengembangan komunikasi eksternal secara nyata oleh jajaran birokrasi pelayanan. Indikasi nyata dari belum dikembangkannya komunikasi eksternal secara efektif oleh birokrasi terlihat pada masih besarnya gap yang terjadi. Gap terjadi merupakan gambaran pelayanan yang memperlihatkan bahwa belum ditemukan kesamaan persepsi antara harapan masyarakat dan birokrat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Kebijakan yang diimplementasikan sangat ditentukan integritas serta memperhatikan kearifan lokal pada daerah yang masih kuat dalam memegang aturan adat istiadat mereka sehingga kebijakan akan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dengan memperhatikan nilai serta keanekaragaman yang ada, tentunya kebijakan tidak hanya melihat pada satu aspek saja. Perlu memperhatikan aspek ketepatan dalam mengambil kebijakan dan mengevaluasi kebijakan. Hal ini diharapkan agar kebijakan bukan hanya melihat dalam tujuan kebijakan saja, namun dapat dirasakan dampak serta manfaat dari kebijakan itu sendiri. Hal ini lah yang menjadi perhatian penulis mengenai aspek responsivitas dan aspek ketepatan dalam kebijakan pendidikan di masyarakat adat Baduy.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, pernyataan masalah (problem statement) dalam penelitian ini adalah, ada kesenjangan antara fakta dan hasil evaluasi kebijakan pendidikan pada masyarakat adat Baduy. Dari fakta itu menunjukkan bahwa larangan sekolah formal di komunitas adat mereka sebenarnya tidak sesakral yang kita duga. Pendidikan sebenarnya sudah dan sedang berjalan dengan model atau formula yang khusus dan tentunya berbeda dengan

konsep pendidikan modern yang masyarakat Indonesia pada umum. Konsep pendidikan yang tepat, dan dibutuhkan oleh komunitas mereka, tidak bertabrakan dengan hukum adat mereka

*Research question* dalam penelitian ini dalam aspek responsivitas dalam evaluasi kebijakan yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu? Sedangkan aspek ketepatan dalam evaluasi kebijakan mempertanyakan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar – benar berguna atau bernilai ?

#### TINJAUAN PUSTAKA

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan masyarakat (Tangkilisan, 2005: 177). Sejalan dengan itu responsivitas merujuk pada menanggapi atau tergerak hati atau tidak masa bodoh. Jadi, responsifitas adalah sebuah proses kegiatan perubahan pola perilaku mahluk sebagai akibat rangsangan dari keadaan lingkungan. Indikator dari responsivitas adalah “hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.” Kebijakan publik yang dievaluasi berkaitan dengan responsivitas sesuai dengan yang diuraikan oleh James P. Lester dalam Lester dan Joseph Stewart (2000) bahwa evaluasi kebijakan berhubungan dengan pengkajian tentang konsekuensi dari sebuah kebijakan publik. Secara esensial

terdapat dua tugas utama dari evaluasi kebijakan, yaitu pertama, menentukan apa konsekuensi dari sebuah kebijakan dengan menggambarkan dampaknya, Kedua, menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan sesuai dengan standar maupun ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan Analisis William N. Dunn (2000) bahwa: Ketepatan kebijakan tersebut diukur pada “Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.”

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif, karena metode ini dipandang peneliti lebih relevan digunakan dalam mengamati responsivitas dan ketepatan dalam kebijakan pendidikan pada masyarakat adat Baduy Kabupaten Lebak. Metode penelitian kualitatif Menurut Creswel, (2010:4-5) merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Adapun yang dijadikan informan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Informal (PAUDNI) Kabupaten Lebak, Wakil Jaro Tangtu Baduy Dalam Cibeo, Ketua DPRD Kab Lebak, Kepala Desa Kanekes Baduy Luar, Sekretaris Desa Kanekes Baduy Luar, Sarpin (tokoh pendidikan di baduy Luar) dan PKBM di wilayah Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak.

Teknik Pengumpulan data melalui teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi, observasi (pengamatan), wawancara mendalam. Teknik keabsahan

data dengan triangulasi dilakukan untuk pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan melalui langkah-langkah: pertama, kategorisasi isu-isu yang berkaitan dengan responsivitas dan ketepatan dalam kebijakan pendidikan pada masyarakat adat Baduy di Kabupaten Lebak yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dari informan kunci, dan studi dokumentasi. Kedua, data dan informasi yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik triangulasi. Analisis triangulasi adalah teknik menghubungkan data dan informasi yang diperoleh dari satu sumber informasi dengan sumber informasi yang lainnya, untuk memperoleh pemahaman interpretasi tentang masalah yang diteliti. Ketiga, hasil dari triangulasi tersebut kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Baduy berada di Desa Kanekes, kecamatan Leuwidamar, kabupaten Lebak, propinsi Banten. Secara geografi, lokasi masyarakat Baduy ini terletak pada 627'–60 30' Lintang Utara (LU) dan 108o 3'–106o 4' Bujur Timur (BT) dengan luas sekitar 5.101,85 hektar (Garna, 1993: 124-135; Iskandar, 1992: 21; Iskandar & Ellen, 2000: 5; Permana, 2009: 86; Permana, 2010: 21-22). Hingga saat ini masyarakat Baduy masih terikat pada pikukuh (aturan adat) yang diturunkan dari generasi ke generasi. Salah satu pikukuh itu berbunyi lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambungan, yang berarti panjang tidak boleh

dipotong, pendek tidak boleh sambung. Makna dari pikukuh itu antara lain tidak mengubah sesuatu atau menerima apa yang sudah ada tanpa menambahi atau mengurangi dari yang ada itu (Permana, 2009:92). Insan Baduy yang melanggar pikukuh akan memperoleh hukuman adat dari Puun (pimpinan adat tertinggi).

Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan masyarakat (Tangkilisan, 2005: 177). Sedangkan organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek juga (Osborne & Plastrik, 2000).

Kebijakan tidak dapat memuaskan pada pihak-pihak tertentu karena puas atau tidaknya seseorang harus diukur dengan perasaan dan pada intinya kepuasan itu adalah bagian dari keadilan. Keadilan tidak dapat dilihat secara nyata tetapi kepuasan (*satisfaction*) dapat dirasakan oleh individu yang telah menerima dari suatu kebijakan. Responsivitas diukur pula dengan bagaimana keterlibatan masyarakat dan “Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.” Hal ini sangat erat kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Lebak. Dinas Pendidikan

Kabupaten Lebak merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pendidikan, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Lebak(Nomor 7 tahun 2013) tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, maka lembaga ini mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan serta bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi Banten dengan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan
2. Melaksanakan kebijakan operasional pendidikan
3. Pembinaan teknis pengelolaan kebijakan
4. Penyusunan program, inventarisasi penyediaan sarana penyalarsan serta perawatan dan penggunaan sarana pendidikan.
5. Peningkatan dan pengembangan aspirasi seni budaya dan nilai budaya masyarakat
6. Membantu dan mengendalikan tugas pokok yang di tetapkan
7. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan keuangan perlengkapan dan peralatan dinas.
8. Pembinaan UPTD dan kolompok jabatan fungsional

Responsivitas birokrasi yang rendah juga banyak disebabkan oleh belum adanya pengembangan komunikasi eksternal secara nyata oleh jajaran birokrasi pelayanan. Indikasi nyata dari belum dikembangkannya komunikasi eksternal secara efektif oleh birokrasi terlihat pada masih besarnya gap yang terjadi. Gap

terjadi merupakan gambaran pelayanan yang memperlihatkan bahwa belum ditemukan kesamaan persepsi antara harapan masyarakat dan birokrat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Terkait dengan pernyataan tersebut bahwa sumber daya birokrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak belum optimal baik dari aspek kualitas maupun kuantitas, sehingga pelayanan kepada masyarakat terhambat dan jauh dari harapan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan jumlah tenaga kerja di lingkungan dinas pendidikan dengan standar kualifikasi yang dibutuhkan oleh dinas tersebut.

Dengan demikian, diharapkan sesuai tugas pokok dan fungsi dinas tersebut, karena pelayanan publik sudah selanjutnya di ubah. Masyarakat sangat mendambakan kualitas pelayanan publik prima yang diterapkan oleh pemerintah. Reformasi pelayanan publik menjadi sesuatu yang urgen untuk memberikan hak kepada warga negara atas apa-apa yang seharusnya mereka terima sebagai warga negara. Salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik yakni adanya akuntabilitas dan responsivitas aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Sehingga lebih responsif terhadap tugasnya khususnya pelayanan pendidikan.

Sementara dilain pihak terjadi perkembangan yang luar biasa dalam hal pemikiran dan orientasi dari generasi muda Baduy demi untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup yang penuh dengan kompetisi. Mereka kini sedang menggeser pola dari menunggu ke arah menjemput, dari pasif ke arah aktif dan produktif, serta dari manual ke arah digital. Mereka sangat menyadari bahwa untuk melakukan itu semua mereka memerlukan sebuah kecakapan, kemampuan,

serta keterampilan hidup yang cukup (Wicaksana, 2017:87). Artinya, bagi generasi muda Baduy kebutuhan untuk memiliki ilmu pengetahuan, berpendidikan, dan memiliki keterampilan sudah tidak terelakan lagi, karena mereka dituntut harus mampu berkomunikasi, bernegosiasi, bersaing, dan berkompetisi dengan masyarakat luar yang rata-rata berpendidikan dan memiliki keterampilan.

Budaya lisan sangat mempengaruhi pola dan pemahaman terhadap pendidikan oleh Suku Baduy, mereka memiliki pola dan pemahaman yang khas, yakni model pendidikan papagahan (saling mengajari antar warga). Pembelajaran yang berlangsung lebih diutamakan dan diarahkan pada pemberian pemahaman tentang dasar-dasar hukum adat yang disampaikan secara lisan dan disertai dengan praktek percontohan langsung pada setiap warganya. Mereka sama sekali tidak memiliki aturan adat dalam bentuk tulisan, sehingga menyebabkan sulitnya model pendidikan yang mengedepankan budaya tulisan. Seperti model pendidikan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Analisis secara komprehensif dari setiap aspek dalam menerapkan program kebijakan pendidikan di Kabupaten Lebakakan diuraikan satu persatu sebagai berikut:

Pertama, Potensi tercapainya kebijakan pendidikan Kabupaten Lebak ditinjau dari keruangan. Kedudukan Kabupaten Lebak dengan wilayah administrasi yang terbagi atas wilayah administrasi daratan dan wilayah administrasi dataran tinggi dan garis pantai yang membentang. Dengan demikian, wilayahnya merupakan daerah yang luas yang terletak di bagian paling barat pulau Jawa, dan kawasan lainnya berupa kawasan hutan, perbukitan, lembah pegunungan dan pantai.



Kondisi ini memungkinkan keberadaan beraneka ragam masalah dengan kekhasannya masing-masing keberagaman masalah yang di dapat ini merupakan hambatan yang sangat besar untuk menjadikan Kabupaten Lebak sebagai salah satu daerah dengan sumber daya manusia yang bersaing.

Kedua, Potensi keanekaragaman wilayah terdiri atas lembah pegunungan, hutan dan pantai yang mencakup seluruh daerah Kabupaten Lebak, daerah pantai, dan daerah pedalaman/pegunungan mencakup daerah-daerah pelosok lainnya. Obyek tersebut terletak pada tiga zona, yaitu (1) daerah pantai adalah daerah yang terdapat di bagian selatan Kabupaten Lebak dengan keunggulan pada masyarakatnya yang heterogen dan mudah untuk bekerjasama dalam program apapun. (2) daerah yang berada di pusat administrasi pemerintahan yang terdapat di daerah Rangkasbitung dan sekitarnya dengan keunggulan akses yang mudah dan dapat di akses dengan cepat sehingga kebijakan yang dibuat dapat langsung di implementasikan pada daerah tersebut. (3) Zona Pedalaman atau yang biasa disebut dengan masyarakat adat baduy yang berada di tengah hutan dan dikelilingi oleh lembah-lembah berupa bukit yang membentang sejauh ribuan meter adalah daerah yang terdapat di Kecamatan Leuwidamar dengan panorama alam pegunungan yang elok, sungai-sungai dan air terjun serta potensi budaya masyarakat adat terpencil yang khas merupakan daya tariknya, namun mereka sangat sulit untuk disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang telah dibuat seperti Bantuan Jaminan Sosial (BPJS) dalam hal ini program lebak sehat, lebak cerdas untuk sektor pendidikan dan sebagainya, dalam hal ini pula program untuk meningkatkan sumber daya manusia berupa mencerdaskan kehidupan bangsa dengan kebijakan pendidikan dinilai telah

gagal dan tidak berdampak bagi masyarakat adat baduy. Karena masyarakat baduy memiliki cara tersendiri dalam hal pendidikan di wilayah masyarakat mereka.

Ketiga, Pengembangan kualitas sumber daya manusia di harapkan membuka peluang bagi masyarakat setempat. Olehnya itu, kebijakan pendidikan membutuhkan regulasi yang menjamin kelangsungan adat istiadat dan kebudayaan maupun hidup masyarakat adat baduy dalam. Perencanaan dan pengembangan kebijakan terkait dengan buta aksara sebagai kebijakan yang diperlukan sebagai upaya diversifikasi untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga keragaman masyarakat dapat berpengaruh pada tercapainya kebijakan tersebut yang dapat dijadikan sebagai keberhasilan kebijakan tersebut. Perencanaan dan pengembangan kebijakan sebagai tolak ukur juga harus memiliki landasan hukum yang jelas, agar implementasi tidak menimbulkan interpretasi yang negatif terhadap masyarakat pemilik kearifan budaya tersebut. Dengan demikian, kebutuhan regulasi yang menguntungkan semua pihak dalam usaha meningkatkan sumber daya manusia.

Pada Perda (Nomor 2 tahun 2010) jika ditilik secara mendalam hanya mementingkan daerah yang mudah diakses terutama daerah sekitar pusat pemerintahan. Mengacu pada teori yang diungkapkan oleh (Dunn, 2000) bahwa pemerataan tentang kebijakan pendidikan diukur berdasarkan atas manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang lain. Kebijakan pendidikan adalah suatu kegiatan yang tidak dapat diukur secara finansial tentang manfaat yang dialami seseorang, karena yang menikmati kebijakan itu adalah masyarakat itu sendiri. Hal itu ditentukan dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Penekanannya dalam pemerataan kebijakan pendidikan lebih

berorientasi pada keberhasilan kebijakan tersebut. Sehingga tidak dapat diukur seberapa jauh biaya terdistribusi kepada masyarakat tersebut. Karena kebijakan ini merupakan mencakup seluruh aktivitas, usaha yang diukur secara kualitas, kuantitas dan jangka waktu tertentu untuk membantu seseorang atau lebih mendapatkan keinginannya berdasarkan proses transaksi (*servis charge*).

Sementara itu dalam penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau lembaga pemerintah (Anderson, 1975), ataupun apapun yang dipilih oleh pemerintah dengan lingkungannya (Fyestone, 1971). Inilah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Lebak menerbitkan salah satu perda sebagai salah satu komitmen pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat melalui mekanisme tahapan-tahapan proses pembuatan kebijakan pendidikan, yaitu mulai dari pendefinisian masalah, pelaksanaan, sampai pada penilaian atau evaluasi kebijakan. Hal inilah yang dilakukan oleh peneliti jadi bukan tataran proses dan implementasi kebijakan sehingga memerlukan pemerataan biaya terhadap sasaran kebijakan tetapi terhadap para evaluator kebijakan, sehingga tidak dapat mengungkapkan secara kuantitatif seberapa banyak biaya kebijakan dalam implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan yang di buat akan dapat berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan Analisis William N. Dunn (2000) bahwa: Ketepatan kebijakan tersebut diukur pada “Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.” Salah satu indikator penting dalam dunia pendidikan adalah mengurangnya angka buta aksara. Menurut data kebutuhan akan pendidikan bagi masyarakat adat Baduy adalah kebijakan yang dapat memberikan nilai guna kepada

masyarakat adat Baduy. Aspek Ketepatan dalam evaluasi kebijakan di Kabupaten Lebak terutama kebijakan pendidikan pada masyarakat adat baduy dipahami dalam kerangka enam langkah evaluasi kebijakan.

Berdasarkan beberapa perangkat hasil evaluatif Pemda Kabupaten Lebak, maka keadaan masyarakat adat baduy sejalan dengan uraian Edward A. Schuman yang mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu: Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi, Analisis terhadap masalah, Deskripsi dan Standarisasi kegiatan, Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi, Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain, dan Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Pertama, identifikasi tujuan program erat kaitannya dengan evaluasi mengenai buta aksara sebagai masalah utama di Kabupaten Lebak akan tepat memberikan nilai guna atau ketepatan pada masyarakat jika usaha kebijakan tersebut memberikan peluang yang luas kepada masyarakat adat baduy terutama dari segi adat istiadat dan kebudayaan yang mendukung hal itu. Ketepatan berarti betul atau lurus dari segi arah atau berbetulan benar adanya, hal ini disamakan juga dengan benar atau tidak ada selisih sedikitpun, betul atau cocok. Jadi, yang dimaksud dengan ketepatan selalu saja menunjuk kepada keadaan atau sifat yang tepat atau ketelitian dan kejituan. Kajian ini akan menguraikan angka buta aksara pada masyarakat adat baduy yang diukur pada hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai bagi masyarakat di Kabupaten Lebak.

Kebijakan pendidikan Kabupaten Lebak jika diukur berdasarkan hasil yang dicapai masih jauh dari harapan, maka persoalan ini yang harus dibenahi adalah Perda nomor 2 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Lebak dan ditindak lanjuti oleh Peraturan Bupati sebagai regulasi turunan Perda untuk pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Harapan ini mengharapkan upaya-upaya pembenahan kebijakan baru berdasarkan data-data hasil evaluator yang dilakukan oleh Dinas terkait terutama Dinas pendidikan dan Kebudayaan dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak.

Kedua, Analisis terhadap masalah kebijakan pendidikan terutama diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia yang merupakan upaya mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan daya. Begitu cepatnya perkembangan peradaban dan teknologi. Sampai pada suatu saat, ketika investor mampu untuk memanipulasi alam lingkungan yang berdampak pada timbulnya berbagai masalah lingkungan. Hal ini disebabkan oleh keputusan pembangunan yang hanya didasarkan kepada kepentingan ekonomi, namun belum dapat memperhitungkan aspek lingkungan. Degradasi lingkungan merupakan suatu persoalan yang kumulatif dan menunjukan kecenderungan yang meningkat setiap saat.

Deskripsi dan standarisasi kegiatan sejalan dengan Mitchel (1997) yang diterjemahkan oleh Setiawan dan Rahmi (2000) menguraikan bahwa untuk menyusun sebuah pengelolaan lingkungan atau yang disebut dengan *State of Evironmental* harus dapat menjawab beberapa pertanyaan kunci (*Key questions*) sebagai berikut :

1. Apa yang terjadi dengan kondisi lingkungan sekarang;
2. Mengapa hal itu dapat terjadi;
3. Mengapa masalah itu menjadi penting;
4. Apa yang sedang dilakukan dengan masalah tersebut;
5. Program dan aksi apa yang seharusnya dilakukan; dan
6. Kesimpulan apa yang dapat diambil.

Keempat, Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi berkaitan dengan konsep tersebut merefleksikan isu-isu pokok lingkungan setiap kebijakan. Berdasarkan proses validasi data yang diperoleh dilapangan dan bersumber dari berbagai data dan informasi. Refleksi tersebut kemudian dihubungkan dengan aspek lingkungan. Adapun aspek yang dimaksud adalah:

1. Keanekaragaman Sumber daya alam,
2. Ketersedianya Energi,
3. Kependudukan.

Ketiga aspek ini akan dikaitkan dengan aspek sosial budaya masyarakat dan ekologi wilayah objek kebijakan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat adat Baduy selain adat istiadat dan kebudayaan yang bertolak belakang dengan kebijakan yang dibuat juga. Ancaman terhadap modernisasi yang dapat menggerus adat istiadat dan kebudayaan masyarakat adat Baduy di Kecamatan Leuwidamar maka dari itu diperlukannya suatu tindakan untuk menjaga kearifan lokal sebagai aset utama daerah.

Kelima, perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan program kebijakan pendidikan pada masyarakat adat baduy yang berkaitan dengan hal yang

juga tak kalah pentingnya diperhatikan adalah potensi dampak kebijakan tersebut terhadap adat istiadat dan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat adat baduy. Timbulnya masalah seringkali secara sederhana diartikan sebagai dampak lingkungan. Dalam interaksi manusia dengan lingkungannya sebagaimana disebutkan oleh Marten (2001), lingkungan dalam hal ini dikatakan sebagai ekosistem sosiologi, memberikan layanan berupa penyediaan fasilitas seperti akomodasi dan fasilitas penunjang lainnya yang di dalam proses kehidupan pada ekosistem itu menimbulkan dampak negatif di antaranya adalah hilangnya kearifan lokal. Dan berkurangnya pendapatan daerah dari sektor wisata budaya dan adat istiadat. Jika hal ini tidak di sertai dengan upaya peningkatan sumber daya manusia yang memadai maka akan berdampak pengaruh kepada menurunnya kualitas SDA. Hal ini dapat membawa dampak pada keberadaan masyarakat adat baduy.

Berdasarkan skema Marten (2001) tersebut, maka hal yang perlu di cermati oleh pemerintah Kabupaten Lebak, terkait kearifan lokal. Dengan memperhatikan bentuk topografi Kabupaten Lebak yang berbentuk pegunungan, lembah dan pantai. Dengan bentuk topografi yang memiliki bentuk yang sulit untuk diakses, maka dengan sendirinya daerah tersebut menjadi tempat yang terisolir oleh pemerintah pusat. Sebagai suatu daerah yang sulit untuk diakses. Dengan demikian upaya implementasi kebijakan pendidikan melalui sosialisasi pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat sekitar butuh perhatian yang serius bagi semua pihak agar dampak negatif terhadap kebijakan tersebut dengan baik dan berkesinambungan. Salah satu kondisi yang sangat penting diperhatikan dalam kajian mengenai kebijakan pendidikan Kabupaten Lebak adalah perlunya

ketersediannya taman-taman dan tempat-tempat pendidikan yang aman dan nyaman. Untuk itu maka dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia, pembangunan sekolah pada setiap daerah yang sulit diakses dan terisolir merupakan hal yang mutlak diperhatikan.

Daerah (kawasan) ini juga dihuni oleh para pembuah gula aren / gula merah, madu, bahkan buah durian pas waktu masa panen tiba. Selain itu, upaya yang telah dilakukan masyarakat yakni membuat kerajinan tangan, tenun, dan aksesoris lainnya untuk dijual kepada masyarakat pendatang atau para wisatawan yang mengunjungi Baduy.

Bupati mengharapkan agar semua pihak dapat melakukan koordinasi antar instansi terkait, guna mendukung visi-misi. Tujuannya untuk mengembangkan kegiatan kebijakan pendidikan di Kabupaten Lebak, khususnya Masyarakat Baduy. Selain program kebijakan pendidikan di Baduy, tentunya Bupati berharap dengan potensi wisata budaya yang sudah banyak terdengar di masyarakat luar Lebak terkait masyarakat Baduy. Jika potensi wisata budaya ini dapat dimaksimalkan, maka secara tidak langsung hal ini akan berpengaruh pada pendapat masyarakat sekitar Baduy. Untuk menunjang hal itu, maka pemerintah daerah harus mempersiapkan akses terutama jalanan yang baik untuk para wisatawan dapat dengan nyaman bisa datang mengunjungi Baduy.

Keenam, indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak yang berkaitan dengan sosialisasi mengenai lingkungan hidup, mengundang seluruh stakeholders kebijakan pendidikan untuk membuat kesepakatan untuk mendistribusikan kepada masyarakat.



## KESIMPULAN

Mencermati hal tersebut, bahwa apa yang diungkapkan berdasarkan laporan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan harapan yang ingin dicapai sesuai pengamatan peneliti bahwa, hal ini sangat utopis baru merupakan gagasan bila mencermati secara mendalam terkait evaluasi program kebijakan pendidikan ini di daerah Kabupaten Lebak dengan kenyataan lapangan belum optimal karena: (1) Faktor kesiapan aparatur pemerintah baik pelaksana maupun perencana, (2) Ketersediaan anggaran belum optimal, (3) Kesiapan masyarakat menangkap peluang dari kunjungan wisatawan sebagai salah satu sumber pendapatan dengan menyajikan industri kreatif berupa cendera mata sesuai dengan kearifan lokal yang unik dan menarik. Oleh karena itu, perlu pembinaan dan pengembangan serta desain perencanaan pembangunan khususnya kebijakan pendidikan yang partisipatif dalam perencanaan, demokratis dalam perumusan kebijakan prima dalam pelayanan.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Adeney, Bernard T., 1995, *Etika Sosial Lintas Budaya*, Yogyakarta : Kanisius.
- Adimihardja, Kusnaka. 2000. *Orang Baduy di Banten Selatan: Manusia Air Pemelihara Sungai*, Jakarta. *Jurnal Antropologi Indonesia*, Th. XXIV, No. 61, Januari-April 2000, FISIP Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Dinamika Budaya Lokal*. Bandung. CV. Indra Prahasta dan Pusat Kajian LBPB.
- Agustino, Leo. 2005. *Politik dan Otonomi Daerah*. Serang : UNTIRTA PRESS
- \_\_\_\_\_. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI

- \_\_\_\_\_. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Alwasilah, A. Chaedar. 2002. *Pokoknya Kualitatif : Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit PT. Dunia Pustaka Jaya dan Pusat Studi Sunda.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy-Making*. USA : Penerbit Lay Holt, Rinchart and Winston.
- BPS Lebak. 2013. *Lebak Dalam Angka Tahun 2013*. Lebak: BPS Kabupaten Lebak
- Bruce Mitchell, 1997. *Resource And Environmental Management*, “terjemahan Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan/, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi tahun 2000”. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Cooley, W.W & P.R. Lohnes. 1976. *Evaluation Research in Education*, New York: Irvington Publisher Inc.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design. Qualitative & Quantitative Approaches*. Jakarta: Kik Press
- Danim, Sudarwan. 2004. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*: Jakarta : Bumi Aksa.
- Dunn, William N. 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*. Englewood Cliff: Prentice-Hall, Inc.
- \_\_\_\_\_. 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (terjemahan), Yogyakarta : GadjahMada University Press.
- Edward III, Goerge C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc.
- Garna, Judistira K. 1985. *Masyarakat Baduy dan Siliwangi (Menurut Anggapan Orang-Orang Baduy Masa Kini)*. Jakarta: Dewan Nasional Untuk Kesejahteraan Sosial, Depsos RI – Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 1993a. *Masyarakat Baduy di Banten.*, dalam Koentjaraningrat (ed) *Masyarakat Terasing di Indonesia*. Jakarta: Depsos RI, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, dan Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 1993b. *Orang Baduy di Jawa: Sebuah Studi Kasus Mengenai Adaptasi Suku Asli Terhadap Pembangunan.*, dalam Lim Teck Ghee dan Alberto G. Gomes (peny). *Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- \_\_\_\_\_.1994. *Masyarakat Tradisional Banten dan Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya*. Serang. Makalah pada Seminar Puncak-Puncak Perkembangan Warisan Budaya Banten. Forum Ilmiah Festival Banten 1994. Serang 28-29 Agustus.
- \_\_\_\_\_.2008. *Budaya Sunda Melintasi Waktu Menantang Masa Depan*. Bandung: Lembaga Penelitian Unpad dan The Judistira Garna Foundation.
- \_\_\_\_\_.2009. *Dasar dan Proses Penelitian Sosial.Merencanakan, Melaksanakan dan Menulis Hasil Penelitian*. Bandung: Primaco Akademika dan Judistira Garna Foundation.
- Garna, Judistira K dan Hardjadilaga, Salam. 2012. *Etnografi Jul Jacobs "Orang Baduy dari Banten"*. Bandung: Primako Akademika dan Judistira Garna Foundation.
- Grindle, S, Merilee. 1980. *Politics and Policy Implementation*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hasan, Sandi Suardi, 2006. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Kebijakan pendidikan di Kabupaten Jember*.Thesis.Program Pascasarjana. Jember: Universitas Jember
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Howlet, Micvhael and M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*, Oxford University Press.
- Iskandar, Johan., 1992. *Ekologi Perladangan di Indonesia. Studi Kasus Dari Daerah Baduy Banten Selatan, Jawa Barat*. Jakarta. Penerbit Djambatan.
- Jones, Charles O. 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Massachussetts: Duxbury Press.
- \_\_\_\_\_.1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Alih bahasa Nasir Budiman. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Koentjaraningrat, 1999, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Kusdinar, Aan. 2004. *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam Penanganan Komunitas Adat Terpencil Baduy*.Prosiding Seminar Pengembangan Kawasan Tertinggal Berbasis Komunitas Adat Terpencil. Jakarta: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal BAPPENAS.
- Kurnia, Asep, dan Sihabudin, Ahmad., 2010. *Saatnya Baduy Bicara*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

- Lester, James P, Joseph, Stewart. 2000. *Public Policy An Evolutionary Approach*. Wadsworth, Stamford, USA.
- Mustopadidjaja, AR. 2003. *Paradigma-Paradigma Pembangunan dan Pembangunan Indonesia*, Jakarta: LAN.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara - Duta Pertiwi Foundation.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Dimensi-Dimensi Pokok Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, cetakan kelima, Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.
- Nazir, Mohamad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy : Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Public Policy : Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Kovergensi, dan Kimia Kebijakan (edisi kelima, revisi)*. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo
- Osborne, David dan Peter Plastrik.2000. *Memangkas Birokrasi; Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*. Jakarta: PPM & CV Teruna Grafika
- Patton, M. Quinn. 1997. *Utilization focused evaluation: The new century text*. Thousand oaks, CA: Sage.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. (Terjemahan) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Permana, Raden Cecep Eka., Isman Pratama Nasution, dan Jajang Gunawijaya. 2011. "Kearifan Lokal Tentang Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Baduy". *Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol 15, No 1 Juli 2011:67-76*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Rossi, Peter H. and Howard E Freeman, 1985.*Evaluation A Sytematic Approach*, Third Edition, Sage Publication, Bereley Hills
- Rosenbloom, David H., 1993. *Public Administration, Understanding Management, Politics, and in the Publik Sector*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Rusli, Budiman, 2013. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.

- \_\_\_\_\_. 2014. *Isu-Isu Krusial Administrasi Publik Kontemporer*. Bandung: Lepsindo.
- Rutman, Leonard (ed.). 1977. *Evaluation Research Methods- a basic Guide*. London : Sage Publication.
- Saefullah, H.A.Djadja. 2007. *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik, Prespektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi*. Bandung: LP3AN FISIP UNPAD.
- Sihabudin, Ahmad. 2009. *Persepsi Komunitas Adat Baduy Luar Terhadap Kebutuhan Keluarga Di Kabupaten Lebak Provinsi Banten*. Disertasi.Program Pascasarjana. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Simon, Christoper A. 2007. *Public Policy: Preferences and Outcomes*. New York: Pearson Longman.
- Steers. Richard M, 1985. *Efektifitas Organisasi*. Terjemahan Magdalena Yamin Jakarta: Erlangga
- Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Apikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Stilman II, Richard J., 1984. *Public Administration Concept and Cases*. Boston: Houghton Mifflin Co..
- Tachjan, H. 2005. *Kebijakan Publik (Bahan Kuliah)*. Bandung : Penerbit Program Pascasarjana Fisip Unpad.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Tangkilisan, Hassel Nogi S. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik : Penjelasan, Analisis & Transformasi Pikiran Nagel*. Yogyakarta: Balairung & Co
- \_\_\_\_\_. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Vedung, Evert. 2004. *Public Policy and Program Evaluation*. New Jersey: Transaction Publishers, New Brunswik.
- Weiss, C.H. 1998. *Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies*. 2nd edition Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. Jakarta: CV. Intermedia.
- Wicaksana, Harits Hijrah. 2017. *Evaluasi Program Kebijakan pendidikan di Kabupaten Lebak Pada Masyarakat Adat Baduy Kabupaten Lebak Provinsi Banten*. Disertasi. Program Pascasarjana FISIP. Bandung: Universitas Padjadjaran
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Wirawan. 2004. *Profesi dan Standar Evaluasi*. Jakarta: UHAMKA Press.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi (Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Teks)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

#### **Sumber Lain:**

- Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 13 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak
- Keputusan Bupati Lebak No. 590 / Kep. 233 / Huk / 2002 tentang Penetapan Batas-Batas Detail Tanah Ulayat Masyarakat Adat Baduy di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak.



## **Kebijakan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Subang**

**Zaenal Hirawan**

Program Studi Pasca Ilmu Administrasi Universitas Padjadjaran Bandung  
zaenal\_hirawan@yahoo.co.id

### **ABSTRAK**

Berbagai upaya pembangunan yang sampai saat ini sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Subang, untuk itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang No 3 Tahun 2014 Tentang RTRW Kabupaten Subang (2011-2031). Dalam perda tersebut memuat zona-zona dalam pengembangan wilayah pembangunan. Kabupaten Subang memiliki 30 Kecamatan yang diperuntukan untuk pengembangan sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing. Kondisi lapangan tidak sesuai dengan Perda tersebut, karena terdapat 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Subang, Kecamatan Purwadadi, Kecamatan Cibogo, Kecamatan Kalijati dan Kecamatan Pagaden. Pada kecamatan tersebut terjadi penurunan lahan pertanian menjadi kawasan terbangun baik itu untuk kawasan industri, kawasan ruko dan kantor dan kawasan perumahan. Metode ini merupakan metode kualitatif yang digunakan untuk melakukan penelahan dan mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan pembangunan perumahan di Kabupaten Subang. Dengan metode kualitatif dapat menggali lebih dalam tentang kondisi wilayah yang terdampak atas pembangunan perumahan yang tidak pada peruntukannya

Konsekuensi dari pembangunan perumahan yang tidak pada wilayahnya akan menimbulkan beberapa kondisi yang berubah. Pertama mengurangi lahan atau areal pertanian yang subur menjadi lahan perumahan, sehingga berkurangnya tingkat produktivitas akan hasil pertanian. Dampak lain yang ditimbulkan atas pembangunan perumahan yaitu perubahan mata pencaharian dan pendapatan penduduk lokal dapat ditimbulkan oleh kegiatan pembebasan lahan maupun oleh kegiatan penerimaan tenaga kerja pada tahap konstruksi dan operasi. Kondisi ketiga yaitu pembangunan perumahan didaerah pinggiran/sekitar kota akan mengakibatkan meningkatnya arus komuter (ulang alik) dari perumahan-perumahan tersebut ke kota induk sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas baik di sekitar perumahan tersebut maupun pada jalan-jalan memasuki kota.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, tata ruang wilayah, perumahan

### **LATAR BELAKANG**

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi pada suatu



wilayah. Disamping itu pembangunan juga merupakan suatu proses yang multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, dan lembaga-lembaga nasional, akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan (Todaro,1997). Berbagai upaya pembangunan yang sampai saat ini sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Subang seperti perbaikan jalan, pendirian sekolah-sekolah, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan dan agrobisnis, pengembangan kepariwisataan, dan pembangunan perumahan. Berkaitan dengan hal tersebut Kabupaten Subang menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang No 3 Tahun 2014 Tentang RTRW Kabupaten Subang 2011-2031) bahwa Kabupaten Subang terbagi menjadi beberapa zona atau wilayah, yaitu wilayah pertanian, pariwisata, industry, pengembangan kawasan hutan kota, kawasan perkantoran sampai dengan kawasan perumahan.

Pada intinya dengan diterbitkan peraturan tersebut bahwa pembagian wilayah atau zona sesuai dengan peruntukannya dan jangan sampai tumpang tindih. Di Kecamatan Pagaden mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terjadi penurunan lahan pertanian yaitu dari 4.481 menjadi 5.201 sampai dengan tahun 2015 menjadi 5.006 Ha. Hal ini dikarenakan lahan pertanian diubah menjadi lahan industry, ruko kantor dan kawasan permukiman pedesaan yang terbesar. Sedangkan Kecamatan Subang yang memiliki 8 Kelurahan yaitu Parung, Pasirkareumbi, Soklat, Karanganyar, Cigadung, Dangdeur, Sukamelang dan Wanareja. Melihat kondisi di atas, jelas bahwa Kecamatan Subang diperuntukan sebagai kawasan atau

wilayah pengembangan pusat pemerintahan, pusat ekonomi/ usaha juga pengembangan kawasan terbangun. Untuk tahun 2015 luas tanah untuk perumahan di Kecamatan Subang seluas 1.021 Ha sedangkan untuk tahun 2016 meningkat menjadi 1.261, 85 (UPTD Pertanian Kecamatan Subang). Peningkatan tersebut merupakan dampak atas peruntukan wilayah sebagai penyangga kota Kabupaten ditambah dengan perkembangan perekonomian yang menyedot banyak tenaga kerja sehingga permintaan akan perumahan menjadi meningkat.

Untuk Kecamatan Kalijati yang terdiri dari 10 Desa dengan pengembangan wilayah pertanian. Namun kondisi lapangan tidak demikian, karena banyak lahan pertanian digunakan sebagai kawasan terbangun yang tidak pada tempatnya. Untuk tahun 2015 luas lahan perumahan 1.981,72 Ha sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 2.051 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa adanya konversi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan yang strategi. Karena kawasan perumahan tersebut dibangun beriringan dengan kawasan industri. Sehingga perkembangan kawasan industri juga menarik perkembangan kawasan perdagangan dan kawasan pendukung lainnya yang mendukung terciptanya kawasan industry tersebut. Sedangkan Kecamatan Purwadadi merupakan kawasan peruntukan pengembangan pertanian dan industri menengah. Luas Wilayah Kecamatan Purwadadi adalah 89,93 km<sup>2</sup> atau sekitar sekitar 4,38 % dari luas wilayah Kabupaten Subang ( ± 12.051,95 km<sup>2</sup>). Kecamatan ini terbagi menjadi 10 desa. Dari 10 desa yang berada di Kecamatan Purwadadi, Desa Pasirbungur merupakan desa terluas di Kecamatan Purwadadi dengan luas sekitar 22,09 km<sup>2</sup> atau 35,60 persen dari luas seluruh wilayah Kecamatan Purwadadi. Sebagai daerah dengan potensi pertanian, di

Kecamatan Purwadadi terdapat sarana penunjang kegiatan pertanian berupa kios saprotan (sarana produksi pertanian), lumbung padi dan juga heuleur (penggilingan padi). Pada perkembangannya luas lahan pertanian menjadi berkurang sedangkan kawasan perumahan dan kawasan terbangun menjadi meningkat. Hal ini terlihat pada tahun 2016 luas perumahan mencapai 1.304,81 Ha

Kecamatan Cibogo memiliki luas wilayah 53,71 Km<sup>2</sup> yang terbagi kedalam Sembilan desa yaitu Sadawarna, Sumurbarang, Padaasih, Cibogo, Cinangsi, Majasari, Cibalandongjaya, Belendung dan Cisaga. Kecamatan Cibogo mempunyai potensi wilayah untuk pengembangan wilayah pertanian, industri juga perumahan. Karena Kecamatan ini merupakan daerah terdekat dengan kota Subang sehingga menjadi Kecamatan penyangga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan juga perekonomian. Hal ini menyebabkan luas areal atau lahan pertanian dari mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 semakin berkurang. Walaupun luas lahan pertanian yang digunakan tidak sebanyak dengan luas lahan pada Kecamatan Purwadadi, namun pengurangan luas lahan pertanian juga membawa dampak yang kurang baik terhadap tingkat produktivitas padi. Banyak lahan pertanian yang dipergunakan untuk pembangunan perumahan hal ini juga membawa dampak yang kurang baik. Berkaitan dengan pembangunan kawasan perumahan juga dihubungkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Karena dengan pertumbuhan penduduk juga mengakibatkan peningkatan permintaan akan perumahan yang sekaligus menyedot lahan pertanian yang bersifat produktif.

Konsekuensi dari pembangunan perumahan yang tidak pada wilayahnya akan menimbulkan beberapa kondisi yang berubah. Pertama mengurangi lahan atau

areal pertanian yang subur menjadi lahan perumahan, sehingga berkurangnya tingkat produktivitas akan hasil pertanian. Dampak lain yang ditimbulkan atas pembangunan perumahan yaitu perubahan mata pencaharian dan pendapatan penduduk lokal dapat ditimbulkan oleh kegiatan pembebasan lahan maupun oleh kegiatan penerimaan tenaga kerja pada tahap konstruksi dan operasi. Selain itu, hadirnya masyarakat baru yaitu kelas bawah yang secara geografis tinggal bersama warga setempat, dan masyarakat kelas atas yang menghuni perumahan, membawa pengaruh tersendiri terhadap perubahan tatanan sosial masyarakat setempat.

Kondisi ketiga yaitu pembangunan perumahan didaerah pinggiran/sekitar kota akan mengakibatkan meningkatnya arus komuter (ulang alik) dari perumahan-perumahan tersebut ke kota induk sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas baik di sekitar perumahan tersebut maupun pada jalan-jalan memasuki kota. Karena kapasitas jalan yang tidak berubah namun tidak diiringi dengan jumlah peningkatan kapasitas kendaraan. Kondisi berikutnya dari dampak pembangunan perumahan yaitu, jumlah areal lahan yang dibangun melebihi kebutuhan. Hal ini diakibatkan karena adanya sarana pendukung seperti pembangunan jalan menuju perumahan dan bangunan lain atas pendukung perumahan. Bangunan lain yang tidak direncanakan oleh pemerintah ketika pembangunan perumahan seperti terbangunnya kawasan ruko komersil

### **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, peneliti mengemukakan masalah dalam penelitian ini yaitu perencanaan wilayah pembangunan perumahan di Kabupaten Subang. Dari pernyataan masalah tersebut, selanjutnya peneliti

mengidentifikasi pertanyaan penelitian sebagai berikut: “mengapa pembangunan perumahan di Kabupaten Subang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)?”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Konsep Kebijakan**

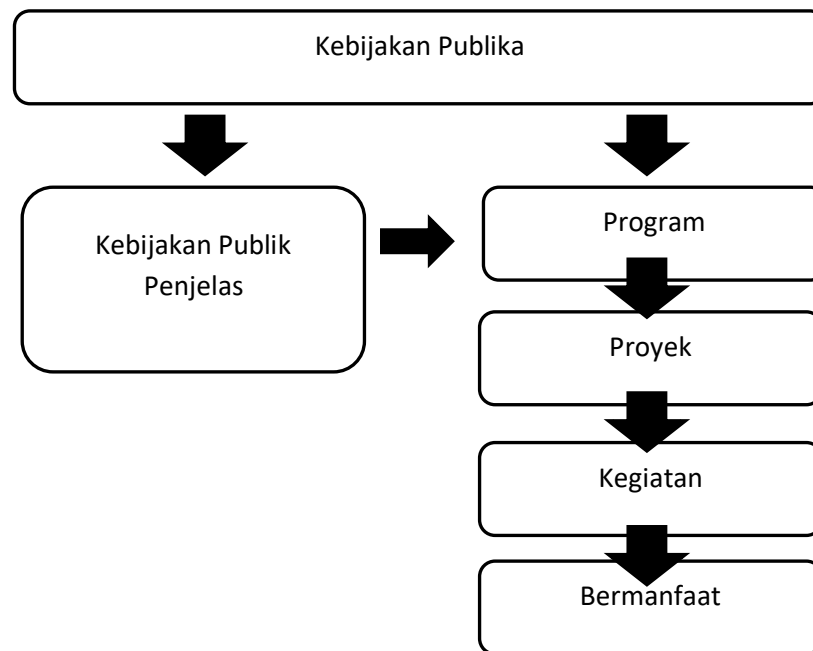
Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur penelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik. Frederick dalam Nugroho(2008: 53) mendefinisikan kebijakan publik adalahserangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada.

Kebijakan yang diusulkan tersebut ditunjukkan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Menurut Bridgeman dan Davis dalam Suharto (2011: 3) kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever government choose to do or not to do*”, artinya kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

## **Implementasi Kebijakan**

Presmann dan Waldavsky dalam Jones (1991: 295) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan lanjut dari formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi diterapkan strategi dan tujuan-tujuan kebijakan. Sedangkan tindakan (*action*) untuk mencapai tujuan diselenggarakan pada tahap implementasi kebijakan, implementasi adalah suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapainya. Grindle dalam Wahab (1991: 45) mengatakan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, iamenyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Dari beberapa pemikiran di atas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan lebih penting dari pembuatan keputusan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang strategis dan menentukan terhadap pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam tahap formulasi sebuah kebijakan.

Nugroho (2008: 429) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan dereviat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar Sekuensi Implementasi Kebijakan

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan Studi

Metode ini merupakan metode kualitatif yang digunakan untuk melakukan penelaahan dan mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan pembangunan perumahan di Kabupaten Subang. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kebijakan pembangunan perumahan Kabupaten Subang. Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apa pun dari peneliti.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan jenis data yang akan diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data ini terbagi atas pengumpulan data primer dan data sekunder.

### **1. Teknik Pengumpulan Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data primer tersebut, peneliti menggunakan cara:

- a. Wawancara mendalam. Menurut Kriyantono (2009:63) wawancara mendalam (*depth interview*) merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus-menerus (lebih dari satu kali) untuk menggali informasi dari informan. Data yang akan digali adalah bagaimana keterlibatan setiap stakeholder sesuai dengan tanggung jawabnya dalam perencanaan pembangunan perumahan
- b. Observasi. Disamping wawancara mendalam, penelitian ini juga melakukan metode observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Data yang akan digali adalah data lokasi atau kawasan yang akan dijadikan perumahan, jumlah perumahan, konsep perumahan (subsidi atau komersil), proses pemasaran perumahan.

### **2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder**



Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahankepustakaan. Data-data yang dikumpulkan merupakan data yang mempunyai kesesuaian dan kaitan dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan.

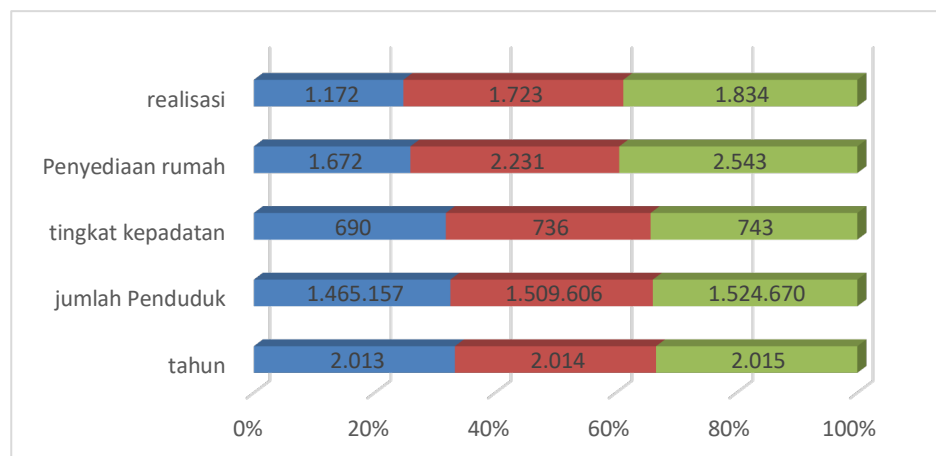
b. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Jumlah penduduk yang semakin meningkat berbanding lurus dengan kebutuhan lahan dan tempat tinggal. Pembangunan perumahan yang terjadi di Kabupaten Subang memberikan dampak yang besar terhadap perubahan bentuk penggunaan lahan. Perumahan tidak hanya dibangun di desa-desa yang dekat dengan kawasan perkotaan saja, namun sudah merambah ke desa-desa di pinggiran yang merupakan kawasan pertanian. Melihat perkembangan lahan pertanian di Kabupaten Subang kian tahun semakin menyusut, maka pemerintah Kabupaten Subang perlu melakukan perencanaan ulang mengenai pembangunan perumahan. Karena para pengembang membangun perumahan di areal lahan pertanian yang

produktif. Hal ini jelas melanggar aturan Perda Kabupaten Subang No 3 Tahun 2014 mengenai RTRW, karena di dalam Perda tersebut jelas zona-zona yang digunakan untuk pengembangan industri, pesawahan, perkebunan dan kawasan terbangun. Dari sekian banyak lahan pertanian yang digunakan untuk perumahan yaitu sebesar 10 ha. Namun dengan jumlah yang semakin meningkat sebesar 27% merupakan lahan pertanian yang bersifat produktif. Hal ini yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah kabupaten subang sebagai penanggung jawab atas pengelolaan wilayah

### **Grafik Perkembangan Pendudukan dengan penyediaan perumahan Di Kabupaten Subang**



Sumber: Subang Dalam Angka, 2016

Melihat grafik di atas, penduduk Kabupaten Subang setiap tahun mengalami peningkatan. Sudah jelas dengan peningkatan penduduk juga akan mengakibatkan tingkat kepadatan keruangan semakin meningkat. Peningkatan penduduk tidak dapat dihindari dengan berbagai program, hanya peningkatan penduduk dapat dikendalikan sesuai dengan fungsinya. Ditambah dengan tingkat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi, juga membawa dampak atas pertumbuhan dan

peningkatan penduduk berbanding lurus. Berkaitan dengan perumahan, bahwa peningkatan penduduk tentu saja meningkatkan permintaan masyarakat akan kuantitas dan kualitas perumahan yang disediakan oleh pihak pengembang.

Berkaitan kuantitas permintaan perumahan, bahwa masyarakat Subang setiap tahun terjadinya peningkatan permintaan akan perumahan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa, permintaan akan kuantitas perumahan juga berasal dari masyarakat luar Subang. Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan khusus baik itu Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Subang yang mengatur secara teknis tentang kepemilikan perumahan di Kabupaten Subang. Karena proses kepemilikan perumahan diserahkan pada mekanisme pasar, sehingga titik permintaan tidak dapat dikendalikan hanya untuk masyarakat Kabupaten Subang saja. Dengan berbagai lokasi, tipe baik itu subsidi atau tipe komersil, proses tersebut langsung diserahkan pada pihak pengembang bukan lagi pada pihak pemerintah sebagai sentral dalam pengaturan kepemilikan.

Pihak pengembang juga tidak dapat bergantung pada masyarakat local dalam rangka kepemilikan hunian. Karena pengembang juga tidak ingin menanggung kerugian dalam proses penyediaan sampai dengan pembangunan perumahan. Sehingga mekanisme pasar dalam penawaran perumahan kepada masyarakat lebih dominan dibandingkan dengan kepemilikan hunian untuk masyarakat Subang. Kondisi social masyarakat Subang yang lebih memilih membuat hunian di areal permukiman juga menambah proses permintaan atas perumahan masyarakat menjadi rendah. Kondisi tersebut tidak dapat diarahkan pada perumahan, namun bentuk kesadaran sendiri bahwa hunian harus memiliki

tingkat kelayakan, baik itu dari segi kualitas bangunan sampai dengan kualitas kesehatan.

Berkaitan dengan adanya ketimpangan antara penyediaan dan realisasi perumahan di Kabupaten Subang. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, pertama Perumahan yang bersubsidi memiliki kelemahan yaitu akses terhadap pusat kegiatan perekonomian yang jauh ditambah fisik bangunan yang harus diperbaharui. Kondisi bangunan yang harus diperbaharui inilah yang menyebabkan kuantitas perumahan dengan tipe subsidi jarang dimiliki oleh penduduk Subang. Selain itu, unit yang disediakan oleh pihak pengembangan sangat terbatas dengan persyaratan kepemilikan yang rumit. Sedangkan untuk perumahan tipe komersil dengan fisik bangunan yang memadai, akses terhadap pusat kegiatan perekonomian yang tidak terlalu jauh namun dari segi biaya cukup tinggi. Hal ini yang menjadi realisasi perumahan yang bersifat komersil lebih didominasi oleh masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah.

Dari pihak pemerintah Kabupaten, tidak dapat memberikan intervensi kepada masyarakat local harus berpindah dari permukiman ke hunian perumahan, walaupun perumahan merupakan bagian dari kebutuhan yang bersifat primer. Karena pemerintah mengeluarkan Perda Tentang RTRW memberikan kewenangan dalam pengembangan wilayah sesuai dengan peruntukan dan potensinya masing-masing. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pengembangan kewilayahan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sampai dengan penyediaan anggaran dari pemerintah untuk pembebasan lahan dalam penyediaan perumahan. Pemerintah dapat berupaya dalam penyediaan tanah dalam

pembangunan perumahan, bukan memberikan intervensi kepada masyarakat untuk mempunyai perumahan. Pemerintah berkewajiban memberikan ijin lokasi, ijin mendirikan bangunan, sampai dengan Amdal. Proses tersebut sangat bermanfaat bagi pihak pengembang sampai dengan target pembangunan dapat mengetahui, apakah proses pembangunan perumahan tersebut sesuai dengan peraturan atau melanggar peraturan yang berlaku.

Pembangunan perumahan juga melibatkan banyak pihak (*multi stakeholder*), hal ini berkaitan bahwa pembangunan perumahan hanya bentuk hasil, namun mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan dampak apa yang dihasilkan atas pembangunan perumahan bahkan sampai penentuan ketepatan sasaran atau target pembangunan perumahan. Perencanaan pembangunan mencakup, penyediaan lahan, pihak yang akan terlihat sampai dengan penyediaan anggaran dalam proses pembiayaan pembangunan. Tentunya proses tersebut mencakup banyak pihak yang turut serta dalam proses tersebut, namun pemerintah memegang peran penting dan dominan. Pelaksanaan pembangunan juga meliputi banyak pihak, juga melibatkan proses pengawasan pembangunan agar kegiatan tersebut tidak menyimpang. Namun pada proses penentuan sasaran, tidak dilakukan evaluasi siapa saja yang mendapatkan hunian perumahan. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak dapat memegang peran penting dan dominan sampai dengan mengeluarkan aturan khusus dalam proses kepemilikan. Sehingga mekanisme pasar yang mengatur dan memegang peranan kunci dalam proses kepemilikan.

## SIMPULAN

Pembangunan perumahan di Kabupaten Subang sudah melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini menimbulkan dampak negative bagi produktivitas hasil pertanian dan perkebunan. Selain itu, adanya wilayah terbangun yang tidak direncanakan sebelumnya juga berimbas pada perubahan mata pencaharian warga masyarakat Subang

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, David. 1994. *Urban Planning And The Development Process*. UCL Press. University College London
- Agustino. 2008. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: Puslit KP2W Lemlit Unpad-AIPI
- Bintarto, 1989, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia. Indonesia
- Edward III, George C (edited), 1980, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Etzioni, 1967, *Social Change, Sources, Patterns and Consequences*. New York, London: Basic Books Inc Publishers
- Goggin, Malcolm L *et al.* 1990. *Implementation, Theory and Practice: Toward a Third Generation*, Scott, Foresmann and Company, USA.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Jim, Ife. 2013. *Community Development In An Uncertain World. Vision, analysis and Practice*. Cambridge University Press
- Jones. 1991. *Organizational Theory: Structure, Take and Case*. New York: Addison-Wasley Publishing Company
- Kuncoro. 2005. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN

- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Merilee S. Grindle. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey
- Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: LAN RI dan Duta Pertiwi Foundation
- Nakamura, Robert T and Frank Smallwood. 1980. *The Politics of Policy Implementation*, St. Martin Press, New York.
- Suharto, Edi. 2011, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama
- Thomas R. Dye. 1981. *Understanding Public Policy*, Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs, NY
- Tyler, Norman and Robert. 2011. *Planning And Community Development – A Guide For The 21st Century*. First Edition. Printed In The United State Of America

### **Dokumen**

- Peaturan Pemerintah No 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman
- Perda Kabupaten Subang No 3 Tahun 2014 Tentang RTRW Kabupaten Subang 2011-2031

## **Implementasi Kebijakan Lahan Lestari Di Kota Sukabumi**

**Dian Purwanti**

Universitas Muhammadiyah Sukabumi  
purwantidian75@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Kota Sukabumi yang luas wilayahnya hanya 48 km<sup>2</sup> terdiri dari 7 wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 239.000 jiwa, warga masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian di bidang pelayanan jasa, namun masih ada juga yang tetap mempertahankan budaya dengan mengolah lahan pertanian. Seiring perkembangan zaman, adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi perumahan, pertokoan, hotel, dan tempat wisata membuat para petani di kota Sukabumi hampir kehilangan sumber mata pencahariannya. Kelompok tani yang ada di kota Sukabumi hanya sebagian kecil saja yang menggarap lahan pertaniannya sendiri karena sawah mereka telah dijual dan dialih fungsikan. Sebagian besar petani hanyalah menjadi petani penggarap yang menyewa sawah untuk kegiatan pertanian mereka. Menjawab fenomena ini pemerintah kota Sukabumi kemudian mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2011-2031, selanjutnya Perda RTRW Kota Sukabumi 2011-2031 tentang Lahan Lestari dan Lahan Cadangan Lestari yang menetapkan penyediaan Lahan Lestari seluas 321 ha di Kecamatan Baros, Cibeureum dan Lembursitu, serta Lahan Cadangan Lestari seluas 1,559 ha. Dengan kebijakan Lahan Lestari dan Lahan Cadangan Lestari tersebut, pemangku kebijakan (*policy maker*) akan menempatkan warga-lahan-proses sebagai bagian penting dalam implementasi kebijakan Lahan Lestari dan Lahan Cadangan Lestari. Bagaimana implementasi dari kebijakan Lahan Lestari dan Lahan Cadangan Lestari di kota Sukabumi, serta apa saja yang menjadi kendala dalam proses implementasinya. Untuk menjawab masalah tersebut digunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasi, dan memverifikasi data dan informasi. Data primer maupun sekunder tentang implementasi pengadaan Lahan Lestari dan Lahan Cadangan Lestari diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam (*depth interview*) kepada informan kunci. Validitas, reliabilitas data dan informasi dilakukan dengan triangulasi, diklarifikasi, dideskripsi, diekplanasi dan diverifikasi berdasarkan panduan teori implementasi kebijakan (*policy implementation*).

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Lahan Lestari, Lahan Cadangan Lestari, Pemangku kebijakan.



## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian sebenarnya bukan masalah baru. Pertambahan penduduk dan pertumbuhan perekonomian menuntut pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bangunan industri dan pemukiman, yang sudah barang tentu harus didukung dengan ketersediaan lahan. konversi lahan pertanian dilakukan secara langsung oleh petani pemilik lahan ataupun tidak langsung oleh pihak lain yang sebelumnya diawali dengan transaksi jual beli lahan pertanian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik lahan mengkonversi lahan atau menjual lahan pertaniannya diantaranya disebabkan oleh faktor harga lahan, proporsi pendapatan, luas lahan, produktivitas lahan, status lahan dan adanya kebijakan konversi lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.

Rencana tata ruang merupakan landasan pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan atau ekonomi (Anonymous, 2009). Hal ini mulai terjadi sejak dikeluarkannya paket-paket kebijakan yang mendorong investor dalam dan luar negeri menanamkan modalnya di bidang nonpertanian sekitar pertengahan 1980-an. Keperluan lahan nonpertanian mengikutitrend peningkatan investasi tersebut. Keperluan lahan untuk bidang nonpertanian semakin meningkat seiring dengan *Booming* pembangunan perumahan pada awal tahun 1990-an. Pemerintah memberikan berbagai fasilitas untuk mendorong pembangunan wilayah. Laju alihfungsi lahan dari yang semula digunakan untuk pertanian menjadi perumahan dan industri tidak dapat dihindari.

Departemen Pertanian sudah memperkirakan tantangan berat sektor pertanian terkait dengan keterbatasan lahan. (Sudaryanto, 2002). Pertumbuhan perekonomian menuntut pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bangunan industri dan pemukiman. Dengan kondisi demikian, permintaan terhadap lahan untuk penggunaan non pertanian tersebut semakin meningkat, akibatnya banyak lahan sawah terutama yang berada di sekitar perkotaan mengalami alih fungsi ke penggunaan lain.

Kurangnya insentif pada usaha tani lahan sawah dapat menyebabkan terjadi alih fungsi lahan pertanian ke fungsi lainnya (Ilham dkk, 2003). Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan berkembangnya industri, prasarana ekonomi, fasilitas umum, dan permukiman dimana semuanya memerlukan lahan telah meningkatkan permintaan lahan untuk memenuhi kebutuhan nonpertanian. Namun pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan kondisi sosial ekonomi pada lahan nonpertanian. Kondisi inilah yang membuat konversi lahan pertanian terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tidak mungkin dapat dihindari (Sudaryanto, 2002).

Kota Sukabumi yang luas wilayahnya hanya 48 km<sup>2</sup> memiliki luas lahan sawah sebesar 1.589 ha atau setara dengan 33,10 % dari luas kota Sukabumi, hal ini menjadi potensi tersendiri bagi kota Sukabumi. Menurut data BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2012, Kota Sukabumi merupakan kabupaten/kota yang memiliki tingkat produktivitas padi tertinggi se-Jawa Barat. Namun akibat adanya trend konversi lahan pertanian, menurut data Kota Sukabumi dalam Angka Tahun 2007-2013, pada kisaran tahun 2006-2012 telah terjadi penurunan lahan sawah sebesar

31,39% yang berdampak pada penurunan rata-rata hasil produksi padi sawah dari 76,72 kw/ha pada tahun 2008 menjadi 67,49 kw/ha pada tahun 2012.

Konversi lahan pertanian jelas tidak menguntungkan bagi pertumbuhan sektor pertanian karena dapat menurunkan kapasitas produksi dan daya serap tenaga kerja yang selanjutnya berdampak pada penurunan produksi pangan, dan pendapatan per kapita keluarga tani. Konversi lahan pertanian juga mempercepat proses marjinalisasi usaha tani sehingga menggerogoti daya saing produk pertanian domestik. Konversi lahan pertanian merupakan isu strategis dalam rangka pemantapan ketahanan pangan nasional, peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi berbasis pertanian.

Berbagai peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan sebenarnya telah diterbitkan pemerintah untuk mengendalikan konversi lahan pertanian namun pengalaman menunjukkan bahwa peraturan-peraturan tersebut kurang efektif. Padamasa pemerintahan otonomi daerah, peraturan-peraturan yang umumnya diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi, semakin kurang efektif karena pemerintah kabupaten/kotamadya memiliki kemandirian yang luas dalam merumuskan kebijakan pembangunannya (Simatupang, 2001).

Sebagai upaya mewujudkan pencapaian produksi pertanian beras di kota Sukabumi, pada tahun 2012 Pemerintah kota Sukabumi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2011-2031 (Perda RTRW Kota Sukabumi 2011-2031) yang memuat peraturan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan

peruntukkan pertanian tanaman pangan, tercatat luas lahan pertanian di kota Sukabumi ketika itu 1.588 ha.

Menurut data DKPP kota Sukabumi, lahan pertanian di kota Sukabumi pada tahun 2017 luasnya tinggal 1.486 ha, setiap tahun kota sukabumi kehilangan lahan pertanian sekitar 163 ha, khususnya sawah beririgasi yang mengakibatkan target peningkatan produksi pertanian khususnya beras menjadi sulit untuk direalisasikan. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pencapaian produksi pertanian beras, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Peternakan (DKPPP) kota Sukabumi bekerja sama dengan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB pada tahun 2013 telah berhasil memetakan Lahan Lestari seluas 321 ha dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lahan Cadangan Lestari) hingga mencapai 1.559 ha. Hasil pemetaan tersebut menjadi bagian dari materi Perda RTRW kota Sukabumi 2011-2031, khususnya pasal 56 ayat (1) huruf a tentang penetapan dan penyediaan LP2B.

Setelah 5 tahun berlalu sejak LP2B ditetapkan, maka evaluasi kebijakan atas implementasi LP2B menjadi penting untuk dilakukan. Selain berkenaan dengan konsistensi penetapan LP2B dan Lahan Cadangan Lestari di wilayah kota Sukabumi, juga untuk mengetahui implementasi kebijakan penetapan dan penyediaan LP2B dan LCP2B serta kebijakan yang mengatur system pelaksanaan dan pengelolaan LP2B dan LCP2B di kota Sukabumi.

### **Pokok Masalah**

Keanekaragaman pola aktivitas manusia sebagai dari akibat pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan akan lahan meningkat. Luas lahan

tidaklah terus menerus mengalami perubahan, akan tetapi kebutuhan lahan yang terus meningkat sehingga terjadi perubahan penggunaan dan penutupan lahan. Khusus daerah kota Sukabumi, alih fungsi lahan/ konversi terjadi karena disebabkan oleh adanya perluasan penggunaan lahan untuk perumahan dan permukiman penduduk, industri serta fasilitas sarana prasarana lainnya.

Menurut Irawan (2005), mengemukakan bahwa konversi yang lebih besar terjadi pada lahan sawah dibandingkan dengan lahan kering karena dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

1. Pembangunan kegiatan non pertanian seperti kompleks perumahan, pertokoan, perkantoran, dan kawasan industri lebih mudah dilakukan pada tanah sawah yang lebih datar dibandingkan dengan tanah kering
2. Akibat pembangunan masa lalu yang terfokus pada upaya peningkatan produk padi maka infrastruktur ekonomi lebih tersedia di daerah persawahan dari pada daerah tanah kering
3. Daerah persawahan secara umum lebih mendekati daerah konsumen atau daerah perkotaan yang relatif padat penduduk dibandingkan daerah tanah kering.

Bagaimana upaya pemerintah kota Sukabumi menyelamatkan lahan pertanian sawah dan menyediakan Lahan Pangan lestari di kota Sukabumi sebagai upaya meningkatkan produksi padi di kota Sukabumi dan mewujudkan masyarakat yang makmur berkeadilan.

## **Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai informasi kepada pemerintah daerah kota Sukabumi mengenai kondisi Lahan Pertanian di kota Sukabumi agar dapat segera melakukan antisipasi kerusakan/kehilangan lahan pertanian yang merupakan sumber mata pencaharian sebagian warga kota Sukabumi yang bergerak di sektor agraris. Juga sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk kebijakan Lahan Lestari dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk menyelamatkan asset lahan pertanian subur di kota Sukabumi.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (untuk selanjutnya disingkat menjadi LP2B) merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional (UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). LP2B ini dikenal juga dengan lahan lestari. Menurut Sudrajat (2015) strategi jangka pendek yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah konversi lahan pertanian adalah dengan mengimplementasikan penetapan lahan pertanian abadi pada tiap daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2009. Selanjutnya menurut Rantini dan Prabatmodjo (2013) salah satu upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian adalah perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kebijakan ini sangat berkaitan dengan petani yang merupakan faktor

kunci dalam mensukseskan implementasi kebijakan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan berikut insentif dan disinsentifnya, karena petani merupakan pelaksana sekaligus penerima manfaat kebijakan itu. Sehingga perlu diungkapkan bagaimana tanggapan petani terhadap kebijakan tersebut, mengingat tanggapan dapat mempengaruhi keputusan petani mengenai lahan pertanian miliknya.

Menurut Jones (1977), pelaksanaan kebijakan merupakan pelaksanaan program yang berhubungan dengan organisasi (*organization*), interpretasi (*interpretation*) dan aplikasi (*aplication*). Organisasi diperlukan untuk pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk mewujudkan sebuah program terlaksana. Interpretasi diperlukan sebagai upaya menafsirkan program menjadi suatu rencana aktifitas yang tepat, dapat diterima dan dapat dilaksanakan. Aplikasi menjadi penting karena berhubungan dengan ketentuan-ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan-tujuan pelaksanaan program.

Dalam makalah ini yang akan dibahas dalam pilar organisasi adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, Dinas Tata Ruang Lingkungan dan Pemukiman Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, Bagian Aset Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi. Sedangkan pada interpretasi adalah pemilihan lokasi tanah untuk Lahan Lestari serta upaya mempersiapkan proses pembangunan yang berkelanjutan. Evaluasi kebijakan

secara sederhana menurut William Dunn (2000), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan.

Ketika ia bernilai bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut member sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan adalah harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Dampak kebijakan dalam hal ini melingkupi komponen sebagai berikut: a. Kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, untuk mengukur seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai. b. Pelaksanaan kebijakan, yaitu untuk mengetahui apakah tindakan yang ditempuh oleh implementing agencies sudah benar-benar efektif, responsive, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan juga harus memperhatikan persoalan-persoalan hak azasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. Hal ini diperlukan oleh para evaluator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar hak asasi warga. Selain itu untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini, evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan output dan outcome yang dihasilkan dalam suatu implementasi kebijakan.



Pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 1.559 ha dan cadangannya merupakan salah satu upaya prioritas untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta meningkatkan kemakmuran petani dan masyarakat Kota Sukabumi. Selain itu, kebijakan Lahan Lestari seluas 321 ha dan cadangannya seluas 1,559 ha berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah menetapkan perlunya Pemerintah melakukan perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian yang pengaturannya dengan Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Berdasarkan hal itu, Pemerintah Kota Sukabumi melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2011-2031 telah memuat tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan Lahan Lestari, yang belum mengatur secara jelas dan tegas berkenaan dengan rencana pengadaan lahannya, sistem pelaksanaan dan pengelolaannya.

## **PEMBAHASAN**

### **Kondisi Fisik Geografi dan Administrasi**

Secara geografis Kota Sukabumi terletak di bagian selatan Jawa Barat pada koordinat 106°45'50" Bujur Timur dan 106°45'10" Bujur Timur, 6°50'44" Lintang Selatan, di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya

584 meter di atas permukaan laut, dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi
2. Sebelah Selatan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi
3. Sebelah Barat Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi
4. Sebelah Timur Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi

Wilayah Administratif Kota Sukabumi berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukabumi. Kota Sukabumi terdiri dari 7 Kecamatan dan 33 Kelurahan dengan luas wilayahnya kurang lebih 4.800 ha/48 Km. Kecamatan Lembursitu merupakan wilayah dengan luas terbesar yaitu 890 ha dan Kecamatan Citamiang merupakan wilayah dengan luas terkecil yaitu 404 ha.

**Tabel Daftar Kecamatan dan Luas Wilayah per Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Cikole	708
2	Citamiang	404
3	Gunungpuyuh	550
4	Warudoyong	760
5	Baros	611
6	Cibeureum	877
7	Lembursitu	890
	Luas	4800

Sumber Statistik Kota Sukabumi (BPS, 2016)

Kecamatan Cikole terdiri dari 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Selabatu, Kelurahan Gunung Parang, Kelurahan Kebonjati, Kelurahan Cikole, Kelurahan Cisarua dan Kelurahan Subangjaya. Kecamatan Gunungpuyuh terdiri atas 4 Kelurahan, yaitu Kelurahan Gunungpuyuh, Kelurahan Karamat, Kelurahan Sriwedari, dan Kelurahan Karangtengah. Kecamatan Warudoyong terdiri dari 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Warudoyong, Kelurahan Nyomplong, Kelurahan Benteng, Kelurahan Dayeuhluhur, dan Kelurahan Sukakarya. Kecamatan Baros terdiri atas 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Sudajaya Hilir, Kelurahan Jaya Mekar, Kelurahan Jayaraksa, dan Kelurahan Baros. Kecamatan Cibeureum terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu Kelurahan Sindang Palay, Kelurahan Limusnunggal, Kelurahan Babakan dan Kelurahan Cibeureum Hilir. Kecamatan Lembursitu terdiri dari 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Lembursitu, Kelurahan Situmekar, Kelurahan Cipanengah, Kelurahan Cikundul dan Kelurahan Sindangsari. Kecamatan Citamiang terdiri dari 5 Kelurahan, yaitu Kelurahan Cikondang, Kelurahan Gedongpanjang, Kelurahan Nanggaleng, Kelurahan Citamiang dan Kelurahan Tipar.

Kota Sukabumi yang berjarak 120 km dari Ibukota Negara (Jakarta) atau 96 km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) mengakibatkan pergerakan orang dan barang dari kota-kota tersebut ke Kota Sukabumi cukup tinggi. Kedekatan jarak dengan dua kota besar tersebut juga membuka kesempatan untuk mengembangkan diri sebagai pusat pelayanan berkualitas di bidang perdagangan, pendidikan dan kesehatan yang merupakan visi Kota Sukabumi.

Posisi Kota Sukabumi dalam konstelasi regional Jawa Barat berada pada posisi strategis karena berada di antara pusat pertumbuhan megaurban Jabodetabek dan Bandung Raya sehingga menjadi salah satu kawasan andalan dari 8 kawasan andalan di Jawa Barat yang berpotensi untuk pengembangan agribisnis, pariwisata dan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan modal investasi untuk menghasilkan daya saing global, serta menjadi motivator untuk memacu perkembangan wilayahnya juga mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah disekitarnya (Bappeda, 2008).

Secara historis Kota Sukabumi dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai *Burgerlijk Bestuur* (1914) dengan status *Gemeenteraad Van Sukabumi* yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang Belanda dan Eropa sebagai pengelola perkebunan di wilayah Kabupaten Sukabumi, Cianjur dan Lebak. Memasuki era kemerdekaan dengan dibentuknya sistem pemerintahan daerah, Kota Sukabumi termasuk kedalam kategori kota kecil yang disebut sebagai Kotapraja, kemudian berubah menjadi Kotamadya dan terakhir menjadi Kota yang memiliki areal 1.215 Ha.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 1995, Kota Sukabumi mengalami perluasan menjadi 4.800,23 ha yang terbagi dalam 5 kecamatan dan 33 kelurahan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah No. 15/2000 yang ditetapkan pada tanggal 27 September 2000, wilayah administratif Kota Sukabumi mengalami pemekaran menjadi 7 Kecamatan, yaitu Kecamatan Cikole, Kecamatan Cibereum, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Lembursitu, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Baros dan Kecamatan Gunung Puyuh,

dengan 33 kelurahan. Jarak terjauh ke Balai Kota yaitu Kecamatan Lembursitu Sejauh 7 KM.

### **Iklm dan Curah Hujan**

Sepanjang tahun 2011 keadaan iklim di Kota Sukabumi cenderung basah dengan suhu udara Kota Sukabumi berkisar antara 15°-30° celsius. Berdasarkan hasil pemantauan di Stasiun Cimandiri disetiap bulan pada tahun 2011 pasti terjadi hujan dengan intensitas tertentu. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November yang mencapai 323 mm dengan jumlah hari hujan 27 hari, sementara curah hujan terendah terjadi pada bulan september dengan jumlah curah hujan 6 mm dan jumlah hari hujan sebanyak 2 hari.

### **Hidrologi**

Kondisi air tanah di wilayah Kota Sukabumi dan sekitarnya untuk kebutuhan sehari-hari secara umum cukup tersedia. Sumbernya berasal dari air tanah, mata air dan air tanah tertekan. Sebaran akuifer dengan produktivitas tinggi terdapat di sekitar Kota Sukabumi dengan sebaran paling dominan mulai dari barat hingga timur. Di bagian utara merupakan zona air tanah dengan akuifer berproduktifitas sedang dan wilayah penyebaran yang luas. Bagian selatan merupakan zona akuifer yang produktivitasnya rendah hingga langka. Sungai terpanjang yang melintasi Kota Sukabumi adalah Sungai Cipelang dengan panjang aliran sungai 15.814 m. Sungai yang berasal dari mata air di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di wilayah Kabupaten Sukabumi

melintasi 3 Kecamatan yang ada di Kota Sukabumi, yaitu Kecamatan Gunungpuyuh, Kecamatan Warudoyong dan Kecamatan Lembursitu.

### **Topografi dan Kemiringan Lereng**

Wilayah Kota Sukabumi merupakan lereng selatan dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango, yang berada pada ketinggian 584 meter di atas permukaan laut pada bagian selatan dan 770 meter di atas permukaan laut bagian utara. Sedangkan di bagian tengah mempunyai ketinggian rata-rata 650 meter dari permukaan laut. Bentuk bentangan alam Kota Sukabumi berupa perbukitan bergelombang dengan sudut lereng beragam (Bappeda, 2011). Wilayah Kota Sukabumi didominasi oleh kemiringan lereng 0 – 2% dengan luas mencapai 2.237,51 ha atau sekitar 45,62% dari luas kota dan kemiringan lereng 2 – 15% mencapai 2.560,14 ha atau sekitar 52,2% dari luas kota. Selanjutnya, sekitar 2% dari luas Kota Sukabumi terdiri dari wilayah yang memiliki kemiringan lereng 15% hingga kemiringan lereng > 40%.

### **Pemerintahan, Penduduk dan Ketenagakerjaan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000, Wilayah administrasi Kota Sukabumi dibagi menjadi 7 kecamatan yaitu Cikole, Citamiang, Gunung Puyuh, Warudoyong, Baros, Cibereum dan Lembursitu serta 33 Kelurahan. Jumlah penduduk kota Sukabumi pada tahun 2015 berjumlah 318.117 jiwa, yang merupakan urutan kedua jumlah penduduk terendah dari 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat.

Jumlah penduduk laki-laki berjumlah 161.188 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 156.929 jiwa. Pertumbuhan penduduk 0,98 % dengan kepadatan penduduk 6.627 jiwa/km<sup>2</sup>. Berdasarkan distribusi penduduk per kecamatan di Kota Sukabumi, penduduk kecamatan Cibeurem berjumlah 13 % dari jumlah seluruh penduduk kota Sukabumi (318.117 jiwa) yaitu sekitar 4,136 jiwa.

**Tabel Statistik Kependudukan Kota Sukabumi**

Kategori	Jumlah
Jumlah Penduduk	318.117 jiwa
Laki-Laki	161.188 jiwa
Perempuan	156.929 jiwa
Pertumbuhan Penduduk	0,98 %
Kepadatan Penduduk	6.627 jiwa/km <sup>2</sup>

Sumber Statistik Kota Sukabumi (BPS, 2016)

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2015, di Kota Sukabumi terdapat 147.065 orang yang tergolong angkatan kerja. Menurut Konsep BPS, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara sedang tidak bekerja dan pengangguran. Jumlah pengangguran di Kota Sukabumi sebesar 9,06 persen.

### **Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Manusia (IPM)**

Dibidang pendidikan, dapat dilihat dari salah satu indikator untuk mengukur angka partisipasi sekolah (APS) yaitu sebesar 99,36 persen untuk APS usia 7-12 tahun. Sarana yang menunjang pelayanan kesehatan di Kota Sukabumi sudah cukup baik dengan berdirinya 7 rumah sakit milik pemerintah maupun swasta

ditambah dengan 233 dokter praktek, 3 Puskesmas dengan pelayanan tempat inap, 20 unit Puskesmas pembantu dan 15 unit puskesmas keliling. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator dalam mengukur keberhasilan upaya pembangunan kualitas hidup manusia. IPM Kota Sukabumi pada tahun 2015 sebesar 71,84 yang termasuk ke dalam kategori tinggi.

### **Kondisi Pertanian**

Penggunaan Lahan di Kota Sukabumi dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah (lahan kering). Lahan sawah seluas 1.486 Ha, lahan bukan sawah yang terdiri dari lahan pekarangan/rumah, tegal/kebun, kolam/tebat/empang dan lainnya seluas 3.314 Ha. Lahan sawah di Kota Sukabumi menghasilkan beberapa komoditas pertanian seperti padi sawah, palawija, sayuran, tanaman hias dan tanaman obat-obatan. Berikut ini adalah komposisi luas lahan sawah dengan rumah tangga usaha pertanian.

Tabel Komposisi Luas Lahan Sawah dengan Rumah Tangga  
Usaha Pertanian Tahun 2013

Kecamatan	Luas Lahan Sawah (Ha)	RTUP Pengguna Lahan Jumlah	Petani Gurem		Jumlah RTUP per Hektar Sawah	Rata-rata Penguasaan lahan Sawah
			Jumlah	%		
Baros	244.92	913	774	84.78	3.73	0.27
Lembursitu	355.59	1723	1452	84.27	4.85	0.21
Cibeureum	485.5	1199	889	74.15	2.47	0.4
Citamiang	63.22	323	283	87.62	5.11	0.2
Warudoyong	242.05	690	503	72.9	2.85	0.35



Gunungpuyuh	81.32	383	312	81.46	4.71	0.21
Cikole	83.94	370	308	83.24	4.41	0.23
Jumlah	1556.54	5.601	4.521	80.72		

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi. 2014. *Potret Usaha Pertanian Kota Sukabumi Menurut Subsektor*

Hasil produksi padi tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 7,19 % dibanding tahun 2014, yaitu dari 23.358 ton menjadi 25.168 ton pada tahun 2015. Sedangkan hasil tanaman palawija mengalami penurunan. Komoditas palawija yang terbanyak adalah ketela pohon sebanyak 331 ton, jagung 304 ton dan kacang tanah 304 ton. Tanaman hortikultura jenis buah-buahan memiliki produksi yang terbanyak yaitu 835 kuintal, alpukat 511 kuintal, mangga 466 kuintal dan sawo 7 kuintal. Produksi hortikultura terbanyak adalah kangkung 2.117 ton, petsai/sawi 1.272 ton, ketimun 921 ton dan kacang panjang 551 ton. Potensi tanaman hias di Kota Sukabumi pada tahun 2015 adalah krisan 58.000 tangkai. Komoditas obat-obatan produksi terbanyak adalah jahe 148.700 kg dan kunyit 22.680 kg. Sedangkan potensi peternakan di Kota Sukabumi pada tahun 2015 adalah sapi sebanyak 6.418 ekor, kerbau 224 ekor, kuda 39 ekor, kambing 114 ekor, domba 7.325 ekor.

## SIMPULAN

Lahan Lestari merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional (UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). LP2B ini dikenal juga dengan lahan lestari. Menurut Sudrajat (2015) strategi jangka pendek

yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah konversi lahan lahan pertanian adalah dengan mengimplementasikan penetapan lahan pertanian abadi pada tiap daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2009.

Selanjutnya menurut Rantini dan Prabatmodjo (2013) salah satu upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian adalah perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kebijakan ini sangat berkaitan dengan petani yang merupakan faktor kunci dalam mensukseskan implementasi kebijakan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan berikut insentif dan disinsentifnya, karena petani merupakan pelaksana sekaligus penerima manfaat kebijakan itu.

Pemerintah kota Sukabumi mengalami kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Lahan Pangan Lestari dan Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

1. Kurangnya Kemampuan daerah secara finansial untuk mempertahankan atau membeli lahan pertanian yang telah dipetakan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan maupun Lahan Pangan Lestari.
2. Kondisi ekonomi masyarakat petani di kota Sukabumi yang memaksa mereka untuk melepas kepemilikan tanah kepada para investor dikarenakan tidak adanya alternative yang ditawarkan oleh pemerintah.
3. Tidak jarang Ketua kelompok tani justru menjadi kaki tangan dari para calo tanah yang menekan para petani untuk menjual sawah kepada investor.

4. Kurangnya perlindungan kepada para petani ketika mendapat intimidasi dari para pengembang/investor yang dengan sengaja menutup saluran irigasi hingga petani gagal panen bahkan tidak dapat melakukan kegiatan pertanian.
5. Tidak adanya perlindungan harga jual hasil pertanian / stabilitas harga jual produk pertanian terutama pada saat panen raya, sehingga membuat petani putus asa menjalani hidup sebagai petani dan memilih melepas sawah mereka kepada para investor.

Untuk mengatasi permasalahan ini, kiranya perlu ada bantuan dan perhatian dari pemerintah pusat agar pembangunan di kota Sukabumi juga daerah lain di Indonesia tidak merusak kelestarian sektor pertanian sebagai ciri khas bangsa dan negara Indonesia yang agraris.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2012. *Jawa Barat Dalam Angka*. Bandung
- Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi. 2013. *Kota Sukabumi Dalam Angka*. Kota Sukabumi
- Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi. 2012. *Kota Sukabumi Dalam Angka*. Kota Sukabumi
- Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi. 2014. *Potret Usaha Pertanian Kota Sukabumi Menurut Subsektor* (Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013). Kota Sukabumi
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi. 2013. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Sukabumi 2012*. Kota Sukabumi
- Creswell JW. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajahmada University Press. Yogyakarta

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta

Jones, Charles O. 1977. *An Introduction in Study of Public Policy*. Massachusetts. Duxburry Press. North Scituate

Rantini, R. Ratih Rantini dan Prabatmodjo, Hastu. 2014. *Tanggapan Petani Terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bandung*. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung*. Bandung B SAPPK V3N2 | 373- SAPPK V3N2 Hal 37 [sappk.itb.ac.id/jpwwk2/wp.../08/R.Ratih-Rantini.pdf](http://sappk.itb.ac.id/jpwwk2/wp.../08/R.Ratih-Rantini.pdf)

Sudrajat, Jajat. 2015. *Strategi Pengendalian konversi Lahan Pertanian untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Indonesia*. *Prosiding Konferensi Nasional XVII dan Kongres XVI Tahun 2014*. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI).Bogor.

Purwanti, Dian dan Fitri Yana, Yana Fajar. 2017. *Evaluasi Perda Nomor 11 tahun 2012 Tentang RTRW 2012-2031 Kota Sukabumi Ditinjau dari Persepsi Petani Terhadap Kebijakan Pengadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula. Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

### **Peraturan**

PP No. 1/2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.



## **Strategi Komunikasi dalam Pengembangan Kampung Wisata Karodangan Sepang Kota Serang**

**Rina Yulianti**

Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Untirta  
rina.yulianti@untirta.ac.id

### **ABSTRAK**

Kampung Karodangan diresmikan sebagai kampung wisata karena memiliki daya tarik tersendiri. Dimana Karodangan memiliki potensi sumber daya manusia kreatif, dan kaya khasanah makanan khas Kota Serang. Tujuan dibentuknya kampung wisata ini agar masyarakat Kampung Karodangan bisa lebih berkembang dan mampu berkarya lebih baik lagi. Pasalnya, sumber daya alam di Kampung Karodangan sangat berpotensi untuk dijadikan kampung wisata di Kota Serang. Selain itu juga kampung karodangan memiliki potensi kuliner, karena SDM nya mampu membuat makanan khas Banten seperti kue wingko, ketan bintul, arem-arem, sate bandeng, kue bugis, kue getuk, kue mento, kue gembeng kacang, kue jendral, kue kelepon, kue apem, kue naga sari pisang, bubur ratuban serta kue cucur. Hanya saja setelah di resmikan, kampung wisata karodang kurang di datangi oleh wisatawan. Hal ini sangat menarik untuk di teliti berkaitan dengan komunikasi yang di lakukan oleh pemerintah Kota Serang dan masyarakat karodangan di dalam mengembangkan kampung wisata karodangan, yang nantinya dapat membantu perekonomian masyarakat setempat. Selain itu bagaimanapun agar kampung wisata ini dapat lebih di kenal luas oleh masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dan hasil penelitian ini dapat menjadikan masukan bagi masyarakat Kampung Karodangan.

Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Pengembangan Kampung Wisata

### **PENDAHULUAN**

Setiap daerah mempunyai potensi yang dapat dikembangkan di dalam meningkatkan pendapatan daerahnya. Begitu juga dengan kota Serang yang berusaha menggali segala potensi yang ada dan dapat dikembangkan. Selain itu juga menjadi alternatif wisata selain kawasan Banten Lama. Pada bulan Agustus 2016 Walikota Serang meresmikan Kampung Wisata Karodangan di Kelurahan Sepang. Pembentukan kampung wisata ini juga merupakan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan mengangkat atau menggali kelebihan dari Kampung Karodangan. Dimana Kampung Karodangan ini memiliki sumber daya manusia yang ahli di dalam membuat makanan, sehingga bisa menjadi tempat kuliner yang di cari di Kota Serang, tujuan pembentukan kampung wisata ini oleh walikota agar masyarakat Kampung Karodangan bisa lebih berkembang dan mampu berkarya lebih baik lagi. Pasalnya, sumber daya alam di Kampung Karodangan sangat berpotensi untuk dijadikan kampung wisata di Kota Serang.

Menurut Walikota Serang, Tb Haerul Jaman, dalam peresmiannya menyebutkan kampung Karodangan ini memiliki banyak potensi alam yang baik dan memiliki tradisi yang kreatif. Seperti wisata perbukitan, ada lapangan, juga tradisi kesenian Banten seperti debus, bendrong lesung, ditunjang dengan kuliner khas Banten yang beragam. Dan masih banyak lagi yang bisa digali dari kampung ini.

Kampung wisata ini di buat agar tidak bergantung kepada pemerintah daerah. Dimana kampung ini dapat memberdayakan apa yang menjadi keunggulan di kampung tersebut. Sehingga dapat menjadi rujukan bagi kampung yang lain. Oleh karena itu pemerintah Kota Serang berharap Kampung Karodangan dapat menjadi kampung wisata yang mandiri. Untuk menjadikan sebuah kampung wisata tentu pemerintah Kota Serang tidak bisa begitu saja lepas di dalam pembinaan masyarakatnya. Untuk membuat Karodangan di kenal sebagai kampung wisata harus ada strategi yang di buat. Salah satunya adalah komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah Kota Serang sehingga dapat menjual apa yang menjadi kelebihan di Kampung Karodangan.

## **KAJIAN TEORI**

### **Komunikasi Pariwisata**

Komunikasi sangat diperlukan dalam penyampaian promosi kepariwisataan. Untuk memahami komunikasi secara lebih jelas, sering digunakan paradigma, Laswell. Dalam karyanya "*The Structure and Function of Communication in society*", Laswell mengajukan suatu paradigma, yaitu *who, say what, to whom, in which channel, dan with what effect*. Berdasarkan paradigma Laswell tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.

Secara etimologis, kata Pariwisata berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu "pari" berarti banyak, berkali-kali atau berputar-putar dan wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi, kata Pariwisata diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain. Maka dapat disimpulkan definisi Pariwisata adalah sebagai berikut (Yoeti, 1982:109): "Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam".

### **Definisi Kampung Wisata**

Kampung Wisata adalah salah satu ungkapan kehidupan manusia yang menyuguhkan tujuan wisata perkampungan. Dalam perwujudannya, kampung wisata hendaknya dapat memenuhi tuntutan- tuntutan yang ada baik yang



menyangkut fasilitas wisata, sirkulasi, dan pengolahan ruang luar yang memiliki banyak keanekaragaman.

Daerah tujuan wisata adalah kawasan atau daerah tertentu yang memiliki potensi seperti atraksi dan objek-objek wisata yang ditunjang oleh hubungan lalulintas, fasilitas kepariwisataan dan usaha-usaha pariwisata serta masyarakat menjadi kebutuhan wisatawan.

Tujuan wisatawan adalah untuk :

- a. Rekreasi/berlibur.
- b. Keperluan pengetahuan dan kebudayaan.

### **Perkembangan Kampung Wisata di Indonesia**

Perkembangan kampung wisata di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama dikarenakan banyaknya wisatawan yang ingin melakukan perjalanan wisata alam. contoh kampung di Indonesia yang dijadikan sebagai objek wisata seperti : Kampung Naga, di Kuningan Jawa Barat Kampung Naga, sebuah desa yang berada di Kampung Nagaratengah, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Berlokasi + 40 km atau 1 jam perjalanan (darat) dari Kota Tasikmalaya ke arah Barat menuju Kabupaten Garut. Kampung Naga merupakan kampung budaya yang menjadi salah satu potensi wisata Kabupaten Tasikmalaya selain potensi wisata lainnya. Visi Kabupaten Tasikmalaya yang menjadikan dasar religi yang islami untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan serta berkompetitif dalam bidang Agribisnis. Peran masyarakat lokal di kawasan Kampung Naga dilakukan sosialisasi setiap rencana pembangunan di Kampung Naga (atau

sekitar kawasan Kampung Naga). Selain itu, adanya musyawarah bersama antara masyarakat Kampung Naga semakin meningkatkan peran masyarakat adat setempat dalam perencanaan pembangunan. Pola pemukiman Kampung Naga merupakan pola mengelompok yang disesuaikan dengan keadaan tanah yang ada dengan sebuah lahan kosong (lapang) di tengah - tengah kampung. Pola perkampungan seperti Kampung Naga bisa jadi merupakan prototype dari pola perkampungan masyarakat Sunda, walaupun di sana sini terjadi perubahan. Adanya kolam, leuit, pancuran, saung lisung, rumah kuncen, bale, rumah suci, dan sebagainya, menunjukkan ciri-ciri pola perkampungan Sunda.

### **Karakter Kampung Wisata**

Kampung wisata merupakan sebuah potensi pariwisata yang dapat menunjang perekonomian suatu daerah tertentu. Kampung wisata dapat dikatakan sebagai suatu daerah yang berpotensi wisata jika mempunyai suatu keunikan di daerah tersebut berupa kehidupan keseharian masyarakat setempat, adat istiadat, kebudayaan setempat yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.'

Beberapa karakter yang mendukung keberhasilan suatu kampung wisata adalah sebagai berikut:

- a) Sasaran wisatawan. Semakin banyak wisatawan yang datang, semakin informasi tentang daerah wisata berkembang keseluruh dunia.
- b) Lokasi. Lokasi yang memiliki potensi wisata yang menarik bisa menjadi daya tarik bagi para wisatawan.
- c) Fasilitas wisata. Fasilitas menjadi pelengkap bagi para wisatawan yang dapat dinikmati dan menjadi objek wisata yang menimbulkan atraksi wisata.

- d) Bangunan dan suasana harus memiliki sesuatu yang berbeda sesuai dengan karakter pariwisata daerah setempat.
- e) Citra. Sebuah kampung wisata merupakan gambaran karakter dari kampung itu yang membentuk identitas unik dan khas dapat dibentuk dengan menghadirkan nuansa pedesaan dan budaya setempat serta tradisi lokal kedalam kampung wisata.

Kampung wisata akan berkembang dengan baik jika didukung oleh masyarakat serta aparat desa dan juga adanya promosi yang baik.

### **Strategi Pengembangan Komunikasi**

Potensi wisata yang dimiliki oleh Provinsi Banten, seharusnya bisa menjadi andalan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dimana sektor pariwisata bisa menjadi salah satu penopang pemasukan daerah. Di era yang semakin maju maka banyak cara dan strategi untuk mengangkat potensi wisata di suatu daerah. Masing-masing daerah memiliki kekhasan atau keunikan serta alam maupun sosio kultural dan aspek lainnya. Desa memiliki segudang potensi yang bisa diangkat menjadi komoditas dan dipoles dengan manajemen strategi yang tepat untuk menjadi desa wisata.

Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*management communication*) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu, bergantung kepada situasi dan kondisi. Dengan demikian, strategi

komunikasi mempunyai fungsi ganda. *Pertama*, menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang maksimal dan optimal. *Kedua*, menjembatani kesenjangan budaya (*cultural gap*) akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya. (Effendi, 2002:29).

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan dibidang kepariwisataan maka Kampung Karodangan di nilai oleh pemerintah daerah memiliki ke khasan untuk di angkat menjadi kampung wisata. Dimana kampung ini memiliki wisata alam yang masih asri dan daerah yang berbukit serta memiliki kuliner makanan yang banyak, dan tidak ketinggalan dengan keseniannya.

Di dalam pengembangan kampung wisata ini pemerintah daerah memiliki peran penting di dalam membantu masyarakat di dalam pengembangannya. Bagaimanapun orang akan datang ke tempat wisata kalau tempat tersebut mempunyai ke khasannya, serta adanya promosi dan di tunjang dengan infrastruktur yang bagus. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memiliki strategi serta arah dan tujuan yang jelas. Untuk mencapai ini, pemerintah setempat merasa memerlukan adanya kegiatan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat. Strategi komunikasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat citra yang bagus mengenai kampung karodangan dengan mengangkat kelebihan yang dimiliki oleh kampung tersebut sehingga layak menjadi kampung wisata.
- 2) Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan

karodangan sebagai kampung wisata.

- 3) Meningkatkan komunikasi serta koordinasi
- 4) Memberikan dukungan terhadap upaya penataan dan penciptaan objek dan daya tarik kampung wisata tersebut

## **PEMBAHASAN**

Keberadaan kampung wisata di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, begitu juga di Provinsi Banten. Dengan adanya kepedulian dari pemerintah daerah serta masyarakatnya dalam mengembangkan kampung wisata, sehingga mampu merangsang perekonomian dan untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat Kampung Karodangan.

Kampung Karodangan merupakan salah satu dari kampung wisata yang ada di Banten. Kampung karodangan terletak di Kelurahan Sepang Kecamatan Taktakan Kota Serang, sebagai kampung wisata Karodangan memiliki daya tarik dengan alamnya serta tempatnya yang perbukitan, selain itu kulinernya yang khas Serang dan kesenian yang dimiliki juga menjadikan Karodangan dianggap memiliki daya tarik.

Daya tarik wisata ini hendaknya yang akan dijual kepada wisatawan. Kampung wisata identik dengan pemandangan alamnya serta budaya yang khas dari kampung tersebut. Hal ini dijumpai di Kampung Karodangan hanya saja di dalam penataan dan pengelolaannya belum terlaksana sesuai kampung wisata pada umumnya. Disini penulis melihat peran pemerintah daerah kurang di dalam mempromosikan Kampung Karodangan, pasca setelah diresmikan oleh bapak

walikota Chaerul Jaman. Kurangnya komunikasi juga terlihat dari pengembangan kampung wisata ini, bagaimana masyarakat dapat mengembangkan kampung mereka jika tidak ada bantuan dari pemerintah daerah setempat, baik dari pembinaan untuk kuliner maupun kelebihan alam yang dimiliki.

### **Setelah Peresmian Tanpa Ada Penataan**

Setelah peresmian yang dilakukan oleh Bapak Walikota Serang, kampung Wisata Karodangan tidak menampakkan seperti kampung wisata yang seharusnya menjadi tujuan wisata alternatif yang ada di Kota Serang. Sehingga seperti kampung biasa yang ada di sekitarnya. Padahal Kampung Karodangan mempunyai potensi dengan kulinernya. Masyarakatnya dikenal pembuat kue dan masakan. Serta alamnya yang perbukitan.

Hanya saja sarana sebagai penunjuk arah ke lokasi kampung wisata karodangan tidak difasilitasi dengan sarana yang memadai, salah satunya adalah penunjuk jalan yang menujuk dan menandakan adanya kampung wisata yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Serta diberikannya pembinaan di dalam pengelolaan terkait kuliner yang menjadi andalan Kampung Karondangan.

Kampung Karodang memiliki dua daya tarik hingga akhirnya ditetapkan sebagai kampung wisata. Dua hal itu adalah kuliner dan seni budaya. Dari sekitar 120-an rumah tangga di kampung itu, sekitar 25 diantaranya memproduksi kuliner tradisional seperti arem-arem, bubur sumsum, bacang, gembeng mento, dan makanan jenis lain. Produk itu cukup unggul karena kerap dipesan sejumlah pedagang kuliner tradisional di Ibukota Provinsi Banten. Hanya saja di dalam perkembangannya Kampung Karondangan sebagai kampung wisata tidak terdengar

lagi, untuk membuat Karodangan di kenal kembali dengan kelebihan budaya dan kulinernya di butuhkan strategi yang lebih dan komunikasi dua arah serta media untuk mempromosikannya, agar penetapan Kampung Karodangan sebagai kampung wisata dapat menjadi kelebihan yang di miliki oleh masyarakatnya.

## **SIMPULAN**

Tujuan di bentuknya Kampung Karodangan karena kampung ini dianggap memiliki kelebihan dari segi budaya, kuliner dan alamnya. Untuk membuat sebuah kampung wisata menjadi tempat wisata andalan tidaklah mudah dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Serang di dalam memajukan dan mempromosikan dengan gencar Kampung Karodangan sebagai tempat yang bisa menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk berkunjung. Tidak saja hanya sebatas menetapkan sebagai kampung wisata tapi juga perlu ada pembinaan serta pemberdayaan masyarakat setempat serta promosi terkait kampung wisata Karodangan. Selain itu strategi komunikasi juga di lakukan dengan menjalin kerjasama dengan dinas pariwisata Kota Serang.

## **Daftar Pustaka**

- Effendy, Onong Uchjana, 2003, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Larson. Carl E. dan Goldberg. Alvin. *Komunikasi Kelompok: Proses-proses Diskusi dan Penerapannya*. UIP, Salemba Jakarta
- Lasswell, Harold (1948). Bryson, L., ed. *The Structure and Function of Communication in Society. The Communication of Ideas*. New York: Institute for Religious and Social Studies.

Nasution, Zulkarimen, 2007, *Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori dan Penerapannya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.  
Yoeti, A. Oka. 1985, *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: angkasa





## **Komunikasi Guyub Dalam Pembangunan Swadaya Masyarakat Walantaka Kota Serang**

**Nina Yuliana**

Prodi Ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Untirta

nina.yuliana@untirta.ac.id

### **ABSTRAK**

Komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat penting bagi tumbuhnya pembangunan partisipatif. Namun, pada prakteknya tidak sedikit masyarakat yang harus mencari cara sendiri untuk mendapatkan kesejahteraannya, yaitu melalui pembangunan swadaya. Hal itu dilakukan ketika masyarakat merasa pemerintah tidak dapat melaksanakan tugasnya. Salah satu masyarakat yang berusaha membuat sistem pembangunan swadaya dengan memanfaatkan komunikasi guyub-nya yaitu masyarakat Kecamatan Walantaka Kota Serang. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat guyub, komunikasi guyub, dan bagaimana hal itu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya. Dengan penelitian etnografi dan teori konstruksi sosial atas realitas, diperoleh hasil penelitian bahwa sifat guyub, komunikasi guyub dan pelaksanaannya dalam pembangunan swadaya terpusat pada apa yang disebut delapan prosesi hajat, dan di dukung secara maksimal oleh kelompok-kelompok sosial yang terbentuk di luar hajat, sehingga definisi kesejahteraan yang ditargetkan tiap individu dalam masyarakat sebagai suatu sistem tercapai.

**Kata Kunci:** Komunikasi Guyub, Kesejahteraan Masyarakat, Pembangunan Swadaya

### **PENDAHULUAN**

Komunikasi yang tidak baik atau tidak terjadi antara berbagai pemangku kepentingan dalam sebuah aturan pembangunan partisipatif (terutama di desa) kerap kali membuat masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan menjadi korban. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak didasarkan

komunikasi (musyawarah) dari tingkat desa tidak pernah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Padahal, otonomi daerah memberlakukan aturan UU No. 32 tahun 2004 agar perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah melalui musyawarah yang dilakukan dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota.

Di saat pemerintah tidak memahami pentingnya komunikasi di antara berbagai pemangku kepentingan dan menghasilkan kebijakan yang tidak didasarkan keberpihakan pada rakyat, masyarakat Walantaka sebagai manusia yang kreatif justru berhasil membuat sebuah sistem pembangunan swadaya berdasarkan pemahaman pentingnya komunikasi dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan yang didasarkan pada pemanfaatan modal sosial dan budaya yang dimiliki dalam bentuk komunikasi guyub. Komunikasi guyub menjadi kerangka inti dalam proses pembangunan internal mereka yang sejauh ini dianggap efektif sebagai solusi dari berbagai masalah dari kebutuhan yang dijadikan sebagai kebutuhan bersama yang tidak bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan dari warga lain

## METODE PENELITIAN

### **Metode Etnografi dan Teori Konstruksi Realitas**

Menurut Harris (dalam Cresswell, 1998:58) etnografi adalah deskripsi dan interpretasi atas suatu budaya untuk mendapatkan pola atau aturan budaya. Menurut Seville-Troike, tujuan utama etnografi adalah menghimpun data deskriptif dan analisis tentang bagaimana makna-makna sosial dipergunakan dalam konteks

komunikasi atau ketika makna dipertukarkan dalam struktur interaksi sosial yang mempengaruhi bahasa, dan kebudayaan dalam kosa kata bahasa (Kuswarno, 2011: 15). Etnografi berusaha untuk menemukan bagaimana masyarakat mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran mereka dan kemudian menggunakan budaya tersebut dalam kehidupan berdasarkan susunan pikiran anggota masyarakat melalui praktek komunikasi budaya.

Tujuan yang senada diungkapkan oleh teori konstruksi sosial atas realitas. Teori ini didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif, atau tentang aktivitas manusia dalam kehidupan dirinya sendiri ataupun kehidupan sosial. Konstruksi sosial menurut Jergen (dalam Littlejohn, 2001: 163 - 164) bahwa “Realitas dikonstruksi melalui proses interaksi dalam grup, komunitas/masyarakat dan budaya.” Berger & Luckmann (2012: 176-177) juga mengatakan bahwa “realitas sosial eksis dengan sendirinya dan struktur dunia sosial bergantung pada manusia yang menjadi subyeknya” (dalam Kuswarno, 2009: 111).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Deskripsi Umum Masyarakat Kecamatan Walantaka**

Kecamatan Walantaka memiliki 16 kelurahan, yaitu Beberan, Cigoong, Kalodran, Kepuren, Keserangan, Kiara, Lebakwangi, Nyapah, Pabuaran, Pageragung, Pasuluhan, Pengampelan, Pipitan, Tegalsari, Teritih, dan Walantaka.

Dengan pekerjaan 23% diindustri dan 8,5% dipertanian<sup>1</sup>. 23% diindustri didefinisikan sebagai buruh pabrik di daerah keragilan, Tambak, Cikande, Sentul dan sekitarnya dengan rata-rata lulusan SD dan paling tinggi SMP. Data diperoleh dari identifikasi bahwa syarat masuk pabrik seperti Nikomas, Staedler, dan Indah Kiat dengan ijazah minimal SMU banyak tidak dipenuhi. Menjadi rahasia umum bagi warga setempat kalau mereka yang ingin bekerja harus ‘tembak’ atau ‘merekayasa’ ijazah orang lain. Pekerja yang banyak dicari adalah perempuan, karena dianggap lebih tekun, penurut dan sangat murah.<sup>2</sup>80% anak perempuan dan ibu-ibu muda bekerja sebagai buruh pabrik di Cikande dan Keragilan, sedangkan laki-laki usia produktif lebih banyak pekerja serabutan.<sup>3</sup> Kerjasama suami istri untuk memenuhi kebutuhannya, dan atau lebih banyak istri/perempuan yang bekerja untuk membantu orang tua, suami, atau menjadi tulang punggung keluarga menjadi hal yang umum.

Pekerja serabutan atau pengangguran terselubung mengandalkan hidup sebagai buruh tidak tetap diberbagai pekerjaan kasar seperti menjadi tenaga sewa di sawah, penjaga kebun, kuli bangunan, dan pedagang musiman. Kecilnya prosentase petani (8,5%) dari jumlah penduduk 75.681 orang dan luas 47,88 Km<sup>2</sup>, disebabkan tanah penduduk pribumi telah banyak berpindah tangan kepada orang luar seperti Jakarta, baik pengusaha Cina, pribumi, maupun pejabat untuk dibangun menjadi rumah makan, bumi perkemahan, gudang perusahaan, rumah sakit gila, kompleks perumahan, dan lainnya.

---

<sup>1</sup> BPS Kota Serang 2010

<sup>2</sup>Wawancara dengan Ibu Mumun Supervisor di Nikomas asal Nyapah.

<sup>3</sup> Wawancara dengan berbagai informan

Masyarakat Walantaka memiliki tuntutan kebutuhan hidup yang tinggi dan diantaranya tidak bisa dihindari, seperti hajat, selamatan (tujuh bulan, cukuran, kirim do'a, dan lainnya), dan membangun rumah. Meskipun demikian, seperti dinyatakan Hamijoyo (1993: 13), bahwa "Setiap masyarakat akan memiliki sistemnya sendiri – sendiri, maka dengan sendirinya demi kelangsungan hidupnya, setiap masyarakat dapat membentuk kebudayaannya. Faktor-faktor kultural dan struktur sosial dalam masyarakat, seperti Indonesia dikenal dengan gotong royong"<sup>4</sup>. Kebutuhan ditengah kesulitan yang ada menempatkan masyarakat Walantaka yang memiliki kemauan atau itikad baik, komitmen moralitas, dan kejujuran mampu menghasilkan kebersamaan sebagai sifat *guyub (togetherness, commonality)* dalam mengartikan atau mempersepsikan sesuatu dan cara memecahkan masalah atau kesulitan.

### **Sifat Guyub sebagai dasar Komunikasi pembangunan Masyarakat Walantaka**

#### a. Menikah berdasarkan kekerabatan dan atau Tempat

Dari 20 informan yang diperoleh secara acak<sup>5</sup> dalam rentang usia 17 – 30 tahun, diperoleh kondisi tingkat pendidikan; 18 laki-laki lulusan SD, 1 lulusan SMP dan 1 lulusan SMU. Dari kelompok perempuan, diperoleh 10 lulusan SD, 4 tidak sampai lulus SD, 4 pernah menduduki bangku SMP namun tidak lulus, dan 2 lulus SMP. Kondisi ini tidak signifikan berubah pada anak era sekarang, meskipun terdapat SD - SMU gratis. Setelah lulus SD banyak gadis yang hanya menghabiskan

---

<sup>4</sup>Badan Pekerja Panitia Tujuh Pembakuan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. 1995. Kamus Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hlm. xi

<sup>5</sup>Selama dua hari peneliti bertanya kepada pembeli yang datang ke warung dengan memperhatikan batasan usia dan asal kampung, hingga mencapai jumlah 20 orang.

waktu di rumah atau ke pesantren tradisional dan menyebabkan remaja putera dan puteri memilih menikah atau dinikahkan muda karena orangtua memiliki keterbatasan ekonomi dan ingin melepas beban kepada mantu. Selain prinsip “bibit, bebet dan bobot“, rendahnya tingkat pendidikan juga berimbas pada keterbatasan pilihan tempat dan jenis pekerjaan melanggengkan pernikahan satu ikatan darah atau tempat baik dengan kerabat atau tetangga, dengan prinsip makan tidak makan yang penting kumpul sebagai inti dari mempererat silaturahmi, dan persaudaraan.

b. Pola Kekerabatan dan Prinsip ‘Harus Kumpul’

Pola kekerabatan khas masyarakat desa adalah ‘Harus Kumpul’. Budaya kolektif menghasilkan prinsip “harus kumpul”. Kumpul dalam definisi satu keluarga, maupun kumpul secara umum, yaitu dengan banyak orang dari berbagai kampung, saudara, teman, tetangga, yang dikenal atau yang tidak dikenal. Kumpul satu keluarga antara orang tua dan anak dilakukan dengan cara hidup berkumpul dalam satu rumah bagi yang kurang mampu, dan masing-masing membangun rumah di dekat rumah orang tua, terutama bagi anak perempuan, bagi yang mampu.<sup>6</sup>

Penjabaran prinsip ini terlihat pada terbentuknya gugus rumah pada tiap kampung. Terbentuknya kampung dapat dimulai pada satu keluarga inti. Keluarga inti yang telah memiliki anak dewasa menikahkan dan membuatkan rumah di sebelah rumahnya, begitu juga dengan anak kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan hingga kedua belas. Pola yang sama dilakukan pada generasi berikutnya, berikutnya, dan berikutnya hingga tidak terhingga, meluas kepada pembentukan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan H. Sayuti pada tanggal 15 Mei 2015

kampung- kampung yang saling berdekatan karena pemecahan wilayah secara administratif pemerintahan.

c. Hasrat untuk berhubungan dalam banyak kelompok sosial dan keagamaan

Hasrat untuk berhubungan sebagai penerapan dari sifat guyub yang dimiliki dapat terlihat dari: (1). Maraknya kelompok arisan dan kreditbaik uang maupun barang sebagai cara kreatif untuk mendapatkan barang dan uang dengan saling berbagi. Bungin(2006: 4) mengatakan, “Individu manusia menjadi penentu utama dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasar kehendaknya dan menjadi mesin produksi sekaligus reproduksi yang kreatif”.<sup>7</sup>Interaksi sosial guyub terjadi karena pada kelompok arisan memiliki waktu tertentu dimana para anggota harus berkumpul, saling bertemu, bersilaturahmi dan berbagi informasi kurang lebih 1 - 2 jam. Hubungan nonformal secara individual dan kelompok juga terjadi diantara anggota kelompok arisan barang saat bertemu secara individual baik sengaja maupun tidak sengaja seperti di pengajian, di sekolah anak, di warung sayur, maupun di paguyuban. Hal itu seperti yang dijelaskan oleh Isabella Santini dan Anna De Pascale (dalam Amelia, 2015: 319), bahwa “Adanya hubungan yang kuat antara modal sosial dan kesejahteraan ekonomi rumah tangga”.

(2). Pengajian Lintas Kampung. Senang hiburan dangdut, dan gemar datang ke pengajian. Dua hal yang terlihat kontras, tetapi intinya adalah karena masyarakat Walantaka senang hidup guyub sebagai konsep diri. Konsep diri dipaparkan oleh Mulyana (2008: 76) sebagai berikut: “Perilaku manusia merupakan produk penafsiran individu atas obyek disekitarnya dengan pemaknaan yang berasal dari

---

<sup>7</sup> Katalog Rumah Arisan Mapan 2016



interaksi sosial dan dapat berubah selama interaksi berlangsung”. Terdapat tiga jenis pengajian pada masyarakat Walantaka Kota Serang, yaitu pengajian khusus ibu-ibu, pengajian khusus bapak-bapak, dan pengajian gabungan. Istimewanya dalam sifat guyub, ketiga pengajian ini dibuat jadwal agar antara satu mushola atau mesjid dari kampung satu dan kampung lainnya agar tidak bentrok sehingga dapat saling bergantian menghadiri pengajian. Karena itu, jaringan ini menghasilkan jaringan sosial dan komunikasi dengan istilah ‘partisipasi’ pada budaya hajat setempat.

(3). Kelompok Bank. Kegiatan kelompok guyub lainnya adalah kelompok kredit bank yang hadir pada tahun 2012.<sup>8</sup> Satu kelompok minimal terbentuk delapan orang pada tiap satu RT, dan bergabung dari RT lain jika tidak mencukupi. Sifat guyub ditengarai dari wajib hadirnya peminjam dalam setiap jadwal pertemuan. Ketidakhadiran anggota akan menyebabkan setiap orang dalam kelompok menanggung denda. Karena itu komunikasi dan hubungan baik selama kebersamaan 1 – 3 tahun di antara anggota kelompok harus sangat dijaga karena kebersamaan dalam kelompok dirancang hingga mencapai puluhan tahun karena jumlah limit dana pinjaman yang semakin tinggi hanya dapat diperoleh seiring dengan lamanya keanggotaan.<sup>9</sup>

(4). Paguyuban. Paguyuban menjadi realitas yang dianggap setingkat dengan hajat sebagai budaya *mainstream*, meskipun baru hadir tahun 2009. Hal itu terbukti dari masuknya paguyuban sebagai prosesi hajat yang sudah dilakukan sejak nenek moyang, menjadi delapan prosesi. Empat keanggotaan paguyuban menjadi hal biasa

---

<sup>8</sup> Cara yang sama dilakukan oleh kelompok kredit barang. Pemilik mengangkat 1 orang warga menjadi ketua kelompok dengan minimal 10 orang anggota. Ketua kelompok mendapat jatah satu barang gratis yang telah ditentukan oleh pemilik modal.

<sup>9</sup> Wawancara dengan ibu Tini dan ibu Siah ketua kelompok di Cimareng dan Nyapah

karena dapat memperoleh uang yang lebih banyak, juga relasi dan jaring komunikasi yang lebih luas. Satu paguyuban yang diikuti 70 – 100 orang menghasilkan rata-rata relasi dan jaring komunikasi 280 – 400 orang. Paguyuban berdasarkan ikatan darah membuat asal anggota dalam satu kelompok paguyuban menjadi sangat luas, tidak saja berasal dari satu kampung, tetapi dari berbagai kampung. Setiap anggota dari kampung berbeda menceritakan kepada teman, keluarga, kerabat dan tetangga satu dan antar kampung yang ditemuinya. Berdasarkan cerita tersebut banyak paguyuban didirikan diberbagai wilayah sesuai. Demikian seterusnya siklus dari pada perkembangan dan pertumbuhan paguyuban baik dari jumlah maupun variannya. Awal dasar alasan didirikannya paguyuban adalah untuk memperoleh modal hajat, yang kemudian berkembang menjadi pemenuhan berbagai kebutuhan lainnya.

d. Hajat, bukan resepsi

Di Kota Serang seperti di kelurahan Lebak Wangi Kecamatan Walantaka “hajat”, secara tegas dibedakan dengan resepsi yang didefinisikan bersenang-senang, bermewah-mewahan dan dinilai sombong.<sup>10</sup> Hal demikian seperti Kuswarno (2009: 111) dan McQuail (2011: 110) jelaskan bahwa realitas sosial menekankan kemungkinan untuk tindakan dan juga pilihan yang dibuat dan diberikan makna oleh aktor manusia secara sosial sebagai mesin produksi sekaligus reproduksi yang kreatif (Bungin, 2006: 4). Hajat didefinisikan masyarakat dengan bergotong royong dalam memenuhi kebutuhan besar yang dianggap sebagai kebutuhan bersama yang rencanakan bersama dengan sistem partisipasi yang saling

---

<sup>10</sup> Hasi wawancara dengan Ibu Ayu asal Cibogo - Walantaka

bergantian dengan beberapa aturan seperti minimal menggelar hajat 5 – 8 tahun, rajin menolong orang lain yang hajat dengan saling menyimpan uang dan berbagai barang kebutuhan hajat seperti rokok, beras, ikan, daging ayam atau kerbau, mi instan, bumbu, minyak, kopi, air mineral gelas, sohun, kerupuk, andong ngarak, dan lainnya. Selain itu, dukungan moral seperti saling menjadi juru bicara bagi warga yang menggelar hajat (*advocators consumens*), pos informasi, dan lainnya kepada jaring informasi dan sosial yang dimiliki pada kelompok-kelompok sosial yang diikuti agar 1500 – 5000 undangan dapat disebar dan hadir dengan hasil hajat puluhan hingga ratusan juta rupiah yang digunakan sebagai modal hajat, dan sisanya untuk kebutuhan besar lain seperti modal, investasi, dan membangun rumah agar kesejahteraan warga tercapai atau meningkat. Hal itu sebagaimana Mann Wann (dalam Field, 2014: 196 – 197) katakan, bahwa keanggotaan jaringan dan seperangkat nilai bersama dapat menciptakan sistem kesejahteraan dan bantuan timbal balik.

### **Komunikasi Guyub Masyarakat Kecamatan Walantaka Kota Serang**

#### **1. Sistem Jaring Sosial dan Jaring Komunikasi khas Masyarakat Walantaka**

Paguyuban menjadi ciri khas masyarakat yang memiliki Walantaka sejak tahun 2009 di Kampung Cimareng Desa lebak Wangi, diadopsi dari paguyuban di Pasar Induk Kramat Jati. Satu paguyuban beranggotakan 40 hingga 100 orang dengan kapasitas individu rata-rata ikut 2 – 6 paguyuban atau hingga 500 orang sebagai jaring komunikasi dan sosial sebagai modal sosial untuk mendapatkan modal material dan moral bagi hajat dan keperluan besar lain dengan sistem gotong royong saling bergantian. Lima ratus orang adalah jumlah yang tidak sedikit untuk

diundang dalam sebuah hajat. Jika di dalam paguyuban pengumuman calon penarik selalu dilakukan tiga kali berturut-turut dalam setiap penarikan sebelumnya, maka secara formal berarti 12 kali pengumuman telah dilakukan pada empat tempat yang berbeda. Jika gema gethok tular informasi dari satu orang dapat mencapai 17 kali lipat, maka jumlah gema yang didapat dari keanggotaan paguyuban mencapai hingga 4280 gema yang akan terus bertambah dengan interaksi dan komunikasi hingga hari setelah hari hajat digelar. Fukuyama (2002) mengatakan bahwa “modal sosial juga menunjuk pada kemampuan orang untuk berasosiasi dengan orang lain yang bersandar pada norma-norma dan nilai bersama dan menghasilkan kepercayaan yang pada gilirannya memiliki nilai ekonomi yang besar dan terukur dengan tiga parameter *trust*, *norms* dan *networks*.” *Trust*, reputasi dan sanksi informal merupakan pengganti yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem legalitas dan sanksi formal, selain modal sosial juga berfungsi sebagai penyalur informasi yang berguna bagi pencapaian tujuan individual maupun kelompok. Semakin banyak jaring komunikasi yang dimiliki, semakin luas dan lengkap informasi tentang *sokhibul hajat* yang tersebar keberbagai khalayak sasaran, semakin besar kepercayaan dan reputasi yang diperoleh.

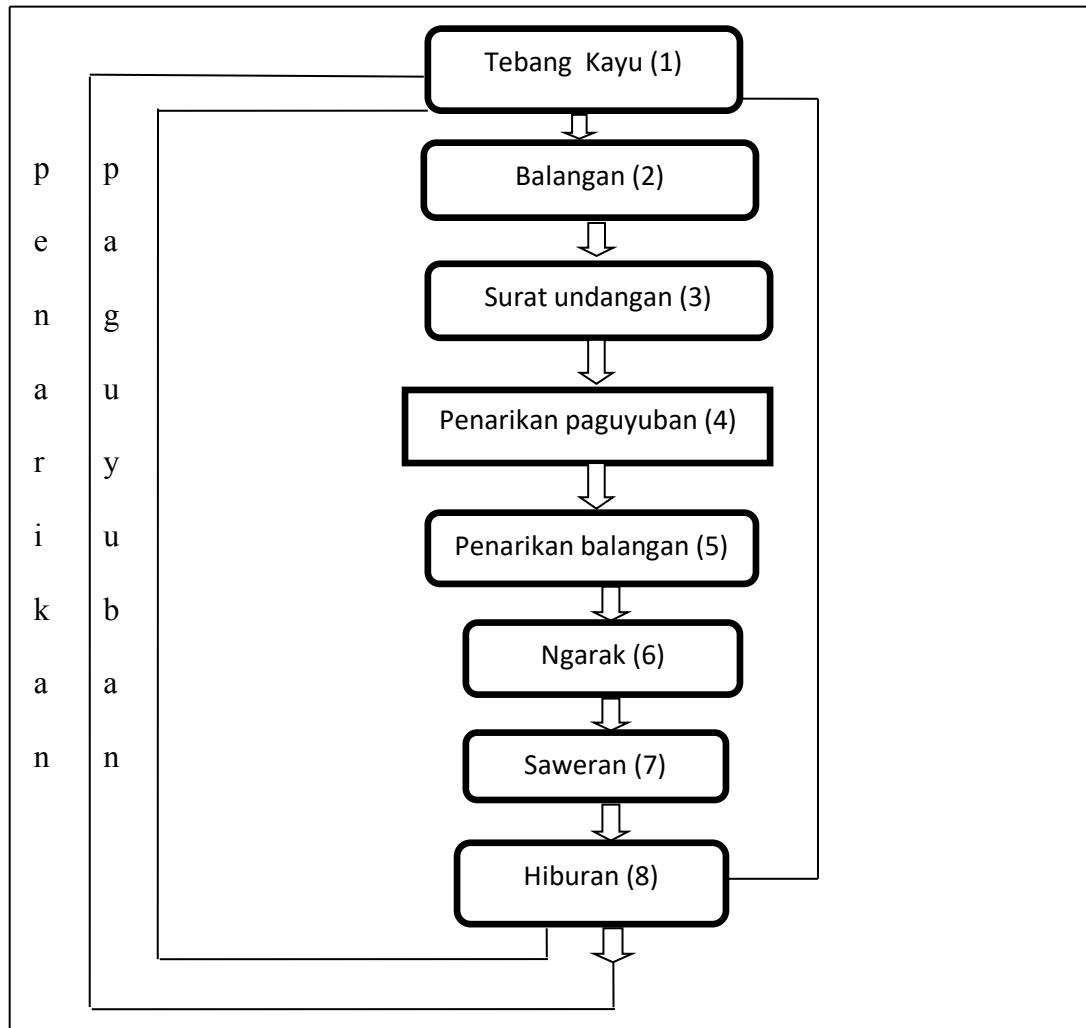
Jika tiap minggu satu warga mendapatkan 7 – 13 undangan, maka dalam satu tahun sudah dapat menyimpan barang atau uang kepada 1680 orang. Ditambah jumlah teman paguyuban sebanyak 600 orang, maka calon *sokhibul hajat* maksimal dapat mengundang orang hingga 2280 orang. Oleh karena itu tidak heran jika masyarakat setempat biasa mengundang 2000 – 3000 orang, bahkan diantaranya hingga mencapai 4000 – 5000 undangan.

## **2. Delapan Prosesi Hajat sebagai wadah berjenjang perencanaan partisipatif warga**

Untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi yang kuat dari masyarakat terhadap kebutuhan seseorang, maka setiap warga harus merasa dilibatkan agar timbul suatu rasa tanggung jawab bersama seluruh masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan anggotanya. Perencanaan partisipatif sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki warga dengan cara saling memberi dan menerima untuk mencapai tujuan keadaan sosial yang lebih baik sesuai apa yang menjadi kebutuhan individu anggota diawali dari kesadaran bahwa hal yang mungkin dari kondisi mereka adalah saling ketergantungan semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Karena itu, musyawarah perencanaan setiap tahap dalam hajat dibuat berjenjang sebagai delapan prosesi, yang dilakukan tiga bulan sebelum hajat digelar sebagai wadah silaturahmi dan musyawarah untuk membuat sebuah rancangan rencana yang dibahas dan dikembangkan bersama semua pelaku pembangunan swadaya (*stakeholders*) dari semua warga seperti keluarga besar, kerabat, tetangga, teman, dan aparat desa. Secara tertulis, hal itu terlihat disurat undangan dalam kelompok turut mengundang dan pengangkat hajat dengan jumlah mencapai lebih dari 100 orang. *Stakeholders* pembangunan dijelaskan oleh Wrihatnolo (2006:160), yaitu penyelenggara negara, masyarakat dan kaum rohaniwan, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan lain-lain.

Musyawarah partisipatif dalam perencanaan pembangunan secara swadaya di Kecamatan Walantaka telah menjadi tradisi masyarakat dari zaman dahulu dan

semakin terus berkembang di zaman sekarang dengan berbagai bentuk variasi dan kreatifitasnya yang memanfaatkan pengenalan oleh pelaku pembangunan (masyarakat) mengenai potensi *riil* yang dimilikinya, yang dirangkum menjadi sebuah sistem terbuka dalam delapan prosesi hajat sebagai berikut:



Gambar Delapan prosesi hajat masyarakat Walantaka

Sumber : Diolah dari berbagai data penelitian

Keterangan :

1. Tebang kayu : Prosesi menebang beberapa ranting kayu atau kebutuhan seluruh kayu untuk memasak yang dilakukan satu bulan sebelum hari hajat digelar yang dihadiri oleh 30 – 40 orang.
2. Balangan :Memberikan barang berupa rokok, susu kaleng, kopi dan gula kepada orang yang diundang baik disertai surat undangan maupun tidak, yang dilakukan pada 7 atau 4 hari sebelum hari hajat digelar.
3. Penarikan paguyuban : Menarik barang dan uang (seperti arisan) yang dilakukan secara umum pada malam sebelum hari hajat digelar atau sesuai kebutuhan.
4. Penarikan balangan : Menarik uang dari harga barang balangan yang telah diterima oleh tamu yang diundang yang biasa dilakukan pada malam sebelum hari hajat digelar.
5. Ngarak : Pengantin dan rombongan keliling beberapa kampung sebagai bentuk pengumuman, dengan dimeriahkan oleh kelompok *Wewe* yang diiringi musik degung.
6. Saweran : tamu undangan memberikan uang yang dirangkai dalam berbagai bentuk kepada pengantin, yang dilakukan setelah isya pada hari hajat digelar
7. Hiburan : Menampilkan berbagai jenis kesenian seperti ubrug (kesenian tradisional khas setempat yang mirip lenong Betawi)
8. Hajat untung : pendapatan bersih dari hajat, yaitu perolehan barang dan uang dikurangi dari total biaya yang dikeluarkan untuk menggelar hajat.

Delapan prosesi hajat dibuat seiring dengan kebutuhan dan evaluasi dari jenjang sebelumnya sehingga didapatkan jaring komunikasi dan jaring sosial untuk sampai pada tujuan akhir, yaitu hajat sukses baik secara material dan moral. Barang (material) yang saling dipertukarkan (diberikan) adalah seluruh jenis barang yang dianggap dibutuhkan oleh setiap penggelar hajat, yaitu sembako dan barang lainnya seperti beras, bumbu dapur, minyak, kecap, uang, rokok, kopi, buah-buahan, kue, mi instan, air mineral gelas, daging dan ayam, sohun, dan kerupuk. Sedangkan secara moral terlihat dari tabel berikut:

**Tabel Intensitas waktu dan partisipan guyub delapan prosesi hajat masyarakat Walantaka Kota Serang**

<b>No</b>	<b>Nama Prosesi</b>	<b>Waktu Prosesi</b>	<b>jumlah Tamu undangan (orang)</b>	<b>Tamu yang hadir</b>
1.	Tebang kayu	1 bulan sebelum hajat	30 – 40	Tetangga, saudara, dan teman yang dekat secara fisik dan atau emosi
2.	Balangan	7-3 hari sebelum hajat	300 – 700 untuk balangan,	Internal 1 kampung, 1 RT, beberapa RT terdekat, atau disebar kepada saudara dan teman dekat di beberapa kampung.
3.	Surat undangan	7-3 hari sebelum hajat	2000 – 5000 untuk surat undangan	Tersebar pada banyak kampung
4.	Penarikan paguyuban	Dapat dilakukan sebelum tebang kayu. Namun, umumnya pada malam sebelum hajat atau 2 hari sebelum penarikan balangan.	70 – 100 untuk 1 kelompok. Mencapai 200 orang Jika menarik 2 kelompok paguyuban dengan cara disatukan.	Berasal dari berbagai kampung asal domisili anggota paguyuban
5.	Penarikan balangan	Ba'da isya sebelum hajat digelar	300 – 700	Hanya internal satu kampung; satu RT; beberapa RT terdekat; atau saudara dan teman yang tersebar di beberapa kampung.
6.	Ngarak	Ba'da dzuhur pada hari hajat untuk pengantin sunat, dan pukul 08 atau 09 pagi untuk pengantin	100 – 300	Saudara, tetangga, teman, masyarakat umum yang ingin ikut
7.	Saweran	Ba'da isya pada hari H	300 – 500	Saudara, tetangga, teman, dan masyarakat umum dari berbagai asal wilayah yang keterkaitan sosial dan emosi
8.	Hiburan	Malam pada hari hajat, setelah prosesi saweran	Ratusan hingga ribuan, tergantung hiburan apa dan siapa	Saudara, tetangga, teman. Masyarakat umum dari berbagai asal yang sangat luas yang ingin datang menonton



## **Bentuk Pembangunan Swadaya Masyarakat Walantaka**

Di tengah kesulitan dan kebutuhan bersama yang dihadapi, dengan modal sosial yang mereka miliki, yaitu sifat kekerabatan, pertemanan, kedaerahan, dan gotong royong, terciptalah sifat guyub yang dipelihara secara sistematis dan terorganisir untuk membuat program-program atau realitas yang dapat mengatasi kesulitan dan memenuhi kebutuhan mereka. Guyub menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rukun, berkumpul.<sup>11</sup>Sifat guyub masyarakat Walantaka Kota Serang dapat dilihat pada aktifitas masyarakat yang menjadi wadah untuk guyub, yaitu pada hajat dengan delapan prosesnya, dan pada kelompok-kelompok di luar hajat. Uraian dari kedua klasifikasi tersebut di bawah ini bermuara pada sifat budaya kolektif dari Hui & Triandis, (2015), yaitu: (1) perhatian terhadap diri dengan tetap memperhatikan orang lain; (2) berbagi kelebihan material dan nonmaterial, (3) saling memiliki; (4) peduli terhadap *self-presentation* dan kehilangan muka; (5) mempercayai keterhubungan hasil yang dicapainya dengan hasil orang lain, (6) memiliki perasaan terlibat dan berkontribusi terhadap kehidupan orang lain. Berikut diuraikan sifat guyub masyarakat Serang pada hajat dan di luar hajat. Sifat guyub tersebut yaitu:

### **a. Pembangunan Swadaya Masyarakat Dalam Hajat**

Pembangunan swadaya masyarakat melalui komunikasi guyub dalam hajat dimulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan: **(1).** *60 – 500 orang berkumpul dari berbagai kelompok paguyuban, tiga bulan sebelum hajat digelar.* Pada malam penarikan paguyubanselalu diumumkan tiga orang yang akan

---

<sup>11</sup>Kbbi.web.id. diakses pd tgl. 26 Sept. 2015. Pkl 11:19 wib.

menarik selama tiga kali penarikan ke depan, dan pada pengumuman yang ketiga kali, diperkuat dengan surat undangan. Keduanya memiliki makna komunikasi dua tahap, yaitu komunikasi ‘sokhibul hajat’ melalui pengurus paguyuban dengan menggunakan jalur komunikasi formal baik lisan maupun tulisan<sup>12</sup> agar anggota memiliki waktu mempersiapkan barang dan uang yang akan diberikan. Anggota paguyuban yang diikat berdasarkan hubungan tempat dan darah beranggotakan sebagian besar terdiri dari teman, tetangga, dan saudara. Hal itu, seperti Usman, (2015: 70-71) katakan, bahwa “Prinsip-prinsip modal sosial diantaranya yaitu jaringan sosial yang diikat oleh pertemanan, kekeluargaan, ketetanggaan dan melembagakan hubungan tatap muka dengan perasaan senasib dan sepenanggungan”. Berdasarkan hal itu, masyarakat menyebut barang dan uang yang dikumpulkan dengan, simpan dan bayar’. Simpan artinya ia memberi dan belum pernah menarik paguyuban, sedangkan bayar artinya ia mengembalikan barang dan uang sejumlah apa yang pernah diterimanya saat menarik paguyuban. Satu kelompok paguyuban dapat dengan jumlah anggota minimal 60 orang dapat mencapai 20 juta rupiah uang dan 1000 bungkus rokok. Menurut Fjnneman *et al*, (1997), hal itu terjadi karena dalam masyarakat kolektif berlaku hukum dukungan yang mereka harap terima akan diberikan sebagaimana yang diterima, seimbang dalam berbagai situasi sosial pada seluruh hubungan interpersonal yang dibangun.

(2). Satu bulan sebelum hari hajat 30 – 50 orang berkumpul pada acara ‘tebang kayu’. ‘Sokhibul hajat’ akan menghaturi<sup>13</sup> beberapa kerabat dan tetangga dekat

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Nani tanggal 17 Oktober 2015

<sup>13</sup> Mengundang secara lisan, tatap muka, langsung oleh sokhibul hajat dengan cara berkeliling.

untuk datang berkumpul, menebang kayu, mengobrol dan makan bersama. Kayu yang diperoleh akan dibawa sebagai salah satu barang 'seserahan', dan atau untuk memasak hajat jika menebang dalam jumlah banyak. Makna ini didapat dari apa yang Mead (dalam Littlejohn, 2008: 160) katakan, bahwa simbol adalah esensi dari komunikasi dalam interaksi antar manusia. 'Tebang kayu' memberikan wadah dan alasan untuk saling bertemu dan bersantai dalam suasana yang hangat dan akrab dengan berbagi informasi yang intim dan cair. Hal itu seperti yang dijelaskan Denzin & Lincoln (2009: 578), bahwa dalam komunikasi nonformal kelompok, memungkinkan semua partisipan terlibat dalam percakapan.

(3). Seratus orang menjadi pengangkat hajat dan turut mengundang. Sifat guyub masyarakat Walantaka melalui surat undangan hajat terlihat pada komposisi khas nama pengangkat hajat dan turut mengundang. Nama pengangkat hajat berjumlah 6 - 20 orang<sup>14</sup> yang diambil dari keluarga besar atau kerabat dekat yang dapat menarik orang agar datang, disebabkan oleh keturunan, kekayaan, gelar, dan pekerjaannya. Sedangkan nama dalam kelompok turut mengundang dapat mencapai 90 orang terdiri dari perangkat desa di urutan pertama menunjukkan rasa hormat dan patuh, lalu keluarga besar atau kerabat, teman dan tetangga yang diambil sebagai perwakilan dari berbagai kampung tempat undangan disebar dan berfungsi sebagai 'pos informasi', sekaligus untuk menjaring masa secara getok tular (WOM). Hal itu Menurut Godes dan Mayzlin (2004, vol. 23), karena informasi WOM dilakukan melalui percakapan sehari-hari, diskusi formal maupun non formal, dan rekomendasi yang diberikan oleh orang lain. Hal itu sekaligus menggambarkan

---

<sup>14</sup>observasi dari surat undangan sebanyak 50 surat undangan.

luas jaring komunikasi dan sosial yang dimiliki seseorang. Putnam (1996) mengatakan jaringan sosial, norma dan kepercayaan mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan. Modal sosial ini seperti modal sosial yang Fukuyama (2002) katakan, yaitu “Menunjuk pada kemampuan orang untuk berasosiasi dengan orang lain yang bersandar pada norma dan nilai bersama dan menghasilkan kepercayaan yang pada gilirannya memiliki nilai ekonomi yang besar dan terukur”. Modal sosial yang diperoleh dari pengangkat hajjat dan turut mengundang sama dengan prinsip modal sosial yang dikatakan oleh Usman (2015: 70-71), yaitu sikap *reciprocity*, saling memberi keuntungan satu sama lain untuk mendukung perilaku yang inovatif dan produktif.

(4). 1500 – 5000 ribu orang sebagai tamu undangan. Surat undangan hajjat umumnya disebar 1500 – 5000 lembar. Jumlah itu tidak menentukan banyaknya jumlah tamu, karena warga internal satu kampung biasanya tidak diberikan surat undangan, hanya diberikan barang balangan. Makna di atas seperti Berger & Luckmann: 2012: 206) katakan, “Dengan bahasa, dan dengan perantaraannya, berbagai skema motivasi dan interpretasi diinternalisasi sebagai sudah didefinisikan secara kelembagaan.”Prosentase kehadiran dari jumlah yang diundang adalah setengahnya harus pasti, didapat dari 5 - 8 tahun menghadiri undangan, dari jaringan pengangkat hajjat dan turut mengundang, paguyuban, dan lainnya.<sup>15</sup>

(5). Dua kali datang undangan untuk memenuhi tiga jenis surat undangan yang diterima. Setiap warga yang ikut paguyuban bisa mendapatkan tiga jenis surat undangan. Pertama, surat penarikan paguyuban, kedua, surat undangan khusus

---

<sup>15</sup>Wawancara tanggal 20 September 2015.

keluarga paguyuban, dan ketiga surat undangan umum. Dari ketiganya, setiap orang dapat hadir dua kali, yaitu saat penarikan paguyuban dan saat menghadiri surat undangan pada hari hajat digelar. Dua kali undangan berarti memberikan dua kali uang atau barang. Pada penarikan paguyuban memberikan barang dan uang yang telah disepakati, pada undangan khusus memberikan uang, dan pada undangan hari hajat digelar memberikan barang dan atau uang. Jadi, keanggotaan seseorang dalam paguyuban menghadirkan apa yang Field (2014: 51) katakan, bahwa “Jaringan sosial memiliki nilai dan kontak sosial yang mempengaruhi produktivitas individu dan kelompok”. Produktivitas dalam definisi ini yaitu dapat digunakan untuk modal hajat, usaha, investasidan naik haji. Ketiga jenis surat diberikan agar frekuensi percakapan antara pihak terkait tetap terjaga untuk dapat meningkatkan potensi dukungan material dan moral. Hal itu seperti Berger & Luckmann(2012: 210) katakan, bahwa “Kenyataan subyektif tergantung kepada struktur kemasukakalan tertentu, yaitu landasan sosial dan proses sosial tertentu yang diperlukan untuk memeliharanya“.

(6). Dua hari sebelum hajat digelar minimal 60 -200 orang keluarga besar paguyuban datang memenuhi undangan khusus dan malam penarikan paguyuban. Surat undangan khusus berarti permintaan calon ‘sokhibul hajat’ kepada keluarga paguyuban agar memberikan dukungan secara moral dan finansial. Acara digelar bersamaan atau terpisah dengan malam penarikan paguyuban. Undangan khusus dibagikan langsung oleh calon ‘sokhibul hajat‘ kepada seluruh anggota

paguyuban.<sup>16</sup> Pilihan itu, menurut Ritzer (1992) dapat terjadi karena manusia adalah aktor yang kreatif dari realita sosialnya.

(7). Kumpul partisipan 2 – 4 kali sebulan pada satu kelompok paguyuban perluasan. Paguyuban perluasan mengumpulkan berbagai jenis kebutuhan hajat (sama dengan barang undangan) selain uang dan rokok, yaitu beras, susu kaleng, bumbu, kecap, minyak, kopi, mi instan, air gelas, dan lainnya dengan ketua sebagai koordinator dan penanggung jawab terhadap kepastian pengembalian dan tujuan dari tiap anggota. Keanggotaan berdasarkan tempat membuat saling mengenal, bersifat personal, intim, kekeluargaan, dan komunikasi antar anggota lebih banyak terjadi secara informal di luar paguyuban. Hal itu seperti Soekanto (2012: 116) jelaskan, bahwa “Paguyuban didirikan orang-orang yang sepaham untuk membina tujuan dan kesejahteraan bersama”.

Paguyuban perluasan memiliki intensitas frekuensi guyub tertinggi dibanding paguyuban dasar (rokok dan uang). Pada beberapa kelompok, paguyuban perluasan juga menganut sistem keanggotaan lintas kampung dan rangkap anggota, sehingga sama seperti paguyuban dasar, komunikasi dan relasi sosial yang ada membentuk sebuah jaring lintas kampung. Rutinitas komunikasi dalam satu bulan bisa terjadi 4 – 5 kali sehingga intensitas terjaga.<sup>17</sup> Cara demikian, seperti dikatakan oleh Sutisna (2002: 184), bahwa “Setiap orang setiap harinya berbicara dengan yang lainnya, saling tukar pikiran dan informasi, dan saling berkomunikasi”.

---

<sup>16</sup>Hasil observasi pada malam penarikan paguyuban tgl. 27 September 2015

<sup>17</sup>Wawancara dengan Ibu Sumyati, ketua Paguyuban Ibu-Ibu Muda Cibonteng pada tanggal 26 Februari 2015.

(8). Malam sebelum hari hajat digelar 700 – 1300 orang datang pada malam penarikan balangan. Balangan adalah memberikan barang seperti rokok, gula, kopi dan susu kaleng kepada orang tertentu saat dibagikan surat undangan atau tanpa surat. Barang balangan diantaranya dapat berasal dari warga yang sudah biasa saling membantu satu sama lain dengan cara menyimpan dan memberikan kembali berbagai barang atau uang untuk saling dapat memenuhi kebutuhannya. Selebihnya, rokok dan barang balangan lain di dapat dari paguyuban, membeli atau meminjam dari warung sembako yang akan dibayar setelah hajat selesai.

Barang yang dipilih penerima akan dicatat pada buku penerima barang balangan, dan akan dilengkapi dengan jumlah uang balangan yang diberikan penerima barang balangan saat malam penarikan balangan. Orang yang dibalang akan dijamu dengan makanan berbagai kecil (kue-kue), kopi dan rokok, juga prasmanan dengan durasi umum acara 3 – 4 jam sebagai wadah bersilaturahmi untuk saling bercengkerama (berinteraksi sosial) dengan memperbincangkan berbagai topik dengan suasana yang intim dan cair menjadi salah satu cara ikatan sosial yang dikembangkan berdasarkan daerah (*locality*) sekaligus kekerabatan (*kindship*) membuat hubungan terjalin lebih erat, tradisi hidup bersama dalam rasa sepenanggungan, atau dengan *sense of community* tinggi. Menurut Usman (2005: 69-77), ikatan sosial demikian, di dalamnya terdapat relasi-relasi multidimensi, yaitu relasi-relasi sosial, dan ekonomi yang berbau dengan hubungan pertemanan, dan kekerabatan yang semakin memperkuat *risk-sharing*.

(9). Pada hari hajat digelar 100 – 300 orang berkumpul dalam rombongan ‘ngarak’. Hal itu seperti Soetomo (2005: 271 – 272) katakan, bahwa kepedulian

sosial berasal dari solidaritas sosial, dan asas timbal balik sebagai modal sosial yang berhasil membangun pranata bersama yang memayungi seluruh kelompok. 'Ngarak' menjadi tontonan yang sangat menarik dan ditunggu dengan urutan rombongan paling depan ada 'Petan Wewe', sejajar dengan kuda atau andong pengantin, kemudian keluarga, kerabat, tetangga dan sekelompok pemain musik yang terus memainkannya sepanjang jalan. Pengantin diarak keliling beberapa kampung dengan menaiki 'Jaran', andong atau becak yang dihias dan diiringi oleh dua atau lebih 'Petan Wewe'.

Kendaraan yang dinaiki pengantin bisa satu atau lebih dan seperti halnya barang lain, dapat diberikan sebagai tabungan. Sisa dari kendaraan 'ngarak' yang ditanggung pengantin biasanya ditanggung oleh saudara pengantin sunat yang sebaya dan berdandan lengkap secara adat Sunda atau Jawa. Sedangkan andong dan becak lebih sering digunakan oleh orang tua pengantin. 'ngarak' hanya bertujuan sebagai media pengumuman bagi pengantin sunat, dan menjemput mempelai laki-laki bagi pengantin menikah. Secara umum, 'ngarak' dilakukan 3 - 4 jam dengan biaya 3 - 5 juta rupiah. Waktu yang dihabiskan termasuk waktu yang digunakan kelompok 'debus' untuk menunjukkan keahliannya baik saat ngarak maupun setibanya di rumah pengantin.

(10). Tiga ribu orang berkumpul untuk 'saweran' dan hiburan pada malam hari hajat digelar. McQuail (2011:110) mengatakan bahwa "Realitas" dibuat dan diberikan makna oleh aktor manusia secara sosial". Hal itu berlaku pada 'saweran' khas masyarakat Serang. Tamu memberikan uang tunai kepada 'sokhibul hajat' saat malam penarikan balangan, sedangkan memberikan uang tunai kepada pengantin



diberikan saat 'saweran'. 'Saweran' dilakukan setelah Isya. Tamu yang telah undangan, akan datang kembali sekitar pukul 19.30 Wib setelah petasan dibunyikan dan dilanjutkan menonton hiburan hingga pukul satu dini hari. Jumlah penyawer dan penonton tergantung kredibilitas 'sokhibul hajat' dan kelompok hiburan yang dihadirkan. Saat berbaur inilah berbagai percakapan dapat terjadi dalam bentuk interaksi dua orang atau dalam kelompok kecil 2 – 6 orang dengan berbagai *setting* dan konteks seperti sambil menikmati jajanan baso atau hanya menonton dangdut, 'ubrug',<sup>18</sup> qasidah, layar tancap, dan ceramah. Penonton hiburan dangdut menjadi wadah dan topik informasi paling menarik, luas dan cepat karena mampu menarik penonton hingga 2000 - 3000 orang berasal dari berbagai kampung sampai radius tujuh kilometer yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan anak-anak.

#### **b. Pembangunan Swadaya Masyarakat dalam Membangun Rumah**

Gotong royong dalam membangun rumah dilakukan dengan cara yang sama dengan gotong royong dalam menggelar hajat, dan menjadi nilai budaya yang signifikan dilakukan. Layaknya dalam menggelar hajat, orang yang akan membangun rumah diawali dengan banyak menyimpan atau memberi kepada orang lain yang akan membangun rumah. Ada dua kelompok barang yang biasa saling diberikan atau dipertukarkan dalam gotong royong membangun rumah, yaitu kelompok barang yang berhubungan dengan bahan bangunan seperti semen, batu bata, pasir, dan batu kelompok barang sembako, dan uang dengan barang paling favorit semen. Sedangkan sembako yang diberikan sama dengan kepada orang yang

---

<sup>18</sup>sangat mirip ludruk atau wayang orang dengan tokoh utama mirip si Cepot (Sunda). Ubrug adalah pagelaran khas berasal dari kesenian masyarakat, yaitu kampung Perisen Desa Ciruas. Dan biasa tampil sekitar tujuh jam, atau sampai pukul dua atau tiga dini hari.

akan menggelar hajat, yaitu beras, gula, kopi, rokok, ayam atau daging ayam, kambing dan bumbu-bumbu dapur seperti kecap, minyak sayur, dan kemiri. Besaran uang yang biasa diberikan dimulai dari ratusan hingga jutaan rupiah. Barang-barang dan uang yang diberikan atau diterima selalu dicatat oleh kedua belah pihak, sebagai pengingat jika suatu hari harus balik memberi. Dari kebutuhan dan sifat inilah kemudian terbentuk paguyuban rumah.

**c. Pembangunan Swadaya Masyarakat dalam Kebutuhan Besar Lainnya**

Menurut Koentjaraningrat budaya gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni gotong royong tolong menolong dan gotong royong kerja bakti. Budaya gotong royong tolong menolong terjadi pada aktivitas pertanian, kegiatan sekitar rumah tangga, kegiatan pesta, kegiatan perayaan, dan pada peristiwa bencana atau kematian. Sedangkan budaya gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan sesuatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum, entah yang terjadi atas inisiatif warga atau gotong royong yang dipaksakan.<sup>19</sup>

Kebutuhan besar lainnya yang dianggap menjadi kebutuhan bersama yang tidak dapat dipenuhi sendiri oleh masyarakat kecuali harus saling gotong royong yaitu sebagai berikut : ( 1). Selamatan tujuh bulan ; (2) kirim doa ; (3) mengurus jenazah ; (4) cukuran, pemenuhan kebutuhan barang rumah tangga ; (5) modal ; (6) pergi haji atau umroh ; (7). Selamatan haji dan umroh Penyelesaian dari beberapa permasalahan tersebut memiliki beberapa perbedaan tertentu. Selamatan tujuh

---

<sup>19</sup><http://kuta.desakupemalang.id/2016/11/optimalisasi-swadaya-dalam-pembangunan-di-desa-dengan-gotong-royong/>

bulanan ;pergi haji atau umroh ; selamatan haji dan umroh ; serta kebutuhan modal dapat diperoleh melalui gelaran hajjat dengan delapan prosesi hajjat, jika ia belum pernah menggelar hajjat selama 5 – 8 tahun. Jika ia telah menggelar hajjat, maka tujuh bulanan dapat dilakukan dengan menarik paguyuban, baik paguyuban dasar maupun perluasan jika ia memiliki paguyuban yang belum ditarik. Biasanya, warga yang mengikuti lebih dari satu keanggotaan paguyuban memiliki perhitungan tersendiri apakah ia akan menarik sekaligus semua paguyuban yang diikutinya atau disesuaikan dengan berbagai kebutuhan ke depan.

Sedangkan kirim do'a, mengurus jenazah, dan cukuran hanya dapat diperoleh dengan cara menarik paguyuban dasar maupun perluasan. Dengan tidak ada kepastian kapan dapat memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan besar, penarikan arisan, menabung, kelompok bank, dan kelompok kredit barang kerapkali menjadi solusi bagi masyarakat. Pilihan ini menjadi sebuah kenyataan sendiri di masyarakat Walantaka karena dasar dari kelompok sosial demikian memiliki inti sifat yang sama, yaitu guyub.

## **SIMPULAN**

Pembangunan swadaya masyarakat Walantaka dibuat karena kondisi keterbatasan ekonomi tanpa solusi disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya tingkat spesialisasi yang rendah sehingga masyarakat hidup dalam lingkaran kemiskinan yang tidak dapat diurainya secara sistematis dan terstruktur. Namun demikian, sebagaimana yang dikatakan oleh Berger dan Luckmann, manusia adalah makhluk yang kreatif, penentu dunia social dan struktur

di dalamnya. Dengan keterbatasan yang ada, tanpa kepedulian pemerintah setempat, masyarakat menciptakan system pembangunan ekonomi swadaya dengan memanfaatkan sifat guyub sebagai dasar komunikasi guyub yang dimiliki dengan sistem hajat gotong royong, saling bergantian dengan aturan yang dibuat bersama dalam delapan prosesi hajat, agar berbagai kebutuhan hajat terpenuhi, terlampaui, sekaligus setelahnya, berbagai kebutuhan besar lainnya seperti membangun rumah, modal, investasi (mmebeli tanah, dan lainnya) terpenuhi. Hasilnya adalah tujuan yang direncanakan bersama, dirancang dan dilaksanakan bersama dengan rasa memimili yang besar dan dibalut sifat kekerabatan, pertemanan dan tanggung jawab yang tinggi, berbagai yujuan yang telah ditargetkan tiap individu sebagai warga masyarakat guyub, tercapai. Namun sayng, karena lingkaran kemiskinan yang terjadi adalah lingkaran kemiskinan yang terstruktur, maka solusi yang diperoleh warga tidak mampu mengatasi masalah yang ada secara terstruktur dan permanen. Sehingga, rata-rata kesejahteraan masyarakat tetap menjadi minim.

## **SARAN**

Pembangunan swadaya yang dilakukan masyarakat Walantaka memiliki proses yang sesuai menurut amanat Undang-Undang No. 25 tahun 2004 yang berbunyi; “Melibatkan masyarakat (*stakeholder*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan”. Meskipun masyarakat tidak menegtahui dan memahami undang-undang tersebut. Dengan adanya hal itu, pemerintah terkait yang dimulai dari desa hingga kota dapat belajar dan memaksilakna pembangunan swadaya masyarakat yang telah ada menjadi pembaguna partisipatif sesuai dengan

amanh undang-undang di atas, agar masyarakat maupun pemangku kepentingan memilikipemahaman bersama agar dapat bersama-sama merumuskan dan memutuskan langkah-langkah pembangunan yang perlu dilakukan untuk membangun desa agar menghasilkan suatu rencana pembangunan yang komprehensif yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Sehingga masyarakat Walantaka mampu mencapai kesejahteraannyasecara terstruktur dan komprehensif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Berger, Peter L & Thomas, Luckman. 2002. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES
- Field, Jhon. 2014. *Modal Sosial*. Bantul: Kreasi Wacana Offset
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga
- Kuswarno, Engkus. 2008. *Metodologi Penelitian Komunikasi: Etnografi Komunikasi Suatu pengantar dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: Widya Padjadjaran
- LittleJohn, Stephen W, 2008. *Theories human communication, fifth edition*. Belmont, California: Wodsworth Publishing Company Inc.
- Rosen, Emanuel, 2000. *Kiat Pemasaran Dari Mulut Ke Mulut (The Anatomy of Buzz)*. Jakarta. PT.ELEX Komputindo
- Usman, Sunyoto. 2015. *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wrihatnolo.R dan Nugroho. 2006. *Manajemen pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan*. Jakarta: Elex Media Komputindo

**Paper:**

Fay, Keller. Juni 2012. *Quantifying the role of social voice in marketing effectiveness*. www.marketshare.com. Diakses tgl 02 Sept 2015 pkl.18.10 wib.

Keller, Ed. 5 Desember 2012. *Finally, Proof that Word of Mouth isn't just "Nice to Have," but Drives Measurable ROI*. www.marketshare.com.

Silverman, Goerge. 2002. *The Secrets of Word of Mouth Marketing*. www.quirks.com. Diakses tgl 02 September 2015. Pkl. 14.57 wib.

The World Bank.(2011). *Social Capital in Poverty Reduction and Economic Development*. <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTTSOCIALCAPITAL/0,,contentDK:20186616~menuPK:418214~pagePK:148956~piPK:216618~theSiteK:401015,00>. Html

**Jurnal Nasional**

Amelia, Ayu Diah. 2015. *Social Capital and Poverty*. Sosio Informa Vol.1, No. 03 September – Desember.

Kuswarno, Engkus. *Tradisi fenomenologi pada Penelitian Komunikasi Kualitatif: Sebuah Pengalaman Akademis*. Mediator, Vol 7 No.1 Juni 2006.

**Sumber Lain:**

Hamijoyo, Santoso, S. 1993. *Landasan Ilmiah Komunikasi*. Pidato Ilmiah Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Ilmu Komunikasi Surabaya, Universitas DR. Soetomo.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 Tentang Desa  
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah



## **Strategi Forum Dalam Membangun Kota Serang Sehat**

**Rahmi Winangsih**

Prodi Ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Untirta  
winangsih68@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Persoalan kelestarian lingkungan di wilayah Kota Serang, dalam membangun kota sehat masih memprihatinkan, geliat dari seluruh *stakeholder* masih belum optimal, sehingga keberadaan forum kota sehat menjadi perlu agar kegiatan menuju kota sehat lebih fokus dan terarah. Keberadaan forum sebagai mediator seluruh OPD se-Kota Serang terkait dengan swasta dan masyarakat. Upaya semangat bersama yang dibangun dari seluruh stakeholder terkait pun, menjadi modal dasar mengubah mental dan kesadaran masyarakat, bahwa menciptakan dan menjaga lingkungan kota serang yang bersih, sehat, aman, dan nyaman menjadi tanggung semua warga kota serang menuju kehidupan harmonis dan selaras dalam mencapai tujuan bersama. melalui pendekatan kualitatif interpretatif, dan teori difusi inovasi yang dipopulerkan oleh Rogers (1983), dengan menggali informasi dari berbagai narasumber yang sangat dekat dan mampu menjawab persoalan lingkungan di Kota Serang, bukan hanya mimpi belaka.

Kata Kunci: Kota Sehat, Forum, Kelestarian Lingkungan

### **PENDAHULUAN**

Kota sehat merupakan proses berjalan terus menerus untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan, baik fisik, sosial, budaya, dengan mengembangkan kualitas lingkungan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, agar saling mendukung dalam menerapkan fungsi-fungsi kehidupan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki kota dan lingkungan sekitarnya.

Pertumbuhan penduduk Kota Serang masih menunjukkan lonjakan cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk tersebut menimbulkan berbagai masalah, seperti kepadatan lalu lintas, pencemaran udara, lingkungan perumahan kurang sehat,



perilaku buang sampah sembarangan, pelayanan masyarakat kurang layak, dan penyakit masyarakat yang sampai saat ini menjadi permasalahan sosial diantaranya kriminalitas, kekerasan, merebaknya anak jalanan, dan penggunaan obat-obat terlarang. Sementara pelayanan kesehatan yang ada belum memenuhi kebutuhan, baik dari aspek pemerataan dan kemudahannya.

Dengan situasi tersebut di atas, bila tidak segera dikendalikan, akan berpengaruh pada stabilitas kehidupan bersama dalam keharmonisan saling menjaga kelestarian lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman, karena lambat laun mengancam kesehatan lingkungan. Seperti menyebarnya epidemi penyakit diare, ISPA, cikungunya, typhus, DBD, dan sebagainya. Di samping itu perilaku masyarakat, dengan gaya hidup tidak sehat juga memberi kontribusi cukup signifikan bagi berkembangnya penyakit tidak menular, seperti hipertensi, jantung, stroke, obesitas, kanker, ginjal, dan sebagainya.

Penanggulangan permasalahan tersebut, menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Optimalisasi peran pemerintah dalam menggerakkan seluruh komponen menjadi faktor utama, dan lebih membuka diri dan memberi peran lebih besar kepada masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan, serta mampu memahami derajat kebutuhan masyarakat. Sesuai amanat UU No. 23/2004 bahwa pemerintah daerah sebagai penyelenggara perkotaan dan pedesaan perlu mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat.

Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berwawasan kesehatan, yaitu setiap pembangunan yang dilakukan perlu mempertimbangkan aspek dan dampak

kesehatan. Sebagai sasaran menengah pembangunan berwawasan kesehatan, selaras dengan visi Indonesia sehat, misinya, antara lain:

- a. Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan;
- b. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;
- c. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan bermutu, merata, dan terjangkau;
- d. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya. (Tim Pembina Kab/Kota Sehat Pusat, 2012)

Untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang sehat perlu dilakukan pengembangan kesehatan perwilayah, agar mudah menggerakkan pembangunan lintas sektor berwawasan kesehatan. Penyelenggaraan kota sehat dapat menjadi acuan bagi para pelaku pembangunan, terutama dalam memfasilitasi Forum Kota Serang Sehat, serta di dalam melakukan advokasi dan sosialisasi, baik kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.

Untuk menciptakan kota sehat, bersih, aman dan nyaman di lingkungan kota Serang, Forum mengurai berbagai strategi yang dapat ditempuh untuk melakukan pendekatan, agar masyarakat dari seluruh elemen turut memberikan kontribusi berarti bagi kelestarian lingkungan.

### **Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diuraikan identifikasi masalah dari kajian ini yaitu: Permasalahan kelestarian lingkungan apa saja yang harus diatasi di wilayah Kota Serang; Faktor hambatan dan pendukung

apa saja yang turut memberikan kontribusi bagi terciptanya kelestarian lingkungan Kota Serang; dan Strategi apa saja yang dilakukan oleh Forum dalam upaya mencapai kelestarian Kota Serang menuju Kota Sehat, bersih, aman dan nyaman.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan kajian ini dilakukan diantaranya untuk mengetahui dan mampu menjelaskan pemahaman mengenai: Permasalahan kelestarian lingkungan yang harus diatasi di wilayah Kota Serang; Faktor hambatan dan pendukung yang turut memberikan kontribusi bagi terciptanya kelestarian lingkungan Kota Serang; Strategi yang harus dilakukan oleh Forum dalam upaya mencapai kelestarian Kota Serang menuju Kota Sehat, bersih, aman dan nyaman.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan agar memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat Kota Serang dalam menjaga lingkungan sekitarnya tetap bersih, sehat, aman, dan nyaman. Serta membangun kepedulian seluruh masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mencapai Kota Sehat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Komunikasi Pembangunan**

Paparan komunikasi pembangunan dalam penelitian ini, mengkaji efek komunikasi pembangunan dalam melakukan perubahan sikap dan perilaku masyarakat, mengadopsi inovasi program-program pembangunan. Semula ilmu komunikasi belum dianggap sebagai salah satu unsur yang mempengaruhi proses

pembangunan. Bahkan dianggap tidak mampu memberikan kontribusi, memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Namun, sejak prestasi pembangunan belum memperlihatkan perkembangan menggembirakan bagi semua pihak, maka bidang komunikasi pun mulai dilirik.

Pandangan bahwa eksistensi komunikasi pembangunan sebagai studi komprehensif, dalam mempercepat dan menuntaskan permasalahan pembangunan. Dimensi teori komunikasi pembangunan dikembangkan melalui kajian dan analisis mendalam, diarahkan pada upaya pencarian konsep atau model pembangunan, yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. (Jayaweera, 1987) Kemudian, membangkitkan kesadaran baru dengan konsep-konsep bersifat korektif. Peran dan fungsi studi komunikasi, digunakan sebagai bentuk pendekatan antardisiplin, menjawab tantangan dan tuntutan, sekaligus memberikan pengaruh menentukan proses dan tujuan pembangunan.

Konsep tersebut disambut positif oleh para ilmuwan komunikasi, termasuk ilmuwan sosial lainnya. Walhasil, banyak pihak menganggap konsep ini merupakan bentuk respon, terhadap kondisi pembangunan masyarakat dan negara sedang berkembang sebagai solusi alternatif. Maksudnya, kompleksitas permasalahan pembangunan (seperti: sosial, budaya, ekonomi, dan politik), telah melibatkan kegiatan pembangunan menjadi bagian dari fenomena sosial, yang membutuhkan pendekatan komunikasi secara komprehensif dan efektif.

Secara konseptual, teori komunikasi digunakan untuk menjembatani arus informasi (ide, gagasan) baru, dari pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya. Dengan kata lain, melalui komunikasi pesan-pesan pembangunan, dipahami

khalayak untuk tujuan perubahan. Sementara teori pembangunan digunakan sebagai karakteristik bentuk perubahan secara terarah dan progresif, dari satu kondisi ke kondisi lain, atau dari satu keadaan menuju keadaan lebih baik.

Oleh karena itu, berbagai konsepsi pembangunan sebagai proses partisipasi masyarakat, dalam segala bidang perubahan sosial. Dengan tujuan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk pemerataan, kebebasan serta berbagai kualitas lainnya) dengan kemampuan lebih besar mengatur lingkungannya (lihat Rogers, 1989: 65). Tujuannya berusaha menyampaikan, mengkaji, dan menjelaskan isu, ide, atau gagasan aktual berkaitan dengan perubahan menuju pembangunan masyarakat. Memberi inspirasi baru dalam penggalan aspirasi, kreativitas, kepentingan, dan kebutuhan individu, kelompok dan masyarakat, sehingga membuka jalan bagi munculnya ide, gagasan, dan inovasi dari tingkat akar rumput. Komunikasi pembangunan dipandang sebagai instrument kunci dalam menggambarkan, mendorong, mengarahkan, mempercepat, dan mengendalikan setiap perubahan pembangunan.

Berdasarkan falsafahnya, studi komunikasi pembangunan didasari dengan peningkatan harkat, martabat dan menanamkan jiwa kemandirian masyarakat. Apa pun bentuk dan jenisnya, aktivitas pembangunan akan mengarah pada pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian tumbuh peradaban masyarakat, akibat penyebaran program-program pembangunan, yang mengandung unsur mendidik, membujuk, dan memberi keterampilan masyarakat.

Sejak memasuki dunia ketiga, konsep komunikasi pembangunan merupakan komponen penting dalam program pembangunan. Pertama kali

dikenalkan oleh Lerner melalui studinya berjudul *The Passing of Traditional Society, (1958) dengan label communication and development*. Kemudian pandangan ini diperkuat oleh Lucian Pye dan Wilbur Schramm dengan pernyataan bahwa “*It referred to technology-based communication network which regardless of message and content, tended to create, by reason of its inherent characteristics, a climate suited for development.*” (Lerner, 1958). Dengan demikian, Esensi pembangunan adalah pemaksimalan penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat. Dunia maju dan berkembang dibedakan oleh kualitas barang dan jasa. Selain itu, cara cepat dan efektif yang membawa perubahan kesadaran, dilakukan melalui penggunaan teknologi berbasis komunikasi, terutama radio, teknologi, dan TV mampu menciptakan citra baru, mobilitas psikis, dan empati.

Ideologi komunikasi pembangunan, yang berupaya menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan kesejahteraan hidup manusia. Namun dalam perkembangannya, konsep pembangunan tidak sesuai harapan bangsa di negara dunia ketiga. Jarak sosial ekonomi antara kaya dan miskin semakin jauh. Tekanan sosial budaya, juga ikut menimbulkan kekacauan di kehidupan sipil, sehingga ketidakstabilan politik menjadi endemi.

Seiring berjalannya waktu, menurut Quebral (1976), pembangunan bukan sekedar proses kuantitatif, dengan memaksimalkan barang dan jasa seperti analisis Lerner, melainkan membutuhkan distribusi produk ekonomi secara adil dan merata. Penggerak utama pembangunan tidak hanya bersumber dari media massa, tetapi terletak pada kebebasan masyarakat dari struktur ketidakseimbangan ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam lingkup nasional dan internasional.

Tantangan yang muncul akibat perubahan lingkungan eksternal organisasi, tentu akan terasa sangat besar. Apalagi bila perubahan terjadi pada lingkungan eksternal, sebagai perubahan besar dan mendasar, seperti perubahan dalam sistem ketatanegaraan. Pemberlakuan otonomi daerah sejak 1 Januari 2001, mengubah sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan memberikan sejumlah kewenangan, semula ditangani oleh pemerintah pusat, dialihkan kepada pemerintah kota/kabupaten. Menguatnya semangat positif kedaerahan, mampu mendorong masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab, terhadap permasalahan terjadi di kota/kabupaten. Namun pengaruh negatif bisa saja muncul, dengan mengedepankan kepentingan daerah di atas segala-galanya.

Paradigma pembangunan lama lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi, lewat industrialisasi sebagai kunci pembangunan. Orientasi pada teknologi dan modal sebagai pengganti tenaga kerja, direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam lingkup nasional. Sedangkan masyarakat lokal, tentu saja akan diubah oleh pembangunan tersebut. Namun kemajuannya akan sangat tergantung, pada tersedianya informasi dan masukan sumberdaya dari pusat, sehingga dinilai sangat lamban. Adanya keterbelakangan disebabkan cara berpikir dan bertindak tradisional, masih dilakukan masyarakat negara berkembang. Sedangkan jalan menuju modernisasi, ditunjukkan dengan mengubah masyarakat, menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan baru. Kondisi ini tentu saja menuntut masyarakat berpikir cepat dan berkeinginan untuk melakukan perubahan lebih baik, agar mampu mengikuti perkembangan jaman.

Selama akhir periode 1960an, terdapat paradigme dominan, mengarahkan pembatasan dan pembahasan pembangunan, serta memandu program pembangunan nasional. Paradigma ini berusaha menjelaskan transisi, dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Pengaruh utama akademis dan historis dalam konsepsi lama pembangunan, dikemukakan oleh Rogers dalam Schramm (1989: 149-150) adalah:

- 1) Revolusi Industri, industrialisasi dikatakan sebagai faktor utama keberhasilan pembangunan.
- 2) Teknologi padat modal, dengan mengenalkan teknologi sosial yang tepat, meminimalisasi kekeliruan cara berpikir, kepercayaan, serta nilai-nilai sosial tradisional, ditujukan untuk mengidentifikasi perubahan dengan cepat dan memodernkan masyarakat, serta menjadikan prioritas utama tugas berbagai lembaga pemerintah, dengan melibatkan media massa.
- 3) Pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi semua manusia berpikir ekonomis, maka motif keuntungan akan mendorong perubahan perilaku, sebagai penggerak pembangunan berskala besar.

Paradigma lama mengisyaratkan bahwa kemiskinan merupakan keterbelakangan, sehingga pada negara berkembang saat ingin mencapai kemajuan, terus bergerak menjadikan dirinya seperti negara maju. Selain itu, dalam proses pembangunan, ditemukan pula jalan alternatif dapat ditempuh, yang memiliki kombinasi berbeda dalam setiap negara. Unsur utama konsepsi baru ini dapat dilihat dari:



- 1) Pemerataan penyebaran informasi, keuntungan sosial ekonomi, dan sebagainya. Konsep ini menitikberatkan para penduduk desa dan orang miskin perkotaan, menjadi sasaran utama program pembangunan, serta berupaya meminimalisir kesenjangan sosial ekonomi dengan cara menggerakkan sektor tertinggal sebagai prioritas program;
- 2) Partisipasi masyarakat, tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan disertai desentralisasi pedesaan. Pembangunan harus menguntungkan rakyat, maka harus diikutsertakan dalam pemikiran, perencanaan, dan pelaksanaan rencana pembangunan.” Dengan demikian, mereka dapat membangun dirinya sendiri dengan penuh kesadaran, terlibat aktif dalam proses pembangunan;
- 3) Berdiri di atas kaki sendiri dan mandiri dalam melaksanakan proses pembangunan, dengan menggali potensi sumber daya setempat dan membangun kerjasama dengan negara maju, agar bersinergi.
- 4) Perpaduan antara sistem tradisional dan modern. Mengartikan modernisasi sebagai sinkrenisasi antara pemikiran lama dan baru, dengan pertimbangan berbeda di setiap daerah. (Rogers, 1989: 160-161)

Pemikiran pembangunan sampai tahun 1970-an memberikan kesan bahwa kelembagaan tradisional perlu diganti, dengan kelembagaan modern secara keseluruhan, agar dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan. Seperti diungkapkan Omo-Fadaka (1974) bahwa: “negara-negara berkembang hendaknya tidak meniru pola pembangunan negara industri, tetapi menerapkan pola pembangunan sesuai tradisi dan budaya setempat.”

Sejalan perkembangannya berbagai kritik bermunculan terhadap paradigma dominan, berakibat pada pergeseran konsep pembangunan, semula lebih mengutamakan pertumbuhan material ekonomi, beralih pada pemahaman mengenai nilai-nilai sosial budaya. Nilai-nilai tersebut ditentukan oleh masyarakat sendiri, melalui proses keikutsertaan secara luas.

Dengan demikian, masing-masing negara dapat memilih cara berbeda dalam proses pembangunan, sesuai keinginan. Menurut Schramm dan Lerner (1976), pembangunan merupakan perubahan besar menuju sistem sosial ekonomi dalam suatu negara. Pembangunan juga dapat dikatakan sebagai suatu upaya masyarakat mewujudkan nilai-nilai manusiawi lebih baik, dan memperluas fungsi pengawasannya terhadap lingkungan, atas tujuan politik, serta memperkenankan setiap pribadi mengatur diri secara lebih bebas. (Inayatullah dalam Rogers, 1989: 163)

Program pembangunan akan memberikan semangat kedaerahan positif. Memajukan daerah menjadi terdepan, dan melahirkan semangat kerja sama dan kemitraan, baik organisasi pemerintah/swasta dengan masyarakat. Tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi instansi swasta dan seluruh warga masyarakat kota Serang, wajib berpartisipasi dalam proses pembangunan. Khususnya pembangunan kesehatan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan aman. Optimalisasi titik temu, dari harapan dan keinginan organisasi pemerintah/swasta dengan masyarakat. Seluruh kegiatan diorientasikan pada capaian *community development*, secara bersama-sama bertindak dalam wujud nyata. Organisasi pemerintah/swasta mengerahkan segala potensi, baik berupa

dana, sarana-prasarana, dan sumber daya manusia yang terampil dan ahli. Sedangkan masyarakat dengan segala kekuatan sosial, berusaha bahu membahu terlibat aktif dan interaktif dalam proses pembangunan tersebut. Selain itu, seluruh lapisan masyarakat bergeliat menuju kemajuan daerah lebih baik, dan mampu menarik perhatian para investor. Oleh karena itu, organisasi pemerintah perlu merumuskan langkah-langkah strategis komunikasi pembangunan efektif, dalam membantu mengembangkan warga masyarakat disekitarnya, untuk meningkatkan taraf hidup lebih berkualitas.

### **Komunikasi Kesehatan**

Setiap manusia memiliki dorongan untuk berhubungan dengan orang lain, lingkungan dan melakukan komunikasi, baik secara internal dengan dirinya, maupun eksternal dengan lingkungan fisik, biologis, serta sosial budaya. Hubungan antarmanusia melalui komunikasi, memungkinkan terpenuhinya kebutuhan psikososial, seperti cinta, rasa memiliki, serta pengembangan harga diri dan identitas diri. Untuk mencapai komunikasi efektif, diperlukan beberapa syarat, diantaranya *The seven C's of communication* dalam Moore (1988: 57), yaitu:

- a) *Credibility*, yaitu pengakuan komunikan terhadap keberadaan komunikator. Posisi dan kedudukan dalam strata sosiokultural tertentu, mempengaruhi pengakuan dan kredibilitas seseorang.
- b) *Context*, merupakan situasi dan kondisi relevan dengan keadaan si penerima pesan. Situasi dan kondisi dapat meliputi konsentrasi dan perhatian (atensi) individu yang terlibat, dalam komunikasi maupun situasi/kondisi lingkungan, tempat penyelenggaraan komunikasi.

- c) *Content* merupakan materi disampaikan sebagai pesan oleh komunikator, berpengaruh terhadap penerima pesan.
- d) *Clarity* yaitu pesan yang disampaikan oleh komunikator, diterima dan dimengerti oleh penerima.
- e) *Continuity dan consistency*. Pesan yang disampaikan konsisten dan berkesinambungan, tidak menyimpang dari topik dan tujuan komunikasi.
- f) *Channel* digunakan dalam komunikasi, sesuai dan memungkinkan diterima dengan baik oleh komunikan
- g) *Capability of audience*. Materi/isi pesan dan teknik penyampaian pesan disesuaikan kemampuan penerimaan sasaran, sedangkan pesan itu sendiri mudah diterima dan tidak membingungkan.

Dalam melaksanakan komunikasi kesehatan sebagai bagian dari komunikasi pemasaran sosial, selalu dimulai dengan promosi mengenai sikap atau kepercayaan. Melalui komunikasi kesehatan masyarakat telah banyak mengalami perubahan sangat pesat dan mendasar, dari strategi bersifat *partial* menuju strategi komprehensif. Tujuan pokok program komunikasi kesehatan, yaitu terjadinya perubahan perilaku kesehatan masyarakat, dalam meningkatkan derajat kesehatan. Tumbuhnya motivasi di kalangan masyarakat, diharapkan upaya pergerakan masyarakat menjadi lebih dinamis.

Secara historis, studi ilmu komunikasi kesehatan terinspirasi oleh gerakan karantina, gerakan kesehatan individu, gerakan *meningkatkan ilmu pengetahuan tentang kebersihan*, dan *gerakan mengenalkan konsep baru kesehatan masyarakat, yang mendorong perubahan kesadaran atas masalah kesehatan masyarakat*. Studi

komunikasi kesehatan pada dasarnya, menghubungkan studi komunikasi dengan kesehatan. Salah satu bidang kajiannya adalah studi kemasyarakatan sebagai satu tema penting didalamnya, adalah peranan komunikasi, terutama strategi komunikasi dalam merancang dan menyebarluaskan informasi kepada individu, keluarga, komunitas, organisasi, maupun masyarakat pada umumnya, sehingga dapat membuat keputusan tepat, terhadap usaha pemeliharaan kesehatan.

Dalam UU No. 9 Th 1960 Bab I Pasal 2, arti kesehatan adalah “*keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan.*” Kemudian disempurnakan oleh UU RI No. 23 Th 1992 Bab 1 Pasal 1 bahwa kesehatan merupakan “*keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis.*” Oleh karena itu, seseorang dianggap sehat, sekalipun tidak berpenyakit jiwa dan raga, namun harus dinyatakan sehat secara sosial. Hal ini dianggap perlu, karena penyakit diderita seseorang/sekelompok masyarakat, umumnya sangat ditentukan oleh perilaku dan keadaan sosial budayanya.

Sedangkan Winslow (1920) dalam buku *Public Health* sebuah buku lama yang sampai saat ini masih menjadi acuan, mengatakan bahwa kesehatan masyarakat merupakan ilmu dan kiat untuk mencegah penyakit, memperpanjang harapan hidup, dan meningkatkan efisiensi masyarakat melalui usaha terorganisasi, untuk sanitasi lingkungan lebih baik, pengendalian penyakit menular, pendidikan *hygiene* perorangan, mengorganisasi pelayanan medis dan perawatan. Berbagai kegiatan tersebut agar dapat dilakukan diagnosis dini dan pengobatan pencegahan,

serta membangun mekanisme sosial, sehingga setiap insan dapat menikmati standard kehidupan cukup baik dan layak.

Untuk mengukur keberhasilan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dalam rumah tangga digunakan 10 (sepuluh) indikator, yaitu:

- a. Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan;
- b. Memberi ASI eksklusif bayi;
- c. Menimbang berat badan balita;
- d. Menggunakan air bersih;
- e. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
- f. Menggunakan jamban sehat;
- g. Memberantas jentik nyamuk;
- h. Mengonsumsi sayur dan buah setiap hari;
- i. Melakukan aktivitas fisik setiap hari;
- j. Tidak merokok di dalam rumah.

(Sumber: Menkes RI, 2011: 13)

Memahami komunikasi kesehatan secara efektif, membantu meningkatkan kesadaran resiko dan solusi, terhadap masalah kesehatan masyarakat. Selain itu dapat memberi motivasi masyarakat, agar mengembangkan keterampilan mengurangi resiko. Oleh karena masalah kesehatan seringkali dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor penentu, yaitu *genetic*, *lingkungan (biopsikososial)*, dan *perilaku individu*. (Liliweri, 2011: 21) Ketiga jenis faktor tersebut bekerjasama dan saling mempengaruhi. Faktor penentu ini berlainan bagi tiap individu, keluarga, daerah, atau negara. Seperti yang terjadi pada masyarakat wilayah Kota Serang, yang

tinggal di daerah kumuh dan miskin perkotaan, misalnya karena *faktor lingkungan kurang menunjang, tingkat pendidikan rendah, kesadaran terhadap kesehatan masih kurang*, maka akan dijumpai banyak penyakit infeksi parasit, penyakit kulit, atau penyakit kurang gizi.

Dalam menyebarkan informasi kesehatan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye kesehatan, berupaya berperilaku hidup bersih dan sehat, menciptakan kesadaran, mengubah sikap, dan memberikan motivasi setiap individu, untuk mengadopsi perilaku direkomendasikan. Penyebaran informasi dapat dilakukan melalui tatap muka maupun bermedia. Seluruh aktivitas komunikasi manusia, termasuk komunikasi kesehatan pada semua level komunikasi, baik komunikasi antarpersona, kelompok, organisasi, publik maupun massa. Kesemua lingkup komunikasi yang dilakukan mempunyai tujuan yang sama, yaitu: mempengaruhi sikap penerima, misalnya pihak sasaran mengubah sikap perilakunya, sesuai kehendak pengirim informasi. Semula tidak memahami perilaku hidup bersih dan sehat, menjadi mampu mengadopsikan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, diperlukan seorang penggagas, mampu menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman tepat, dalam mengimplementasikan isi informasi tersebut. Dengan demikian, diperlukan seorang komunikator kesehatan efektif, sehingga dapat mencapai kesuksesan program. Dalam Hal ini terdapat beberapa criteria yang harus dipenuhi, diantaranya:

- a. Mampu dan terampil sebagai *leader* dalam kebijakan komunikasi kesehatan; b. Mampu merancang strategi dan implementasi komunikasi;

- c. Terampil memobilisasi dan melatih individu atau komunitas masyarakat berpartisipasi membuat keputusan;
- d. Terampil berkomunikasi;
- e. Mampu mengenalkan peluang koordinasi, kerjasama, dan jaringan kerjasama;
- f. Memproduksi pesan multimedia atau kelengkapan audio visual lainnya.

(Liliweri, 2011: 35)

Masalah komunikasi seringkali diakibatkan dari bagaimana cara komunikator mempengaruhi perilaku komunikan. Efek yang ditunjukkan audien, sebagai reaksi komunikasi persuasif, setidaknya akan membentuk perhatian terhadap kredibilitas komunikator dari kelengkapan informasi melalui media yang cocok, metode dan teknik berkomunikasi sesuai, serta ketepatan komunikasi dalam konteks (sosial, kultural, dan psikologis).

Selain itu, efektivitas komunikasi antarpersona ditentukan pula oleh bagaimana seseorang *menghormati orang lain; mendengarkan dengan senang hati; mendengarkan tanpa menilai; keterbukaan terhadap perubahan dan keragaman; empati; bersikap tegas; dan kompetensi komunikasi*. Sedangkan media sebagai agen sosialisasi efektif, mampu menjalankan fungsinya menyebarluaskan nilai dan norma sosial masyarakat, melalui pembelajaran dan penyesuaian terhadap nilai, kepercayaan, norma, bersumber dari budaya masyarakat.

### **Komunikasi Kesehatan Lingkungan**

Kesehatan lingkungan menekankan pada dinamika hubungan interaktif, antara kelompok masyarakat dan segala macam perubahan komponen lingkungan hidup, seperti berbagai spesies hidup, bahan, zat, atau kekuatan di sekitar manusia,



yang menimbulkan ancaman, atau berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, serta upaya mencari pencegahannya. Masalah kesehatan lingkungan dipengaruhi oleh pertumbuhan dan sebaran penduduk, kebijakan para pengambil keputusan, mentalitas dan perilaku penduduk, dan kemampuan alam mengendalikan pencemaran. Kesehatan lingkungan pada hakikatnya, merupakan suatu kondisi atau keadaan lingkungan optimum, sehingga berpengaruh positif terhadap kesehatan lingkungan. Hal ini mencakup perumahan, pembuangan kotoran manusia, penyediaan air bersih, pembuangan sampah, dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan usaha kesehatan lingkungan adalah memperbaiki atau mengoptimalkan lingkungan yang sehat bagi kehidupan manusia.

Pengembangan menuju tatanan masyarakat madani, merupakan upaya membangun hubungan dengan anggota masyarakat, lebih luas dan harmonis. Dengan memperkuat perilaku masyarakat berbasis nilai-nilai universal, seperti kebersamaan, kekeluargaan, kerelawanan, kejujuran, dan lain-lain, didasari nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial, memperkuat tatanan masyarakat. Sesama anggota masyarakat saling mengembangkan budaya menjunjung etika, menghormati hukum dan peraturan, hak-hak warga lainnya, melalui sikap dan perilaku yang tertib, bersih, sehat, dan produktif.

Permukiman dengan tatanan masyarakat seperti di atas, membuka peluang tumbuh suburnya daya inovasi dan kreativitas masyarakat, mendayagunakan kehidupan harmonis, baik kehidupan sosial, pertumbuhan ekonomi, maupun lingkungan pemukiman bersih, sehat, produktif, dan menjadikan pemerintah sebagai mitra kerja dalam mewujudkan lingkungan pemukiman berkualitas.

Setidaknya dapat mengantisipasi musim penghujan, terutama di daerah yang selalu terjadi banjir dan menimbulkan penyakit. Beberapa penyakit ditimbulkan oleh sanitasi kurang baik, diantaranya: diare, demam berdarah, disentri, hepatitis A, kolera, tiphus, cacangan, malaria, dan sebagainya. Mengapa BAB harus sehat? Mengapa jamban harus sehat? Mungkin belum pernah terpikirkan oleh sebagian besar masyarakat, yang masih berperilaku tidak sehat. Padahal dampak penyakit ditimbulkan sangat berbahaya bagi kehidupan mereka. Jamban merupakan tempat penampungan kotoran manusia sengaja dibuat untuk mengamankannya, dengan tujuan: Mencegah terjadinya penyebaran langsung bahan-bahan berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia, dan mencegah kuman-kuman pembawa penyakit pada lingkungan sekitarnya.

Lalat yang hinggap disampah dan permukaan air limbah atau tikus selokan, masuk ke saluran air limbah membawa sejumlah kuman penyakit. Bila lalat dan tikus menyentuh makanan atau minuman, maka besar kemungkinan seseorang yang menelan/memakannya, menderita penyakit seperti tersebut di atas. Demikian pula anak-anak kecil bermain, atau orang dewasa bekerja di sekitar lingkungan seperti itu, atau mengalami kontak langsung dengan air limbah dan sampah, dapat terkena penyakit, terutama bila tidak membersihkan anggota badan terlebih dahulu.

Air limbah dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu: Air bekas berasal dari bak atau lantai cuci piring dan peralatan rumah tangga, lantai cuci pakaian dan kamar mandi. Selain itu juga lumpur tinja berasal dari jamban atau *water closet* (WC). Pembuangan kotoran ke dalam saluran, menyebabkan penyumbatan dan menimbulkan genangan, sehingga mempercepat

berkembangbiaknya mikro organisme atau kuman-kuman penyebab penyakit, seperti serangga dan mamalia penyebar penyakit, contohnya lalat dan tikus. Badan air seperti sungai atau laut mempunyai pengurai tertentu. Bila air limbah langsung masuk begitu saja ke dalam badan air, tanpa dilakukan proses pengolahan, maka suatu saat dapat menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran tersebut berlangsung, bila melebihi kapasitas pengurai limbah dalam badan air, tidak mampu lagi melakukan proses pengolahan atau penguraian secara alamiah. Keadaan seperti ini dinamakan kondisi septic atau tercemar, ditandai bau tidak sedap, warna air gelap dan pekat, serta banyak ikan dan organisme air lainnya mati dan terapung.

Oleh karena itu, PHBS menjadi penting, karena lingkungan sehat dapat memberikan efek terhadap kualitas kesehatan. Sedangkan kesehatan seseorang akan menjadi lebih baik, jika lingkungan disekitarnya juga baik. Begitu juga sebaliknya, kesehatan seseorang akan menjadi buruk, jika lingkungan disekitarnya kurang baik. Dalam penerapan hidup bersih dan sehat, dapat dimulai dengan mewujudkan lingkungan sehat. Lingkungan sehat memiliki ciri-ciri tempat tinggal dan lingkungan sekitar rumah sehat.

Pembuangan kotoran manusia pun dalam lingkungan rumah sehat harus menjadi perhatian. Maksud dari kotoran manusia adalah semua benda atau zat sudah tidak dipakai lagi oleh tubuh dan harus dikeluarkan oleh tubuh. Beberapa penyakit dapat disebarkan oleh kotoran manusia yaitu tifus, disentri, kolera, bermacam-macam cacing, tempat tertentu atau jamban sehat. Teknologi pembuangan kotoran manusia secara sederhana, antara lain: Jamban cemplung

(kakus), Jamban cemplung berventilasi, Jamban empang, Jamban pupuk, dan Septik tank.

Berbagai cara sederhana dari teknologi pembuangan kotoran manusia ditawarkan, dan sesungguhnya mudah dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Upaya ini dilakukan agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan akibat air limbah, diantaranya menjadi transmisi atau media penyebar penyakit tifus, kolera, dll. Selain itu, dapat juga berpotensi sebagai media berkembangbiaknya mikro-organisme patogen, nyamuk, menimbulkan bau tidak sedap, sumber pencemaran air dan permukaan tanah.

### **Kota Sehat**

Kabupaten/Kota sehat adalah suatu kondisi lingkungan Kabupaten/Kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, dicapai melalui terselenggaranyapenerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Berbagai kegiatan diselenggarakan untuk mewujudkan kabupaten/kota melalui pemberdayaan masyarakat, melalui forum yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Kawasan sehat merupakan suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan kawasan potensial dengan berbagai kegiatan terintegrasi yang disepakati masyarakat, kelompok usaha dan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, forum menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam membangun dan menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, Forum Kota Sehat berperan turut menentukan arah, prioritas, perencanaan pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikanberbagai

aspek, sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, sehat, aman, dan nyaman untuk dihuni warganya. Sedang di lingkungan kecamatan, Forum komunikasi Desa/Kelurahan Sehat atau nama lain yang disepakati masyarakat berperan mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mengimplikasikan prioritas, perencanaan antar desa/kelurahan satu dengan desa/kelurahan lainnya di wilayah kecamatan, yang dilakukan oleh masing-masing Pokja Desa/Kelurahan Sehat.

Adapun kelompok kerja (Pokja) atau nama lain yang disepakati masyarakat merupakan wadah bagi masyarakat di pedesaan/kelurahan atau yang bergerak di bidang usaha, ekonomi, sosial dan budaya, serta kesehatan untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam kegiatan yang disepakati.

Tujuan dibentuknya Forum Kota Sehat diantaranya untuk mencapai kondisi kabupaten/kota untuk hidup dengan bersih, sehat, aman, dan nyaman untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program kesehatan dan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktivitas dan perekonomian masyarakat. Adapun sasaran kegiatan yang diuraikan dalam pedoman pendirian, 2012 antara lain:

- a. Terlaksananya program kesehatan dan sektor terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat, melalui pemberdayaan forum yang disepakati masyarakat.
- b. Terbentuknya forum masyarakat yang mampu menjalin kerjasama antar masyarakat, pemerintah daerah dan swasta, serta dapat menampung aspirasi

masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik.

- c. Terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial, dan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata, dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di kabupaten/kota secara mandiri.
- d. Terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan ekonomi wilayah di masyarakatnya, sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih baik.

Oleh karena itu, pelaksanaan kabupaten/kota sehat diwujudkan dengan menyelenggarakan semua program yang menjadi permasalahan di daerah secara bertahap, dimulai dengan kegiatan prioritas bagi masyarakat di sejumlah kecamatan pada sejumlah desa kelurahan atau bidang usaha yang bersifat sosial ekonomi dan budaya di kawasan tertentu. Pelaksanaan kabupaten/kota sehat dilaksanakan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan, didukung pemerintah daerah dan mendapatkan fasilitas dari sektor terkait melalui program yang telah direncanakan daerah.

Sedangkan fungsi forum kota sehat dan forum komunikasi desa/kelurahan sehat adalah:

- a. Membentuk dan membina Pokja Desa/Kelurahan Sehat.
- b. Merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi perkembangan dari Desa/Kelurahan Sehat.

- c. Mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh Forum dan Pokja, maka diupayakan dari sumber lain, seperti swasta dan pemerintah.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah, dan unsur-unsur non pemerintah, agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sedangkan kabupaten/kota sehat dikelompokkan berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus, terdiri dari:

- a. Kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum.
- b. Kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi.
- c. Kawasan pertambangan sehat.
- d. Kawasan industri dan perkantoran sehat.
- e. Kawasan pariwisata sehat.
- f. Ketahanan pangan dan gizi.
- g. Kehidupan masyarakat mandiri.
- h. Kehidupan sosial yang sehat. (Panduan Kabupaten/Kota Sehat, 2012).

Dalam hal ini kota serang sesuai dengan potensi setempat, akan memfokuskan pada tatanan kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum, dan kawasan masyarakat mandiri. Namun akan terus berkembang sesuai kebutuhan dan kondisi spesifikasi kota serang. Adapun penghargaan kota sehat, dapat dikategorikan sebagai berikut: 1) Penghargaan Padapa diberikan kepada kabupaten/kota pada taraf pemantapan yang memilih 2 tatanan; 2) Penghargaan Wiwerda diberikan kepada kabupaten/kota pada taraf pembinaan yang memilih 3-

4 tatanan; dan 3) Penghargaan Wistara diberikan kepada kabupaten/kota pada taraf pengembangan yang memilih 5 tatanan.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk membahas penelitian ini digunakan paradigma interpretif dan metode kualitatif, mengangkat kasus kelestarian lingkungan yang berkembang sampai saat ini di wilayah Kota Serang, dengan menggali informasi dari para narasumber terkait yaitu: H. Embay Mulya Syarief selaku Ketua Forum Kota Serang Sehat, NP. Rahadian (Konsultan Lingkungan), dr. Ela (Ka. BPPKL Dinas Kesehatan Kota Serang), Hafidz (BLHD), melalui teknik pengumpulan data observasi partisipasi dan wawancara mendalam.

## **PEMBAHASAN**

### **Permasalahan kelestarian lingkungan yang harus diatasi di wilayah Kota Serang**

Berdasarkan hasil pengamatan langsung dan wawancara dengan beberapa para narasumber terkait, diperoleh data dan informasi bahwa sangat banyak persoalan lingkungan Kota Serang menuju Kota Sehat yang harus segera dibenahi. Menurut H. Embay persoalan lingkungan terkait dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan, BAB sembarangan, penggunaan air bersih, mengkonsumsi makanan sehat, gaya hidup masyarakat Kota Serang terkadang tidak berorientasi pada hidup sehat. Kota Serang sampai hari ini belum mampu mengelola masyarakat untuk terbiasa buang sampah di tempatnya. Di antara sudut-sudut kota masih



tampak onggokan sampah dan bertebaran di sekelilingnya, sehingga tampak kumuh. Kebiasaan sampah berserakan dimana-mana ini juga dapat ditemukan di sepanjang jalan protokol dan area-area publik. Padahal pemerintah sudah menggulirkan target Indonesia bebas sampah tahun 2020.

Belum lagi permasalahan sampah plastik, yang menyumbang begitu besar dalam kehidupan masyarakat, dan saat ini dianggap sudah mulai mengancam kualitas tanah, serta lambat laun berwarna coklat, subur dan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya, akan mengandung lapisan plastik, kemungkinan besar tidak bisa lagi menunjang keberlanjutan hidup manusia. Sedangkan solusi yang dilakukan pemerintah, antara lain memberlakukan plastik berbayar bagi perusahaan retailer. Menurut NP Rahadian, kebijakan ini dianggap tidak adil, ingin menyelesaikan persoalan, menimbulkan persoalan lainnya. Kembali lagi masyarakat dibebankan. Warung kecil saja menyediakan kantong, karena disadari menjadi bagian dari pelayanan. Sementara di toko besar, para pembeli harus membeli kantong belanja walaupun hanya @ Rp 200,-. Sedangkan para pengusaha retailer tidak memperdulikan sampah plastik berserakan di sekitarnya. Mengapa pengusaha sebagai konsekuensi dari pelayanan, tidak menyediakan kantong ramah lingkungan yang tidak menimbulkan resiko lingkungan dan mengurangi kualitas kesuburan tanah.

Sampah di kota serang belum dikelola dengan baik, selain itu pemilahan sampah juga belum dilakukan secara menyeluruh. Pembiasaan buang sampah pada tempatnya sebaiknya diawali dari sekolah/pesantren, bahkan perguruan tinggi, karena data menunjukkan bahwa beberapa sekolah/pesantren yang dikunjungi,

ditemukan peserta didik dan khalayak sekitarnya masih membiasakan diri buang sampah sembarangan, kecuali sekolah adiwiyata yang memang cukup baik memiliki konsep kelestarian lingkungan.

Selain itu, lingkungan pasar di wilayah kota serang, masih perlu pembenahan yang serius, baik di dalam maupun lingkungan luar pasar, secara umum memberikan kesan tidak beraturan, bau, kotor, macet, becek, dan semrawut. Para pedagang tidak memiliki kesadaran untuk ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan pasar tetap bersih, sehat, aman, dan nyaman. Seperti disampaikan para aktivis pekerja bhakti sosial, pada saat kerja bhakti dimana dengan mengerahkan para kalangan militer dan perwakilan elemen masyarakat, para pedagang pada saat itu lebih senang nonton yang kerja bhakti, dibandingkan turut berpartisipasi ikut bersih-bersih, minimal di lingkungan sekitarnya tempat dimana mereka berjualan. Selain itu, di jalan-jalan protokol masih dijumpai saluran air yang tidak mengalir, akibat saluran drainase yang kurang baik. Menurut NP Rahadian: di wilayah Kota Serang pertokoan dibiarkan menutupi saluran pembuangan air kotor, sehingga tersumbat dan tumpah ke jalan yang mengakibatkan banjir, seperti dapat dilihat di area warung pojok, depan hotel Le Dian. Oleh karena itu perlu aturan yang tegas agar para pedagang peduli lingkungan, dengan memelihara dan menjaga agar lingkungan sekitarnya tetap lestari, bersih, rapi dan teratur sesuai tatanan yang berlaku.

Sinerjitas antar SKPD dalam menangani Kota Sehat masih belum optimal, program yang dijalankan masih berjalan sendiri-sendiri, terkesan overlapping dan egosentris program. Padahal semuanya akan menjadi efektif dan efisien manakala

seluruh unsur SKPD dan Forum berjalan bersama meimikirkan persoalan yang menjadi permasalahan mendasar dalam mewujudkan kota sehat. Anggaran yang disebabkan untuk membangun kota Serang yang bersih, sehat, aman, dan nyaman menjadi lebih fokus pada pemberdayaan sumber daya yang berorientasi pada kota sehat.

### **Faktor hambatan dan pendukung apa saja yang turut memberikan kontribusi bagi terciptanya kelestarian lingkungan Kota Serang**

Faktor penghambat dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Kota Serang, antara lain: Karakteristik masyarakat Kota Serang yang relatif sulit berubah; Perilaku masyarakat yang belum memiliki kesadaran hidup bersih dan sehat. Komitmen pemerintah sebagai salah satu bagian dari sistem sosial belum optimal berorientasi pada perubahan mendasar dalam membangun kesadaran masyarakat peduli lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman.

Program pemerintah yang belum bersinergi antar SKPD terkait dan stakeholder lainnya. Seringkali terjadi overlapping dan egosentris program antar SKPD. Ketersediaan anggaran masih terbatas. Keterbatasan waktu dan tenaga dari sumber daya manusia yang ada, serta Masyarakat maunya disuapi dan kurang termotivasi untuk membangun kesadaran menjaga kelestarian lingkungan tetap bersih dan sehat.

Faktor penunjang dalam menjaga kelestarian lingkungan menuju Kota Serang yang bersih, sehat, aman, dan nyaman, diantaranya: Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan RI yang tertuang dalam Peraturan No. 34 Tahun 2005 dan No. 1138/Menkes/PB/VIII/2005 mengenai Pedoman

penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat; Terbentuknya Forum Kabupaten/Kota Sehat; dan Orientasi pemerintah sudah mulai memikirkan keberadaan Forum Kota untuk turut mewujudkan Kota Sehat.

**Strategi apa saja yang dilakukan oleh Forum dalam upaya mencapai kelestarian Kota Serang menuju Kota Sehat, bersih, aman dan nyaman.**

Dalam mencapai tujuan melestarikan Kota Serang dan sekitarnya menuju Kota Sehat, bersih, aman, dan nyaman, melakukan berbagai strategi dan pendekatan, antara lain:

Forum Kota Serang Sehat keterlibatannya dalam mewujudkan Kota Sehat, terjun langsung ke masyarakat, kelurahan, kecamatan, dan pemerintah kota terkait. Dengan terus melakukan kerjasama, khususnya dalam melaksanakan kegiatan yang berada di bawah payung kelembagaan Dinas kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda, serta SKPD lainnya. Tidak jarang juga bersinergi dengan kalangan militer dalam menggerakkan masyarakat untuk turut berpartisipasi pada program kerja bhakti atau Karya Bhakti Militer. Dalam acara ini hadir pula selain unsur pimpinan pemerintah daerah, juga mengerahkan perwakilan sekolah sekitar lokasi kerja bhakti, misalnya alun-alun, stadion Maulana Yusuf, terminal pakupatan, pasar lama, pasar rau, pasar taman sari, dan sebagainya. Baik dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, serta para pengusaha di sekitarnya secara suka rela dan senang hati turut berpartisipasi menyediakan konsumsi, seperti Toyota, Coca Cola, Mc Donald, Carrefour, Hotel Le Dian, Hotel dan Rumah Makan sekitar alun-alun, Mitsubishi, dan sebagainya.

Dalam rangka membangun kesadaran masyarakat untuk membangun perilaku hidup bersih dan sehat, Forum juga melakukan sosialisasi dan konsolidasi dengan pengurus forum di tingkat kecamatan dan kelurahan, yang dipayungi oleh Dinas Kesehatan. Sosialisasi ke sekolah dan pesantren juga dilakukan.

Sistem sosial melakukan proses perubahan dan menjadi kebiasaan masyarakat, tidak pernah terpisahkan dari peran sistem budaya, memerlukan kesesuaian antara inovasi dengan nilai-nilai kepercayaan yang dianut. Cepat atau lambat adopsi berbagai macam informasi yang terkait dengan kelestarian lingkungan, sangat tergantung dari itikad baik seluruh unsur dalam sistem sosial, terutama pemerintah. Bila pimpinan daerah sebagai agen pembaharu, tidak peduli terhadap inovasi program PHBS, masyarakat akan lebih tidak peduli dengan lingkungannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Embay selaku Ketua Forum Kota Serang Sehat periode 2013-2018 (dua periode), bahwa:

“Untuk mengubah kebiasaan masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat, perlu keterlibatan aktif unsur penentu kebijakan. Instruksi terpadu dan terkoordinasi untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta terbangunnya berperilaku hidup bersih dan sehat dari setiap warga masyarakat Kota Serang, mulai dari pimpinan wilayah Kota, Kecamatan, kelurahan, sampai wilayah terkecil, yaitu Ketua RT menjadi faktor sangat penting dalam melakukan percepatan perubahan.”

Begitu pula yang dikatakan oleh Soekartawi (1988) mengatakan bahwa sistem sosial masyarakat, akan mempengaruhi proses adopsi inovasi mengenai informasi kelestarian lingkungan yang disampaikan oleh Forum Kota Sehat. Itikad

baik pemerintah kota dapat dikatakan masih belum optimal dalam membentuk kesadaran masyarakat. Komitmen dan konsistensi pemerintah dalam memperhatikan pemberdayaan masyarakat kumuh dan miskin, belum terlihat signifikan. Upaya capaian program hanya bersifat wacana atau slogan-slogan saja. Bahkan diantara instansi pemerintah masih terjadi *overlapping* dan *egosentris* program. Belum terdapat komunikasi terpadu dan bersinergi antar unit kerja. Akibatnya, hasil kerja pemerintah belum terlihat signifikan dalam melakukan perubahan masyarakat ber-PHBS.

Apabila aparat pemerintah lebih peduli pada kesehatan lingkungan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, akan terus melakukan gerakan secara *massif* dalam memprioritaskan capaian program PHBS yang disosialisasikan oleh Forum Kota Serang Sehat (FKSS). Bila pimpinan daerah peduli terhadap PHBS, perangkat daerah akan peduli. Sebaliknya, bila pimpinan daerah tidak peduli, aparat daerah akan lebih tidak peduli. Untuk mencapai target SDGs (Sustainable Development Goals) yang belum optimal pada konsep MDGs 2015, antara lain menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, membangun kelestarian lingkungan, dan membangun kemitraan global untuk pembangunan. Dalam hal ini, FKSS bersinergi dengan pimpinan daerah terus berupaya menggerakkan seluruh tokoh masyarakat dan stakeholder, menyadarkan masyarakat untuk peduli terhadap kesehatan lingkungan, khususnya dalam mencapai tujuan *program kelestarian lingkungan hidup*. Dengan

mengutamakan penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak, melalui pemberdayaan masyarakat agar ikut bertanggung jawab dalam mengelola infrastruktur dan pembangunan sarana sanitasi. Target yang dicapai yaitu: memenuhi 50% dari jumlah masyarakat yang sulit mengakses air minum dan sanitasi. Hal ini sesuai kesepakatan masyarakat dunia yang sadar bahwa semua stakeholders bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat, terutama mengenai pelayanan kesehatan primer (*primary health care*) yang mencakup 8 (delapan) unsur pokok bidang kesehatan, yaitu: Penyuluhan kesehatan; Gizi; *Sanitasi dasar dan air bersih*; KIA, kesehatan Ibu dan anak; Imunisasi terhadap 6 (enam) penyakit utama: BCG, Difteria, Pertusis, Tetanus, Polio, dan Campak; Pencegahan dan pengelolaan penyakit endemic; Pengobatan penyakit yang umum dijumpai; Tersedianya obat esensial. (Sumber: Liliweri, 2011: 64)

Berdasarkan kondisi yang ada di wilayah Kota Serang, dapat dikatakan bahwa konsep kota dalam taman yang bersih, sehat, selaras, dan lestari, terasa masih jauh dari impian. Masyarakat cenderung malas dan jorok, tidak peduli lingkungan sekitarnya. Saat ini, masih banyak ditemukan masyarakat yang selalu ingin diberi umpan, seperti pemberian stimulan MCK. NP Rahadian mengatakan bahwa upaya mengubah mindset/pola pikir dan kebiasaannya, dengan menggerakkan tokoh masyarakat yang disegani dan betul-betul tulus membangun masyarakat berkehidupan lebih baik. Masyarakat diajak bicara mengenai membangun kesadaran menjaga kelestarian lingkungan yang akan diterapkan, khususnya terkait program PHBS ini. Perlu kemauan yang keras dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ber-PHBS. Selain itu H. Embay menyatakan pula bahwa

pemahaman masyarakat tentang kesehatan masih sangat rendah. Masyarakat Banten yang dikenal religious, tapi belum menerapkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, sebagai acuan hidup mayoritas masyarakat Kota Serang.

Dengan demikian, perlu melakukan pendekatan melalui peran tokoh agama, belum menyentuh aspek-aspek kehidupan secara factual, bekerja sama dengan LSM dan swasta, agar dapat mendorong masyarakat berorientasi pada pembangunan sanitasi, didukung kemauan dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, percepatan perubahan perilaku inilah yang harus dipicu.

Di samping itu, **sumber komunikasi** yang digunakan masih belum optimal, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap tahap pengetahuan. Bagaimanapun sumber komunikasi memegang peranan penting dalam proses penyebaran inovasi, karena dapat membantu proses penyebaran informasi dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat disampaikan ke seluruh lapisan masyarakat. Sumber komunikasi yang digunakan tidak mampu mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan jamban. Dalam Hamidjoyo, 2005 dikatakan bahwa: *“suatu inovasi hampir selalu menghadapi tantangan dari masyarakat. Persoalannya kemudian, apakah tantangan itu selalu berujung pada kegagalan? Kegagalan dalam mensosialisasikan sesuatu inovasi salah satunya disebabkan oleh adanya persepsi atau cara pandang yang kurang tepat khususnya berkaitan dengan karakteristik masyarakat sasaran.”*

Di samping itu, pendekatan sumber komunikasi melalui bentuk komunikasi interpersonal, dalam melakukan sosialisasi untuk menyentuh tahap pengetahuan, juga masih sangat minim. Hal ini didukung oleh tenaga penyuluh atau agen



pembaharu memiliki tugas menyebarkan informasi mengenai kelestarian lingkungan. Namun dengan segala keterbatasan yang ada, baik dari sumber daya manusia maupun fasilitas lainnya, belum menyentuh secara keseluruhan sampai ke lapisan masyarakat terkecil.

Upaya memotivasi masyarakat melakukan perubahan jauh dari kebiasaan semula, diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat. Peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan sehat, *akan mendorongnya untuk ber-PHBS, disertai dukungan dari lingkungan sosialnya, seperti keluarga, tokoh panutan, kelompok pengajian, dan lain-lain*. Setidaknya masyarakat akan mengalami peningkatan dari fase *tahu* ke fase *mau*. Masyarakat dapat meningkatkan kemampuannya melalui proses belajar, sehingga bersama anggota masyarakat lain dapat menolong diri sendiri, serta mengembangkan kegiatan bersumber daya masyarakat. Sesuai kondisi sosial budaya setempat, didukung kebijakan publik berwawasan kesehatan. Adapun beberapa strategi perubahan mendasar pada masyarakat kumuh dan miskin perkotaan di Kota Serang, diantaranya:

- a. Mengoptimalkan peran penyuluh kesehatan/tim kesehatan keliling di setiap wilayah rawan berperilaku tidak bersih dan sehat, seperti daerah yang terlewati rel kereta api (Penancangan, Cilame, Sumurpecung, dan sebagainya), daerah yang memiliki banyak tanah kosong/semak, area aliran sungai/kali, dan lain-lain yang berpotensi masyarakat berperilaku tidak bersih dan sehat;
- b. Menentukan sasaran capaian program;
- c. Menentukan target lamanya waktu yang diperlukan;

d. Merancang cara-cara efektif menyentuh masyarakat agar mau mengubah kebiasaan buruk yang sudah cukup lama dilakukan.

Pemerintah harus berkomunikasi dan mencari dukungan kepada seluruh pihak, membangun transparansi dan keberpihakan pada masyarakat miskin. Manfaat program PHBS sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari, yang penting semua unsur anggota masyarakat menjadi variabel peubah menciptakan lingkungan sehat, bersih, serasi, selaras, dan lestari.

Kebanyakan dari mereka tidak memahami resiko yang akan terjadi, berakibat pada pencemaran udara, air, dan tanah, serta berkembangannya potensi penyakit diare, ISPA, types dan sebagainya, bahkan sampai menimbulkan kematian. dr. Ella mengatakan: “*Strategi terkait pelaksanaan program kelestarian lingkungan, perlu dibarengi penyadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan jamban. Sejak tahun 2012, sebenarnya sudah dicanangkan gerakan pemberdayaan masyarakat.*” Hal ini dilakukan, agar masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam membangun kesehatan lingkungan. Pendekatan melalui 3 (tiga) pilar PRA (*Participatory Rural Appraisal*), yaitu: *Attitude and behaviour change* (perubahan perilaku dan kebiasaan), *sharing* (berbagi), dan *method* (metode). Jika perilaku dan kebiasaan tidak berubah, maka tidak akan pernah mencapai tahap *sharing* dan sangat sulit menerapkan metode. Partisipasi masyarakat setempat menjadi tolak ukur bagi keberhasilan proses pemberdayaan. Oleh karena keberadaan Forum Kota Sehat sebagai komunitas yang begitu konsern dan berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki kabupaten/kota berbasis kesehatan menjadi sangat diperlukan, agar

masyarakat dengan mudah melakukan perubahan perilaku, dari tidak tahu menjadi tahu, serta mau mengikuti secara sadar dan aktif menerapkan kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Permasalahan kelestarian lingkungan yang harus segera diatasi di wilayah Kota Serang, diantaranya pengelolaan sampah yang belum optimal masih menjadi persoalan mendasar bagi pemerintah kota serang, khususnya kebiasaan perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan, produk sampah plastik yang sudah semakin tidak terbandung, hingga perlu diterbitkan kebijakan plastik berbayar yang menimbulkan polemik, ketersediaan air bersih yang masih terbatas, tata kota yang masih perlu penataan optimal, termasuk lingkungan pasar-pasar di wilayah kota serang, area-area pertokoan-pertokoan masih perlu aturan yang tegas dalam membangun kesadaran akan kewajibannya menata lingkungan lebih bersih, sehat, dan teratur. Warga sekolah/pesantren/ perguruan tinggi yang masih perlu ditanamkan perilaku yang memiliki kesadaran tinggi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Perubahan begitu masif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat dan stakeholder terkait didukung pula oleh ketersediaan dana yang betul-betul berorientasi pada pembangunan yang berbasis kesehatan.

Faktor penghambat dan pendukung yang turut memberikan kontribusi bagi terciptanya kelestarian lingkungan Kota Serang Sehat

(a) Faktor penghambat dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Kota Serang, antara lain:

- (1) Karakteristik masyarakat Kota Serang yang relatif sulit berubah;
- (2) Perilaku masyarakat yang belum memiliki kesadaran hidup bersih dan sehat.
- (3) Komitmen pemerintah sebagai salah satu bagian dari sistem sosial belum optimal berorientasi pada perubahan mendasar dalam membangun kesadaran masyarakat peduli lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman.
- (4) Program pemerintah yang belum bersinergi antar SKPD terkait dan stakeholder lainnya. Seringkali terjadi overlapping dan egosentris program antar SKPD.
- (5) Ketersediaan anggaran masih terbatas.
- (6) Keterbatasan waktu dan tenaga dari sumber daya manusia yang ada.
- (7) Masyarakat maunya disuapi dan kurang termotivasi memiliki kesadaran menjaga kelestarian lingkungan tetap terjaga bersih dan sehat.

(b) Faktor penunjang dalam menjaga kelestarian lingkungan menuju Kota Serang yang bersih, sehat, aman, dan nyaman, diantaranya:

- (1) Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan RI yang tertuang dalam Peraturan No. 34 Tahun 2005 dan No. 1138/Menkes/PB/VIII/2005 mengenai Pedoman penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.
- (2) Terbentuknya Forum Kabupaten/Kota Sehat?kecamatan sampai tingkat kelurahan dan organisasi terkecil dalam masyarakat.

- (3) Orientasi pemerintah sudah mulai memikirkan keberadaan Forum Kota untuk turut mewujudkan Kota Sehat.

Strategi yang dilakukan oleh Forum dalam upaya mencapai kelestarian Kota Serang menuju kota sehat, bersih, aman dan nyaman, yaitu: Forum membangun hubungan dengan seluruh stakeholder, terjun langsung ke masyarakat, membaca kebutuhan masyarakat, mensinergikan kegiatan dengan seluruh SKPD terkait, menginventaris seluruh potensi Kota Serang dalam membangun Kota Sehat, berkoordinasi dengan seluruh elemen kesehatan baik di tingkat kelurahan, kecamatan sampai pemerintah kota serang. Memberikan pencerahan langsung kepada peserta didik, baik di lingkungan sekolah pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Selain itu, untuk melakukan sosialisasi dan menanamkan kesadaran pada masyarakat, digunakan pula media komunikasi yang mampu menyentuh langsung sampai ke kelompok masyarakat terkecil, baik dengan cara mengoptimalkan bentuk komunikasi interpersonal melalui pemberdayaan tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh agama, serta media komunikasi lainnya yang mampu mendekatkan informasi mengenai kelestarian lingkungan dengan masyarakat.

#### **SARAN**

- 1) Pemerintah Kota Serang melalui SKPD terkait terus melakukan sinerjitas program dengan Forum Kota Sehat, agar lebih berdaya guna dilihat dari aspek waktu dan kegiatan dalam menyelesaikan persoalan lingkungan.

- 2) Pemberdayaan Forum hendaknya lebih optimal, ditunjang pula dengan biaya dan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan kegiatan yang begitu besar bagi kemaslahatan warga masyarakat Kota Serang dan sekitarnya.
- 3) Perlu aturan yang tegas dalam membentuk pembiasaan pada masyarakat untuk mengubah perilaku mendasar melakukan perubahan, menjadikan Kota Serang yang bersih, sehat, aman, dan nyaman.

### **Daftar Pustaka**

- Arief, Sritua dan Adi Sasono. 1984. *Ketergantungan dan Keterbelakangan, Sebuah Studi Kasus*. Penerbit Sinar Harapan, Jakarta.
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed, Edisi ketiga*. Penerjemah: Achmad Fawaid. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Devito, Joseph A. 1997. *Komunikasi Antar Manusia*, Alih Bahasa oleh: Agus Maulana, Penerbit Professional Book, Jakarta.
- Dilla, Sumadi. 2007. *Komunikasi Pembangunan, Pendekatan Terpadu*. Cetakan Pertama. Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Fishbein, M. & Ajzen, I., 1975. *Beliefs, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Philippines: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Fukuyama, Francis, 2002. *The Great Disruption, Hakekat Manusia dan Rekonstruksi Tatanan Sosial*, alih bahasa Ruslani, Yogyakarta: Penerbit Qalam
- Garna, Judistira K. 2007. *Sistem Budaya Indonesia*. The Judistira Garna Foundation dan Primaco Akademika, Bandung.
- Hamidjoyo, Santoso. 2005. *Komunikasi Partisipatoris, Pemikiran dan Implementasi Komunikasi Dalam Pembangunan Masyarakat*. Humaniora, Bandung.
- Hanafi, Abdillah, 1987. *Memasyarakatkan Ide-ide Baru*. Usaha Nasional Surabaya, Indonesia.

Liliweri, Alo. 2002. *Komunikasi Kesehatan*. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Littlejohn, Stephen W. & Karen A. Foss. 2008. *Theories of Human Communications*, Ninth Edition. Thomson Wadsworth, USA.

Rogers, Everett M., 1983. *Diffusion Of Innovations, Third Edition*. The Free Press. A Division of Macmillan Publishing Co., Inc. 866 Third Avenue, New York, 10022.

## **Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor di Banten Selatan**

**Anis Fuad, Shanti Kartika Dewi dan Arenawati**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
anis.fuad@untirta.ac.id, kartika@untirta.ac.id dan arenawatiprawoto@gmail.com

### **ABSTRAK**

Banten Selatan adalah bagian dari wilayah Provinsi Banten yang berada di wilayah utara, yang meliputi Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Banten Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk dikembangkan, juga potensi pendapatan lain yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu potensi yang potensial dan masih dapat dikembangkan adalah pajak kendaraan bermotor. Terbatasnya jam operasional angkutan umum perkotaan dan perdesaan dan terbatasnya trayek menyebabkan pertumbuhan yang pesat pada kendaraan roda dua. Pengembangan kawasan dengan tumbuhnya beberapa industri seperti pabrik semen merah putih turut mendorong pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Lebak. Namun berdasarkan hasil observasi didapatkan bahwa kendaraan yang berada di Banten Selatan, terutama kabupaten Lebak berplat nomor dari luar Banten, diantara berplat nomor Sukabumi, Bogor dan Jakarta. Sehingga kontribusi pajak kendaraan bermotor pun menjadi berkurang. Oleh karena itu penelitian ini memberikan penjelasan seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lebak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dimana sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor di wilayah Banten Selatan adalah sebesar 5,24 %.

**Kata Kunci :** Pendapatan Asli Daerah, Potensi, Kendaraan Bermotor

### **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan otonomi daerah berkonsekuensi tidak hanya pada kemandirian penyelenggaraan pemerintah juga pada kemandirian dalam hal fiskal. Setiap pemerintahan daerah memiliki persoalan kesenjangan fiskal yakni kesenjangan antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) sehingga Pemerintahan Daerah dituntut untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki selain dituntut untuk



mengelola penggunaan anggaran dengan prinsip *money follow function*. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelola Kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Provinsi Banten jika dilihat dalam kurun waktu 2014 sampai dengan Agustus 2015 capaian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) selalu mengalami peningkatan. Realisasi pendapatan daerah di tahun 2014 sebesar 4,897,761 triliun sedangkan tahun 2015 adalah 4,934,391 triliun (disajikan pada tabel 1).

**Tabel Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Provinsi Banten  
(dalam juta)**

URAIAN	2014	S.D. TW IV-2014		2015		S.D. TW IV-2015	
	APBD-P	REALISASI	%	APBD	APBD-P	REALISASI	%
Pendapatan Asli Daerah	4,662,415	4,897,761	105%	5,133,482	5,069,785	4,934,391	97%
Dana Perimbangan	1,167,745	1,159,663	99%	1,122,954	1,182,169	976,178	83%
Lain-lain pendapatan yang sah	1,010,827	1,008,551	100%	1,388,198	1,390,119	1,378,295	99%
<b>Total Pendapatan Daerah</b>	<b>6,840,987</b>	<b>7,065,975</b>	<b>103%</b>	<b>7,644,634</b>	<b>7,642,073</b>	<b>7,288,864</b>	<b>95%</b>
Belanja Tidak Langsung	4,351,472	4,013,612	92%	4,927,482	4,980,853	4,759,533	96%
Belanja Langsung	3,521,232	2,178,584	62%	4,020,152	4,297,215	3,324,203	77%
<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>7,872,704</b>	<b>6,192,195</b>	<b>79%</b>	<b>8,947,634</b>	<b>9,278,067</b>	<b>8,083,736</b>	<b>87%</b>
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>-</b>	<b>873,780</b>			<b>(1,635,994)</b>	<b>(794,872)</b>	<b>49%</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1,069,805	1,069,805	100%	1,325,000	1,907,994	1,907,994	100%
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>1,069,805</b>	<b>1,069,805</b>	<b>100%</b>	<b>1,325,000</b>	<b>1,907,994</b>	<b>1,907,994</b>	<b>100%</b>
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	38,088	38,088	100%	22,000	272,000	22,000	8%
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>38,088</b>	<b>38,088</b>	<b>100%</b>	<b>22,000</b>	<b>272,000</b>	<b>22,000</b>	<b>8%</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>1,031,717</b>	<b>1,031,717</b>	<b>100%</b>	<b>1,303,000</b>	<b>1,635,994</b>	<b>1,885,994</b>	<b>115%</b>
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	-	1.905.497	-	-	-	1,091,122	-

Sumber: BI, Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Prov. Banten Triwulan IV-2015

Provinsi Banten terbagi atas dua wilayah yakni Utara dan Selatan. Wilayah Utara terdiri dari Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Kota Serang sedangkan wilayah Selatan hanya terdiri atas dua kabupaten saja yakni Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Meskipun wilayah selatan hanya terdiri atas dua wilayah administratif namun luas wilayah kedua kabupaten tersebut mencakup 63% wilayah Banten. Namun dari sisi ekonomi data BPS menjelaskan bahwa kontribusi wilayah Selatan lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Utara (lihat tabel dibawah).

**Tabel PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kab/Kota di Provinsi Banten (miliar rupiah) kurun waktu 2012-2015**

<b>Kabupaten/Kota Regency/City</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014<sup>x</sup></b>	<b>2015<sup>xx</sup></b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Kabupaten/Regency</b>				
1. Pandeglang	15 115,44	16 443,91	18 195,67	20 277,96
2. Lebak	15 125,90	16 742,05	18 606,94	20 729,20
3. Tangerang	72 303,65	80 570,55	91 692,76	102 044,71
4. Serang	42 039,51	45 972,29	51 430,75	56 313,72
<b>Kota/City</b>				
1. Tangerang	83 648,13	94 561,02	110 772,32	126 119,12
2. Cilegon	55 414,14	61 746,90	70 030,67	77 962,90
3. Serang	15 506,67	17 452,62	19 691,30	21 866,58
4. Tangerang Selatan	39 071,49	44 346,74	50 214,64	56 044,37
<b>Jumlah/Total</b>	<b>338 224,93</b>	<b>377 836,08</b>	<b>430 635,05</b>	<b>481 358,56</b>

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya  
Source: Based on Census, Surveys, and Other Sources

Sumber : BPS. Provinsi Banten dalam Angka 2016

Meskipun demikian, Banten wilayah Selatan memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang besar pada triwulan 1 2016 Kabupaten Lebak mampu menyerap penanaman modal dalam negeri (PMDN) berjumlah 7 proyek yang bernilai Rp. 646.048.500 dan penanaman modal asing berjumlah 5 proyek yang bernilai 6.041 USD. PMDN Kabupaten Lebak lebih besar dibandingkan dengan Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang.

Komponen terbesar penyumbang pendapatan daerah Provinsi Banten adalah PAD terutama yang berasal dari Pajak Daerah. Pada triwulan II tahun 2016 saja komposisi realisasi PAD setidaknya 90% berasal dari penerimaan pajak daerah. Dalam tabel 5 dapat dilihat dari target APBD 2016 pajak daerah 4,985,942 triliun terealisasi 2,369,878 triliun dan hal yang sama pula terjadi pada tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah masih menjadi pilihan yang realistis dan rasional dalam hal peningkatan potensi pendapatan daerah bagi Provinsi Banten.

**Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Banten per komponen (dalam juta)**

URAIAN	2015	S.D. TW II-2015		2016	S.D. TW II-2016	
	APBD-P	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
Pajak Daerah	4,944,468	2,202,798	45%	4,985,942	2,369,878	48%
Retribusi Daerah	41,827	17,054	41%	52,629	32,755	62%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	40,900	42,400	104%	42,425	49,973	118%
Lain-lain PAD	106,288	83,799	79%	161,334	61,525	38%
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>5,133,482</b>	<b>2,346,051</b>	<b>46%</b>	<b>5,242,330</b>	<b>2,514,132</b>	<b>48%</b>
Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	460,986	210,466	46%	526,279	262,446	50%
Dana Alokasi Umum	640,981	374,022	58%	693,447	346,724	50%
Dana Alokasi Khusus	20,986	6,296	30%	1,537,832	989,880	64%
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1,122,954</b>	<b>590,784</b>	<b>53%</b>	<b>2,757,558</b>	<b>1,599,050</b>	<b>58%</b>
Pendapatan Hibah	5,400	437	8%	5,400	2,740	51%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1,382,798	687,491	50%	-	-	
Pendapatan Lainnya	-	2,338		-	811	
<b>Lain-lain Pendapatan</b>	<b>1,388,198</b>	<b>690,266</b>	<b>50%</b>	<b>5,400</b>	<b>3,550</b>	<b>66%</b>
<b>Total Pendapatan</b>	<b>7,644,634</b>	<b>3,627,101</b>	<b>47%</b>	<b>8,005,287</b>	<b>4,116,732</b>	<b>51%</b>

Sumber: BI. Keadaan Ekonomi Regional Provinsi Banten Agustus 2016.

Dari 5 (lima) objek pajak daerah provinsi yang memberikan kontribusi tertinggi adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Dalam tabel 7 terlihat bahwa target APBD terhadap PKB dan BBNKB jika dijumlah hasilnya 70% dari total penerimaan pajak daerah.

**Tabel Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Banten**

Jenis Pajak	APBD	I 2016	%	II 2016	%
Pajak kendaraan bermotor	1,697,220	276,894	16%	908,398	54%
Bea balik nama kendaraan bermotor	1,942,200	304,432	16%	986,584	51%
Pajak air permukaan	30,500	4,653	15%	15,931	52%
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	786,022	133,860	17%	378,398	48%
Pajak Rokok	530,000	80,568	15%	80,568	15%
<b>Total</b>	<b>4,985,942</b>	<b>800,407</b>	<b>16%</b>	<b>2,369,878</b>	<b>48%</b>

Sumber : BI. Kondisi Regional Ekonomi Provinsi Banten Agustus 2016

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan diatas penelitian ini bermaksud untuk meneliti tentang Kontribusi pendapatan daerah yang difokuskan pada Pendapatan Asli Daerah yang bersumber pada Pajak Daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Banten Selatan Studi Kasus pada UPTD Malingping dan Lebak.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pendapatan Daerah**

Kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi *issue* yang dihadapi oleh setiap Pemerintahan Daerah, karena kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) akan menimbulkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan PAD tanpa harus melanggar norma-norma dengan cara mengoptimalisasi potensi yang ada. Optimalisasi PAD dari sisi penerimaan hendaknya diikuti dengan pengelolaan penggunaan anggaran dari sisi pengeluaran dan dikelola dengan baik dengan prinsip *value for money* serta dilakukan secara komprehensif dengan berbagai strategi sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah dan keuangan negara, dengan peningkatan prosedur pengendalian dari intern pemerintah daerah agar terpenuhi prinsip *stewardship dan accountability*.

## **Sumber Pendapatan Daerah**

Menurut UU 23 Tahun 2014, sumber keuangan daerah adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1). Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2). Peraturan

Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan persyaratan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan, karena SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 128 ayat (2).

Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, dalam UU Nomor 23/2014 terdiri dari :

- 1) Pajak daerah,
- 2) Retribusi daerah,
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

#### **b. Pajak Daerah**

Pajak Daerah menurut UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah menurut Davey dalam Nurcholis (2007:182) adalah :

- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.

3) Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dalam pelaksanaan desentralisasi keuangan daerah, jenis-jenis pajak dibedakan atas pajak daerah yang dipungut provinsi dan yang dipungut kabupaten/kota.

Jenis-jenis pajak daerah yang dipungut provinsi, (Mardiasmo,2004:140) yaitu :

- 1) Pajak kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air (PKB-KAA) dengan tarif 5%.
- 2) BBNKB (Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor) dan KAA (kendaraan diAtas Air) dengan tariff 10%.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan tarif 5%.
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT dan AP) dengan tarif 20%.

Sebagian hasil pajak ini dibagi ke Kab/Kota dangan ketentuan :

- 1) Minimum 30% dari PKB-KAA dan BBN-KAA
- 2) Minimum 70 % dari PBB-KB
- 3) Minimum 70 % dari P3ABT dan AP

Jenis-jenis Pajak pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel dengan tarif 10%.
- 2) Pajak Restoran dengan tarif 10%
- 3) Pajak Hiburan dengan tarif 35%
- 4) Pajak Reklame dengan tarif 25%
- 5) Pajak Penerangan Jalan dengan tarif 10%



- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C dengan tarif 20%
- 7) Pajak Parkir dengan tarif 20%

Berdasarkan Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, jenis Pajak Daerah Provinsi Banten, terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

#### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Obyek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdapat di daerah. Yang termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 Perda Nomor 1 tahun 2011 adalah :

- a. Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat .
- b. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 GT sampai dengan 7 GT.

Yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor disini adalah :

- a. kereta api

- b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara
- c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbale balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan :

- a. Untuk kendaraan bermotor pribadi sebesar 1,5%
- b. untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah Pusat/Daerah, TNI, POLRI sebesar 1%.
- c. kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2%

Setiap kepemilikan kendaraan bermotor pribadi, kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif. Besarnya tarif progresif (pasal 8 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2011) sebagai berikut :

- a. Untuk kepemilikan kedua sebesar 2 %
- b. untuk kepemilikan ketiga sebesar 2,5 %
- c. Untuk kepemilikan keempat sebesar 3 %
- d. Untuk kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 %

Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud didasarkan atas nama dan/alamat yang sama.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini fokus pada tujuannya yaitu memperoleh gambaran tentang Kontribusi PAD wilayah Banten Selatan, mendapat gambaran strategi peningkatan PAD Banten Selatan. Berdasarkan karakteristik tujuan tersebut maka penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif.

### **Sumber Data**

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan langsung dari responden di lapangan, serta hasil wawancara dengan sejumlah informan. Di samping itu digunakan pula data sekunder berupa publikasi resmi dan dokumen lain yang dipublikasi oleh instansi yang berwenang, antara lain:

1. Dinas pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten
3. Data statistik pengumpulan data di lapangan (kecamatan Malimping, Kecamatan Pasanggrahan, kecamatan Bayah dan Kecamatan Cilograng).

### **Metode Pengumpulan Data**

Sesuai dengan karakteristik data yang akan digunakan dalam penelitian ini maka pengumpulan data akan mengkombinasikan beberapa teknik dalam pengumpulan data yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara

mendasar. Metode yang digunakan oleh penulis adalah : penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, observasi.

### **.Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Proses pengolahan dilakukan dengan memanfaatkan piranti lunak *Microsoft Excel 2013*. Analisis data juga diolah dengan menggunakan piranti lunak *Microsoft Excel 2013* untuk melakukan analisis statistik secara deskriptif.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif. Peneliti mencoba mengolah data yang diperoleh lewat pendeskripsian sebuah fenomena yang diteliti melalui penjelasan fakta berdasarkan data di lapangan. Analisis kontribusi dapat dilihat dari rumus berikut:

$$Kontribusi = \frac{\text{Penerimaan PKB/BBNKB UPTD tahun ke } - n}{\text{Penerimaan PKB/BBNKB DPPKD tahun ke } - n} \times 100\%$$

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan sumber PAD bagi Provinsi Banten yang memiliki kontribusi yang besar bagi pembangunan di Propinsi Banten.. Kinerja UPTD dalam menyerap pendapatan dari dua jenis pendapatan ini menunjukkan hasil yang sangat baik, dimana realisasi pencapaiannya adalah 92 %. Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Banten berdasarkan UPTD pada tanggal 8 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB Provinsi Banten Per 8  
Desember 2016**

Nama UPTD	Penerimaan PKB dan BBNKB	Realisasi (%)
Serang	145.923.405.650	91,13%
Cikande	169.216.005.700	91,36%
Cilegon	159.132.623.800	92,22%
Lebak	71.525.482.600	91,03%
Pandeglang	93.665.832.550	89,29%
Malingping	25.508.816.400	89,89%
Balaraja Banten	223.957.922.000	90,83%
Balaraja Metro	634.430.821.250	93,30%
Serpong	403.732.565.950	93,02%
Ciputat	608.115.574.250	93,49%
Cikokol	549.211.347.831	93,95%
Ciledug	402.324.624.450	93,62%
Jumlah	3.486.745.022.431	92,85%

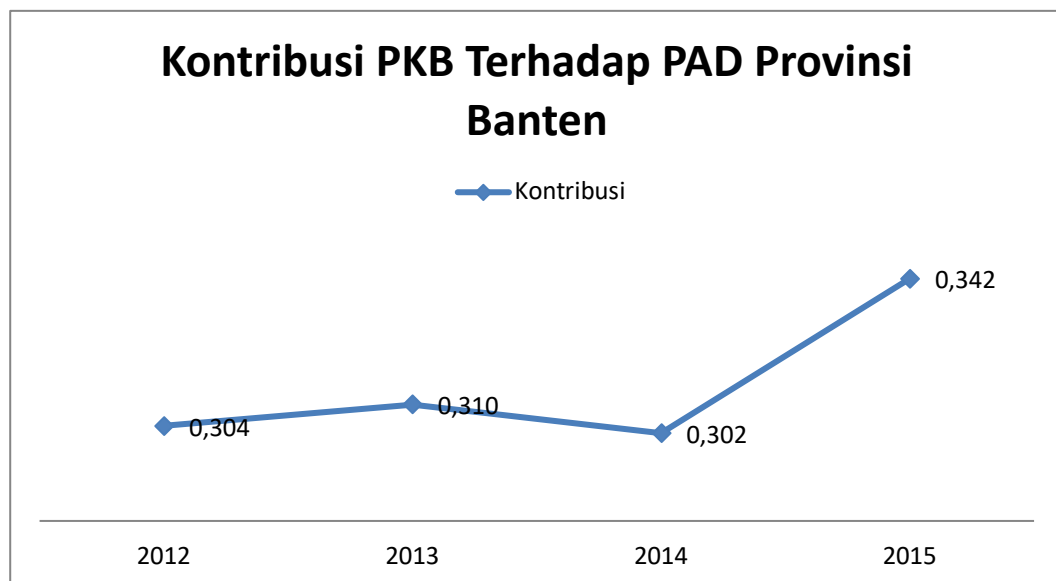
Berdasarkan pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi Penerimaan pajak daerah PKB dan BBNKB pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.486.754.022.431,- , realisasi tersebut sudah mencapai 92,85 5 dari yang ditargetkan. Dari 12 UPTD yang terdapat di Provinsi Banten, UPTD Pandeglang dan Malingping realisasi penerimaan PKB dan BBNKB masih dibawah 90% sementara itu UPTD Lebak sudah mencapai 91,03 %. Berdasarkan jumlah

penerimaan UPTD Pandeglang, Lebak dan Malingping adalah 3 UPTD dengan target penerimaan terendah. Hal ini dikarenakan jumlah kendaraan di ketiga wilayah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah lainnya. Tercatat pada tahun 2015 kendaraan bermotor dari berbagai jenis di wilayah kabupaten Pandeglang dan Lebak terdapat 489.596 kendaraan dari 4.599.429

### **Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Banten**

Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten digambarkan pada grafik berikut :

**Grafik Kontribusi Penerimaan PKB terhadap Penerimaan PAD  
Provinsi Banten Tahun 2012-2015**



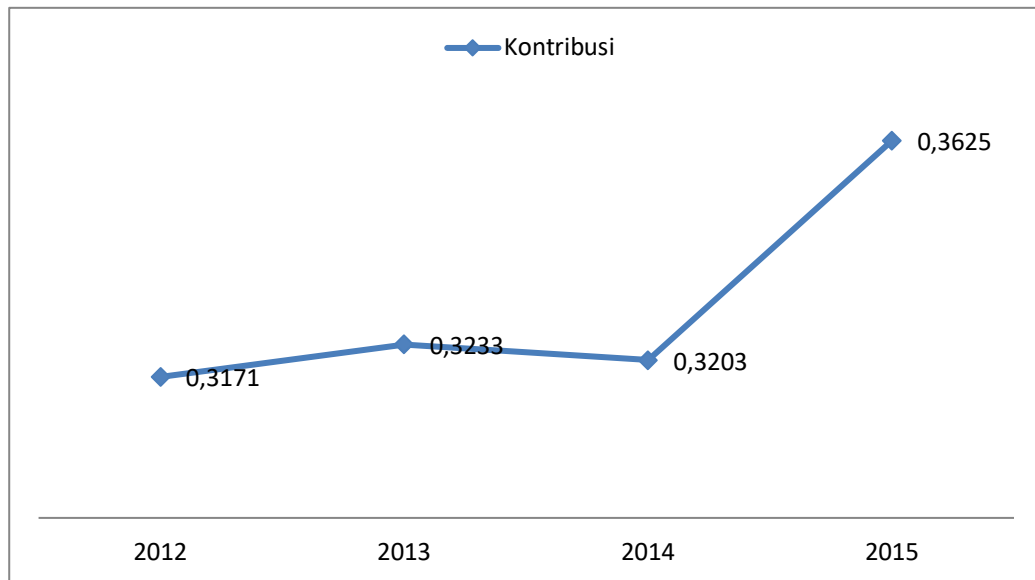
Sumber : DPPKD dan Banten Dalam Angka Tahun 2016, diolah

Berdasarkan pada grafik diatas dapat dijelaskan bahwa kontribusi dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Banten sebesar 0,304 pada tahun 2012, yang artinya penerimaan dari PKB menyumbang sebesar 30,4% dari total PAD yang diterima oleh Provinsi Banten. Ini menunjukkan bahwa PKB memiliki kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan PAD di Provinsi Banten. Pada Tahun 2013 kontribusi PKB meningkat menjadi 0,310. Pada tahun PKB memberikan sumbangan sebesar 31% bagi PAD Provinsi Banten. Pada tahun 2014 kontribusi PKB terhadap PAD mengalami penurunan sekitar 0,8 %. sehingga sumbangan untuk PAD pun menurun menjadi 30,2 %. Pada tahun 2015 kontribusi penerimaan PKB meningkat cukup signifikan menjadi 0,342, yang artinya penerimaan PKB telah menyumbang sebesar 34,2 % dari seluruh penerimaan yang bersumber dari PAD.

### **Kontribusi PKB Terhadap PAD Sektor Pajak Daerah Provinsi Banten**

Pajak Kendaraan bermotor (PKB) adalah salah satu komponen Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Banten. Dari 5 komponen Pajak yang menjadi kewenangan Provinsi Banten : PKB, BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, PKB memiliki kontribusi rata-rata setiap tahunnya lebih dari 30%. Gambaran perkembangan kontribusi PKB terhadap Penerimaan Pajak Daerah provinsi Banten adalah sebagai berikut :

**Grafik Kontribusi Penerimaan PKB Provinsi Banten Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2015**



Sumber : DPPKD dan Banten Dalam Angka 2016, diolah

Berdasarkan pada grafik tersebut nampak bahwa kontribusi PKB terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi Banten secara trend mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2014 mengalami sedikit penurunan, namun pada tahun 2015 kembali meningkat sekitar 4,25%. Keadaan ini menunjukkan bahwa penerimaan PKB dapat menjadi penentu keberhasilan pencapaian Penerimaan Pajak Daerah.

**Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Malimping, UPTD Lebak dan UPTD Pandeglang**

UPTD Malimping, UPTD Lebak dan UPTD Pandeglang adalah UPTD yang berada di wilayah Banten Selatan. Penerimaan PKB di ketiga UPTD tersebut merepresentasikan keberadaan kendaraan dan penerimaan dari dua jenis pajak



tersebut di wilayah Banten bagian selatan. Bagaimana perkembangan penerimaan PKB dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel Penerimaan PKB Provinsi Banten Tahun 2012 - 2015

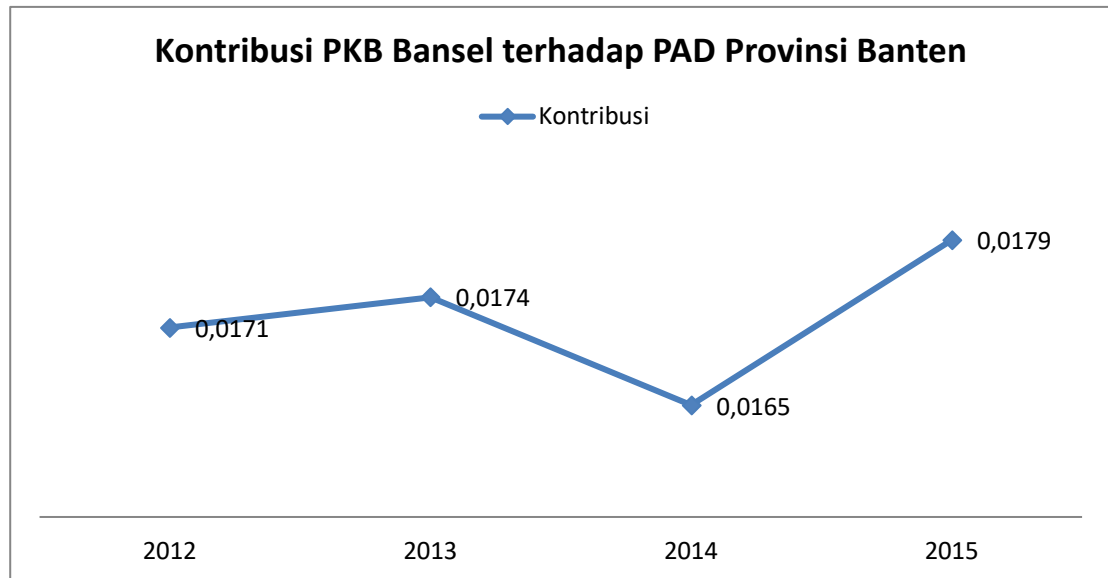
<b>Nama UPTD</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
UPTD Malimping	-	9.969.743.400	11.712.635.950	12.121.280.400
UPTD Lebak	30.825.422.000	27.244.813.600	30.284.260.200	33.746.637.900
UPTD Pandeglang	27.372.798.600	34.454.865.900	38.681.343.600	43.118.266.950
Jumlah	58.198.220.600	71.669.422.900	80.678.239.750	88.986.185.250

Sumber : DPPKD Provinsi Banten 2016, diolah

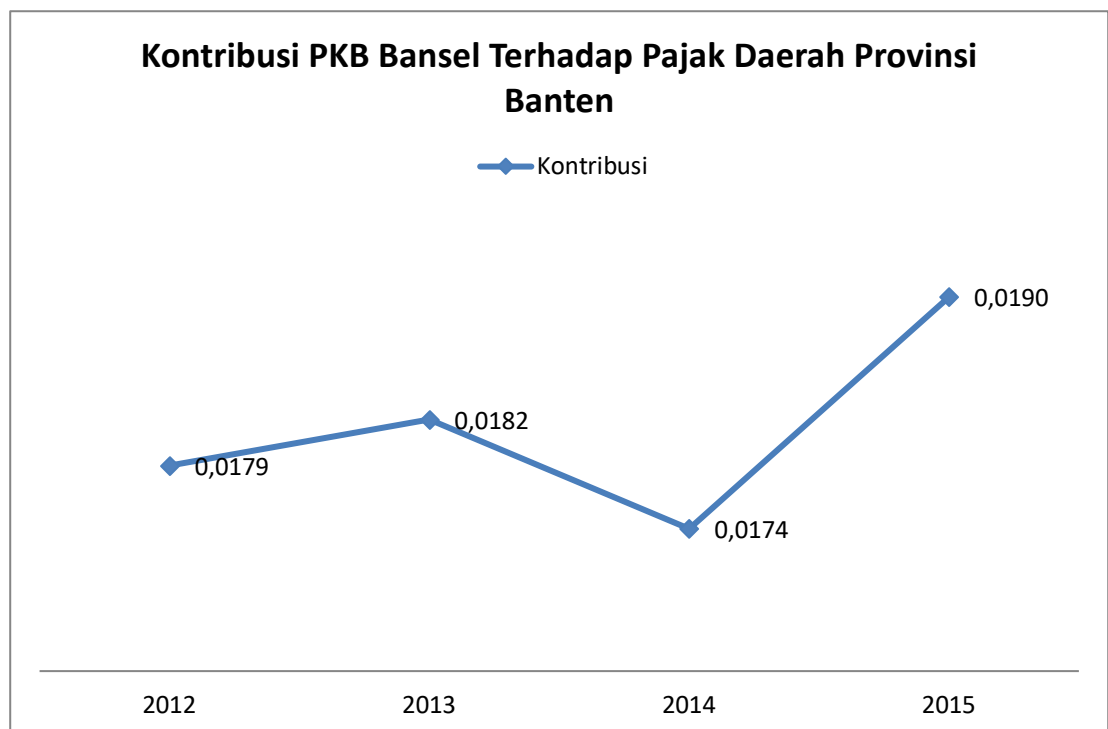
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah penerimaan dari PKB setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup berarti. Penerimaan PKB di wilayah banten Selatan pada tahun 2013 meningkat sebesar 23%, pada tahun 2014 meningkat 12,5% dan pada tahun 2015 meningkat sebesar 10,3%.

#### **Kontribusi PKB Banten Selatan (UPTD Malimping, UPTD Lebak dan UPTD Pandeglang terhadap Penerimaan PAD Provinsi Banten**

Kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Banten Selatan, yang meliputi UPTD Lebak, UPTD Pandeglang dan UPTD Malimping terhadap seluruh penerimaan PAD Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

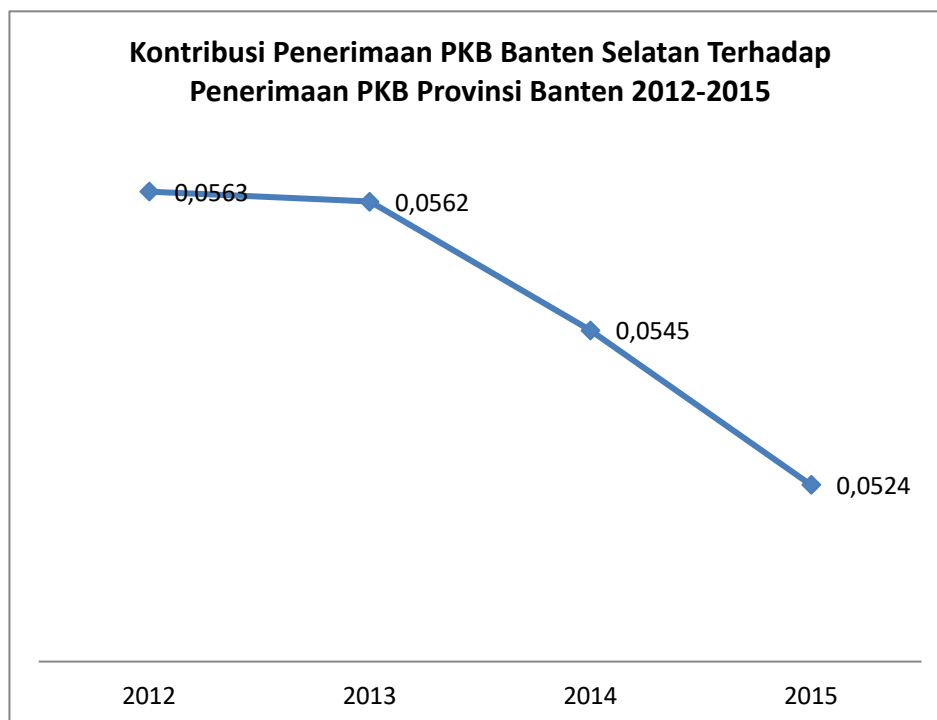


Kontribusi PKB Banten Selatan ( UPTD Malimping, UPTD Lebak dan UPTD Pandeglang) terhadap PAD Sektor Pajak Daerah Provinsi Banten



Sumber : Data sekunder, diolah

Pada grafik diatas tampak bahwa kontribusi PKB Banten Selatan terhadap seluruh Pajak Daerah di Provinsi Banten setiap tahun berfluktuasi, terjadi penurunan di tahun 2014 dan meningkat kembali di tahun 2015, dengan kontribusi sebesar 1,9 %. Dari seluruh pendapatan pajak daerah di Provinsi Banten. Sementara itu Kontribusi PKB Banten Selatan (UPTD Malimping, UPTD Lebak dan UPTD Pandeglang) terhadap penerimaan PKB Provinsi Banten adalah sebagai berikut :



Berdasarkan pada grafik diatas, kontribusi PKB Provinsi Banten Selatan terhadap penerimaan PKB di Provinsi Banten, mengalami penurunan dan hanya memiliki kontribusi sebesar 5,24 % . Padahal jika dilihat dari jumlah keseluruhan jenis kendaraan di wilayah Banten Selatan sebanyak 489.429 kendaraan, sementara jumlah seluruh kendaraan di Provinsi Banten pada tahun 2015 adalah sebanyak 4.599.429, maka prosentase jumlah kendaraan di Banten Selatan adalah sebesar

10,6 %. Berarti kontribusi PKB di Banten Selatan tidak signifikan dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Banten Selatan.

Berikut jumlah kendaraan bermotor di Banten Selatan dibandingkan dengan seluruh jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Banten:

Tabel Jumlah Kendaraan Bermotor Banten Selatan tahun 2015

	<b>Mobil Penumpang</b>	<b>Bus</b>	<b>Truk</b>	<b>Motor</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Provinsi Banten</b>	506164	7516	152492	3933257	4599429
<b>Kab. Lebak dan Pandeglang</b>	23739	1053	15953	448851	489596
<b>Prosentase</b>	0,047	0,140	0,105	0,114	0,106
<b>Prosentase</b>	4,70%	14%	10,50%	11,40%	10,60%

Sumber : BPS Provinsi Banten , 2015

Berdasarkan data kendaraan bermotor tersebut tampak bahwa kontribusi terbesar pajak kendaraan bermotor di Banten Selatan adalah dari bus 14,% dilanjutkan dengan motor sebesar 11,4%. Dengan demikian secara hitungan , maka potensi penerimaan dari PKB di Banten Selatan masih dapat digali. Karena baru tergali sekitar 50% saja, yaitu hanya 5,24% sementara potensinya adalah 10,6 %.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Banten Selatan (Kabupaten Lebak dan Pandeglang) terhadap PAD Provinsi Banten memiliki kontribusi sebesar 1,79%
2. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Banten Selatan terhadap keseluruhan Pajak Daerah memiliki kontribusi sebesar 1,9 %
3. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Banten Selatan terhadap PKB Provinsi Banten memiliki kontribusi sebesar 5,24%
4. Kontribusi PKB Banten Selatan masih belum optimal karena kontribusinya hanya sekitar 50% jika dibandingkan dengan prosentase jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Banten.

### **Daftar Pustaka**

Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta

Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta

Soleh, Chabib, Heru Rochmansyah, 2010, *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*, FokusMedia, Bandung

Suryanto, 2014, *Pendapatan Asli Daerah*,  
<http://bpkad.natunakab.go.id/index.php/2014-05-21-00-44-45/148-pendapatan-asli-daerah>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Perda Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi



## **Manajemen Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan di Kota Serang**

**Titi Stiawati**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP  
Universitas Sultan ageng Tirtayasa  
titi.stiawati@untirta.ac.id

### **ABSTRAK**

Masalah sosial diartikan sebagai sebuah kondisi yang dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diharapkan. Kemiskinan, pengangguran, perceraian, kenakalan remaja misalnya, adalah contoh dari masalah sosial. Dalam lingkungan bermasyarakat akan banyak sekali ditemukannya masalah sosial. Salah satu masalah sosial ini adalah yang perlu diperhatikan adalah masalah anak jalanan. Adapun permasalahan terkait dengan rehabilitasi anak jalanan antara lain kurangnya koordinasi antara lembaga. Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2010, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya anggaran untuk rehabilitasi sosial. Tujuan penelitian ini untuk memaparkan dan mendeskripsikan model rehabilitasi sosial, dan proses manajemen rehabilitasi sosial anak jalanan di Kota Serang. teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu menggunakan teori fungsi manajemen menurut Luther Gullick menurut Handoko (2003:11) yang meliputi: *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*, dengan menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik anak jalanan Kota Serang karna keturunan dan latar belakang pendidikan yang rendah, model rehabilitasi yang digunakan berupa memberikan pelatihan keterampilan, proses manajemen di *planning, directing, coordinating, dan budgeting* serta pemberian pendidikan jasmani dan rohani. Saran yaitu, pembinaan yang dilakukan bukanlah hanya diberikan kepada anak jalannya saja akan tetapi keluarganya pun perlu mendapatkan pembinaan,

Kata Kunci : Anak jalanan, Manajemen, Rehabilitasi Sosial

### **PENDAHULUAN**

Anak jalanan atau sering disebut “anjak”, merupakan salah satu permasalahan sosial yang kompleks dan saling terkait dengan masalah sosial lainnya, terutama identik dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan tidak lagi dapat dilihat dari satu dimensi atau hanya pendekatan ekonomi saja, tetapi memerlukan diagnosa yang



lengkap dan menyeluruh terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan baik secara lokal maupun nasional. Bertambahnya populasi anak jalanan dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Keresahan sosial yang ditimbulkan dari maraknya anak jalanan, karena mereka menjadikan tempat-tempat seperti pasar, kolong jembatan, trotoar, ataupun ruang terbuka lainnya digunakan sebagai arena hidup mereka, sehingga kerap mengganggu ketentraman dan kenayamana warga masyarakat lainnya.

Semakin meningkatnya jumlah anak jalanan mengindikasikan fenomena permasalahan sosial yang sangat kompleks. Bila dilihat dari fenomena yang ada di dalam masyarakat hal ini terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan orang tua dan atau keluarga dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani maupun sosial yang dibutuhkan oleh mereka.

Meskipun Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Permasalahan anak jalanan namun sepertinya harus terus dikaji dan ditemukan akar masalahnya, sehingga dalam penanganannya bisa dilakukan secara tepat dan tuntas. Program-program penanganan anak jalanan sudah banyak dilakukan oleh pemerintah baik dari sisi preventif, kuratif maupun rehabilitatif, akan tetapi permasalahan anak jalanan belum dapat terselesaikan secara tuntas. Mati satu, tumbuh seribu begitulah ungkapan yang sepertinya tepat untuk menggambarkan masalah anak jalanan tersebut.

Keberadaan anak jalanan mudah ditemui seperti di perempatan dan pinggir jalan, terminal, stasiun kereta api, pasar dan tempat publik. Aktivitas yang mereka

lakukan pun bermacam-macam dari menyemir sepatu, pemulung sampai memintaminta untuk mengemis maupun mengamen.

Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten dimana letak pusat pemerintahan Provinsi terletak di wilayah Kota Serang. Kota Serang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat yang salah satu diantaranya adalah anak jalanan. Dalam peraturan daerah tersebut dituliskan bahwa salah satu cara penanggulangan penyakit masyarakat yaitu dengan merehabilitasi sosial mereka. Namun meskipun peraturan daerah tersebut telah diimplementasikan namun masih ada permasalahan yang terjadi seperti halnya kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia, lemahnya koordinasi, dan kurangnya anggaran untuk rehabilitasi sosial.

Selanjutnya fakta yang lain di lapangan yaitu masih ada masyarakat Kota Serang yang tetap memberikan uang kepada anak jalanan yang mengamen di tempat umum atau tempat yang dilarang oleh isi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 pasal 21 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan adanya ketentuan sanksi pidana terhadap masyarakat ataupun para Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial seperti anak jalanan yang melanggar dari aturan tersebut.

Dalam perkembangannya jumlah anak jalanan di Kota Serang terus meningkat walaupun terkadang menurun, seperti halnya pada tabel di bawah ini :

**Tabel Data Jumlah Anak Jalanan di Kota Serang Tahun 2013 -2016**

No	Kecamatan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Serang	78	101	124	<b>143</b>
2	Cipocok Jaya	3	3	21	<b>27</b>
3	Taktakan	29	29	15	<b>15</b>
4	Curug	0	2	0	<b>2</b>
5	Walantaka	3	0	6	<b>6</b>
6	Kasemen	0	0	0	<b>0</b>
<b>Jumlah</b>		<b>113</b>	<b>135</b>	<b>168</b>	<b>193</b>

Sumber: *Pemutakhiran data hasil Reunifikasi Anak jalanan dinas Sosial Kota Serang.*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, jumlah anak jalanan di Kota Serang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 jumlahnya terus meningkat jumlahnya. Hal seperti itulah yang menjadi salah satu permasalahan yang penting dan perlu segera ditangani agar jumlah tersebut tidak semakin bertambah.

Sebenarnya, banyaknya anak jalanan di Kota Serang ini bukanlah karena adanya trend di kalangan anak muda melainkan karena himpitan ekonomi keluarga yang memaksa keterlibatan seluruh anggota keluarga untuk turut bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup.

Namun, selain himpitan ekonomi yang semakin mencekik masih ada beberapa faktor lain yang membuat seorang anak memilih untuk turun ke jalanan seperti karena kekerasan dalam keluarga, keinginan untuk bebas, ingin memiliki uang sendiri, pengaruh teman dan yang paling dominan adalah karena adanya faktor perpecahan dalam keluarga. Karena ketika seorang anak sudah merasa tidak

nyaman di dalam rumah, maka dengan sendirinya mereka akan mencari kenyamanan di tempat lain. Oleh karena itu, kenyamanan dan ketenangan dalam keluarga merupakan faktor penting untuk tumbuh kembang seorang anak. Jangan sampai rumah yang seharusnya yang menjadi tempat paling nyaman untuk anak justru malah menjadi tempat yang tidak nyaman bagi anak itu sendiri.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Manajemen**

Menurut Stoner dalam Handoko (2003:9) menjelaskan definisi manajemen sebagai berikut: “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan” . sedangkan menurut Luther Gulick dalam Handoko (2003:11) mendefinisikan bahwa manajemen sebagai berikut: “suatu bidang ilmu pengetahuan (*Science*) yang berusaha secara sistematis untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi manusia”.

Secara sederhana fungsi-fungsi manajemen menurut Luther Gulick dalam Handoko (2003 : 11 ) yang terkenal dengan akronim POSDCORB, adalah:

1. Perencanaan (*Planning*), adalah perincian dalam garis besar untuk memudahkan pelaksanaannya dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan maksud/tujuan badan usaha itu.

2. Pengorganisasian (*Organizing*), menetapkan struktur formal dari pada kewenangan dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyusunan Pegawai (*Staffing*), keseluruhan fungsi dari pada kepegawaian sebagai usaha pelaksanaannya, melatih para staf dan memelihara situasi pekerjaan yang menyenangkan.
4. Pembinaan Kerja (*Directing*), tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan, yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-instruksi dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu badan usaha/organisasi.
5. Pengkoordinasian (*Coordinating*), kewajiban yang penting untuk menghubungkan berbagai kegiatan dari pada pekerjaan.
6. Pelaporan (reporting), pimpinan yang bertanggung jawab harus selalu mengetahui apa yang sedang dilakukan, baik bagi keperluan pimpinan maupun bawahannya melalui catatan, penelitian maupun inspeksi.
7. Penganggaran (*Budgeting*), semua kegiatan akan berjalan dengan baik bila disertai dengan usaha dalam bentuk rencana anggaran, perhitungan anggaran dan pengawasan anggaran.

### **Konsep Anak jalanan**

Menurut Ahira (2010:6) anak jalanan merupakan sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Anak jalanan merupakan seseorang maupun sekumpulan anak yang menghabiskan waktunya di jalanan, baik untuk

mencari nafkah maupun hanya untuk berkeliaran di jalanan. Keberadaan anak jalanan terkait banyak faktor, salah satunya adalah kemiskinan (Novri, 2010:12).

Menurut UNICEF anak jalanan adalah anak-anak berumur 16 tahun, melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya dan larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya. Definisi ini sangat ketat, hanya diperuntukan pada anak yang benar-benar hidup di jalanan. Padahal dalam realitasnya anak jalanan tidak selalu terlepas dengan orangtuanya dan hidup sepanjang hari di jalanan. Apabila definisi ini digunakan maka banyak anak jalanan di Indonesia yang tidak akan tercakup dalam definisi tersebut.

Hal ini akan menyebabkan penanganan anak jalanan menjadi tidak komprehensif dan tuntas. Oleh karena itu definisi anak jalanan haruslah dapat mencakup semua anak yang hidupnya ada di jalan. Apa yang dikemukakan oleh Silva dalam Dwiyantri Hanandini dan Machdaliza (2008:3) mengenai pengertian anak jalanan lebih dapat mencakup yaitu anak jalanan adalah (1) Anak-anak yang benar-benar hidup dan bekerja di jalanan dan ditelantarkan atau telah lari dari keluarga mereka; (2) Anak-anak yang menjaga hubungan dengan keluarga mereka, tetapi menghabiskan waktunya di jalanan; (3) Anak-anak dari keluarga yang hidup di jalanan.

Pada anak-anak jalanan yang berasal dari luar kota biasanya mengontrak rumah sebagai tempat tinggal secara bersama dengan teman-teman yang senasib, kontak dengan keluarga lebih sering bila dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh dari jalanan, tidak bersekolah, dan ikut ke kota atas ajakan teman yang lebih

dewasa. Motivasi mereka kebanyakan ekonomi, oleh karena itu seringkali mereka masih menyisakan hasil kerjanya untuk dikirim kepada orangtuanya di kampung.

Subekti dalam Suyanto (2013:200) menjelaskan berdasarkan hasil kajian dilapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok. Pertama, *children of the street* yakni anak yang mempunyai kegiatan ekonomi dijalanan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagaimana penghasilan mereka dijalanan diberikan kepada orang tuanya. Kedua, *children on the street*, yakni anak yang berpartisipasi penuh dijalan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Ketiga, *children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup dijalanan. Walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ketempat lain dengan segala risikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi.

Pengertian konsep anak jalanan tersebut sebenarnya masih belum lengkap karena hanya memberikan batasan pada cakupannya saja. Sementara batasan usia anak jalanan belum tercakup dalam pengertian tersebut. Batasan umur anak jalanan sampai saat ini masih belum ada kesepakatan terutama mengenai batasan usia bagi anak. Dalam konvensi hak anak dicantumkan yang dianggap anak adalah mereka yang berumur dibawah 18 tahun.

### **Model Penanganan Anak jalanan**

Fokus utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah pada perlindungan sosial. Karena itu, model pertolongan terhadap anak jalanan bukan sekedar menghapus anak-anak dari jalanan. Melainkan harus bisa mengikat kualitas hidup mereka atau sekurang-kurangnya melindungi mereka dari situasi-situasi yang eksploitatif dan membahayakan. Dalam garis besar, alternatif model penanganan anak jalanan mengarah kepada 4 (empat) jenis model, yaitu:

1. *Street-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di “jalan” dimana anak-anak jalanan biasa beroperasi. Tujuannya agar dapat menjangkau dan melayani anak di lingkungan terdekatnya, yaitu di jalan.
2. *Family-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang difokuskan pada pemberian bantuan sosial atau pemberdayaan keluarga dapat mencegah anak-anak agar tidak menjadi anak jalanan atau menarik anak jalanan kembali ke keluarganya.
3. *Institutional-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di lembaga, baik secara sementara maupun permanen. Pendekatan ini juga mencakup tempat berlindung sementara yang menyediakan fasilitas “Panti Asrama Adaptasi” bagi anak jalanan.
4. *Community-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di sebuah komunitas. Melibatkan program-program *communitydevelopment* untuk memberdayakan masyarakat dan penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial di masyarakat dengan menjalin *networking* melalui berbagai institusi baik lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial masyarakat.



## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan penelitian ini diarahkan untuk dapat mengetahui, memahami serta mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya di lapangan secara rinci dan aktual tentang Manajemen Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Di Kota Serang. Metode penelitian kualitatif, yang berfokus pada deskriptif studi kasus menjadi pilihan yang dirasa cocok untuk mengakomodasi keperluan tersebut. Disamping untuk memperoleh pemahaman yang otentik mengenai pengalaman orang-orang sebagaimana dirasakan oleh yang bersangkutan.

### **Sumber Data**

Data yang diolah dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung direkam di lapangan melalui wawancara mendalam dan juga data yang didapat melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Sementara data sekunder adalah data olahan atau data telah dipublikasikan secara resmi yang didapat dari berita media, dokumentasi dan arsip lembaga terkait lainnya terkait dengan Manajemen Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Di Kota Serang.

Data yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan dan wawancara mendalam dengan seluruh informan dalam penelitian ini. Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara mendalam dan observasi langsung. Data sekunder merupakan data dari hasil studi dokumentasi. Data-data sekunder dalam penelitian ini meliputi dari laporan hasil rehabilitasi sosial anak jalanan yang didokumentasikan oleh Kabid dan Kasi Rehabilitasi anak serta

Peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi sosial anak jalanan yaitu Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010.

## **PEMBAHASAN**

### **Karakteristik Anak Jalanan**

Anak jalanan dapat dikatakan mereka tinggal atau hidup di jalanan dan sebagian besar akan tinggal atau menjalankan kehidupannya sehari-hari di kota-kota besar. Kehidupan dari anak-anak jalanan tersebut tidak lepas dari pusat keramaian seperti yang terjadi di Kota Serang. Karakteristik anak jalanan dalam hal ini digambarkan, latar belakang anak jalanan turun ke jalan, usia, pendidikan dan pekerjaannya.

### **Alasan Anak Turun Ke Jalan**

Alasan mereka, anak jalanan turun ke jalan yang kemudian menjadi anak jalanan di kota Serang memiliki berbagai macam latar belakang yang beragam. Alasan yang muncul diantaranya, karena faktor internal keluarga akibat ekonomi keluarga yang lemah atau kemiskinan dan pendidikan yang rendah.

Alasan anak jalanan turun ke jalan menjadi anak jalanan disebabkan selain faktor ekonomi juga faktor budaya. Sering terjadi pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat, hal ini terjadi pada perilaku anak jalanan yang mendapatkan uang dari jalanan untuk digunakan seperti bermain judi, minum minuman keras, seks bebas, merokok dan penyalahgunaan narkoba. Anak jalanan tersebut mulai terkontaminasi perilaku orang dewasa atau yang populer disebut preman jalanan.

Anak jalanan lainnya, memiliki alasan bahwa turun ke jalan karena hiburan atau rekreasi. Mereka anak jalanan turun ke jalan hanya ingin bermain dengan teman-temannya saja dan untuk menyalurkan kegemaran mereka terhadap musik serta sarana berkumpul sesama anak musik jalanan.

### **Karakteristik Usia, Pendidikan dan Pekerjaan Anak Jalanan**

Umur anak jalanan di Kota Serang ini ditemukan ada yang 13 tahun sampai 18 tahun. Anak-anak jalanan ini masih berusia sekolah SD, SMP sampai SMA. Pekerjaan yang dilakukan anak-anak jalanan ini rata-rata adalah pengamen di perempatan jalan atau lampu-lampu merah, Alun-alun kota, tempat-tempat rumah makan atau warung makan. Pendidikan anak jalanan yang disandang mereka berbeda-beda, diantaranya ada yang lulusan SD, SMP dan SMA, dan ada juga yang tidak menamatkan sekolahnya. Walaupun ada anak yang sekolahnya hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, namun tetap turun ke jalan dan bekerja sebagai pengamen. Anak jalanan yang mengamen di jalan tersebut beralasan bahwa mereka turun ke jalan untuk membantu orang tuanya dan mereka menganggap bangga terhadap dirinya sendiri. Mereka tidak merasa rendah diri dengan pekerjaan yang dilakukannya sebagai pengamen.

### **Penanganan Pelibatan Pihak Terkait**

Penanganan yang dilakukan di Kota Serang merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, dilaksanakan oleh para pelaksana Kebijakan.

Penanganan anak jalanan di Kota Serang, terdapat beberapa pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya. Sebagaimana dilihat adanya kerjasama antara pihak Dinsos Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang, dalam membersihkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Serang.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Dilakukan oleh pemerintah Kota Serang yaitu memberikan suatu keamanan dan ketertiban umum bagi masyarakat Kota Serang di dalam menanggulangi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial seperti anak jalanan yang berada di pusat lingkungan Kota, yaitu tepatnya di Lampu Merah Kota Serang.

### **Model Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Serang**

Dalam penanganan keberadaan anak jalanan di kota Serang, Selama ini dinas terkait hanya baru sebatas pada pengarahan sehingga keberadaan Anak jalanan belumlah jera dan selalu turun kembali ke jalanan. Solusi yang dilakukan hanya dengan penangkapan dan pengarahan dan sekedar menyentuh aspek perilakunya saja. Pencapaian target dalam pelayanan publik yang bersih dari anak jalanan, perlu adanya peran aktif dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat serta keluarga.

Dalam pemberian pembinaan pada anak jalanan di Kota Serang Dinas Sosial Kota Serang belum mempunyai panti rehabilitasi sosial sehingga Dinas Sosial bekerja sama dengan Kementrian Sosial untuk memberikan pembinaan, adapun lokasi pembinaannya terletak di Bekasi Provinsi Jawa Barat yaitu di panti PSBK (Panti Sosial Bina Karya) dimana di panti tersebut anak jalanan diberikan

pendidikan baik rohani dan jasmani serta diberikan pelatihan dan keterampilan agar mereka mempunyai keahlian, proses pembinaannya selama 8 bulan sesudahnya mereka diberi modal dan diberi peralatan.

### **Proses manajemen rehabilitasi sosial di Kota Serang**

Berdasarkan hasil dilapangan bahwa dari aspek :

1. **(Planning) Perencanaan** merupakan suatu yang melatarbelakangi suatu program rehabilitasi sosial pada anak jalanan, hal ini berdasarkan pula pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit masyarakat, dan didalam peraturan daerah tersebut tertera salah satu bentuk penanganan yaitu dengan rehabilitasi sosial. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam program rehabilitasi sosial yaitu mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Serang, serta mengembalikan mereka untuk berperilaku yang semestinya di dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengubah *mindset* mereka dan memberikan pendidikan kepada mereka. Rehabilitasi sosial yang dimaksud dilakukan dengan memberikan pendidikan baik pendidikan jasmani maupun rohani agar mereka penyandang masalah kesejahteraan sosial akan berubah dan berkurang.
2. **(Organizing)** dalam manajemen juga terdapat adanya pengorganisasian dimana pengorganisasian ini merupakan menetapkan struktur formal daripada kewenangan, dan pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam program rehabilitasi sosial ini yang terlibat dalam kepengurusannya

yaitu kepala bidang pelayanan rehabilitasi sosial dibantu dengan 3 seksi yaitu seksi pelayanan perlindungan anak dan lansia, kepala seksi rehabilitasi sosial gepeng, WTS, Eks. Napza, dan kepala seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Cacat.

3. **(Staffing)** Penyusunan pegawai menjelaskan mengenai keseluruhan fungsi daripada kepegawaian sebagai usaha pelaksanaannya, melatih para staf dan memelihara situasi pekerjaan yang menyenangkan. Penyusunan pegawai di Dinas Sosial Kota Serang belum optimal karena hanya beberapa orang saja yang sesuai bidangnya yaitu bidang ilmu sosial. Meskipun pegawai Dinas Sosial belum sesuai dengan bidangnya ilmunya namun pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta SOP, adapun jumlah pegawai tersebut lulusan sarjana sosial hanya 3 orang dan sarjana pendidikan yang lebih banyak.
4. **(Directing)** Pembinaan kerja dinilai menjadi aspek yang sangat penting dalam terwujudnya tujuan dari program, hal ini dilakukan agar tugas yang dikerjakan oleh seluruh pegawai yang berada di Bidang pelayanan rehabilitasi sosial dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan uraian tugasnya. Adapun pembinaan yang diberikan merupakan pembinaan yang mengarah kepada program sehingga pegawai yang terlibat didalam program tersebut paham dan mengerti akan tugas pokok dan fungsinya.
5. **(Coordinating)** Koordinasi merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan

harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam program rehabilitasi sosial yaitu adanya koordinasi antar lembaga dan koordinasi antar bagian atau bidang. Dalam program rehabilitasi sosial, Dinas Sosial bekerjasama dengan Satpol PP, Dinas Pendidikan dan MUI. Dinas Sosial Kota Serang yang bertanggung jawab untuk membina penyandang masalah kesejahteraan sosial bekerjasama dengan Satpol PP selaku perazia atau pengeksekutor selain dengan Satpol PP, Dinas Sosial juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan MUI untuk memberikan pendidikan jasmani dan rohani. Selain koordinasi antar lembaga, Dinas Sosial berkordinasi dengan antar bidang atau bagiannya dalam program rehabilitasi sosial kepala bagian Pelayanan Rehabilitasi Sosial bekerjasama dengan bidang pemberdayaan sosial dan bidang jaminan sosial.

6. **(Reporting)** Reporting merupakan manajemen yang berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tulisan sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan. Laporan ini dilakukan setiap bulan yang isinya tentang apa yang sudah dikerjakan kepala seksi dan dilaporkan kepada kepala bidang, laporan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi Banten dan BAPPEDA Kota Serang.

7. (*Budgeting*) Penganggaran ini merupakan suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Dalam anggaran tercantum besarnya biaya dan hasil yang akan diperoleh. Dalam penganggaran anggaran atau dana yang disesuaikan dengan kegiatan. Untuk mengajukan rencana anggaran khusus harus melalui kepala Dinas. Dalam penganggaran ini juga terdapat indikator mengenai pengawasan anggaran yang merupakan lembaga atau bidang yang mengawasi pengeluaran yang dibutuhkan oleh kegiatan yang sedang berjalan, adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang dalam mengawasi dana dan perkembangan modal yang diberikan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sebelumnya mereka mengikuti proses pembinaan selama 8 bulan, dana yang diberikan langsung dikirim ke rekening para penyandang. Tugas Dinas Sosial memonitoring apakah dana tersebut digunakan untuk keperluan usaha atau tidak dengan mengeceknya perbulannya.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Masalah anak jalanan dewasa ini telah dianggap sebagai masalah sosial yang memerlukan penanganan yang serius karena telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap anak. Adapun proses manajemen rehabilitasi sosial di Kota Serang berdasarkan hasil dilapangan bahwa dari aspek :



1. **(Planning) Perencanaan** merupakan suatu yang melatarbelakangi suatu program rehabilitasi sosial pada anak jalanan, hal ini berdasarkan pula pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit masyarakat, dan didalam peraturan daerah tersebut tertera salah satu bentuk penanganan yaitu dengan rehabilitasi sosial. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam program rehabilitasi sosial yaitu mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Serang.
2. **(Organizing)** Dalam program rehabilitasi sosial ini yang terlibat dalam kepengurusannya yaitu kepala bidang pelayanan rehabilitasi sosial dibantu dengan 3 seksi yaitu seksi pelayanan perlindungan anak dan lansia, kepala seksi rehabilitasi sosial gepeng, WTS, Eks. Napza, dan kepala seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Cacat.
3. **(Staffing)** Penyusunan pegawai di Dinas Sosial Kota Serang belum optimal karena hanya beberapa orang saja yang sesuai bidangnya yaitu sosial bahwa pegawai Dinas Sosial masih belum sesuai dengan bidangnya namun pekerjaannya tetap sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta SOP.
4. **(Directing)** Pembinaan yang diberikan merupakan pembinaan yang mengarah pada program sehingga pegawai yang terlibat didalam program tersebut paham dan mengerti akan tugas pokok dan fungsinya.
5. **(Coordinating)** Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam program rehabilitasi sosial yaitu adanya koordinasi antar lembaga dan koordinasi antar bagian atau bidang. Dalam program rehabilitasi sosial, Dinas Sosial bekerjasama dengan Satpol PP, Dinas Pendidikan dan MUI.

6. **(Reporting)** Laporan ini dilakukan setiap bulan yang isinya tentang apa yang sudah dikerjakan kepala seksi dan dilaporkan kepada kepala bidang, laporan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi Banten dan BAPPEDA Kota Serang.
7. **(Budgeting)** Penganggaran ini merupakan suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Dalam anggaran tercantum besarnya biaya dan hasil yang akan diperoleh. Tugas Dinas Sosial memonitoring apakah dana tersebut digunakan untuk keperluan usaha atau tidak dengan mengeceknya perbulannya.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang menjadi rekomendasi peneliti sebagai berikut :

1. Pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Serang tidak hanya kepada anak jalanan saja akan tetapi diupayakan dapat diberikan juga kepada keluarganya agar anak-anak mereka tidak menjadi anak jalanan.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap anak jalanan yang dikirim ke PSBK (Panti Sosial Bina Karya) Bekasi, diupayakan terus terawasi agar tidak kembali lagi menjadi anak jalanan.
3. Pemerintah Kota Serang disamping berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang juga perlu diupayakan berkoordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Civitas Akademika dan masyarakat.

4. Perlu ditambahkan anggaran untuk rehabilitasi sosial seperti mengadakan Unit Pelayanan Terpadu Rehabilitasi Sosial dengan sarana dan prasarana yang lengkap sehingga Dinas Sosial Kota Serang tidak perlu mengirim anak jalanan untuk mengikuti pembinaan di luar Kota Serang,

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ahira, Anne. 2010. *Mengintip Metode Pendidikan Anak di Lingkungan Keluarga*, <http://debu.com/berita-uncategorized>, diakses 21/02/2016.
- Departemen Sosial RI, 1992. *Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, "Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*. Departemen Sosial RI : Jakarta.
- Handoko, T Hani, 2003. *Manajemen*. BPF. Yogyakarta.
- Hanandini, Dwiyantri dan Machdaliza, 2008. Model Pembinaan Anak Jalanan dan Pengemis melalui Pemberdayaan Keluarga Luas dan Institusi Lokal untuk Mengatasi Masalah Anak Jalanan dan Pengemis di Sumatera Barat, *Artikel Ilmiah*, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.
- Moleong, J. Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Novri, Yanti. 2010. *Pemberdayaan Anak Jalanan melalui Pelatihan, Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya dan Bahan Pencemar Lingkungan sebagai Salah satu Alternatif penurunan pengangguran secara berkelanjutan*, <http://novriyanti07.student.ipb.ac.id/2010>, diakses 21/02/2016.
- Irawan, Prasetya, 2004. *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta, STIA-LAN Press.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Surakhmad, Winarno, 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Transito.  
Suyanto, Bagong. 2013. *Masalah Sosial Anak edisi revisi*. Jakarta: PT Kencana.

**Dokumen :**

UU No. 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 *Tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis*.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 *Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 *Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat*.



## **Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pada Divisi EMCA Kantor Pusat PT. Kereta Api Indonesia (Persero)**

**Heni Rohaeni dan Risma Oktaviani**

Akademi Sekretaris dan Manajemen BSI Bandung dan  
Manajemen Perusahaan BSI Bandung  
heni.hri@bsi.ac.id dan rismanima0710@gmail.com

### **ABSTRAK**

Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang sangat berharga, dalam hal ini perusahaan dituntut untuk selalu membina dan mengembangkan potensi para pegawainya. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penerapan mutasi personal yang terbagi atas promosi, rotasi dan demosi. Program ini diharapkan dapat menjamin kualitas pegawai yang dimiliki oleh perusahaan dan pemanfaatannya yang optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di kantor pusat PT Kereta Api Indonesia (persero), prosedur mutasi jabatan terbagi atas permintaan sendiri dan kepentingan dinas. Dalam prosedur mutasi jabatan ini melibatkan direksi/kepala divisi, pegawai yang dimutasikan atau pegawai yang mengajukan mutasi dan divisi EMCAM (*Mutation, Retirement and Personnel Database*) yang bertugas mengatur serta melakukan pengecekan persyaratan mutasi berdasarkan data pegawai. Seluruh data kepegawaian dikelola dalam arsip elektronik yang bernama RDS (*Railways Document System*). Adapun hambatan dalam prosedur pelaksanaan mutasi jabatan di divisi EMCA kantor pusat PT Kereta Api Indonesia (persero) ini yakni ketidaktelitian pada saat pengecekan dan pelanggaran yang sengaja dilakukan sehingga mutasi dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

Kata Kunci: Prosedur, Mutasi, Pegawai

### **PENDAHULUAN**

Hampir semua bidang pekerjaan akan berhubungan dengan pengolahan sistem mutasi pegawai karena berkaitan dengan bagaimana organisasi atau

perusahaan mengelola sumber daya manusianya. Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam sebuah organisasi sebagai penggerak dari semua operasional perusahaan. Dalam pengelolaannya, divisi yang menangani sumber daya manusia dalam sebuah organisasi sering mengadakan program pengembangan untuk pegawainya. Salah satu bentuk dari pengembangan terhadap pegawai yakni pelaksanaan mutasi pegawai.

PT Kereta Api Indonesia (persero) sebagai salah satu instansi yang bergerak di bidang jasa transportasi mengelola sumber daya manusianya dengan melaksanakan mutasi pegawai. Mutasi pegawai yaitu pemindahan suatu pekerjaan/jabatan ke pekerjaan/jabatan lain baik jabatan yang lebih tinggi, jabatan yang lebih rendah ataupun jabatan dengan kedudukan yang sama. Mutasi terbagi dalam tiga jenis yakni rotasi, promosi dan demosi. Mutasi pegawai di divisi EMCA kantor pusat PT Kereta Api Indonesia (persero) telah dilakukan, tetapi masih banyak permasalahan yang dihadapi, seperti mutasi yang tidak sesuai prosedur ataupun pegawai yang dimutasikan tidak sesuai dengan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki, sehingga dapat menurunkan prestasi kerja karyawan.

Pelaksanaan mutasi jabatan pegawai PT Kereta Api Indonesia (persero) harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan agar terstruktur dan terencana, serta dilakukan atas beberapa pertimbangan sesuai dengan prestasi kerja maupun hukuman atas yang dilakukan seorang karyawan yang akan menjalankan karena berkaitan dengan penempatan bidang/posisi kerja yang baru. Dari berbagai fenomena dan permasalahan yang terjadi maka penulis tertarik untuk melaksanakan

penelitian mengenai prosedur pelaksanaan mutasi jabatan pada divisi EMCA kantor pusat PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penyusunan dan pengumpulan data penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Observasi yakni pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum terhadap objek penelitian. Penulis datang ke lokasi tempat penelitian menelaah dan meneliti secara langsung, sehingga penulis dapat merekam serta mempelajari berdasarkan berbagai fenomena (situasi, kondisi) yang terjadi.

Observasi dilaksanakan di kantor pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung selama kurang lebih 1 bulan pada bulan Mei-Juni 2016. penulis juga menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data dan informasi dari narasumber secara lisan. Proses wawancara dilakukan dengan cara tatap muka dan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yaitu Ibu Indriani bagian *Manager Mutation, Retirement and Personnel Database*.

Penulis mengajukan pertanyaan, baik dengan meminta penjelasan dan jawaban dari pertanyaan yang diberikan dan membuat catatan tentang hal-hal yang diungkapkan kepada penulis maupun merekam selama wawancara berlangsung. Penulis juga menggunakan metode pengumpulan data yakni dengan melihat, menelaah serta menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sebagian besar data yang tersedia adalah dalam



bentuk arsip fisik dan elektronik , surat-surat, dokumen, catatan, foto, dan sebagainya.

## **PEMBAHASAN**

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengelola, menata, mengurus, mengatur atau mengendalikan, dengan demikian manajemen pada dasarnya dapat diterjemahkan menjadi pengelolaan, penataan, pengurusan, pengaturan atau pengendalian. Sedangkan sumber daya manusia semula merupakan terjemahan dari *human resources*. Sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat besar bagi sebuah organisasi/ perusahaan. Sumber daya manusia yang dapat mewujudkan tujuan, sasaran strategi dan inovasi yang bisa diunggulkan dalam organisasi. Bagian atau unit yang mengurus sumber daya manusia yaitu divisi bagian *Human Resource Department (HRD)*.

Manajemen sumber daya manusia juga melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. Menurut A.A. Anwar Prabumangkunegara dalam Fahmi (2016:2) “Manajemen sumber daya manusia adalah suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai).” Sumber daya manusia merupakan *asset* perusahaan, maka dalam pengelolaan dan pemeliharaannya setiap organisasi/ perusahaan memiliki masing-masing manajemen khusus yang menangani berbagai masalah dalam ruang lingkup pegawai yang berfungsi mengatur, memelihara serta mengelola sumber daya manusianya. G.R. Terry dalam Djumhana (2011:22)

mengatakan bahwa fungsi manajemen SDM yaitu “Suatu proses yang membedakan atas perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) yang dikenal dengan POAC. dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Pengembangan sumber daya manusia (*Human Resources Development*) secara praktis melaksanakan berbagai aktivitas dan tugas-tugas yang beragam berkaitan dengan penyiapan, peningkatan serta pemeliharaan sumber daya manusia yang lebih berkualitas di dalam tatanan organisasi sesuai dengan visi, misi dan strategi organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi, yaitu meliputi perencanaan Sumber Daya Manusia (*Human Resources Planning*). Mutasi merupakan program pengembangan pegawai yang berarti perpindahan suatu jabatan/pekerjaan ke jabatan/pekerjaan yang lain baik dalam kedudukan/ golongan yang sama, kenaikan jabatan maupun penurunan jabatan yang dengan prinsip *the right man on the right place* atau orang yang tepat pada tempat yang tepat. Untuk mencapai tujuan mendapatkan orang tepat pada tempat yang tepat, harus dilakukan penilaian secara terus-menerus dan segala penilaian tersebut dapat dilaksanakan dengan mutasi terhadap para pegawai.

Sastrohadiwiryono dalam Kadarisman (2012:68) mendefinisikan “Mutasi adalah kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenagakerjaan tenaga kerja ke situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja yang semaksimal mungkin

kepada organisasi”. Mutasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam suatu organisasi/perusahaan. Dengan diadakannya mutasi memberikan manfaat bagi para pegawai sehingga dapat berkontribusi langsung kepada perusahaan melalui pencapaian yang tinggi.

Mutasi dilaksanakan berdasarkan penyebab dan alasan-alasan yang jelas serta direncanakan dengan tujuan untuk menghindari timbulnya masalah-masalah yang tidak diinginkan di kemudian hari, termasuk timbulnya kegagalan dari mutasi tersebut, maka ini jelas berdampak pada kerugian yang telah dikeluarkan. Berikut adalah sebab dan alasan mutasi menurut para ahli. Hasibuan (2013:103) berpendapat sebab dan alasan mutasi digolongkan atas permintaan sendiri (*personal transfers*) dan alih tugas (*Production transfers*) atau kepentingan dinas. Mutasi berarti berpindahnya suatu posisi/jabatan ke posisi/jabatan lain baik kenaikan jabatan, jabatan tetap maupun penurunan jabatan. Dalam pelaksanaannya mutasi terbagi dalam rotasi, promosi dan demosi. Hasibuan (2013:101) mendefinisikan jenis-jenis mutasi terbagi atas

#### 1. Rotasi

Rotasi adalah Perpindahan tugas (*tour of duty*) atau perpindahan wilayah kerja (*tour of area*) dan hanya bersifat penyegaran (*refreshing*), karena seseorang yang terlalu lama pada satu jenis tugas atau pada satu daerah kerja akan merasa jenuh, bosan dan lama-lama dapat menurunkan semangat kerjanya, oleh karenanya perlu dilakukan mutasi dengan jenis rotasi. Rotasi biasanya tidak membawa perubahan terhadap pangkat atau golongan yang bersangkutan, namun diyakini pengalamannya akan bertambah di tempat tugas atau daerah yang baru

didudukinya, dengan demikian akan bertambah pula kemampuan kerja dan keterampilannya.

## 2. Promosi

Promosi dilakukan terhadap pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat atau golongan. Promosi memberikan peran penting bagi setiap karyawan, karena dengan promosi terdapat di dalamnya kepercayaan pimpinan dan pengakuan mengenai kemampuan serta kecakapan karyawan bersangkutan untuk menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, promosi akan memberikan status sosial, wewenang (*authority*), tanggung jawab (*responsibility*), serta penghasilan (*outcomes*) yang semakin besar bagi karyawan.

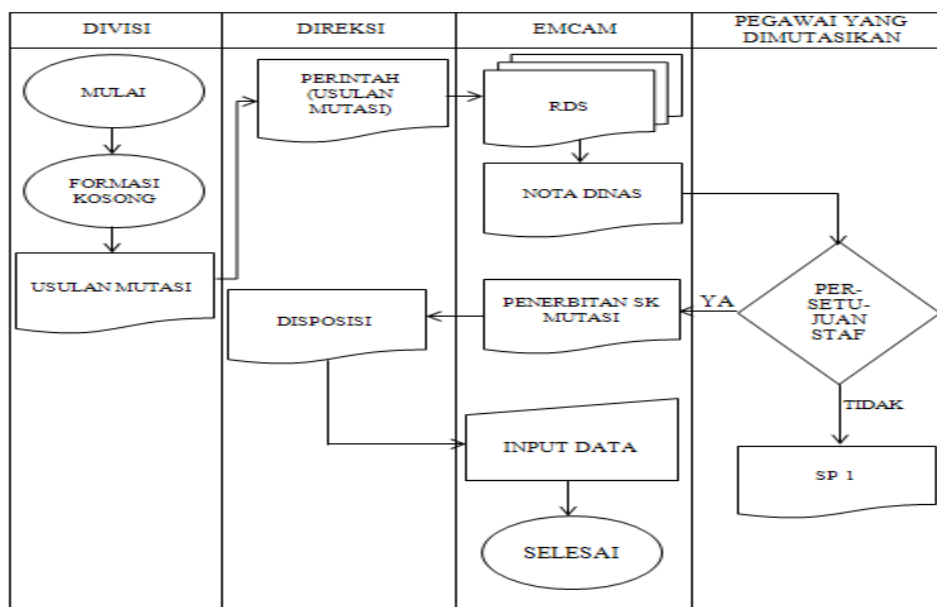
## 3. Demosi

Mutasi jenis demosi ini dilaksanakan terhadap pegawai karena kinerja yang kurang baik dan atau berbuat kesalahan (indisipliner dan lain-lain), yang menurut pertimbangan manajemen perlu dimutasikan dari tempat tugas/tanggung jawabnya selama ini ke tempat tugas/ tanggung jawab yang baru, dengan harapan mutasi ini dapat menjadi terapi (*therapy by transfers*). Mutasi ini diikuti dengan penurunan pangkat/golongan dan atau penurunan jabatan. Biasanya dalam upaya pembinaan pegawai yang diberikan dalam bentuk hukuman, tergantung kepada berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di kantor pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada divisi EMCA, maka penulis dapat mengetahui prosedur pelaksanaan mutasi pegawai yang berlaku di lingkungan kantor pusat PT

Kereta Api Indonesia (Persero). Penelitian dilaksanakan selama bulan Mei-Juli 2016 berdasarkan data pada periode bulan Agustus -Desember 2015. Dalam pelaksanaannya, mutasi pegawai di lingkungan kantor pusat PT Kereta Api Indonesia (persero) terbagi atas mutasi untuk kepentingan dinas dan atas permintaan sendiri. Bagi pegawai yang mengajukan mutasi atas permintaan sendiri alasan harus berdasarkan kenyamanan dirinya dalam bekerja. Sedangkan pegawai yang mutasi karena kepentingan dinas merupakan perwujudan bentuk perhatian perusahaan terhadap pegawainya.

#### A. Kepentingan Dinas



Sumber Data: Divisi EMCA Kantor Pusat PT kereta Api (persero)

**Gambar Prosedur Mutasi Atas Kepentingan Dinas**

Berdasarkan gambar di atas, berikut adalah penjelasan prosedur mutasi pegawai atas kepentingan dinas pada kantor pusat PT Kereta Api Indonesia (persero)

1. Divisi menyatakan kekurangan pegawai saat tersedianya formasi yang kosong sehingga memberikan usulan mutasi pegawai kepada direksi/kepala divisi
2. Direksi/kepala divisi memberi perintah (usulan mutasi) kepada divisi EMCAM untuk mengisi formasi yang tersedia.
3. Divisi EMCAM menyeleksi pegawai melalui dokumen elektronik RDS (*Rail Document System*).
4. Pengecekan ulang terhadap kevalidan data yang memungkinkan pegawai yang terpilih untuk melaksanakan mutasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan.
5. Divisi EMCAM mengeluarkan nota dinas yang akan diberikan kepada pegawai yang akan melaksanakan mutasi.
6. Pegawai yang sesuai dengan kriteria menandatangani nota dinas sebagai persetujuan bahwa pegawai yang bersangkutan akan melaksanakan mutasi bila pegawai setuju, surat nota dinas akan dikirim ke divisi EMCAM untuk dilakukan proses penerbitan SK mutasi. Namun, jika pegawai menolak untuk dimutasikan akan diberi SP1 (surat peringatan 1)
7. Penerbitan SK Mutasi dan disposisi kepada Direksi/Kepala Divisi. SK mutasi adalah surat keputusan atau surat edaran yang diberikan bagi pegawai yang akan melakukan mutasi. SK mutasi ditandatangani oleh pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan tingkat jabatannya.

8. Direksi/Kepala Divisi menandatangani SK Mutasi
9. Input data oleh divisi EMCAM sebagai arsip bahwa pegawai melaksanakan mutasi
10. Mutasi dapat dilaksanakan dan pegawai akan mendapat pekerjaan/posisi/jabatan yang baru

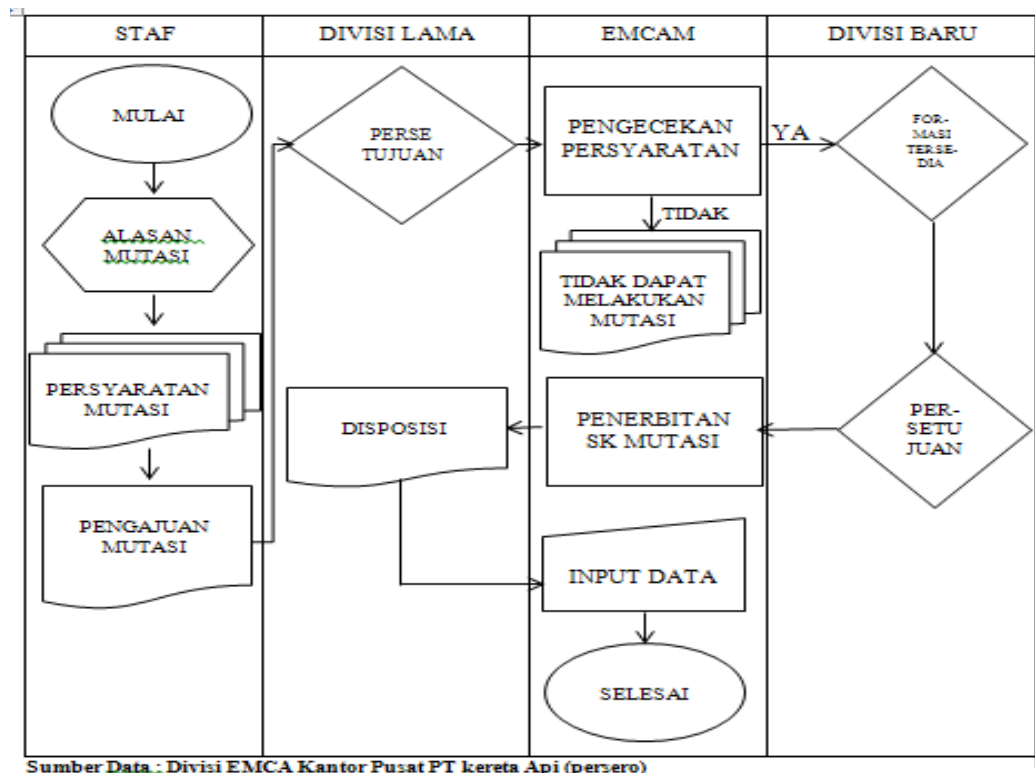
Mutasi kepentingan dinas adalah kewenangan/perintah dari direksi/kepala divisi. Menolak untuk mutasi sama dengan menolak perintah kerja. Sesuai dengan pasal 168 UU ketenagakerjaan yang menyatakan perusahaan berwenang untuk mengangkat, menetapkan/mengalihugaskan dan memutasikan satu jabatan ke jabatan lainnya atau satu tempat ke tempat lainnya di lingkungan perusahaan. Sehingga apabila pegawai menolak perintah mutasi tersebut bisa saja dianggap karyawan melanggar PK (perintah kerja) yang dapat berujung dengan SP (surat peringatan) SP-1, SP-2, SP-3 bahkan hingga PHK (pemutusan hubungan kerja). Berikut adalah data pegawai yang dimutasikan pada periode Agustus-Desember 2015

**Tabel Data pegawai yang melaksanakan mutasi atas kepentingan dinas**

Posisi Akhir Divisi EMCA	PROMOSI	ROTASI
Divisi asal :		
EMT	2	1
EMI		1
ESDG		1
EKC		1
Jumlah	6 Pegawai	

Berdasarkan table diatas menjelaskan bahwa pada periode bulan Agustus-Desember 2015 ada 6 pegawai yang dimutasikan ke divisi EMCA. Terbagi atas rotasi sebanyak 4 pegawai dan promosi sebanyak 2 pegawai dengan komposisi asal divisi EMT, EMI, ESDG dan EKC.

#### B. Atas Permintaan Sendiri



Berdasarkan gambar di atas, berikut adalah penjelasan prosedur mutasi pegawai atas permintaan sendiri pada kantor pusat PT Kereta Api Indonesia:

1. Pegawai yang akan mengajukan mutasi memiliki alasan yang jelas untuk menjadi bahan pertimbangan Direksi/Kepala divisi
2. Pegawai melengkapi persyaratan-persyaratan, baik berkas maupun kriteria yang menjadi syarat seorang pegawai melaksanakan mutasi



3. Pegawai yang akan melaksanakan mutasi membuat pengajuan mutasi yang akan diserahkan kepada Direksi/Kepala divisi yang melepaskan
4. Pegawai meminta persetujuan dari Direksi/Kepala divisi yang melepaskan dan dilanjutkan ke divisi EMCAM untuk diproses pengajuan mutasinya
5. Divisi EMCAM melakukan pengecekan persyaratan mutasi berdasarkan RDS dan berkas yang diserahkan oleh pegawai yang mengajukan mutasi. Bila persyaratan belum terpenuhi, maka pengajuan mutasi akan ditunda ataupun ditolak. Divisi EMCAM akan menyimpan berkas/arsip sebagai catatan bahwa pegawai tersebut telah mengajukan mutasi dan bila suatu saat pegawai yang bersangkutan akan melakukan pengajuan mutasi kembali.
6. Bila formasi tersedia, pegawai bisa mengajukan mutasi ke divisi yang dituju.
7. Persetujuan dari Direksi/Kepala divisi yang baru
8. Divisi EMCA menerbitkan SK mutasi
9. Disposisi ke Direksi/Kepala divisi yang melepaskan untuk ditandatangani
10. Mutasi dapat dilaksanakan dan pegawai akan mendapat pekerjaan/posisi/jabatan yang baru

Setiap pegawai kantor pusat PT Kereta Api Indonesia (persero) mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih posisi/jabatan/pekerjaan yang lebih tinggi. demi kenyamanan pegawai, perusahaan memberi kesempatan untuk mutasi bagi para pegawainya dengan syarat masa kerja minimal 10 tahun dan memiliki riwayat penilaian kinerja dengan nilai baik yang dilaksanakan secara berkala. Berikut adalah data pegawai kantor pusat PT Kereta Api Indonesia (persero) yang melaksanakan mutasi atas permintaan sendiri.

**Tabel Data pegawai yang melaksanakan mutasi atas permintaan sendiri**

Posisi Akhir	PROMOSI	ROTASI
Divisi EMCA		
Divisi asal :		
EMI	1	-
DAOP	7	
DIVRE	2	
Jumlah	9 pegawai	

Berdasarkan tabel di atas bahwa pada periode bulan Agustus-Desember 2015 terdapat 10 pegawai yang dimutasikan ke divisi EMCA dan hanya melaksanakan promosi sebanyak 10 pegawai dengan komposisi asal divisi EMI, DAOP dan DIVRE. Dalam periode ini, divisi EMCA menerima 12 pengajuan mutasi dan hanya 10 pegawai yang dapat melaksanakan mutasi karena 2 pengajuan mutasi ditolak dan ditunda untuk mutasi karena belum memenuhi kriteria. Pegawai dapat mengajukan mutasi kembali setelah pegawai tersebut melengkapi persyaratan mutasi.

## **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan dari literatur serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai prosedur pelaksanaan mutasi jabatan di divisi EMCA PT Kereta Api Indonesia (Persero), maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Prosedur pelaksanaan kegiatan mutasi jabatan pada divisi EMCA PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur sehingga dapat menciptakan prestasi kerja yang baik bagi para pegawainya. Pernyataan di atas diperkuat dengan tanya-jawab dengan narasumber. Mutasi yang berlaku di kantor pusat PT. Kereta Api Indonesia (persero) terdiri dari kepentingan dinas dan atas permintaan sendiri.
2. Hambatan dalam prosedur pelaksanaan mutasi di divisi EMCA kantor pusat PT.Kereta Api Indonesia (persero) adalah pegawai yang dimutasikan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan ataupun *skill* yang dimilikinya serta *human error* dari salah satu pihak sehingga pegawai yang melaksanakan mutasi tidak sesuai dengan prosedur.
3. Solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada adalah dengan mengadakan pelatihan yang dilaksanakan secara berkala sehingga karyawan dapat melaksanakan jabatan atau tugas yang baru serta pemberian sanksi kepada pegawai yang dimutasikan maupun karyawan yang melanggar prosedur.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis untuk tugas akhir ini, penulis dapat memberikan saran-saran yang bersifat membangun.

1. Sebelum melakukan mutasi kerja pegawai diadakan perencanaan yang matang agar pegawai yang dimutasikan benar-benar berdasarkan prosedur dan kriteria yang sesuai dengan posisi/jabatan yang baru.
2. Hendaknya mutasi sesuai dengan keterampilan dan kemampuan kerja pegawai agar tidak ada penolakan yang berujung dengan *resign* maupun pemutusan hubungan kerja (PHK) karena menolak perintah kerja

3. Pemberian tindakan tegas terhadap pihak maupun pegawai yang lalai, tidak hanya diberi hukuman *skorsing* saja. terlebih terhadap pihak yang dengan sengaja melanggar ketentuan prosedur yang berlaku.

### **Daftar Pustaka**

- Azhar Susanto. 2011. *Sistem Informasi Manajemen*, Bandung : Lingga Jaya
- Fahmi, Irham. 2016. *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep & Kinerja*, Bekasi : Mitra Wacana Media.
- Hasibuan, Malayu. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Kaswan. 2013. *Pelatihan dan Pengembangan Untuk Meningkatkan Kinerja SDM*, Bandung : Alfabeta.
- M.Kadarisman. 2012. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Marwansyah. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Kedua*, Bandung : Alfabeta.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurdin, Usman. 2012. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Priansa, Donny Juni. 2014. *Perencanaan & Pengembangan SDM*, Bandung : Alfabeta.
- Purwanegara, Djumhana,dkk. 2011. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Teori dan Dinamika Praktik*, Bandung : CV Dea Art Pustaka.
- Sunyoto Danang. 2015. *Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : CAPS.
- Suwanto. 2014. *Manajemen SDM Dalam Organisasi dan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Yani. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Mitra Wacana Media.

Website PT Kereta Api Indonesia. 2016. <http://www.keretaapiindonesia.com>. diakses pada tanggal 06 Juni 2016.

## **Implementasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Provinsi Banten**

**Listyaningsih**

Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP Untirta  
listyaningsih@untirta.ac.id

### **ABSTRAK**

Tingginya kasus kekerasan anak di Indonesia semakin mengkhawatirkan dan menarik perhatian pemerintah dan masyarakat. Provinsi Banten menduduki peringkat 13 pada kasus kekerasan anak. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk membentuk sebuah gerakan Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi gerakan PATBM dalam menekan angka kekerasan pada anak, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan PATBM, pemangku kebijakan yaitu Badan PP dan Bappeda. Teori yang digunakan sebagai alat analisis yaitu dari Edward III yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan itu dipengaruhi oleh komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi PATBM di Provinsi Banten sudah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa temuan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan belum berjalan dengan baik, begitu juga dengan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten belum memahami dengan baik soal pentingnya memasukkan program perlindungan anak keanggaran daerah. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada komitmen yang kuat dari pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengalokasian anggaran. Sehingga perlu dibangun komitmen yang kuat dari berbagai pihak dalam menyelenggarakan Gerakan PATBM di Provinsi Banten.

Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan anak, masyarakat

### **PENDAHULUAN**

Anak berdasarkan kriteria UNICEF adalah penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Pada usia ini, anak mengalami masa perkembangan dan tidak jarang mengalami kerentanan yang dapat mengganggu perkembangan secara psikologis dan sosialnya. Dewasa ini banyak kita dengar dan lihat baik di media ataupun langsung di sekeliling kita, anak seringkali menjadi korban kekerasan dari

orang dewasa yang terdiri dari orang tua, saudara atau orang-orang disekitarnya. Bahkan kekerasan yang terjadi juga dilakukan oleh anak-anak teman sebayanya. Contoh kasus bulan November 2017, seorang ibu kandung di Jakarta tega membunuh anaknya yang berusia 5 tahun hanya karena sering ngompol. (sumber: <https://metro.sindonews.com/read/1256695/170/>) Dan banyak kasus lain yang masih sering kita saksikan.

Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia melaporkan bahwa Angka kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi. Hasil survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menunjukkan satu dari empat anak laki-laki dan satu dari tujuh anak perempuan mengalami kekerasan fisik. Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPA, Pribudiarta Nur Sitepu, menyatakan angka itu menunjukkan kalau kekerasan terhadap anak di Tanah Air masuk kategori mengkhawatirkan. Hasil survei menunjukkan 30 persen dari total 87 juta anak-anak Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik. (sumber: <http://news.metrotvnews.com/news/0k8jXJ2N-kekerasan-anak-di-Indonesia>)

Sementara di Banten, berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) bahwa pada tahun 2016 terdapat 514 kasus yang dilaporkan, dan 242 diantaranya masuk ke wilayah hukum. Pada kasus kekerasan anak-anak tidak hanya menjadi korban melainkan ada pula yang menjadi pelaku kekerasan. Kepala Dinas menjelaskan, masih tingginya laporan kekerasan terhadap anak berawal dari latar belakang keluarga. Dimana biasanya keluarga yang berlatar

bekang kurang mampu, bisa mendorong perilaku menyimpang dari tindak kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan catatan jumlah kekerasan yang terus meningkat di Indonesia, KPPA mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi angka kekerasan di Indonesia. Maka terbentuklah sebuah gerakan yang bertajuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Gerakan ini dirumuskan bertujuan untuk menurunkan angka kekerasan anak di Indonesia. Tahun 2016, PATBM mulai diluncurkan dan diimplementasikan di semua provinsi di Indonesia. Dalam perjalanannya banyak dijumpai berbagai masalah yang dihadapi, antara lain adalah pertama, pemerintah daerah sebagai *leading sector* gerakan ini masih banyak yang belum paham tentang gerakan PATBM, sehingga komitmen pemerintah daerah menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan gerakan ini. Kedua, pemahaman masyarakat tentang hak anak pun masih terbatas sehingga belum sepenuhnya dapat mendukung gerakan ini. Ketiga, angka kekerasan anak terutama di Banten masih tinggi dengan jumlah kasus yang sangat bervariasi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan



presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara sederhana kebijakan publik didefinisikan oleh Nugroho (2011: 55) sebagai berikut:

“Keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan”.

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang ada. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan pemerintah baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu adalah

memiliki tujuan yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2012).

Menurut Bardach (Agustino 2014:138) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan:

“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijaksanaan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dengan kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang.”

Selanjutnya, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Agustino 2014:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang

ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Sedangkan, menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2014:139) implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Adapun unsur-unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock (dalam Tachjan 2006:28) sebagai berikut:

“Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.”

Kemudian menurut Lester dan Stewart (Agustino 2014:139) bahwa implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Berdasarkan uraian di atas, implementasi kebijakan merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dan dapat memberikan hasil dari aktivitas atau kegiatan tersebut.

### **Model Implementasi Kebijakan Publik**

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan ditentukan oleh banyak variable atau faktor dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Model implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan merupakan suatu model yang semakin operasional sehingga dapat menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan (Sumaryadi,2005:88)

Van Meter dan Van Horn merumuskan mengenai model pendekatan implementasi kebijakan yang disebut dengan *a model of the policy implementation*. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedian, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Model implementasi kebijakan publik yang kedua adalah model yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III terdapat empat variable yang yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi (Agustino, 2014:149).

1. Komunikasi. Menurut Edward III komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa

yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat selain itu kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

2. Sumberdaya. Sumber daya yang memadai merupakan hal penting lainnya menurut George C. Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas.
3. Disposisi. Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variable disposisi menurut George C. Edward III adalah: pengangkatan birokrat dan insentif.
4. Struktur Birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang

seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi yang lebih baik adalah melakukan *Standard Operating Procedures* (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi.

## **PEMBAHASAN**

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Jadi, PATBM pada dasarnya adalah sebuah pendekatan untuk menggerakkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam melakukan perlindungan anak

terhadap kemungkinan kekerasan dari orang lain termasuk orang tua atau orang-orang yang dikenal maupun tidak dikenalnya.

Gerakan PATBM di Provinsi Banten tahun 2016 dilaksanakan di Kota Cilegon yaitu kelurahan Jombang Wetan dan Kelurahan Sukmajaya serta Kota Tangerang Selatan yaitu di Kelurahan Pondok Ranji dan Pondok Kacang Barat dengan melibatkan sepuluh aktivis perlindungan anak pada setiap kelurahan. Kemudian di tahun 2017 berkembang di seluruh kabupaten dan kota Provinsi Banten. Pertumbuhan gerakan PATBM di seluruh kabupaten kota begitu cepat secara kuantitas. Namun bila dilihat dari kualitas gerakan, aktivis PATBM perlu meningkatkan lagi kapasitasnya dalam mencegah kekerasan pada anak. Karena jika dilihat proses penanganannya, banyak lembaga/unit yang memang telah dipersiapkan oleh pemerintah dan masyarakat antara lain Kepolisian, kejaksaan, lembaga pendidikan, lembaga perlindungan anak, P2TP2A dan lain sebagainya.

Selama kurun waktu tersebut maka penulis bermaksud untuk mengetahui bagaimana implementasi gerakan PATBM di Provinsi Banten. Untuk membahas kajian ini maka penulis menggunakan teori implementasi dari George C. Edward III untuk mempermudah menganalisis temuan lapangan. Berikut ini akan dipaparkan bagaimana implementasi gerakan PATBM di Provinsi Banten.

#### 1. Komunikasi

Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau

dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat selain itu kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten. PATBM merupakan sebuah gerakan baru yang berfokus pada pencegahan kekerasan anak dan merespon cepat atas kekerasan yang terjadi pada anak. Untuk itu sangat diperlukan pemahaman para pelaku gerakan ini. Pemerintah pusat melalui KPPA telah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan bagi para fasilitator daerah dan aktivis di tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Pelatihan pertama diberikan kepada para fasilitator daerah yang diselenggarakan secara nasional di dua zona yaitu zona Indonesia Barat dan zona Indonesia Timur. Tim Fasilitator yang dilatih terdiri dari satu orang dari DP3AKB, dua orang dari Badan PP kabupaten Kota, satu orang dari NGO, dua orang dari P2TP2A kabupaten dan kota, serta satu orang dari perguruan tinggi. Tim Fasilitator daerah tersebut mendapatkan mandat sebagai pendamping di daerah. Mereka bertanggungjawab atas tercapainya tujuan dari gerakan PATBM ini. Sehingga harus memiliki kapasitas dalam mengkomunikasikan tujuan dan ukuran keberhasilan dari PATBM. Disamping Fasilitator, terdapat Dinas P3AKB Provinsi Banten yang memberikan komando di tingkat Provinsi Banten.

Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Untuk melihat bagaimana proses transmisi berjalan maka dapat dilihat bagaimana hasil sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh fasilitator daerah. Berdasarkan informasi yang didapat bahwa hasil dari sosialisasi dan pelatihan, para aktivis dapat memahami dengan baik apa dan bagaimana gerakan PATBM. Kemudian para aktivis menerapkan dan memotivasi masyarakat di wilayahnya



masing-masing untuk bersama-sama melaksanakan gerakan PATBM. Disini telah terlihat konsistensi dari informasi mengenai PATBM. Namun terdapat beberapa aktivis yang telah dilatih, kemudian mengundurkan diri dari kelompok karena berbagai alasan, diantaranya adalah tidak memiliki cukup waktu untuk terlibat aktif di PATBM, tidak mendapat honor dan sebagainya. Sehingga menyebabkan informasi yang sudah didapat dari hasil pelatihan tidak lagi tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.

## 2. Sumberdaya

Sumber daya yang memadai merupakan hal penting lainnya menurut George C. Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Sumber daya manusia yang menggerakkan pengembangan PATBM di daerah hingga desa/kelurahan terdiri dari para pegawai di instansi pemerintah DP3AKB di tingkat provinsi dan kabupaten kota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak, camat dan kepala desa/lurah serta kepala seksi urusan kesejahteraan di kecamatan dan desa/kelurahan.

Pelaksana gerakan ini adalah para aktivis yang bersifat sukarela terdiri dari 10 orang di tiap-tiap desa dan kelurahan, yang terdiri dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, kader posyandu, PKK, remaja masjid, forum anak bahkan perangkat kelurahan, babinsa dan lembaga kemasyarakatan. Keragaman aktivis dari berbagai latar belakang ini merupakan sebuah keuntungan karena wewenang para aktivis adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perlindungan anak. Hal ini dapat mempermudah tersampainya himbuan untuk bersama-sama

mencegah kekerasan dan merespon cepat tindakan kekerasan pada anak. Kemudian fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan wewenang, sampai saat ini para aktivis masih memanfaatkan fasilitas yang ada di sekitarnya, misalnya aula desa/kelurahan untuk melakukan sosialisasi, gedung sekolah untuk sosialisasi di sekolah, bisa juga saat pelayanan posyandu berlangsung, bahkan di forum-forum pengajian juga dapat dimanfaatkan oleh gerakan ini.

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variable disposisi menurut George C. Edward III adalah: pengangkatan birokrat dan insentif. Pelaksana dari gerakan PATBM di tingkat desa/kelurahan adalah para aktivis yang berasal dari wilayah desa/kelurahan masing-masing. Aktivis PATBM merupakan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap isu perlindungan anak serta secara sukarela menyatakan kesediaan untuk menjadi tim kerja yang aktif menggerakkan PATBM, disamping itu, aktivis diharapkan memiliki kemampuan merumuskan rencana dan mengelola sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, termasuk mempengaruhi orang-orang untuk berpartisipasi aktif dalam promosi hak anak, mencegah kekerasan, membantu mengarahkan penanganan secara tepat, mengolah data dan informasi serta melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Kelemahan dari gerakan ini adalah pada status sukarela untuk menjadi aktivis. Konsekuensi dari sukarela adalah ketiadaan insentif bagi para aktivis. Sementara biaya operasional yang selama ini digunakan adalah biaya sendiri atau swadaya

aktivis dan masyarakat. Sedikit banyak hal ini mempengaruhi konsistensi atas komitmen yang dibutuhkan dalam gerakan ini.

Berdasarkan temuan lapangan di Kota Cilegon semua kelurahan sudah memiliki kelompok aktivis PATBM yaitu sebanyak 43 kelurahan, di KotaTangerang Selatan terdapat 5 kelurahan, Kota Tangerang 10 kelurahan, Kabupaten Tangerang 3 desa, Kabupaten Pandeglang 9 kelurahan Kota Serang 1 kelurahan, Kabupaten Serang sebanyak dan Kabupaten Lebak senayak 3 Desa. Jika dibandingkan dengan jumlah desa dan kelurahan di Provinsi Banten, maka terdapat 72 dari 1551 desa dan kelurahan, atau sebanyak 4,65%. Hal ini menunjukkan bahwa semangat gerakan di berbagai kabupaten kota tidaklah sama.

Kota Cilegon misalnya, pemerintah kota setempat sudah memberikan pelatihan bagi calon aktivis dan mewajibkan semua kelurahan memiliki kelompok PATBM. Komitmen Walikota Cilegon yang kuat dan kemudian memberikan dukungan baik secara moral maupun material dapat memberikan semangat yang tinggi kepada para aktivis PATBM di tingkat kelurahan. Sementara di kabupaten dan kota yang lainnya pimpinan di daerahnya tidak memberikan penekanan yang sama seperti Kota Cilegon. Sehingga sangat terlihat bahwa pelaksanaan PATBM sangat ditentukan dari komitmen kepala daerahnya atau jajaran di bawahnya, termasuk badan PPA, kecamatan dan kelurahan.

#### 4. Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. KPPA sebagai struktur tertinggi yang bertanggungjawab atas

pelaksanaan PATBM di seluruh daerah di Indonesia. Koordinasi yang sudah dibangun oleh KPPA dan badan PPA di tingkat daerah sudah dilakukan secara baik dan efektif. Secara berkala KPPA mengundang badan PPA di daerah untuk mendengarkan laporan dan berdiskusi tentang pelaksanaan PATBM. Namun sayangnya di tingkat daerah, koordinasi antar badan PPA belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh berubahnya formasi di masing-masing Badan PPA baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Hal ini sangat mengganggu berlangsungnya komunikasi dan pemahaman tentang PATBM. Dapat dibayangkan, birokrat yang sudah dilantik sebagai pendamping atau fasilitator daerah kemudian dirotasi ke dinas atau badan lain, dan diganti dengan personil baru yang sama sekali belum memahami apa itu PATBM. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena untuk menjadi aktivis ataupun fasilitator harus memahaminya terlebih dahulu. Pengalaman seperti ini yang sering mengganggu terlaksananya gerakan PATBM.

Demikian juga dengan para aktivis di tingkat desa dan kelurahan, pergantian personel tim PATBM juga sudah sangat lazim. Hal ini dapat dipahami bahwa memang untuk menjadi aktivis dibutuhkan perhatian khusus dan juga memiliki cukup waktu untuk melaksanakan gerakan. Pergantian personil ini dapat mengganggu berjalannya koordinasi di antara aktivis maupun dinas.

## SIMPULAN

Secara umum pelaksanaan PATBM Provinsi Banten telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Setiap kabupaten dan kota sudah memiliki kelompok-kelompok gerakan PATBM yang jumlahnya sangat bervariasi. Terdapat 4,65%

desa dan kelurahan yang memiliki aktivis PATBM. Hal ini menunjukkan bahwa perlu komitmen yang kuat dari kepala daerah kabupaten dan kota untuk mengembangkan PATBM di desa, kecamatan dan kabupaten kota. Partisipasi masyarakat yang menjadi modal utama pada gerakan ini sudah mulai tumbuh meskipun masih harus diberikan arahan dan stimulus. Kesadaran dan keikhlasan dari para aktivis menjadikan gerakan PATBM ini dapat berjalan dengan optimal, meskipun masih terjadi beberapa kekurangan terutama pada pengelolaan gerakan PATBM. Kapasitas aktivis masih sangat terbatas terutama pada pendokumentasian setiap kegiatan.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat direkomendasikan hal-hal berikut ini:

1. Mendorong pemerintah kelurahan, kecamatan dan kota melalui BPMPKB dan Bappeda untuk memberikan dukungan baik bersifat moral maupun anggaran yang direncanakan. Mengingat hampir semua kelurahan mengalami pengalaman yang sama soal penganggaran yang sangat terbatas.
2. Meningkatkan kapasitas aktivis dalam hal pengelolaan kegiatan PATBM dan pendokumentasiannya melalui pelatihan-pelatihan.
3. Meningkatkan jejaring dan keterpaduan antara BPMPKB, P2TP2A, Polres, Kelurahan dan lembaga terkait dalam hal pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.
4. Mengoptimalkan perusahaan dan pemilik modal untuk memberikan dukungan anggaran melalui program CRS.

### **Daftar Pustaka**

- Agustino, Leo. 2014. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung AIPI-Bandung. Alfabeta
- Nugroho, Riant. 2011. Public Policy. Jakarta. PT Alex Media Komputindo. Kelompok Gramedia.
- Tachjan,Dr.H.M.Si. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia
- Sumaryadi, Nyoman I. 2005. Efektifitas Kebijakan Otonomi Daerah.Jakarta: Citra Utama

### **Dokumen**

- Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Peraturan Daerah Provinsi Banten nomo 9 tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan

Sumber lain:

<http://news.metrotvnews.com/news/0k8jXJ2N-kekerasan-anak-di-Indonesia>

<https://metro.sindonews.com/read/1256695/170/>



## Proses Rekrutmen Terbuka di Pemerintahan Kota Bandung

Mia Rosmiati

Politeknik Negeri Bandung (POLBAN)  
miaw.rose23@gmail.com

### ABSTRAK

Pemerintah daerah Kota Bandung adalah salah satu dari sekian banyak pemerintah daerah yang sudah melaksanakan rekrutmen dengan sistem terbuka yang khusus dilaksanakan hanya untuk mengisi formasi pejabat Eselon II saja. Rekrutmen terbuka ini bertujuan untuk menghasilkan pejabat kompeten dan yang betul-betul mampu memimpin dengan baik dan dapat membawa instansi yang dipimpinnya menjadi instansi yang unggul dan berprestasi. Pada prakteknya ternyata masih juga terdapat kelemahan seperti halnya dalam sistem merit, padahal mekanisme seleksi untuk sistem rekrutmen terbuka ini sudah dirancang sedemikian baik, sehingga tidak ada poin penilaian yang terlewat dari proses seleksi ini, akan tetapi banyak permasalahan yang muncul setelah pejabat hasil rekrutmen terbuka ini mulai bekerja, karena pada saat itulah *skill* atau kemampuan pejabat terpilih teruji secara langsung di lapangan. Sehingga para pejabat hasil rekrutmen terbuka ini, ada yang dimutasi dan dirotasi oleh pemerintah padahal mereka belum lama duduk di kursi jabatannya. Dalam prosesnya, rekrutmen terbuka ini sudah mengikuti aturan perundang-undangan yang tertuang dalam Permenpan No. 13 Tahun 2014. Selain itu tahapan seleksi juga menggunakan indikator-indikator yang dikemukakan oleh Smith dengan harapan mampu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul pasca pejabat terpilih mulai duduk di instansi masing-masing. Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan rekrutmen terbuka masih perlu adanya perbaikan khususnya pada saat seleksi dilakukan. Sebaiknya, panitia seleksi beserta pihak terkait menyiapkan dan menambah atau bahkan menyempurnakan bentuk ujian seleksi bagi para kandidat peserta, sehingga profil yang dihasilkan dari proses seleksi rekrutmen secara terbuka ini dapat mendekati kesempurnaan dan meminimalisir adanya *human error* ketika dilakukan evaluasi. Karena diharapkan sistem rekrutmen terbuka ini betul-betul dapat menghasilkan pejabat tinggi yang kompeten dan dapat memimpin instansinya berkembang menjadi lebih baik.

Kata kunci : Rekrutmen Terbuka, Sistem Merit, Proses Seleksi, Kompeten



## PENDAHULUAN

Indonesia sudah mengalami banyak perubahan cara/metode dalam sistem perekrutan pegawai negeri sipil. Jika pada jaman Orde Baru dikenal dengan perekrutan berdasarkan kekerabatan (*spoil*), maka di era Reformasi Birokrasi ini dikenal istilah sistem merit yaitu sistem perekrutan berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan (Fachturahman, 2014). Namun pada kenyataannya sistem merit tidak bisa menjamin bahwa pegawai yang dihasilkan akan sesuai dengan profil yang diharapkan, salah satunya terlihat dari pegawai pada saat bekerja tidak memperhatikan capaian keberhasilan penyelesaian pekerjaan tepat waktu, hal ini dikarenakan lemahnya sistem *reward and punishment* yang diberikan oleh pemerintah (Thoha : 1990). Dalam upaya memperbaiki sistem rekrutmen agar menjadi lebih baik, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang pegawai negeri yang dituangkan dalam UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan mulai memberlakukan sistem rekrutmen dengan menggunakan sistem rekrutmen terbuka sebagai penyempurna dari sistem merit yang sudah ada. Khusus tentang rekrutmen secara terbuka, dituangkan dalam Permenpan No.13 Tahun 2014 Tentang Rekrutmen Secara Terbuka.

Pemerintah daerah kota Bandung adalah salah satu dari sekian banyak pemerintah daerah yang sudah melaksanakan rekrutmen dengan sistem terbuka yang khusus dilaksanakan hanya untuk mengisi formasi pejabat Eselon II saja. Rekrutmen terbuka ini bertujuan untuk menghasilkan pejabat kompeten dan yang

betul-betul mampu memimpin dengan baik dan dapat membawa instansi yang dipimpinnya menjadi instansi yang unggul dan berprestasi. Pada prakteknya ternyata masih juga terdapat kelemahan seperti halnya dalam sistem merit, padahal mekanisme seleksi untuk sistem rekrutmen terbuka ini sudah dirancang sedemikian baik, sehingga tidak ada poin penilaian yang terlewat dari proses seleksi ini, akan tetapi banyak permasalahan yang muncul setelah pejabat hasil rekrutmen terbuka ini mulai bekerja, karena pada saat itulah *skill* atau kemampuan pejabat terpilih teruji secara langsung di lapangan. Sehingga para pejabat hasil rekrutmen terbuka ini, ada yang dimutasi dan dirotasi oleh pemerintah padahal mereka belum lama duduk di kursi jabatannya.

Menurut walikota Bandung, mutasi atau rotasi dilakukan terhadap para pejabat hasil rekrutmen terbuka ini didasarkan kepada tiga hal, yaitu 1) evaluasi dari pimpinan; 2) evaluasi dari tim evaluator; dan 3) survey penilaian dari bawahan (PPID, 2017). Evaluasi tiga pejabat hasil rekrutmen terbuka yang dimutasi oleh walikota, memang secara kinerja belum mencapai hasil yang memuaskan. Kurangnya kecakapan pejabat-pejabat tersebut dalam menangani permasalahan di lapangan sebagai salah satu faktor tidak bagusnya pencapaian hasil kinerja masing-masing. Ada lagi pejabat hasil rekrutmen terbuka yang terindikasi melakukan tindakan wan prestasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka langkah awal adalah mereview metode seleksi yang sudah dilakukan oleh panitia seleksi. Berikutnya adalah menganalisis metode seleksi tadi untuk mengetahui apakah metode ini sudah cukup baik untuk menghasilkan pejabat yang memenuhi kriteria.

## HASIL PENELITIAN

Istilah rekrutmen terbuka sudah tidak asing lagi bagi Indonesia, karena sesuai dengan latar belakang yang sudah penulis uraikan bahwa hampir seluruh pemerintah pusat dan daerah sudah melakukan sistem baru ini dan beberapa orang yang ahli di bidang sumber daya manusia, memberikan uraian tentang rekrutmen terbuka ini walaupun tidak secara tegas mendefinisikan konsep rekrutmen secara terbuka namun lebih menjelaskan tentang metode dan suber dalam rekrutmen.

Dalam rekrutmen terbuka, pemerintah memberikan kesempatan kepada pegawai yang berasal dari berbagai OPD untuk ikut bersaing secara sehat guna menduduki suatu jabatan tertentu dengan ketentuan mempunyai spesifikasi yang disyaratkan oleh pemerintah/panitia seleksi.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Smith (2013:339) yang mengatakan bahwa:

*“ Open Recruitment is a system which allows for political outsiders to directly apply to the organization for consideration for a nomination, typically after screening process involving interviews with a comitte of organization elites”.*

“Rekrutmen terbuka adalah suatu sistem rekrutmen yang membolehkan pihak dari luar untuk melamar secara langsung kepada instansi dan menjadi kandidat/calon peserta dengan mengikuti serangkaian proses seleksi yang diadakan oleh panita seleksi”.

### **Mekanisme Rekrutmen Terbuka**

Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2013 sudah mulai melakukan sistem rekrutmen secara terbuka untuk memperoleh pegawai yang kompeten di level eselon II. Berikut adalah proses pelaksanaan sistem rekrutmen terbuka yang sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Kota Bandung bersama Panitia Seleksi Rekrutmen Terbuka berdasarkan Permenpan No. 13 Tahun 2014.

1. Membuat pengumuman rekrutmen yang dilakukan secara terbuka baik melalui edaran, papan pengumuman, iklan di media massa cetak maupun elektronik/on line.
2. Setelah terkumpul lamaran yang masuk sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka panitia mulai melakukan seleksi administrasi.
3. Hasil dari seleksi administrasi, maka tersaring sejumlah kandidat pejabat yang lolos sesuai dengan spesifikasi.
4. Panitia melakukan panggilan kepada kandidat untuk mengikuti seleksi selanjutnya, yaitu test kesehatan yang terdiri dari dua uji yaitu test fisik dan psikometri.
5. Panitia memberikan ujian pra assessment dan assessment.
6. Tahap selanjutnya kandidat diwajibkan untuk membuat paper/makalah terkait issue-issue terkini/topik khusus yang kemudian dipresentasikan di hadapan panitia seleksi.
7. Panitia melakukan sesi wawancara dengan para kandidat.

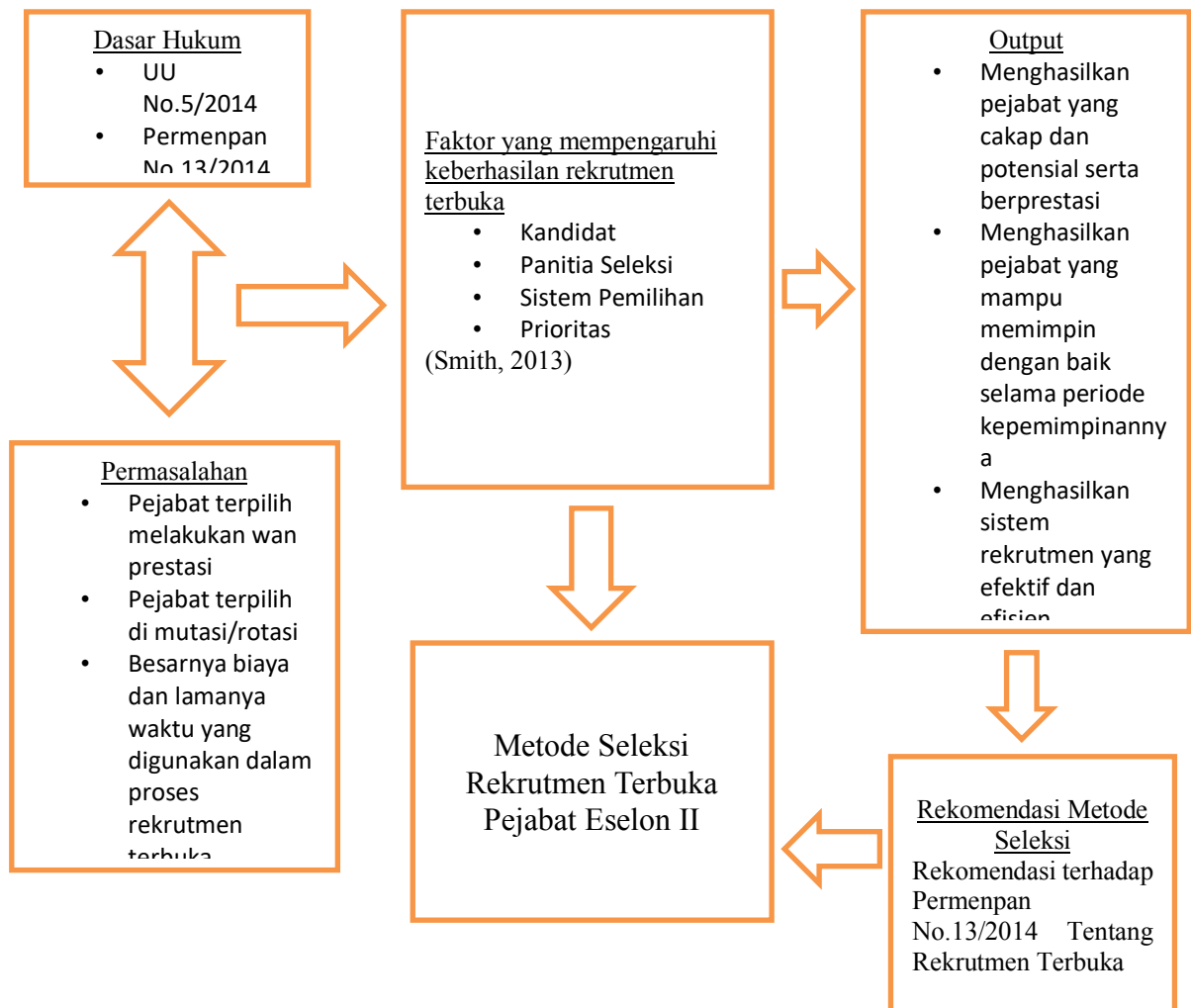
8. Berikutnya panitia mengumpulkan, memeriksa dan menganalisis rekam jejak masing-masing kandidat dengan memperoleh informasi dari badan terkait yaitu BIN, PPATK dan sebagainya.
9. Panitia mengumumkan hasil seleksi akhir yang mengajukan 3 (tiga) orang kandidat yang telah lolos seleksi dari tahap satu sampai dengan tahap delapan kepada Walikota untuk formasi pejabat di Kotamadya dan Gubernur untuk pejabat di Provinsi yang selanjutnya akan di sampaikan kepada Presiden sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.
10. Penetapan kandidat terpilih oleh Walikota/Gubernur/Presiden
11. Tahap akhir adalah pelantikan pejabat terpilih.

Secara garis besar, rekrutmen terbuka mempunyai sebelas tahapan dalam proses seleksinya dan berlaku sama di seluruh Indonesia. Tahapan demi tahapan dirancang dengan memperhatikan setiap detail dari upaya untuk memperoleh pegawai yang kompeten dan berkualitas. Namun pada kenyataannya masih saja terdapat celah yang mengakibatkan pegawai yang dihasilkan tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan urain tadi, penulis mencoba untuk mengkaji proses seleksi dengan sistem rekrutmen terbuka ini yang sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung dalam menghasilkan Jabatan Pimpinan Tinggi(JPT) yang kompeten dan berkualitas dan meneliti secara lebih jauh mengenai proses seleksi ini dengan menggunakan dimensi-dimensi yang dikemukakan oleh Smith (2013), sehingga hasil dari penelitian ini mampu

menghasilkan dan menyajikan model seleksi yang benar-benar dapat melahirkan pejabat yang kompeten dan berkualitas.

Penulis telah merancang dan merencanakan kegiatan penelitian ini yang diharapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan proses rekrutmen khususnya rekrutmen terbuka dengan menghasilkan metode seleksi yang benar-benar tepat untuk digunakan dalam proses seleksi sehingga akan melahirkan pejabat-pejabat yang sesuai dengan kriteria. Hal ini dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Berdasarkan dimensi-dimensi yang Smith gunakan dalam penelitiannya, maka penulis akan menguraikan hasil penelitian dengan indicator sebagai berikut :

1) Kandidat

Kandidat, diperoleh melalui seleksi administrasi yang ketat yang dilakukan oleh panitia seleksi. Kandidat ini harus memenuhi syarat-syarat administrasi yang ditentukan oleh panitia seleksi. Dalam hal ini, BKD menyaring kandidat dengan mencocokkan kesesuaian antara dokumentasi dengan bukti otentik yang dipunyai oleh para kandidat. Termasuk didalamnya akan diperiksa rekam jejak para kandidat dengan melibatkan panitia seleksi untuk menguji keabsahan data para kandidat. Khusus untuk Pemerintah Kota Bandung, kandidat yang hingga saat ini diperbolehkan untuk ikut dalam seleksi, terbatas pada pegawai di wilayah Jawa Barat saja, untuk masa yang akan datang *range* jangkauan calon peserta memungkinkan untuk diperluas. Untuk dimensi kandidat, indikatornya ada dua yaitu ;

a. karakter

Calon peserta yang akan berkompetisi untuk mendapatkan jabatan tertentu dilihat dari karakter atau kepribadian yang bersangkutan, sehingga hal ini akan memudahkan panitia seleksi untuk melakukan seleksi administrasi di awal. Lebih dalam lagi mengenai karakteristik ini adalah penilaian akan kemampuan kandidat dalam menerapkan gaya kepemimpinannya apabila

sudah terpilih yang tentu saja akan dipengaruhi oleh karakter calon peserta atau kandidat

b. latar belakang

Latar belakang calon peserta juga akan menjadi pertimbangan dari permulaan seleksi, karena hal ini akan berkaitan dengan kemampuan calon peserta atau kandidat dalam menyesuaikan dirinya dengan suasana baru yang akan dijumpai pada saat dirinya lulus dalam persaingan, sehingga waktu yang diperlukan untuk penyesuaian tidak akan terlalu membutuhkan waktu yang lama.

2) Panitia Seleksi

a. inklusif

Panitia seleksi berasal dari berbagai kalangan, tidak terbatas pada golongan tertentu saja dan hal ini menentukan hasil pemilihan atau keputusan, karena mereka mempunyai standar yang biasa-biasa saja.

b. eksklusif

Panitia eksklusif berasal dari kalangan tertentu, yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap hasil seleksi. Biasanya kandidat yang dihasilkan mempunyai kompetensi yang cenderung baik karena dihasilkan dari panitia seleksi yang mempunyai standar dan tujuan tertentu. Khusus untuk pemerintah kota Bandung, panitia seleksi dibentuk dengan mempertimbangkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk menilai atau menyeleksi para kandidat. Dalam beberapa kali proses seleksi yang dilakukan oleh pemerintah kota



Bandung, panitia seleksi ini selalu melibatkan kaum akademisi dan tenaga ahli yang sesuai dengan lowongan jabatan yang akan diisi. Hal ini dimaksudkan agar penilaian terhadap para kandidat sesuai dengan kompetensinya antara penguji dan peserta. Panitia seleksi harus mempunyai kemandirian dan kekhususan sehingga mereka tidak dapat diinterferensi oleh pihak lain yang akan mengambil keuntungan dari kedekatan dengan panitia seleksi.

### 3) Sistem Pemilihan

#### a. seleksi administrasi

Kandidat diperoleh melalui seleksi administrasi yang ketat yang dilakukan oleh panitia seleksi. Kandidat ini harus memenuhi syarat-syarat administrasi yang ditentukan oleh panitia seleksi. Dalam hal ini, BKD menyaring kandidat dengan mencocokkan kesesuaian antara dokumentasi data fisik dengan informasi yang diperoleh dari aplikasi atau surat lamaran. Termasuk didalamnya akan diperiksa rekam jejak para kandidat dengan melibatkan panitia seleksi untuk menguji keabsahan data para kandidat. Khusus untuk pemerintah kota Bandung, kandidat yang hingga saat ini diperbolehkan untuk ikut dalam seleksi, terbatas pada pegawai di wilayah Jawa Barat saja, untuk masa yang akan datang *range* jangkauan calon peserta memungkinkan untuk diperluas.

#### b. wawancara

Wawancara dilakukan setelah kandidat atau calon peserta lolos dari seleksi administrasi. Dengan didukung data fisik dan pembacaan karakter serta latar belakang, berbagai test diujikan dalam sesi wawancara ini, sehingga panitia seleksi sudah bisa menentukan apakah kandidat layak dan cocok untuk diterima dan ditempatkan di posisi yang sesuai dengan kompetensinya dan yang sesuai dengan jabatan yang akan dipegangnya.

c. hasil dan penempatan

Setelah melalui tahapan ujian pada sesi wawancara, maka panitia seleksi memutuskan dan memilih calon peserta yang mana saja yang lolos dan kemudian nama-nama kandidat yang lolos ke tiga besar, akan diajukan kepada pimpinan daerah guna diambil satu orang yang layak menduduki jabatan yang diperlukan. Dalam hal ini, walikota Bandung mempunyai peranan penting untuk memilih dan menentukan kandidat mana yang berhasil terpilih dengan mempertimbangkan nilai atau skor hasil seleksi secara keseluruhan.

4) Prioritas

a. kandidat lokal (pejabat karier)

Pada umumnya, sebelum adanya sistem rekrutmen secara terbuka, panitia seleksi akan memprioritaskan kandidat yang berasal dari pejabat karier yang selama ini memang berkarier secara bertahap untuk mencapai suatu jabatan tertentu di lingkungan instansinya sendiri (incumbent). Nilai tambah yang dipunyai oleh kandidat

demikian adalah bahwa dia akan lebih memahami tugas dan tanggungjawabnya serta mengenal lebih dalam akan lingkungan instansinya, sehingga akan memudahkan kandidat pemenang dalam menjalankan roda kepemimpinannya dan memudahkan pula dalam proses pengambilan keputusan suatu kebijakan. Namun metode ini sudah mulai bergeser dan digantikan oleh sistem yang baru, yaitu rekrutmen terbuka.

b. kandidat di luar instansi

Poin inilah yang sebetulnya menentukan bagi pelaksanaan rekrutmen secara terbuka yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung. Dengan sistem ini, memungkinkan kandidat yang berasal dari luar instansi untuk ikut berkompetisi dan apabila memang mempunyai kompetensi yang sesuai, panitia seleksi juga akan memprioritaskan kandidat yang demikian. Karena dengan sistem rekrutmen terbuka ini maka semua kandidat atau calon peserta mempunyai kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara sehat guna mencapai suatu jabatan tertentu.

5) Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh pimpinan daerah yang dalam hal ini adalah walikota Bandung, pada enam bulan pertama pejabat terpilih menempati instansi barunya. Kemudian apabila dari hasil evaluasi yang dilakukan, ternyata belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka akan diberikan perpanjangan waktu enam bulan lagi untuk evaluasi lanjutan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, diketahui bahwa ada pejabat terpilih yang tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Sehingga dari hasil evaluasi, diperoleh data bahwa ada beberapa pejabat terpilih yang dipindahkan atau di rotasi ke instansi lain, dikarenakan penilaian hasil kerjanya yang masih di bawah standar.

## **SIMPULAN**

Dari uraian tersebut di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan rekrutmen terbuka masih perlu adanya perbaikan khususnya pada saat seleksi dilakukan. Sebaiknya, panitia seleksi beserta pihak terkait menyiapkan dan menambah atau bahkan menyempurnakan bentuk ujian seleksi bagi para kandidat peserta, sehingga profil yang dihasilkan dari proses seleksi rekrutmen secara terbuka ini dapat mendekati kesempurnaan dan meminimalisir adanya *human error* ketika dilakukan evaluasi. Karena diharapkan sistem rekrutmen terbuka ini betul-betul dapat menghasilkan pejabat tinggi yang kompeten dan dapat memimpin instansinya berkembang menjadi lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Creswell, John, W., 1994, *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*, London: Sage Publication, Inc.,

\_\_\_\_\_, 2013, *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Alih Bahasa. Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Dessler, Gary, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Alih Bahasa. Eli Tanya, Jakarta :PT. Index Gramedia

Dubois, David D., 2004, *Competency-Based Human Resource Management*, Mountain View, California : Davies-Black Publishing

Mondy, R. Wayne and Noe, M. Robert, 2005, *Human Resource Management*, New Jersey: Pearson Education, Inc.

Mondy, R., 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Alih Bahasa. Bayu Airlangga, Jakarta: Erlangga

Rosidah & Sulistiyani T, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Smith, Daniel M., 2014. "Candidate Recruitment for the 2012 Election: New Parties, New Method..Same Old Pool of Candidates?". New York: Palgrave, Macmillan

Schuler S. & Jackson E, 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Menghadapi Abad Ke-21)*, Alih Bahasa. Nurdin Sobari dan Dwi Kartini Yahya, Jakarta: Erlangga

Suwatno H. & Priansa J, 2014, *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta

### **Karya Tulis**

Kusharwanti, Medelina, 2008, Analisis Kebijakan Rekrutmen dan Seleksi PNS di Indonesia, Universitas Indonesia

Pramudyanto, Sigit, 2012. "Rekrutmen CPNS dengan Seleksi (Merit) Kompetensi di Pemkab Sragen". UGM

Pramuhardana, Andri, 2007. "Transparansi Rekrutmen PNS: Studi pada BKD Provinsi Sumatra Barat". UGM

### **Jurnal**

Smith, Daniel, M, 2012. "Candidat Selection Methods and Policy Cohesion in Parties: The Impact of Open Recruitment in Japan". SAGE.*Party Politics*, Vol.22:339-353

Williams, J. Oliver, 2007."Inside Chinese Bureaucracy: Civil Service Reform in The Ministry of Light Industry".Routledge, Taylor & Francis Group.*International Journal of Public Adiministration*, 16:7, 1035-1051

### **Peraturan**

Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Permenpan No. 13 Tahun 2014 Tentang Rekrutmen Secara Terbuka

Permenpan PER/15/M.PAN/7/2009 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi

### **Rujukan Elektronik**

“Lelang Jabatan”. Melalui [http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-V-9-I-P3DI1-](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-9-I-P3DI1-) >[13/5/28]

“Lelang Jabatan Jokowi “. Melalui <http://birokrasi.kompasiana.com/lelang-jabatan-jokowi-melanggar-uu-549966.html>>[13/4/11]

“Lelang Jabatan Akan Dimulai April 2013”. Melalui <http://www.tempo.co/read/news/214465118/>>[13/3/05]

“Pelantikan Pejabat Eselon II Kota Bandung”. Melalui <https://ppid.bandung.go.id/pelantikan-dan-pengambilan-sumpah-jabatan/>>[03/01/17]



## **Identifikasi Potensi Bencana Industri Di Kota Cilegon Provinsi Banten**

**Pramudi Harsono**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa  
harsono70@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Industrialisasi ada dalam rangka pemenuhan kehidupan manusia. Industrialisasi bagi daerah memiliki potensi yang besar dalam penerimaan PAD dan penyerapan tenaga kerja, Pada satu sisi Industrialisasi membawa dampak positif, karena dapat menumbuhkan perekonomian dan pendapatan asli daerah. Namun disatu sisi industri juga menyimpan potensi bencana, yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan atau ekosistem. Agar industri tidak menjadi ancaman bagi masyarakat daerah industri dan lingkungan, maka perlu ada upaya untuk mencegahnya. Pemerintah Kota Cilegon sebagai pemangku kebijakan di daerah harus mengelola industri, supaya industri tidak menjadi ancaman dan bencana tapi memberikan nilai manfaat dan berdampak positif bagi masyarakat, alam juga pemerintahan. Identifikasi potensi bencana Industri di Kota Cilegon adalah salah satu upaya untuk mencegah timbulnya bencana industri dan resiko yang besar atas bencana industri. Landasan teori yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bencana industri atau teknologi adalah pendapat dari Shaluf (2007) *Socio-tehcnical disaster yang dibedakan atas technological disaster, transportation disaster, structure collapse dan production disaster.*

Kata Kunci : *Bencana, Industri. Pencegahan*

### **PENDAHULUAN**

Bencana adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan terjadi oleh setiap umat manusia, tidak hanya bencana yang terjadi karena faktor-faktor alamiah maupun bencana yang terjadi akibat kesalahan manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor-faktor alam atau bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah



longsor. Sementara itu bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana industri merupakan bagian dari bencana non alam, yang disebabkan oleh kegagalan industri. Kehadiran industri-industri di daerah dapat mendatangkan malapetaka bagi kehidupan masyarakat di sekitar lokasi industri, kesalahan dalam pengelolaan dalam proses industri akan membawa petaka yang besar bagi masyarakat dan lingkungannya seperti pencemaran udara dan air akibat limbah industri, belum lagi polusi yang berdampak pada kesehatan. Bencana akibat kegagalan teknologi pada industri selain akan menyebabkan korban jiwa, sarana dan prasarana industri itu sendiri, juga mengorbankan dan merugikan masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan industri tersebut.

Dua bencana industri telah membuat dunia terhenyak, berduka dan sekaligus khawatir akan dampak yang akan ditimbulkannya. Pertama, bencana industri 3 Desember 1984 meledaknya pabrik methyl isocyanate (MIC) bahan baku peptisida di Bhopal India. Korban mencapai 50.000 – 100.000, kematian sekitar 2000-2500 orang. Bencana Industri Kedua terjadi pada 26 April 1986, meledaknya reactor nuklir di Chernobil, menyebabkan 30 tewas seketika, akibat sampah nuklir ribuan orang terkena dampak dan akan meninggal karena kanker (<https://bempolnes.wordpress.com>). Satu bencana industri yang tak kalah besar dampaknya dan memakan banyak korban juga terjadi di Indonesia. Bencana itu adalah keluarnya lumpur panas akibat aktivitas eksplorasi gas yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas Inc. di Porong Sidoarjo Jawa Timur pada 29 Mei 2006. Bencana ini mengakibatkan tergenangnya area pertanian, perumahan dan industri

di 16 Desa dari tiga kecamatan disekitarnya, yaitu kecamatan Porong, Jabon dan Tanggulangin. Bencana lumpur lapindo ini menyebabkan lebih dari 8200 jiwa dievakuasi dan lebih dari 25 ribu jiwa harus mengungsi, sekitar 10.000 rumah tenggelam, belum lagi ternak dan infra struktur yang rusak. Kondisi ini menunjukkan bahwa bencana industri memiliki dampak yang sangat luas dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.

Industrialisasi di Kota Cilegon telah ada sejak tahun 1970, semenjak didirikannya industri besi baja Trikora, yang kemudian dilanjutkan dengan berdirinya PT. Krakatu Steel. Pertumbuhan industri di Kota Cilegon berjalan sangat pesat, PT. Krakatau Steel sebagai pabrik baja terbesar merupakan cikal bakal bagi lahirnya industri-industri lain. Letaknya yang strategis karena dekat dengan ibukota negara, dan berada di bibir pantai, membuat industri di kota Cilegon terus berkembang, terutama industri kimia. Luas kawasan industri di Kota Cilegon mencapai 892 Ha, yang terbagi dalam 3 zona kawasan, yaitu : Zona Ciwandan, Zona Kawasan Industri Cilegon dan Zona Merak.

Perbedaan industri di Kota Cilegon dengan kota lain, seperti Kota Tangerang, Kota Bekasi dan daerah industri lain adalah pada jenis industrinya. Industri di Cilegon lebih didominasi oleh industri kimia dan berteknologi tinggi milik perusahaan asing. Berdasarkan data dari BPTPM Kota Cilegon pada November 2014 terdapat 124 industri PMA dengan jumlah investasi sebesar 68,29 trilyun dan 45 PMDN dengan total investasi sebesar 17,67 trilyun. Industri kimia adalah industri yang memiliki resiko bencana sangat tinggi, karena kecelakaan pada industri kimia dapat menjadi bencana besar bagi masyarakat Cilegon. Potensi

Bahaya dari aktivitas industri kimia antara lain pada bongkar muat B3 di terminal Kimia khusus dan transportasi B3, penyimpanan/penimbunan B3, pada saat proses produksi, keberadaan peralatan dengan komponen radioaktif dan penempatan Pipa Interkoneksi antar pabrik yang berisi B3. Apabila terjadi kegagalan teknologi pada aktivitas tersebut, dapat menimbulkan kebocoran yang dapat menjadi bencana industri.

Identifikasi potensi bencana industri adalah salah satu upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya bencana yang disebabkan oleh industri. Dengan melakukan Identifikasi juga diharapkan dapat dilakukan pengawasan yang tepat pada perusahaan sesuai dengan jenis industri. Dengan pengawasan yang tepat maka bencana industri dapat dihindari sehingga kerusakan alam dan kerugian materi dapat dihindari. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimanakah potensi bencana industri di Kota Cilegon ?

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Bencana dan Bencana Industri**

Pengertian Bencana menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

“ Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan pengertian diatas, maka secara garis besar bencana dibedakan

3 macam :

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunungmeletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Menurut UN International Strategy for Disaster Reduction (UN/ISDR,2002), terdapat dua jenis utama bencana yaitu bencana alam dan bencana teknologi. Bencana alam terdiri dari tiga:

1. Bencana hydro-meteorological berupa banjir, topan, banjir bandang, kekeringan dan tanah longsor.
2. Bencana geophysical berupa gempa, tsunami, dan aktifitas vulkanik
3. Bencana biological berupa epidemi, penyakit tanaman dan hewan.

Bencana teknologi terbagi menjadi tiga grup yaitu:

1. Kecelakaan industri berupa kebocoran zat kimia, kerusakan infrastruktur industri, kebocoran gas, keracunan dan radiasi.

2. Kecelakaan transportasi berupa kecelakaan udara, rail, jalan dan transportasi air.
3. Kecelakaan miscellaneous berupa struktur domestic atau struktur nonindustrial, ledakan dan kebakaran

Kegagalan Teknologi adalah kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri (BPBD Kota Serang, 2014 diunduh dari <http://bpbdserang01.page4.me/75.html>).

#### **Penyebab terjadinya kegagalan teknologi**

1. Kebakaran
2. Kegagalan/kesalahan desain keselamatan pabrik/teknologi
3. Kesalahan prosedur pengoperasian pabrik/teknologi
4. Kerusakan komponen
5. Kebocoran reaktor nuklir
6. Kecelakaan transportasi (darat, laut, udara)
7. Sabotase atau pembakaran akibat kerusuhan
8. Dampak ikutan dari bencana alam (gempa bumi, banjir, dan sebagainya)

Kegagalan teknologi dapat menyebabkan pencemaran (udara, air dan tanah), korban jiwa, kerusakan bangunan, dan kerusakan lainnya. Bencana Kegagalan teknologi pada skala yang besar akan dapat mengancam kestabilan ekologi secara global.

Penyebab kecelakaan industri antara lain :

1. Mesin

2. Alat angkut
3. Bejana tekan/boiler, instalasi listrik
4. Bahan kimia/radiasi
5. Lingkungan kerja

Lima penyebab diatas tentunya dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas perusahaan-perusahaan yang bergerak di sector industri, terutama perusahaan kimia.

Shaluf (2007) dalam Kusumasari (2014:11) *Socio-tehcnical disaster* atau bencana sosial teknikal dibedakan atas *technological disaster, transportation disaster, structure collapse dan production disaster*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran potensi bencana industri di Kota Cilegon. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif . Metode penelitian adalah deskriptif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian di Kota Cilegon Provinsi Banten.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini diawali dengan melakukan identifikasi perusahaan yang berada di kawasan industri Cilegon, yang meliputi kawasan industri Ciwandan,

Kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon Dan Kawasan Gerem. Berikut daftar perusahaan besar kategori industri di Kota Serang berdasarkan berbagai sumber :

Tabel Daftar Perusahaan Besar di Kota Cilegon

NO	NAMA PERUSAHAAN	BIDANG USAHA
1.	PT. ASAHIMAS CHEMICAL	KIMIA
2.	JETTY CIWANDAN	GALANGAN KAPAL
3.	PT. LAUTAN OTSUKA CHEMICAL	KIMIA
4.	PT. DAEKYUNG INDAH HEAVY INDUSTRY	MESIN
5.	PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL	KIMIA
6.	PT. FAJAR MAS MURNI	MESIN
7.	PT. KRAKATAU DAYA LISTRIK	LISTRIK
8.	STANDARD TOYO POLIMER	KIMIA
9.	PT. BLUESCOPE STEEL	ENGINEERING
10.	PT. TRAKINDO UTAMA	ALAT BERAT
11.	PLTU SURALAYA	LISTRIK
12.	PT. KRAKATAU POSCO	BAJA
13.	PT. KRAKATAU STEEL	BAJA
14.	PT. BUNNASARI FLOUR MILLS INDONESIA FACTORY	PABRIK TEPUNG
15.	COLD ROLLED STEEL	PABRIK BAJA
16.	PT. PGAS SOLUTION	PERALATAN INDUSTRI
17.	PT. ANEKA KIMIA RAYA ,TBK	KIMIA
18.	PT. AKR CORPORINDO	PERALATAN INDUSTRI
19.	PT. UNGGUL INDAH CAHAYA	KIMIA
20.	PT. BARATA INDONESIA	MESIN
21.	PT. FEDERAL KARYATAMA	KILANG MINYAK
22.	PT. DYSTAR CILEGON	PERALATAN INDUSTRI
23.	PT. TJOKTO PUTRA PERSADA	PERALATAN INDUSTRI
24.	PT. NIPPON SHOKUBAI	KIMIA
25.	PT. MC PET FILM INDONESIA	KIMIA
26.	PT. BAYER URETHANES INDONESIA	PERALATAN INDUSTRI
27.	PT. TRI MULYA INTERBUANA	PERALATAN INDUSTRI
28.	PT. KHI PIPE INDUSTRIES	PIPA
29.	PT. SEAMLESS PIPE INDONESIA	PIPA
30.	PT. DOVER CHEMICAL	KIMIA

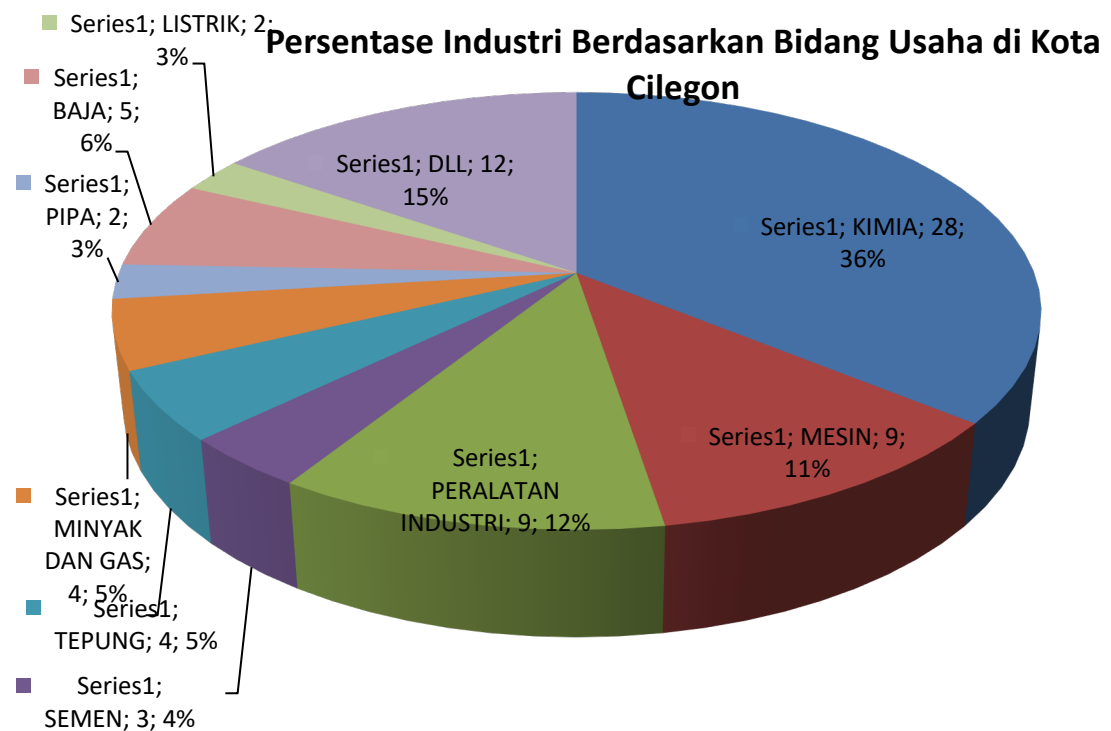
31.	PT. TITAN PETROKIMIA NUSANTARA	KIMIA
32.	PT. INDONESIA POWER	LISTRIK
33.	PT. LOTTE CHEMICAL	KIMIA
34.	PT. CABOT INDONESIA	KIMIA
35.	PT. INDONESIA POS CHEMTECH CHOSUN	KIMIA
36.	PT. CJ KOREA EXPRESS LOGISTIC	JASA PETI KEMAS
37.	PT. POSCO MTECH INDONESIA	ENGINEERING
38.	PT. KOLON INA	JASA ANGKUTAN
39.	PT. SAMUDRA MARINE INDONESIA	SHIPPING
40.	PT. SABA PRATAMA	PERALATAN INDUSTRI
41.	PT. CBA CHEMICAL INDUSTRIES	KIMIA
42.	PT. KING PAPER	KERTAS
43.	PT. PERMATA DUNIA SUKSES UTAMA	KIMIA
44.	PT. ARGAMAS BAJATAMA	BAJA
45.	PT. BAYER MATERIAL SCIENCE	MESIN
46.	PT. BRITISH PETROLEUM	MINYAK DAN GAS
47.	PT. AMOCO MITSUI	MINYAK DAN GAS
48.	PT. LATINUSA	MESIN/PLAT
49.	PT. KRAKATAU NIPPON STEEL SUMIKIN	BAJA
50.	PT. TIMAH INDUSTRI	TIMAH
51.	PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA	MESIN
52.	PT. INDOFERO	MESIN
53.	PT. KRAKATAU SEMEN INDONESIA	SEMEN
54.	PT. THERMAX INTERNATIONAL	MESIN
55.	PT. CILEGON CORN BLOCK	CORN BLOCK
56.	PT. ARCHROMA CILEGON	KIMIA
57.	PT. JAWA MANIS RAFINASI	KIMIA
58.	PT. CERESTAR FLOUR MILLS	TEPUNG
59.	PT. CMINDO GEMILANG	SEMEN
60.	PT. DOW CHEMICAL INDONESIA	KIMIA
61.	PT. INDORAMA POLIPET INDONESIA	KIMIA
62.	PT. CASTROL INDONESIA	MINYAK DAN GAS
63.	PT. SRI S RUBBER INDONESIA	KARET
64.	PT. STANDARD TOYO POLIMER	KIMIA
65.	PT. CCSI FACTORY	MESIN
66.	PT. KRAKATAU POSCHEM DONGSUH CHEMICAL	KIMIA
67.	PT. TRODOMAIN CHEMICAL	KIMIA
68.	PT. BUMI MERAH TERMINALINDO	TERMINAL KILANG
69.	PT. CONTINENTAL SOLVINDO	PERALATAN INDUSTRI



70.	PT. NX INDONESIA	KIMIA
71.	PT. BAKRIE DIAFOIL	PABRIK PLASTIK
72.	PT. REDECO PETROLIN UTAMA	KIMIA
73.	TEREOS FKS INDONESIA	TEPUNG
74.	PT. MAYORA CIGADING	TEPUNG
75.	PT. CHEETHAM GARAM INDONESIA	GARAM
76.	PT. TRINSEO	KIMIA
77.	PT. STATOMER MERAK	PERALATAN INDUSTRI
78.	PT. BANGUN BETON INDONESIA	SEMEN
79.	PT. STYRINDO MONO	KIMIA
80.	PT. ROHM AND HAAS INDONESIA	KIMIA
81.	PT. MCA INDONESIA	KIMIA

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan data yang dihimpun peneliti ini , dapat dikatakan bahwa industri kimia mendominasi perusahaan yang berada di wilayah Kota Cilegon Banten.



Sumber : Data penelitian 2017, diolah

Berdasarkan diagram diatas tergambar dengan jelas bahwa bidang usaha perusahaan dalam kategori industri besar sebagian besar adalah di bidang kimia sekitar 36%, selanjutnya adalah perusahaan yang memproduksi peralatan industri, kemudian pabrik pembuatan mesin-mesin dan baja.

Potensi bencana industri pada setiap bidang usaha berbeda-beda. Berdasarkan pada data yang ada maka identifikasi potensi bencana industri dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel Potensi Bencana Berdasarkan Jenis Usaha**

<b>No.</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Potensi Bencana</b>	<b>Penyebab</b>
1.	Kimia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebocoran zat kimia</li> <li>- Infra struktur industri</li> <li>- Kebakaran</li> <li>- Ledakan</li> <li>- Kebocoran gas</li> <li>- Keracunan</li> <li>- Radiasi</li> <li>- Epidemi/penyakit kulit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kegagalan desain keselamatan pabrik,</li> <li>- kesalahan prosedur pengoperasian,</li> <li>- kerusakan komponen</li> <li>- kebocoran reaktor</li> <li>- kecelakaan transportasi</li> <li>- dampak ikutan dari bencana alam</li> <li>- instalasi listrik</li> </ul>
2.	Mesin dan peralatan industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ledakan</li> <li>- kebakaran</li> <li>- kerusakan infrastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kegagalan desain keselamatan pabrik</li> <li>- kesalahan prosedur pengoperasian pabrik</li> <li>- kerusakan komponen</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- kelalaian pekerja</li> <li>- instalasi listrik</li> </ul>
3.	Baja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polusi udara</li> <li>- Ledakan</li> <li>- Kebakaran</li> <li>- Kerusakan infrastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kegagalan desain keselamatan pabrik</li> <li>- kesalahan prosedur pengoperasian pabrik</li> <li>- kerusakan komponen</li> <li>- kelalaian pekerja</li> </ul>
4.	Minyak dan Gas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencemaran laut</li> <li>- Kebakaran dan ledakan reaktor</li> <li>- Kerusakan infrastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kegagalan desain keselamatan pabrik</li> <li>- kesalahan prosedur pengoperasian pabrik</li> <li>- kerusakan komponen</li> <li>- kelalaian pekerja</li> <li>- Kebocoran pipa</li> </ul>
5.	Listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencemaran udara</li> <li>- Kebakaran</li> <li>- Ledakan</li> <li>- Kerusakan Infrastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kegagalan desain keselamatan pabrik,</li> <li>- kesalahan prosedur pengoperasian,</li> <li>- kerusakan komponen</li> <li>- dampak ikutan dari bencana alam</li> <li>- instalasi listrik</li> </ul>
6.	Semen, tepung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polusi udara dan air</li> <li>- Kerusakan infrastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kegagalan desain keselamatan pabrik</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- kesalahan prosedur pengoperasian pabrik</li> <li>- kerusakan komponen</li> <li>- kelalaian pekerja</li> <li>- kecelakaan transportasi</li> </ul>
--	--	--	---

Sumber : Penelitian 2017, diolah

Berdasarkan klasifikasi diatas, maka potensi bencana industri yang paling besar dan membahayakan adalah potensi bencana pada industri kimia. Kebocoran pipa, tabung zat kimia selain dapat menimbulkan kebakaran, ledakan juga dapat menimbulkan pencemaran udara bahkan radiasi. Radiasi dari bahan radioaktif industri kimia dapat menyebabkan penyakit.

Potensi bencana industri lain dari industri kimia adalah kerusakan infrastruktur, berupa kerusakan gedung akibat ledakan dan kebakaran, kerusakan instalasi listrik dan jaringan telekomunikasi.

Potensi bencana industri dari industri kimia di wilayah pesisir pantai Ciwandan dan Merak adalah pencemaran air laut, akibat limbah kimia yang mengakibatkan rusaknya biota laut. Potensi bencana industri kimia juga dapat disebabkan karena proses perpindahan/transportasi cairan kimia, di dalam lingkungan pabrik maupun transportasi di luar pabrik. Misalnya apabila terjadi kecelakaan pada truk pengangkut bahan kimia tersebut.

Pada industri non kimia potensi bencana industri yang timbul hampir sama, yaitu pencemaran udara dan air, penyakit sebagai akibat pencemaran udara dan air, kebakaran, ledakan dan kerusakan infrastruktur. Penyebabnya pun tidak jauh berbeda yaitu karena kegagalan teknologi dan desain keselamatan pabrik, kesalahan

prosedur pengoperasian, kerusakan komponen, kebocoran pipa gas, kecelakaan transportasi dan dampak ikutan dari bencana alam.

Semua potensi bencana industri tersebut tersebut dapat dicegah oleh setiap perusahaan dengan menggunakan komponen pabrik yang terstandarisasi, lulus uji analisis dampak lingkungan, pemeriksaan rutin terhadap mesin-mesin, instalasi listrik, pipa dan lain-lain.

Selain dilakukan berbagai tindakan pencegahan terhadap bencana industri dari internal perusahaan, pemerintah juga memiliki peran penting untuk mengendalikan pertumbuhan industri, pengawasan operasi industri dan pengelolaan limbah industri.

## SIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Potensi bencana industri terbesar di Kota Cilegon berasal dari industri kimia, persentase jumlah industri kimia di Kota Cilegon adalah sebesar 36 %.
2. Potensi bencana industri yang dapat terjadi pada industri di Kota Cilegon adalah : Kebakaran, Ledakan, Kerusakan Infra Struktur, Kebocoran Gas, Keracuna, Epidemii penyakit, Polusi udara dan air.
3. Penyebab bencana industri di Kota Cilegon antara lain : kegagalan desain keselamatan pabrik, kesalahan prosedur pengoperasian, kerusakan komponen, kebocoran reaktor, kecelakaan transportasi, dampak ikutan bencana alam, instalasi listrik, dan *human eror*.

DAFTAR PUSTKA

Kusumasari, Bevaola, 2014, *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah*

Lokal, Jakarta : Gava Media

Shalu, I. 2007, *Disaster Types, Disaster Prevent and Management*

UU No. 24 tahun 2007 Tentang Manajemen Bencana

<https://bempolnes.wordpress.com>



## **Analisis Administrasi Pembuatan Izin Trayek Akdp Pada Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat**

**Yani Restiani Widjaja dan Selina**

Universitas BSI Bandung  
yani.yrw@bsi.ac.id

### **ABSTRAK**

Dengan adanya prosedur administrasi yang terkoordinir maka pelaksanaan kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur administrasi Pembuatan Izin Trayek AKDP Pada Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat. Dalam penulisan ini mempergunakan metode penelitian kualitatif menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: metode observasi, wawancara studi literatur. Prosedur administrasi pembuatan izin trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemohon izin maupun dalam bidang pelayanannya.

Kata kunci : Administrasi, Izin trayek.

### **PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan sehari – hari istilah administrasi biasanya berurusan dengan kantor pemerintahan atau swasta, kegiatan administrasi memiliki pengaruh yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Dengan adanya prosedur administrasi yang terkoordinir perusahaan dapat melaksanakan kegiatan operasional dengan baik dan lancar. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan administrasi ini bukan tujuan individual melainkan tujuan organisasi. Suatu perusahaan tidak terlepas dari pengelolaan administrasi yang harus dijalankan, pada dasarnya pengelolaan tersebut sebagai alur dari kegiatan administrasi sehingga semua aktivitas yang dilakukan akan tertulis dalam sebuah format yang sudah disediakan oleh perusahaan, termasuk dalam



mengurus berbagai surat izin terdapat prosedur administrasi yang harus dijalankan. Jumlah permohonan perizinan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, seperti yang terlihat pada Tabel I.1 berikut. Begitu pula halnya dengan jumlah perizinan yang diterbitkan terjadi peningkatan di setiap tahunnya. Pada Tabel I.1 terdapat jumlah jenis perizinan, yaitu jumlah jenis perizinan yang aktif dilakukan di setiap tahunnya. Terjadi peningkatan jumlah jenis perizinan yang aktif dilaksanakan sejak tahun 2009 sampai tahun 2012. Peningkatan ini berkorelasi terhadap peningkatan jumlah permohonan yang masuk di tiap tahunnya. Hal demikian harus diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni.

Perizinan bidang transportasi merupakan salah satu layanan sektor perhubungan yang diintegrasikan ke dalam Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat. Izin trayek angkutan kota dalam provinsi termasuk ke dalam sektor perhubungan, wilayah layanan izin trayek angkutan kota dalam provinsi yang dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat yaitu lintas kabupaten kota.

Perizinan terbesar pada tahun 2012 bidang Perhubungan yaitu pengurusan Rekomendasi Kartu Pengawasan (KP) sebanyak 19.409, kemudian diikuti pengurusan Surat Keputusan Izin Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebanyak 9.941. Sedangkan pada tahun 2013 pengurusan Rekomendasi Kartu Pengawasan (KP) dan Surat Keputusan Izin Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebanyak 14.156, dan pada tahun 2014 pengurusan Rekomendasi Kartu

Pengawasan (KP) dan Surat Keputusan Izin Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebanyak 10.153.

Perizinan merupakan wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Dalam pelaksanaan administrasi pembuatan izin trayek angkutan kota dalam provinsi pada Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu sering kali ditemukan data yang tidak lengkap dalam pengajuan berkas pembuatan izin trayek angkutan kota dalam provinsi, sehingga menghambat waktu penyelesaian pembuatan izin trayek angkutan kota dalam provinsi, waktu pemrosesan yang tidak pasti.

#### LANDASAN TEORI

Dalam sebuah perusahaan prosedur merupakan suatu hal yang saling berkesinambungan dengan cara tata kerja, untuk itu prosedur harus dijalankan sebaik-baiknya. Hal ini diperkuat dengan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian dari prosedur. Menurut Tathagati (2014:47) mengemukakan bahwa Prosedur merupakan instruksi tertulis sebagai pedoman dalam menyelesaikan sebuah tugas rutin atau tugas yang berulang dengan cara yang efektif dan efisien. Untuk menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Secara singkat prosedur menggambarkan strategi yang digunakan untuk memastikan bahwa sebuah proses dilaksanakan dengan baik, konsisten, efektif dan efisien.

Sedangkan menurut Tambunan (2013:84) mengemukakan bahwa Prosedur sebagai pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada didalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan serta

penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten, standard dan sistematis. Menurut Nafari (2009:9) mengemukakan bahwa “Prosedur adalah urutan-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam”.

### **Pengertian Administrasi**

Pengertian administrasi dapat ditinjau dari dua sudut yaitu pengertian administrasi dalam arti luas dan pengertian administrasi dalam arti sempit. Pengertian administrasi dalam arti luas menurut Herbert A. Simon dalam Affifuddin (2012:4) mengemukakan bahwa “Administrasi adalah kegiatan kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama”.

Sedangkan menurut The Liang Gie dalam Dewi (2011:7) mengemukakan bahwa “Administrasi dalam arti luas adalah segenap proses penyelenggaraan setiap usaha kerjasama sekelompok orang yang mencapai tujuan akhir yang telah ditentukan”. Menurut Sondang P. Siagian dalam sagala (2012:27) mengemukakan bahwa “Administrasi dalam arti luas adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari pada keputusan yang sudah diambil dan pelaksanaan itu umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut Silalahi (2013:5) mengemukakan bahwa Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan

dalam hubungannya satu sama lain. Data dan informasi yang dimaksud berhubungan dengan aktifitas organisasi. Administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut tatausaha (clerical work).

Sedangkan menurut Athoillah (2010:132) menyatakan bahwa “Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan data dan informasi secara sistematis kedalam bentuk pembukuan. Administrasi disini sama dengan kegiatan organisasi yang akan dijadikan bahan informasi bagi seluruh komponen organisasi yang bersangkutan”. Menurut Mulyono (2009:41) mengemukakan bahwa Administrasi yang mengandung pengertian sempit itu terutama dimaksudkan sebagai ketatausahaan yang diartikan sebagai keterangan–keterangan secara sistematis dan pencatatan–pencatatan secara tertulis semua kegiatan yang diperlukan dengan maksud keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lainnya.

Berdasarkan pengertian–pengertian para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa administrasi memiliki arti luas dan arti sempit. Administrasi dalam arti luas merupakan proses kerja sama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan Dalam arti sempit administrasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, meliputi kegiatan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan, dan menyusun keterangan-keterangan serta memperolehnya kembali secara keseluruhan yang berhubungan satu sama lain. Menurut Afifuddin (2012:6) mengemukakan bahwa ciri-ciri administrasi yaitu :

1. Adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih.

2. Adanya kerja sama dari kelompok tersebut.
3. Adanya kegiatan atau proses atau usaha.
4. Adanya bimbingan, kepemimpinan.
5. Adanya tujuan yang telah disepakati bersama.

Menurut The Liang Gie (2009:11), fungsi administrasi adalah sebagai berikut:

1. Melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari sesuatu organisasi.
2. Menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi itu untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat.
3. Membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan.

### **Pengertian Izin Trayek**

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J ten Berge dalam Helmi (2012:77) mengemukakan bahwa “Izin dalam arti sempit merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang–undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang– undangan”. Menurut Bagir Manan dalam Sutedi (2011:170) mengemukakan bahwa “Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang–undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang”.

Sedangkan dalam Peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu menetapkan bahwa “Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu”. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: Km. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Angkutan Umum. Berdasarkan definisi–definisi yang dikemukakan oleh para ahli, maka izin trayek adalah persetujuan berdasarkan undang–undang untuk memperbolehkan tindakan lintasan kendaraan dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan yang tetap, dan memiliki lintasan dan jadwal yang tetap.

## METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi literatur. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

## PEMBAHASAN

Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat merupakan gabungan dari Badan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat dan

Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Provinsi Jawa Barat sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Provinsi Jawa Barat. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga lain Provinsi Jawa Barat, yang bertugas mengelola proses administrasi penerbitan perizinan, termasuk dibidang penanaman modal. Berdasarkan ketentuan pasal 11 peraturan presiden nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu satu pintu, menyatakan bahwa pelayanan perangkat Daerah Provinsi dibidang Penanaman Modal (PDPPM), untuk memberikan kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, serta efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan, sehingga perlu mengintegrasikan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.

Prosedur administrasi pembuatan izin trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP) pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaannya meliputi kegiatan pemberian informasi mengenai persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian izin sampai dengan penyerahan naskah izin kepada pemohon serta koreksi dan revisi apabila naskah izin yang diterbitkan terdapat kesalahan pencetakan data atau informasi. Izin trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP) termasuk kedalam sektor perhubungan dan izin trayek yang dilayani oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yaitu lintas kabupaten kota

misalnya cicaheum-cileunyi. Izin trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP) dikategorikan kedalam bis kecil.

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tidak sembarangan memberikan izin terhadap pemohon izin. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa prosedur administrasi yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat kepada pihak pemohon, atau bilamana pemohon berhalangan dapat diwakili oleh kuasanya yang dinyatakan dengan surat kuasa dan atau surat tugas bermatrai serta menunjukkan identitas. Naskah perizinan yang diterbitkan untuk pembuatan izin trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP) yaitu berupa surat keputusan (SK) dan kartu pengawasan (KP), adapun tahapan yang harus dilakukan pada saat pembuatan izin trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP), yaitu : Standar Oprasional Prosedur dan mekanisme yang sudah ditentukan didalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. Berikut penjelasan dari gambar alur proses pembuatan surat keputusan izin trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP) pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat :

#### 1. Pemohon

- a. Pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, formulir perizinan, biaya dan waktu yang dibutuhkan melalui petugas *front office*. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon izin diatur dalam keputusan menteri perhubungan No.35 Tahun 2003 persyaratan izin trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP) adalah :



1. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
3. Asli surat keputusan izin trayek
4. Foto kopi kartu pengawasan izin trayek
5. Foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku
6. Foto kopi buku uji yang masih berlaku
7. Rekomendasi perhubungan kabupaten atau kota
8. Foto kopi organda
9. Foto kopi jasa raharja
10. Foto kopi Surat Izin Perusahaan Angkutan (SIPA)
11. Foto kopi meter taxi
12. Surat pernyataan peremajaan
13. Surat pernyataan Bea Balik Nama (BBN)

Contoh brosur tentang persyaratan izin trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP) dapat dilihat pada lampiran A.2

Contoh formulir dapat dilihat pada lampiran A.3, A.4, A.5

Informasi tentang biaya dan waktu pembuatan izin trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP). Waktu yang diperlukan dalam memproses permohonan pembuatan izin trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP) adalah 14 hari kerja atau dua minggu. Jika proses ini memakan waktu lebih dari dua minggu maka ada hal yang menghambat prosesnya. Kemudian biaya yang harus dibayar oleh pemohon izin hanya biaya retribusi saja, tidak dipungut biaya lain pada saat pembuatan izin trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP).

Contoh brosur tarif retribusi dapat dilihat pada lampiran A.6

- b. Pemohon menyampaikan formulir dan kelengkapan persyaratan ke petugas *front office*.
- c. Pemohon mendapatkan tanda terima berkas pendaftaran dari petugas *front office* apabila persyaratan dinyatakan lengkap. Resi penerimaan berkas dapat dilihat pada lampiran A.7
- d. Pemohon akan menerima berkas persyaratan izin kembali, apabila persyaratan dinyatakan tidak lengkap dan tidak bisa diproses.
- e. Pemohon menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari petugas *front office* untuk perizinan yang telah selesai dan dikenakan retribusi. Contoh surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) dapat dilihat pada lampiran A.10, A.11
- f. Pemohon melakukan pembayaran retribusi untuk perizinan yang telah selesai dan dikenakan retribusi.
- g. Pemohon menerima surat dokumen izin yang telah selsai dengan membawa resi penerimaan berkas.

## 2. *Front Office*

- a. Petugas *front office* memberikan informasi kepada pemohon izin.
- b. Petugas *front office* memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan daftar persyaratan.
- c. Petugas *front office* mengembalikan berkas permohonan dan menginformasikan untuk diperbaiki atau dilengkapi oleh pemohon apabila persyaratan tidak lengkap dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Petugas *front office* memberikan tanda terima berkas pendaftaran kepada pemohon apabila berkas sudah memenuhi persyaratan dan lengkap. Contoh tanda terima berkas dapat dilihat pada lampiran A.7
- e. Petugas *front office* menyerahkan berkas permohonan ke petugas *back office*.
- f. Petugas *front office* menyerahkan Surat Keputusan Izin Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang telah ditandatangani kepada pemohon.
- g. Petugas *front office* menyerahkan SKRD ke pemohon.

### 3. *Back Office*

- a. Petugas *back office* melakukan verifikasi dan validasi administratif terhadap berkas pemohon.
- b. Petugas *back office* membuat naskah izin untuk ditandatangani oleh Kepala Badan apabila hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan. Naskah perizinan yang diterbitkan untuk izin trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP) berupa surat keputusan (SK) izin trayek atau izin operasi angkutan penumpang umum di wilayah Provinsi Jawa Barat, surat keputusan berlaku selama 5 tahun, jika usia mobil diatas 10 tahun maka surat keputusan diperbaharui setiap 1 tahun sekali. Contoh format surat keputusan dapat dilihat pada lampiran A.8, A.9.
- c. Petugas *back office* melaksanakan penomoran dan pengarsipan surat keputusan izin trayek AKDP.
- d. Petugas *back office* menyerahkan naskah izin yang telah ditandatangani Kepala Badan kepada petugas *front office*.

#### 4. Tim Teknis

- a. Tim teknis menghitung nilai retribusi sebagai bahan penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh pejabat yang berwenang. Tarif retribusi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011, berdasarkan surat dinas perhubungan provinsi Jawa Barat, nomor : 551.21/3248/KD-SEK.T.DARAT tanggal 25 April 2012, bahwa pelaksanaan penerapan retribusi dimulai sejak tanggal 1 Mei 2012. Berikut tabel retribusi izin trayek.

#### 5. Pimpinan

- a. Kepala Badan menandatangani setiap naskah surat izin yang sudah selesai.
- b. Apabila Kepala Badan berhalangan sementara karena kepentingan lainnya, penandatanganan izin dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Apabila kepala badan berhalangan sementara karena penugasan, penandatanganan izin dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prosedur disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur dan mekanisme yang sudah ditentukan didalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berikut penjelasan dari gambar alur proses pembuatan koreksi dan revisi naskah izin pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat:

##### 1. Pemohon

- a. Pemohon mendapatkan informasi dari petugas *front office* mengenai aturan yang harus dilakukan oleh pemohon izin. Setelah pemohon mendapatkan

informasi, pemohon menyerahkan permohonan koreksi atau revisi naskah dokumen perizinan dengan melampirkan bukti-bukti kekeliruan atau kesalahan penulisan dalam naskah dokumen perizinan kepada petugas *front office*.

## 2. *Front Office*

- a. Petugas *front office* menerima berkas koreksi dan revisi naskah izin trayek dari pemohon.
- a. Petugas *front office* mencatat dan segera meneruskan kepada petugas *back office* untuk dilakukan validasi berkas yang selanjutnya dilakukan perbaikan.
- c. Petugas *front office* menyerahkan hasil revisi dan koreksi kepada pemohon.

## 3. *Back Office*

- a. Petugas *back office* melakukan validasi dan perbaikan naskah izin trayek AKDP.
- b. Petugas *back office* menyerahkan hasil koreksi atau revisi naskah dokumen perizinan yang sudah disyahkan ke petugas *front office*.

Terdapat dasar hukum dalam pembuatan izin trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP) yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat.
7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Kota di Jalan dengan Kendaraan Umum.
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Prosedur diatas disesuaikan dengan Standar Oprasional Prosedur dan mekanisme yang sudah ditentukan didalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. Berikut penjelasan dari gambar alur proses pembuatan duplikat atau salinan nahkah izin pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat:

1. Pemohon

- a. Pemohon menyerahkan surat pernyataan kehilangan dari kepolisian serta bukti pengumuman kehilangan yang dimuat pada koran atau media lainnya.

- b. Pemohon menerima naskah duplikat atau salinan dokumen perizinan yang sudah disyahkan.

## 2. *Front Office*

- a. Petugas *front office* memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon dan meneruskan permohonan kepada petugas *back office* untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Contoh resi tanda terima berkas dapat dilihat pada lampiran A.15
- b. Petugas *front office* menyerahkan duplikat atau salinan naskah dokumen perizinan yang sudah disyahkan ke pemohon. Dalam hal dokumen perizinan yang hilang ditemukan kembali, dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku.

## 3. *Back Office*

- a. Petugas *back office* melakukan verifikasi dan validasi dengan ketentuan, apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan dan atau diragukan kebenarannya, Badan dapat melakukan penolakan terhadap permohonan yang bersangkutan dan apabila permohonan yang memenuhi persyaratan, duplikat atau salinan disyahkan oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai stempel.
- b. Setelah disyahkan duplikat atau salinan naskah izin diterbitkan dan petugas *back office* menyerahkan duplikat atau salinan naskah dokumen yang sudah disyahkan ke petugas *front office*.

## 4. Kepala Badan

- a. Duplikat atau salinan disahkan oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk dengan disertai stempel Badan.

### **Analisa Kendala Dalam Pembuatan Izin Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Pada BPMPT Provinsi Jawa Barat**

Hasil dari penelitian dibagian pelayanan perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat mengenai prosedur administrasi pembuatan izin trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP), ada beberapa kendala yang dialami oleh bagian pelayanan perizinan maupun dari pemohon izin sendiri. Kendala tersebut diantaranya:

#### 1. Kendala dari sisi pemohon

- a. Seringkali terdapat pemalsuan dokumen pada saat pengajuan berkas izin trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP) seperti misalnya pemalsuan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Hal tersebut akan mempersulit pihak pemohon izin dalam melakukan proses pembuatan izin, karena dengan adanya pemalsuan dokumen tersebut izin tidak akan diproses.

Salah satu cara untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan cara, pihak Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat harus lebih teliti dalam memeriksa dokumen yang menjadi persyaratan izin trayek AKDP, karena dengan lebih teliti dokumen yang palsu dan dokumen yang asli dapat terlihat jelas perbedaannya. Selain itu Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat juga bekerja sama dengan samsat untuk memeriksa dokumen seperti STNK kendaraan.



- a. Pemohon seringkali memaksakan permohonannya untuk diproses sementara persyaratannya belum terpenuhi, sehingga akan menghambat proses yang akan dilakukan oleh pihak Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam pembuatan izinnya karena dengan tidak lengkapnya persyaratan maka izin yang diajukan tidak dapat di proses.
  - b. Salah satu cara untuk mengatasi kendala tersebut yaitu petugas *front office* harus menjelaskan ketentuan yang berlaku mengenai persyaratan izin atau aturan yang harus dipenuhi oleh pemohon izin.
2. Kendala dari bagian pelayanan perizinan
- a. Waktu pemrosesan penerbitan izin yang melebihi dari waktu yang ditentukan, misalnya pembuatan izin trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP) didalam ketentuannya durasi waktunya 14 hari, tetapi jika saran teknisnya terlambat dari Dinas Perhubungan maka penerbitan izinnya bisa melebihi waktu yang ditetapkan. Salah satu cara untuk mengatasi kendala tersebut yaitu meminta konfirmasi dari Dinas Perhubungan dan mengadakan rapat evaluasi dengan Dinas Perhubungan tentang saran teknis.
  - b. Seringkali terjadi kekeliruan pada saat penulisan atau pengetikan data atau informasi didalam naskah perizinan yang telah diterbitkan. Cara mengatasi kendala tersebut yaitu dengan cara lebih teliti dalam penulisan atau pengetikan naskah izin yang akan diterbitkan dan melakukan pengecekan kembali naskah izin yang akan diterbitkan.
  - c. Sarana dan prasarana harus terpenuhi, karena dengan tersedianya sarana dan prasarana maka pembuatan izin akan terlaksana dengan baik. Cara mengatasi

kendala tersebut yaitu dengan cara meminta sarana dan prasarana yang dibutuhkan ke subbagian umum.

## PENUTUP

### **Simpulan**

1. Prosedur administrasi pembuatan izin trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP) pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan gubernur dan standar operasional prosedur yang berlaku, maka bisa mempermudah pemohon untuk memperoleh naskah izin trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP) dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam pembuatan izin trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP) .
2. Naskah izin yang rusak ataupun hilang dapat diduplikatkan atau disalin kembali dengan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditentukan. Bilamana dokumen yang hilang ditemukan kembali maka dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku.
3. Prosedur administrasi pembuatan izin trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemohon izin maupun oleh bidang pelayanan. Kendala yang dihadapi oleh pemohon yaitu seringkali memaksakan permohonannya untuk diproses, sementara persyaratannya belum terpenuhi, selanjutnya terdapat pemalsuan dokumen pada saat pengajuan berkas izin trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP) seperti misalnya pemalsuan surat tanda

nomor kendaraan (STNK). Sedangkan kendala yang dihadapi oleh bidang pelayanan perizinan pada saat memproses izin yaitu proses dimana Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat meminta saran teknis dari Dinas Perhubungan, tetapi beberapa kali jawaban saran teknis tersebut melebihi waktu yang ditentukan. Sarana dan prasarana yang harus terpenuhi, karena dengan tersedianya sarana dan prasarana maka pembuatan izin akan terlaksana dengan baik, Seringkali terjadi kekeliruan pada saat penulisan atau pengetikan data atau informasi didalam naskah perizinan yang telah diterbitkan.

### **Daftar Pustaka**

- Affifuddin. 2012. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: Alfabeta.
- Athoillah, Anton. 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Pustaka Setia.
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. Pengantar Ilmu Administrasi. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Ekotama, Suryono. 2015. Pedoman Mudah Menyusun SOP. Yogyakarta. Media Pressindo.
- Helmi. 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasma, Juan. 2012. *Standar Operating Procedure* Perpajakan Perusahaan Jasa. Bandung. Alfabeta.
- Miro, Fidel. 2011. Pengantar SistemTransportasi. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. 2009. Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nafari, M. 2009. PenganggaranPerusahaan. Jakarta: Salemba Empat.

Sagala, Syaiful. 2012. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.

Silalahi, Ulbert. 2013. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Sukmadi. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Humaniora

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga

Tambunan, Rudi M. 2013. *Standar Oprating Prosedure (SOP)*. Jakarta: Maiestas Publishing

Tathagati, Arini. 2014. *Step by Step Membuat SOP (Standar Oprating Procedure)*. Yogyakarta: Efata Publishing.

The Liang Gie. 2009. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.

Dokumen Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat



## **Analisis Komparatif Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Di Provinsi Banten**

Agus Sjafari, Kandung Sapto Nugroho dan Arenawati  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
agussjafari@yahoo.com, kandungsapto@fisip-untirta.ac.id,  
arenawati@untirta.ac.id

### *ABSTRACT*

*Value IPKM all districts /cities in Banten province within 3 (three) last year experienced an increase of 40% - 76%. Meanwhile, two new city of Serang and Tangerang City shows that health development in both cities, especially South Tangerang City has been very good with IPKM value indicates the number 0.8069. By recognizing the value IPKM every district/city, then the Banten provincial government to know how the conditions of health development in the autonomous region which it is responsible. So that the provincial government may determine health priorities views of the area and the indicator is considered low. This study is a study which was focused to give an assessment as well as provide an evaluation related to how big the Human Development Index (HDI) of Health in the province of Banten. Thus, in this study was designed using descriptive research method with quantitative approach. Location research with purposive technique, with the intention that there is representation of the North, South, West and East, so designated research sites as follows: 1) Pandeglang; 2) Serang; 3) The city of Cilegon; and 4) Kota Tangerang. Some research recommendations are as follows: 1). Instilling public awareness of hygienic behavior and healthy (PHBs), 2) Collecting regions access to clean water minimal, and supply of clean water through community empowerment programs, 3) It should be disseminated oral health and dental examination and oral routine. 4) The need for a redistribution of the distribution of health personnel, 5) Optimizing the anti-smoking movement, especially in young children to reduce smoking behavior., 6) Control Card Healthy Indonesia, and 7) Support morally and politically to the establishment of the Faculty of Medicine in order to increase access to health workers lead to improvements in Banten in particular HDI HDI Health Affairs.*

*Keywords: Comparative analysis, The Public Health Development Index*

## PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya (Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015).

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI tahun 2015 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional:

- 1) pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan;
- 3) sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan *benefit* serta kendali mutu dan kendali biaya.

Indikator Makro Pembangunan kesehatan secara umum diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Harapan Hidup di Provinsi Banten sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 selalu berada di bawah Angka Harapan Hidup Nasional. (Statistik Indonesia 2015 dan BPS Banten 2015).

Data di atas menggambarkan bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Angka Harapan Hidup masyarakat di Provinsi Banten selalu berada di atas Angka Harapan Hidup Nasional, bahkan dari tahun ke tahun menunjukkan kesenjangan yang semakin meningkat. Pada tahun 2010 terdapat perbedaan sebesar 1,30 poin, tahun 2011 sebesar 1,32 poin, pada tahun 2012 sebesar 1,34 poin, tahun 2013 sebesar 1,36 dan pada tahun 2014 sebesar 1,47. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tendensi bahwa rentang perbedaan antara AHH Nasional dan AHH Banten semakin melebar. Semakin melebarnya kesenjangan ini mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Provinsi Banten lambat dan tertinggal dari provinsi lain. Untuk menjelaskan bagaimana kondisi makro di Provinsi Banten secara



menyeluruh, maka diperlukan data yang menunjukkan bagaimana AHH seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Kondisi makro kesehatan di Banten berdasarkan AHH dari 8 kabupaten/kota menunjukkan bahwa sebagian besar AHH di bawah AHH Provinsi. Dari 8 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten hanya terdapat 2 kota yang memiliki nilai AHH di atas nilai AHH Provinsi Banten bahkan melebihi nilai AHH Nasional, yaitu Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sementara daerah lain yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kabupaten berada pada urutan tiga terbawah. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat kesenjangan pembangunan di Bidang Kesehatan di Provinsi Banten. Data ini juga menjelaskan Banten wilayah selatan memiliki AHH yang lebih rendah dibandingkan di wilayah utara, sementara wilayah Barat karena berbatasan dengan ibukota negara menunjukkan nilai AHH yang jauh lebih baik (BPS Banten 2015).

Derajat Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Banten selain dilihat Angka Harapan Hidup dari juga dilihat dari Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat. IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) adalah indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan, dirumuskan dari data kesehatan berbasis komunitas yaitu: Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar), Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), Survei Podes (Potensi Desa).

Berdasarkan data lainnya menunjukkan bahwa nilai IPKM Provinsi Banten pada tahun 2007 masih jauh dibawah rata-rata IPKM Nasional, yaitu sekitar 0,39, sedangkan pada tahun 2010 nilai IPKM Provinsi Banten untuk tahun 2010 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan menjadi sekitar 0,59 sedikit di

atas nilai IPKM Nasional. Dengan demikian selama kurun waktu 3 tahun Provinsi Banten dapat meningkatkan berbagai indikator dalam mengukur IPKM (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2010).

Dilihat dari nilai IPKM semua kabupaten/kota di Provinsi mengalami peningkatan 40 % - 76 %. Sementara itu dua kota baru Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan memperlihatkan bahwa pembangunan kesehatan di kedua kota tersebut, terutama Kota Tangerang Selatan sudah sangat baik dengan nilai IPKM menunjukkan angka 0,8069. Dengan mengetahui nilai IPKM tiap-tiap kabupaten/kota, maka pemerintah daerah Provinsi Banten mengetahui bagaimana kondisi pembangunan kesehatan di wilayah otonom yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga pemerintah Provinsi dapat menentukan prioritas pembangunan kesehatan dilihat dari wilayah dan indikator yang dinilai rendah (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Tahun 2014).

### **Rumusan Masalah**

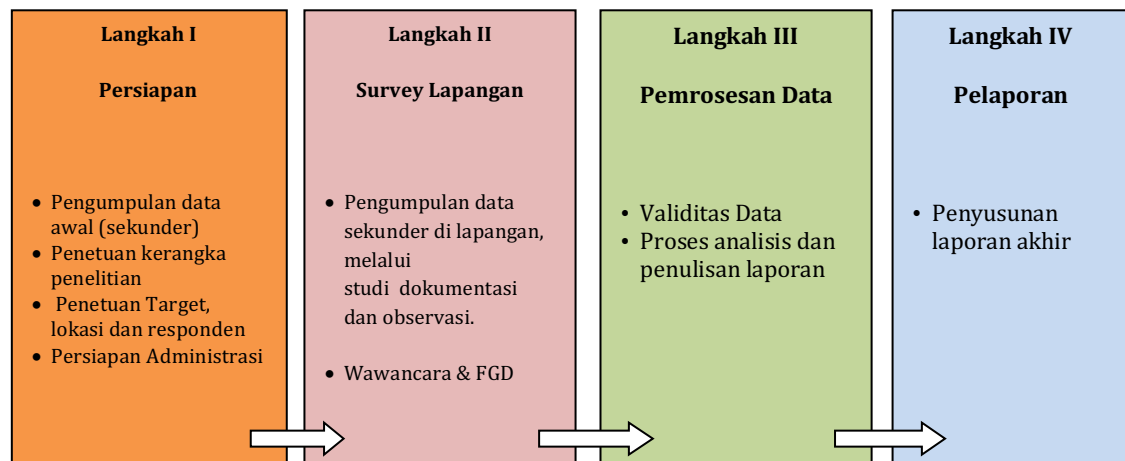
Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar capaian IPKM beserta indikator kompositnya di Provinsi Banten ?
2. Bagaimanakah pemetaan beberapa Daerah Bermasalah Kesehatan Berat/Khusus di Provinsi Banten ?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian yang difokuskan untuk memberikan penilaian sekaligus memberikan evaluasi terkait dengan seberapa besar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kesehatan di Provinsi Banten. Sehingga dalam penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Sementara, metode pendekatan penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono 2009:8).

Terdapat beberapa langkah dalam melakukan penelitian ini: Langkah pertama dalam penelitian ini adalah menjaring data awal melalui pengumpulan dokumen serta beberapa informasi terkait dengan kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kesehatan di Provinsi Banten, baik yang terdapat di beberapa instansi pemerintah seperti Bappeda Provinsi Banten, BPS Provinsi Banten, beberapa instansi pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi, serta beberapa data dan informasi yang ada di media informasi yang relevan. Pada langkah kedua, hasil penelusuran data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan tersebut, kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan analisis pendekatan kuantitatif. Secara singkat langkah – langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar Tahapan Kajian IPKM

Dalam penelitian ini, metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mempelajari dokumen-dokumen yang di dalamnya berisi tentang data dan informasi terkait dengan perkembangan nilai IPM Kesehatan di Provinsi Banten. Beberapa Data Sekunder.a.l.:Publikasi resmi IPM Kesehatan (BPS, BPS Provinsi, dan BPS Kab./Kota Di Provinsi Banten, KEMENKES RI), serta data terkait dari institusi yang berwenang: RISKESDAS, SUSENAS, dan PODES
2. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung dengan obyek penelitian. Peneliti datang langsung ke lokasi penelitian dan mengobservasi obyek penelitian khususnya beberapa obyek penelitian yang datanya dinilai tidak valid.
3. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data pendukung yang digunakan untuk melengkapi informasi secara lebih mendalam melalui pertanyaan

langsung dengan nara sumber. Wawancara ini dilakukan kepada orang-orang yang termasuk kategori informan yang mengerti benar memiliki keterkaitan yang sangat relevan dengan fokus penelitian ini guna melengkapi data penelitian ini (apabila dibutuhkan).

## PEMBAHASAN

### **Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat**

Pembentukan IPKM menggunakan tiga data survei nasional yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), dan Survei Potensi Desa (PODES). Ketiga survei tersebut dilaksanakan pada tahun 2007-2008. Susenas dan Riskesdas merupakan survei berbasis pada masyarakat, sedangkan Podes berbasis pada desa. Susenas dan Podes dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, sedangkan Riskesdas dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan. Data-data tersebut dapat digunakan oleh para perencana pembangunan untuk melihat keadaan, memonitor, dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan. Berdasarkan tujuan, IPKM dapat dimanfaatkan untuk melihat karakteristik kesehatan Kabupaten/ Kota. Dengan menggunakan data dari tiga survei (Riskesdas, Susenas dan Podes), maka dilakukan analisis agregat pada tingkat Kabupaten/ Kota.

Dalam perhitungan nilai IPKM di Provinsi Banten khususnya dalam kajian ini didasarkan pada penentuan lokasi penelitian yang dilakukan dengan tehnik purposive, dengan maksud agar terdapat keterwakilan wilayah Utara, Selatan,

Barat, dan Timur, sehingga ditetapkan lokasi penelitian sebagai berikut : Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang .

### **IPKM Kabupaten Pandeglang**

Hasil pengolahan data-data sekunder untuk mengetahui nilai indeks IPKM di Kabupaten Pandeglang terlihat dari perhitungan berikut ini :

#### Hasil Perhitungan IPKM Kabupaten Pandeglang

$  \begin{array}{rcl}  \text{Nilai Indeks} & = & 6.994,5771 \quad - \quad 840 \\  & & \hline  & & 8965 \quad - \quad 840 \\  & = & 0,7575  \end{array}  $
---

Sumber : Data Diolah, 2016.

Berdasarkan perhitungan di atas bahwa nilai indeks pembangunan manusia bidang kesehatan sebesar 0,7575 dengan standar 0 – 1, dimana ini menunjukkan arti adanya peningkatan ke arah yang lebih baik. Kalau menggunakan standar seperti indeks pembangunan manusia maka nilai 0,7575 ini setara dengan nilai 75,75. Apabila dibandingkan dengan nilai IPM Kabupaten Pandeglang pada tahun 2015 dengan nilai 62,72, IPKM Kabupaten Pandeglang mengalami kenaikan. Kabupaten Pandeglang tidak bisa lepas dari kultur sosial budaya sosial sebagai daerah agrikultur sehingga tidak bisa melepaskan sepenuhnya dari belenggu kurangberdayaan. Pendidikan sebagai ungkit untuk keluar harus terus digalakkan di daerah Pandeglang. Kaitannya dengan IPM Perlu dipahami bahwasannya IPM merupakan indeks komposit aspek kesehatan, aspek pendidikan dan aspek daya beli (kesejahteraan masyarakat/ekonomi) sehingga nampaknya

kontribusi aspek kesehatan mempunyai peran yang signifikan karena di atas nilai IPM Kabupaten Pandeglang.

Indikator yang berkontribusi besar sehingga angka IPKM di Kabupaten Pandeglang dapat mencapai 0,7575 adalah indikator yang berkaitan dengan status gizi balita dan angka prevalensi penyakit turunan dan penyakit yang bukan disebabkan oleh kesehatan lingkungan dan perilaku. Indikator tersebut antara lain : prevalensi balita gizi buruk, prevalensi balita pendek dan sangat pendek, prevalensi balita kurus, prevalensi balita gemuk, prevalensi pneumonia, prevalensi disabilitas dan prevalensi ISPA.

Sementara itu indikator yang menyebabkan rendahnya nilai IPKM di Kabupaten Pandeglang adalah akses terhadap air bersih, akses sanitasi, cakupan kebiasaan cuci tangan, masih rendahnya angka penimbangan bayi, persalinan oleh tenaga kesehatan, prevalensi penyakit diare, dan prevalensi kebiasaan merokok, juga rasio dokter perpuskesmas, Jadi faktor yang menghambat dalam meningkatkan IPKM adalah faktor yang berkaitan dengan perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan, juga karena kecilnya rasio jumlah dokter per puskesmas.

### **IPKM Kabupaten Serang**

Hasil pengolahan data-data sekunder untuk mengetahui nilai indeks IPKM di Kabupaten Serang terlihat dari tabel berikut ini :

$\text{Nilai Indeks} = \frac{7103,307}{8965} \quad \text{--} \quad \frac{840}{840}$ $= 0,7709$
--

Sumber : Data Diolah, 2016.

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai indeks pembangunan manusia bidang kesehatan sebesar 0,7709 dengan standar 0 – 1, dimana ini menunjukkan arti adanya peningkatan ke arah yang lebih baik. Kalau menggunakan standar seperti indeks pembangunan manusia maka nilai 0,7709 ini setara dengan nilai 77,09. Apabila dibandingkan dengan nilai IPM Kabupaten Serang pada tahun 2015 dengan nilai 64,61. Kabupaten Serang bukan hanya sebagai sebuah daerah rural namun juga daerah urban karena sentuhan industri di Banten Utara, tidak bisa dipungkiri bahwa Kabupten Serang bisa disebut sebagai daerah tengah, karena sebagai titik tengah orbitasi di Provinsi Banten yang akan ikut mempengaruhi perilaku sosial dan budaya masyarakatnya. Perlu dipahami bahwasannya IPM merupakan indeks komposit aspek kesehatan, aspek pendidikan dan aspek daya beli (kesejahteraan masyarakat/ekonomi) sehingga nampaknya kontribusi aspek kesehatan mempunyai peran yang signifikan karena di atas nilai IPM Kabupaten Serang.

Indikator yang memberikan kontribusi besar terhadap capaian IPKM Kabupaten Serang adalah prevalensi Balita gizi buruk , prevalensi balita pendek, prevalensi balita kurang dan prevalensi bayi gemuk, prevalensi penderita pneumonia, prevalensi disabilitas, prevalensi cedera, prevalensi sakit sendi dan prevalensi ISPA. Sementara itu indikator yang menghambat capaian IPKM agar mendapatkan nilai baik adalah indikator yang berkaitan dengan akses air, akses sanitasi, penyakit yang disebabkan buruknya kondisi kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat seperti diare dan hipertensi. Sedang perilaku yang tidak



menunjang adalah perilaku merokok, kesehatan gigi mulut dan perilaku cuci tangan.

### **IPKM Kota Cilegon**

Hasil pengolahan data-data sekunder untuk mengetahui nilai indeks IPKM di Kota Cilegon terlihat dari tabel berikut ini :

	7739,0628	--	840
Nilai Indeks =	<hr/>		
	8965	--	840
	=		0,8491

Sumber : Data Diolah, 2016.

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai indeks pembangunan manusia bidang kesehatan sebesar 0,8491 dengan standar 0 – 1, dimana ini menunjukkan arti adanya peningkatan ke arah yang lebih baik. Kalau menggunakan standar seperti indeks pembangunan manusia maka nilai 0,8491 ini setara dengan nilai 84,91. Apabila dibandingkan dengan nilai IPM Kota Cilegon pada tahun 2015 dengan nilai 71,81. Perlu dipahami bahwasannya IPM merupakan indeks komposit aspek kesehatan, aspek pendidikan dan aspek daya beli (kesejahteraan masyarakat/ekonomi) sehingga nampaknya kontribusi aspek kesehatan mempunyai peran yang signifikan karena di atas nilai IPM Kota Cilegon.

Selanjutnya bahwa indikator yang memiliki kontribusi sangat besar dalam pencapaian nilai IPKM di Kota Cilegon sebesar 8,491 adalah indikator yang

berkaitan dengan kesehatan dan status gizi balita, sebagai berikut : Prevalensi balita gizi buruk, prevalensi balita pendek, prevalensi balita kurus, prevalensi balita gemuk. Selain itu indikator yang berkaitan dengan penyakit juga dinilai rendah dan memberikan kontribusi besar dalam pencapaian nilai IPKM di Kota Cilegon, seperti prevalensi gangguan menatal, pneumonia, disabilitas, cedera, penyakit sendi dan ISPA. Sementara itu indikator yang berkaitan dengan perilaku seperti prevalensi cuci tangan, prevalensi merokok, akses sanitasi dan kesehatan gigi dan mulut adalah indikator yang perlu mendapat perhatian dan perlu ditingkatkan.

### **IPKM Kota Tangerang**

Hasil pengolahan data-data sekunder untuk mengetahui nilai indeks IPKM di Kota Tangerang terlihat dari tabel berikut ini :

	7845,3168	-- 840
Nilai Indeks =	<hr/>	<hr/>
	8965	-- 840
	=	0,8622

Sumber : Data Diolah, 2016.

Berdasarkan perhitungan di atas bahwa nilai indeks pembangunan manusia bidang kesehatan sebesar 0,8622 dengan standar 0 – 1, dimana ini menunjukkan arti adanya peningkatan ke arah yang lebih baik. Kalau menggunakan standar seperti indeks pembangunan manusia maka nilai 0,8622 ini setara dengan nilai 86,22. Apabila dibandingkan dengan nilai IPM Kota Tangerang pada tahun 2015 dengan nilai 76,08. Perlu dipahami bahwasannya IPM merupakan indeks komposit aspek kesehatan, aspek pendidikan dan aspek daya beli (kesejahteraan

masyarakat/ekonomi) sehingga nampaknya kontribusi aspek kesehatan mempunyai peran yang signifikan karena di atas nilai IPM Kota Tangerang.

Nilai IPKM Kota Tangerang sebesar 0,8622 menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan di Kota tersebut sudah sangat baik. Beberapa Indikator memberikan kontribusi yang sangat terhadap pencapaian nilai indeks tersebut, indikator tersebut antara lain : prevalensi balita gizi buruk dan kurang, prevalensi balita pendek, prevalensi balita kurus, prevalensi balita gemuk, rasio dokter dan bidan, prevalensi gangguan mental, asma, disabilitas, hipertensi, cedera, penyakit sendi dan ISPA. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain akses air bersih di Kota Tangerang juga sudah sangat baik mencapai angka 98,2.

Sementara itu beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian adalah cakupan penimbangan balita, prevalensi penyakit diare, prevalensi perilaku cuci tangan, perilaku merokok dan kesehatan gigi dan mulut.

Untuk lebih jelasnya penelitian ini menjelaskan secara bersama-sama dalam tabel berikut ini :

Tabel Capaian IPKM 2007 – Existing 2016

Kab/Kota	IPKM 2007	IPKM 2013	Existing 2016	Ket.
Kabupaten Serang	0,438	0,663	0,7709	Naik
Kabupaten Pandeglang	0,3611	0,6384	0,7575	Naik
Kota Cilegon	0,535	0,7501	0,8491	Naik
Kota Tangerang	0,6222	0,7561	0,8622	Naik

Sumber : Data diolah, 2016

Dari tabel di atas nampak bahwasannya dari keempat kabupaten/kota yang menjadi locus penelitian menunjukkan bahwasannya IPKMnya menunjukkan peningkatan yang merata di semua lokasi. IPKM merupakan pembentuk atau kontributor utama dalam penilaian angka harapan hidup. Sehingga nampak dengan jelaskan bahwa apabila dibandingkan dengan tabel di bawah ini menunjukkan bahwa nilai IPKM berbanding lurus dengan nilai Angka Harapan Hidup. Walaupun tidak bisa dibantah seperti yang disampaikan oleh Bloom, bahwa kualitas kesehatan itu dipengaruhi oleh 4 hal yakni, faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor layanan kesehatan dan hereditas/keturunan. Keempat faktor ini adalah indikator kualitas kesehatan di sebuah daerah pada waktu tertentu, sehingga keempat hal inilah yang hendaknya diberikan operasionalisasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Dari keempat faktor kualitas kesehatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pelayanan kesehatan pada memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian nilai IPKM pada Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang. Hal ini dilihat dari angka prevalensi balita gizi buruk, balita pendek, balita kurus dan balita gemuk, yang nilai prevalensinya rata-rata kurang dari 1%. Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota melalui Puskesmas, Pustu, Polindes dan Posyandu untuk memberikan pelayanan kesehatan melalui penimbangan balita secara rutin, pemeriksaan kehamilan, program imunisasi, pemberian makanan tambahan sudah cukup berhasil menekan angka prevalensi yang berkaitan dengan status gizi balita. Tetapi terdapat satu pelayanan kesehatan yang masih perlu mendapatkan perhatian

dan perlu ditingkatkan, yaitu pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Rendahnya nilai pada indikator kesehatan gigi dan mulut, selain dikarenakan kurang pelayanan kesehatan gigi dan mulut juga karena perilaku hidup sehat dengan membiasakan gosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur yang masih kurang diterapkan pada masyarakat.

Sementara itu faktor lingkungan dan faktor perilaku merupakan faktor yang menghambat untuk menciptakan kualitas kesehatan masyarakat, seperti akses air bersih, akses sanitasi, perilaku cuci tangan ,perilaku merokok dan perilaku untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut.

### **Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Dalam Pencapaian Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Banten**

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang mendorong bagi pencapaian nilai IPKM sehingga mendorong peningkatan indeks pembangunan kesehatan di bidang kesehatan adalah faktor pelayanan kesehatan, faktor pelayanan kesehatan yang meliputi sarana dan prasarana kesehatan dan ketersediaan SDM kesehatan sangat berpengaruh terhadap angka prevalensi status gizi dan kesehatan balita dan prevalensi penyakit yang diderita masyarakat. Dengan pelayanan kesehatan yang memadai dan teratur dapat menekan angka prevalensi status gizi dan kesehatan balita dan prevalensi penyakit yang diderita masyarakat.

Faktor- faktor yang diduga sebagai penghambat dalam pencapaian nilai IPKM dan mengurangi derajat kesehatan masyarakat, lebih disebabkan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan dan perilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses air bersih dan akses sanitasi masyarakat

masih di beberapa kabupaten/kota masih tinggi derajat prevalensinya, faktor lingkungan yang masih kurang karena masih tingginya angka prevalensi penderita diare, seperti diketahui bahwa penyakit diare lebih disebabkan karena kondisi lingkungan dan perilaku yang tidak sehat. Perilaku masyarakat juga menjadi penghambat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, seperti dalam perilaku cuci tangan sebelum makan, perilaku merokok, perilaku menjaga kesehatan gigi dan mulut .

Faktor penguangkit dalam pencapaian nilai IPKM di Provinsi Banten antara lain sebagai berikut :

1. BPJS Aktif 1 Januari 2014
2. Anggaran Kesehatan di Provinsi Banten
3. Beberapa program seperti PHBS, PMT, Posyandu, dll
4. Bertambahnya sarana dan prasarana kesehatan

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa capaian IPKM Kabupaten Serang mendapatkan nilai 0,7709, kemudian capaian IPKM Kabupaten Pandeglang mendapatkan nilai 0,7575, capaian IPKM Kota Cilegon mendapatkan nilai 0,8491, dan capaian IPKM Kota Tangerang mendapatkan nilai 0,8622. Keempat kabupaten/kota yang menjadi lokus penelitian ini kesemuanya menunjukkan adanya peningkatan dari IPKM pada tahun sebelumnya.

**Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menanamkan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan mengoptimalkan program tersebut dengan memberikan sosialisasi hidup bersih dan sehat selain di lingkungan rumah tinggal juga di sekolah-sekolah dan lingkungan kerja.
2. Mendata daerah-daerah yang akses air bersihnya minim, dan menyediakan sarana air bersih melalui program pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, perlu dilakukan sosialisasi kesehatan gigi dan mulut dan pemeriksaan gigi dan mulut secara rutin, di lingkungan rumah dan sekolah dan menyediakan dokter gigi dan peralatan penunjangnya di semua puskesmas.
4. Perlunya redistribusi sebaran tenaga kesehatan agar meminimalisasi kesenjangan rasio tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan dapat membuat kebijakan yang mengikat tenaga kesehatan melalui pendidikan ikatan dinas.
5. Mengoptimalkan gerakan anti merokok, terutama pada anak remaja untuk mengurangi perilaku merokok.
6. Pengawasan Kartu Indonesia Sehat, untuk menjamin masyarakat menggunakan pelayanan kesehatan dengan benar dan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar kesehatan dan pelayanan minimal kesehatan.

7. Dukungan moril dan politik untuk pendirian Fakultas Kedokteran guna peningkatan akses tenaga kesehatan yang berujung pada peningkatan IPM Banten khususnya IPM Bidang Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- BPS, 2014. *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*, Jakarta: Badan Pusat Statistik
- BPS, 2014. *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*, Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Fukuda-Parr, Sakiko. 2003. *The Human Development Paradigm: Operationalizing Sen's Idea on Capabilities*. *Feminist Economics*, p.301317. <http://www.tandf.co.uk/journals>
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1798/Menkes/Sk/XII/2010 Tentang Pedoman Pemberlakuan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
- Korten, David C. Rudi Klaus. 1984. *People-Centered Development: Contribution peluncuran-global-implikasi-lokal/Toward Theory and Planning Frameworks*. USA: Kumarian Press
- Slamet, Juli Soemirat. 2002. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: GadjahMada University Press.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung. Alfabeta

### Sumber Lain :

<http://hdr.undp.org/en>

<http://hdr.undp.org/en>

<http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf>



<http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf>

<http://unic-jakarta.org/2014/07/25/laporan-pembangunan-manusia-2014->

<http://unic-jakarta.org/2014/07/25/laporan-pembangunan-manusia-2014->

<http://www.bps.go.id/>

<http://www.bps.go.id/>

<http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home.html>

<http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home.html>

<http://bantenprov.go.id/read/program-kerja.html>

<http://bappeda.bantenprov.go.id/upload/PUBLIKASI%20BPS%202015/Statistik%20Daerah%20Provinsi%20Banten%202015.pdf>

<http://bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211>

## **Analisa Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) terhadap Korban KDRT di Provinsi Banten**

Ima Maisaroh dan Titi Stiawati

Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang  
ima.maisaroh@untirta.ac.id, titi.stiawati@untirta.ac.id

### **ABSTRAK**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semakin banyak terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Sebab dan akibatnya beragam, dengan jumlah korban yang terus meningkat. Korban KDRT bagaikan fenomena Gunung Es. KDRT adalah tindak kriminal yang diancam hukuman pidana. Masih banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa KDRT adalah masalah privat dan bukan masalah kriminal serta masih lemahnya pengetahuan tentang hukum, menyebabkan tindak KDRT tidak diselesaikan melalui proses hukum. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana peran, mekanisme kerja dan layanan P2TP2A dalam penanganan korban KDRT, 2) Bagaimana upaya pemantapan peran P2TP2A dalam penanganan korban KDRT. Dari penelitian dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif ini, disimpulkan bahwa P2TP2A Provinsi Banten telah sesuai dengan tupoksinya, yaitu: 1) Dalam mencegah timbulnya KDRT dan menumbuhkan pengetahuan masyarakat bahwa KDRT adalah tindak kriminal yang diancam hukuman pidana, dilakukan sosialisasi UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT; 2) Dalam pelayanan terhadap korban KDRT, dilakukan pendampingan penyelesaian tindakan hukum kepada lembaga hukum terkait; 3) Agar para korban mendapatkan tindakan medis dan layanan konsultasi psikologi dan sosial, dilakukan pendampingan di rumah sakit.

Kata kunci : P2TP2A, KDRT, Tindakan Hukum

### **PENDAHULUAN**

Dewasa ini, masalah kekerasan terhadap perempuan semakin menguatkan upaya yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan *gender*, Kekerasan terhadap perempuan seringkali disebut sebagai kekerasan berbasis gender karena hal ini

berawal dari subordinasi perempuan di masyarakat dan superioritas laki-laki. Situasi dan kondisi perempuan dengan laki-laki yang bertolak belakang tersebut membentuk sikap dan perilaku dimana laki-laki harus didahulukan, di prioritaskan dan di istimewa. Terbentuklah budaya patriarkhi dan laki-laki tak pernah merasa bersalah, budaya patriarkhi yang kuat dimana laki-laki yang mendominasi struktur keluarga yang mana perempuan secara historis dilihat sebagai seorang yang tidak mampu menangani urusannya sendiri tanpa kepemimpinan.

Deklarasi penghapusan kekerasan pada perempuan PBB tahun 1993, menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut. Pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan privat atau pribadi. Bentuk kekerasan berupa kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi di dalam keluarga ataupun komunitas, termasuk pemukulan penganiayaan seksual anak perempuan dalam keluarga, pemerkosaan perkawinan, kekerasan yang dilakukan bukan oleh pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.

Korban kekerasan dalam rumah tangga ini bukan hanya dialami oleh keluarga menengah kebawah atau karena alasan himpitan ekonomi, tapi juga banyak datang dari keluarga menengah keatas, bahkan selebritis. banyak permasalahan yang dihadapi perempuan yang tidak berani dikemukakan pada publik. Betapapun permasalahan itu sudah menjurus pada aksi kekerasan dan

terancam hukuman pidana bagi pelaku kekerasan dan masih kuatnya norma agama dan faham ketimuran yang dianut, membuat kaum perempuan harus berpikir beribu kali untuk memutuskan perkaranya ke pengadilan.

Kekeraan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak untuk mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan. Artinya negara harus mampu menjamin perlindungan hukum setiap warga negaranya. Bentuk konkrit dari upaya negara dalam melindungi HAM adalah dengan membuat perangkat hukum, penegakan hukum yang pasti untuk melindungi perempuan dan anak, sehingga siapapun pelaku kekerasan harus mendapat sanksi yang tegas. Keadaan ini diharapkan mampu mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang bergerak semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari laporan dan data-data lembaga yang terkait dengan perempuan dan anak baik pemberdayaan maupun upaya perlindungan terhadap kekerasan dan rumah tangga.

Korban kekerasan di Provinsi Banten yang melaporkan kasus kekerasan yang dialami ibu rumah tangga masih relatif sedikit, sebagian kasus justru tidak dilaporkan atau yang menyatakannya secara sukarela. Namun di sadari bahwa jumlah korban bagaikan fenomena gunung es, dimana yang muncul kepermukaan jumlahnya sedikit dibandingkan dengan yang ada didalamnya.

Demikian halnya dengan anak, banyak terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap anak . anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang maha kuasa, wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan

kodratnya. Karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak dasarnya harus dihentikan.

Kasus yang terjadi pada anak diantaranya adalah kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi termasuk eksploitasi seksual serta Trafficking. Trafficking terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia, korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, di jual, dipindahkan dan dijual kembali serta di rampas hak asasinya bahkan beresiko kematian. Gejala ini berkembang dan berubah dalam bentuk kompleksitasnya, namun tetap merupakan perbudakan dan perhambaan. Selama ini Trafficking hanya dianggap terbatas pada bentuk prostitusi, padahal dalam kenyataannya mencakup banyak bentuk dari kerja paksa.

Di beberapa daerah di Indonesia termasuk provinsi Banten korban trafficking seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual misalnya dalam bentuk pelacuran dan pedophilia, serta bekerja pada tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti perkebunan, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak, pengemis jalanan, selain peran sebagai pelacur. Korban trafficking biasanya anak dan perempuan berusia muda dan belum menikah, anak korban perceraian serta mereka yang pernah bekerja di pusat kota atau luar negeri. Umumnya sebagian penghasilannya diberikan kepada keluarga. Anak korban trafficking seringkali berasal dari masyarakat yang diharapkan dapat menambah penghasilan keluarga.

Penanganan KDRT yang dilaporkan ke pihak berwajib dalam hal ini RPK-PPT Polri khususnya Polda Banten sampai dengan tahun 2008 sebanyak 19 kasus,

tahun 2009 sebanyak 34 kasus dan tahun 2010 berjumlah 74 kasus. Keadaan tersebut diperburuk oleh realitas yang menunjukkan bahwa hampir bisa dipastikan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak melapor lebih besar lagi karena KDRT oleh banyak orang masih dianggap privat bukan masalah kriminal.

Data kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan korban trafficking di Provinsi Banten selama kurun waktu tahun 2008 sd 2010, dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

**Tabel Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani**

No	Jenis Kasus	2008	2009	2010
1	KDRT	11	18	30
2	Kekerasan Thd Anak	1	6	22
3	Trafficking	7	2	6
4	Perlindungan Perempuan	0	3	4
5	Kekerasan Seksual	0	2	17
<b>Jumlah</b>		19	34	79

Sumber : P2TP2A Provinsi Banten, 2010

Untuk itu diperlukan penanganan secara holistic artinya penanganan secara bersama-sama, dimana semua lembaga terkait harus bersinergi satu langkah satu itikad untuk melindungi korban KDRT dan tetap memperhatikan aspek *sosiologi*, *psikologi* serta hak asasi korban.

Mengingat banyaknya kasus-kasus di seputar perlindungan perempuan dan anak, khususnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka pemerintah Provinsi Banten mempunyai komitmen yang kuat untuk melindungi rakyatnya dari praktek yang tidak bertanggungjawab serta berupaya untuk mencegahnya dengan berbagai program dan kebijakan, mengingat akibat yang ditimbulkan akan merusak masa depan generasi bangsa yang seharusnya menjadi potensi untuk pembangunan daerah.

Oleh karena itu, dibentuklah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten yang berdasarkan Keputusan Gubernur nomor : 463/Kep.144-Huk/2010 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten.

Sejak terjadinya krisis pada tahun 1997 hingga kini, kualitas hidup perempuan masih belum menunjukkan peningkatan yang berarti, terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang. Dampak kesenjangan gender menyebabkan kondisi perempuan semakin rentan. Oleh karena itu, dalam rangka upaya peningkatan peran dan kualitas perempuan serta perlindungan anak dari tindakan-tindakan yang merugikan dan mengancam keberlangsungan hidup perempuan dan anak, dibentuklah suatu bentuk partisipasi masyarakat dan kerjasama antar masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau lebih dikenal P2TP2A Provinsi Banten.

P2TP2A merupakan salah satu wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Untuk itu diperlukan penelitian ini untuk menganalisa bagaimana peran P2TP2A di Provinsi Banten dalam penanganan perempuan dan anak korban KDRT selama ini.

Selain melayani korban kekerasan dalam rumah tangga, P2TP2A pun melayani permasalahan trafficking (perdagangan perempuan) yang banyak dialami kaum perempuan untuk bekerja di luar negeri. Dengan mendatangi kantor P2TP2A, korban kekerasan memperoleh bantuan sesuai permasalahan yang ada. Menyadari perlunya menumbuhkan rasa aman dan kepedulian kepedulian yang tinggi akan nasib korban kekerasan, P2TP2A juga menyediakan rumah aman yang dijaga kerahasiaan tempatnya.

Maka berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut diatas penulis didalam pembuatan tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan yang sebenarnya tentang “analisa peran pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di provinsi Banten.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Tinjauan Umum terhadap P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)**

#### **1. Pengertian P2TP2A**



P2TP2A merupakan salah satu wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) merupakan wadah penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi pencegahan, penyediaan, dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, reintegrasi social dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi.

## 2. Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan P2TP2A

Tugas pokok Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak merupakan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, P2TP2A memiliki bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan dan pokok permasalahan yang menjadi focus untuk ditangani di setiap daerahnya. Sedangkan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang meliputi informasi, rujukan, konseling/konsultasi, pelatihan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya. Di samping itu, P2TP2A juga dapat menjadi tempat pelatihan-pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang sangat besar terhadap masalah perempuan dan anak di segala bidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang) untuk kemudian dapat bekerja bervarna dan ikut memberikan

pelayanan kepada masyarakat dalam suatu wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

Tujuan P2TP2A secara umum adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kevetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi Pengarustamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, paran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak. Sedangkan secara khusus P2TP2A mempunyai tujuan yaitu :

1. Menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. Mendorong penyediaan sarana, prasarana dan anak seperti pusat data dan informasi ; konseling; psikologi; pusat rujukan; pelatihan keterampilan dan sebagainya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak yang di kelola oleh masyarakat secara mandiri.
3. Membangun mekanisme dialog anatar masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sehingga terbangun kerjasama/kemitraan yang dapat mendukung keberadaan P2TP2A.

Tujuan di bentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Umum

Memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan dan anak.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan pelayanan terhadap pemecahan masalah yang dihadapi perempuan dan anak, seperti KDRT, trafficking, eksploitasi, penelantaran, pendampingan hukum, psikologis, sosial bagi klien.
- b. Menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkan.
- c. Mendorong penyediaan sarana, prasarana dan berbagai jenis layanan diberbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak (pusat data, konseling, pelatihan, rujukan, dll)
- d. **Membangun mekanisme** dialog antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sehingga terbangun kerjasama/kemitraan yang dapat mendukung P2TP2A.

Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah sebagai berikut :

1. Membantu Gubernur Meng-koordinasikan kegiatan Operasional P2TP2A Provinsi Banten dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak dengan menjunjung tinggi aspek-aspek Hak Asasi Manusia (HAM), Perlindungan, Pemberdayaan dan Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
3. Mendorong dan mengembangkan peran serta masyarakat terutama yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan, sebagai upaya peningkatan peran perempuan dalam segala aspek Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut P2TP2A Provinsi Banten dapat bekerjasama dengan Instansi pemerintah, Organisasi Masyarakat, para ahli, Badan Internasional dan/atau pihak-pihak yang dipandang perlu.

Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah sebagai berikut :

**Fungsi Pengkoordinasian meliputi kegiatan**

- a. Pengkoordinasian antara unsur pemerintah dan unsur masyarakat
- b. Pengkoordinasian antara P2TP2A Provinsi Banten dengan P2TP2A Kabupaten dan Kota.
- c. Pengkoordinasian antara P2TP2A Provinsi Banten dengan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Organisasi sosial, Lembaga swadaya masyarakat serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

**Fungsi Pengkajian dan Penelitian meliputi Kegiatan :**

- a. Pengkajian berbagai instrumen peraturan perundang-undangan yang menyangkut Perlindungan Perempuan dan Anak dan Hak Asasi Manusia.

- b. Penelitian segala pariwisata dan permasalahan yang menyangkut dan menimpa perempuan dan anak di Provinsi Banten
- c. Studi kepustakaan, studi lapangan serta studi banding mengenai program peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak.
- d. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian.

### **Fungsi Advokasi**

- a. Pendampingan terhadap korban yang menghadapi persoalan hukum
- b. Pendampingan terhadap korban yang menghadapi tekanan, perlakuan tindak kekerasan maupun pelanggaran hak asasi manusia
- c. Pendampingan proses dan pelaksanaan janinan sosial korban
- d. Memfasilitasi rujukan bagi korban yang memerlukan pelayanan, perawatan dan perlindungan khusus.

### **Fungsi Pencegahan**

- a. Sosialisasi melalui jalur pendidikan formal & non formal
- b. Sosialisasi melalui jalur pengaduan Organisasi sosial kemasyarakatan, LSM, dan Kelompok Masyarakat lainnya.
- c. Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik
- d. Pengkaderan pembentukan kelompok simpatik di sekolah (SD, SLTP, SLTA maupun Perguruan Tinggi dan sederajat)

### **Fungsi Penindakan**

- a. Tindak cepat pertolongan dan penanganan kasus

- b. Mempercepat prosedur perawatan dan perlindungan korban
- c. Memberikan situasi kenyamanan korban selama masa perlindungan/ tindak awal
- d. Menyediakan sarana Fisik crisis-center P2TP2A Provinsi Banten

### **Fungsi Pemulihan dan Rehabilitasi Sosial**

- a. Membentuk institusi yang berfungsi memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rangka pemulihan/ rehabilitasi sosial korban
- b. Menyusun pedoman pelaksanaan pemulihan dan rehabilitasi sosial korban kekerasan perempuan dan anak
- c. Melakukan sosialisasi terhadap eks korban yang terencana dan terpadu

### **Fungsi Rujukan**

- a. Melakukan tindak lanjut penanganan kasus dengan memberikan akses (rujukan) kepada institusi lain yang menangani kasus korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan tahapan pelayanan
- b. Melakukan kerjasama dengan berbagai Institusi pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Obyek Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi Banten.

## **Desain Penelitian**

Desain penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif analitis, yang berusaha mendeskripsikan dan memberikan penjelasan tentang Peran Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi Banten.

Pendekatan interpretif juga di gunakan dalam penelitian ini, yang bermaksud untuk lebih memahami peran sendiri, agar dalam mengungkapkan peristiwa lebih menjadi obyek, maka penelitian dilakukan secara holistik. Maksudnya penelitian berupaya menjalin hubungan dengan obyek studi bersifat total, sejak awal berusaha masuk kedalam realitas kegiatan obyek studi. Pendekatan holistik Muhadjir (1998;125), mendudukan obyek kedalam konstruksi ganda, melihat obyeknya dalam konteks natural. Pendekatan yang bersifat fenomenologik menuntut bersatunya subyek peneliti dengan subyek pendukung obyek yang ditulis. Keterlibatan subyek peneliti di lapangan, menjadi ciri penelitian kualitatif.

Fokus penelitian ini adalah pengungkapan proses dan penjelasan tentang makna dari fenomena, sifat serta hubungan fenomena yang digambarkan sebagaimana adanya secara utuh dan multidimensional sehingga dapat diungkapkan berbagai makna yang terkandung dan dapat merumuskan hingga pada temuan penelitian. Pendekatan kualitatif dijadikan sebagai metode untuk menganalisis data hasil penelitian ini karena penelitian kualitatif difokuskan pada pengungkapan secara mendalam berkaitan proses dan interpretasi makna. Spriduso dan Silferman dalam Creswell (1994-147) Pendekatan kualitatif

dicirikan oleh kegiatan mengumpulkan, menggambarkan dan menafsirkan tentang situasi yang dialami hubungan tertentu, kegiatan, pandangan, sikap yang ditunjukkan atau tentang kecenderungan yang tampak dalam proses yang sedang berlangsung, pertentangan yang meruncing serta kerjasama yang dijalankan.

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pendekatan ini relevan dan cocok dengan masalah penelitian melalui interpretasi proses dan makna dari suatu fenomena yang selanjutnya digunakan untuk membangun pemahaman dan memberikan eksplanasi terhadap fenomena yang diteliti.

### **Penentuan Informasi Sumber Data Penelitian**

Sumber data pada penelitian ini adalah komunitas anak jalanan perempuan dipilih dan ditetapkan tidak berdasarkan pada jumlah yang dibutuhkan, melainkan berdasarkan pertimbangan fungsi dan peran yang diemban informan sesuai fokus masalah penelitian sehingga jumlah informan penelitian ini akan diketahui saat penelitian berlangsung.

Kaitan penentuan informan penelitian, menurut Miles dan Huberman (1984:56). Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam pemilihan dan penetapan informan dalam penelitian dengan melihat dari aspek, antara lain: latar (setting), para pelaku (actors), peristiwa-peristiwa (event), dan proses (process). Kaitan wawancara terhadap informan maka penelitian melakukan wawancara dengan menghubungi informan secara intensif berkenaan dengan fokus masalah penelitian. Proses wawancara dilakukan secara terbuka.



### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dan pencatatan data dilakukan dengan cara observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi. selanjutnya dilakukan observasi partisipatif yaitu untuk mengumpulkan data dalam bentuk pengamatan. Pencatatan dilakukan secara sistematis terhadap fenomena yang ada. Oleh karena itu, selama di lapangan peneliti turut berperan serta atau turut terlibat berpartisipasi aktif (participant observation). Kemudian berbaur dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan anak jalanan perempuan yang menjadi informan dan mengamati berbagai peristiwa, mencatat dan menyimak lokasi penelitian.

Adapun informan pada penelitian ini adalah Sekretaris P2TP2A Provinsi Banten. Pejabat yang berwenang dalam menangani permasalahan KDRT di Provinsi Banten, dan korban KDRT yang melapor ke P2TP2A Provinsi Banten.

### **Metode Analisis**

Pendekatan kualitatif lebih mengarah pada proses produk dari obyek penelitian, Muhadjir (1998:78), oleh karena itu peneliti berkedudukan sebagai instrument penelitian maksudnya adalah sebagai alat pengumpul data (Guba dan Lincoln, 1981). Maksudnya peneliti terlibat aktif dalam segala proses penelitian, bahwa peneliti sebagai instrument, dimaksudkan bahwa manusia (peneliti) responsif terhadap lingkungan dan bersifat interaktif terhadap orang lain dan lingkungannya, sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Peneliti berpartisipasi aktif selama penelitian berlangsung dalam rangka menjangkau data dan

informasi dilokasi penelitian. Analisis data diolah selama kegiatan penelitian dan dikerjakan dilapangan.

Selanjutnya dalam pengerjaan pengumpulan data pada penelitian kualitatif (Muhadjir,2003:101),harus langsung diikuti dengan pekerjaan penulisan,yang merupakan analisis selama pengumpulan data. Analisis pengumpulan data diklasifikasi berupa ketegorisasi,selanjutnya berupa penyajian data yang berbentuk laporan (Alwasilah,2003:56).Langkah awal pendekatan kualitatif,telah menyeleksi tentang apa yang ingin diketahui.Semua data bernilai sesuai dengan masalah yang diteliti,selanjutnya dibuat laporan penulisan (Garna,1997:75).

Analisis kualitatif diartikan sebagai usaha analisis berdasarkan kata-kata yang disusun ke dalam bentuk teks yang diperluas Miles dan Huberman, (1992:16) pengertian kualitatif disini bermakna bahwa data yang disajikan berwujud kata-kata dan bukan angka-angka. Dalam penelitian ini,data hasil wawancara dan pengamatan ditulis dalam suatu catatan lapangan yang terinci,data dari catatan lapangan inilah yang dianalisis secara kualitatif.

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data kedalam formula yang sederhana dan mudah dibaca serta mudah diinterpretasi,maksudnya analisis data di sini tidak saja memberikan kemudahan interpretasi,tetapi mampu memberikan kejelasan makna dari setiap fenomena yang diamati,sehingga implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan simpulan akhir penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan metode induktif.Penelitian ini tidak menguji hipotesis (akan tetapi hipotesis kerja hanya digunakan sebagai pedoman) tetapi lebih merupakan penyusunan abstraksi

berdasarkan data yang dikumpulkan. Analisa telah dimulai sejak pengumpulan data dan dilakukan lebih intensif lagi setelah kembali dari lapangan. seluruh data yang tersedia di telaah dan direduksi kemudian diabstraksi sehingga terbentuk suatu informasi. Satuan informasi inilah yang ditafsirkan dan diolah dalam bentuk hasil penelitian hingga pada tahap kesimpulan.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten. Pemilihan lokasi penelitian itu, secara administrasi merupakan pusat pelayanan pengaduan dan penanganan korban KDRT di Provinsi Banten.

## **PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Banten (P2TP2A) adalah Lembaga Penyedia Pelayanan Terhadap Korban, bersifat Non Struktural dan Independen, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Banten. Lembaga ini menjalankan kegiatan Penindakan, Advokasi, Sosialisasi, Pemulihan dan Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan serta Bimbingan Lanjut bagi korban tindak kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Banten. Lembaga ini juga mendorong dan mengembangkan peran serta masyarakat terutama yang tergabung dalam

Organisasi Kemasyarakatan, sebagai upaya peningkatan peran Perempuan dalam segala aspek Pembangunan.

### **Peran P2TP2A Provinsi Banten Dalam Penanganan KDRT**

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Banten dapat menjadi wahana yang dapat memfasilitasi berbagai pelayanan masyarakat baik fisik maupun nonfisik, antara lain meliputi informasi rujukan, konsultasi, pelatihan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Wahana P2TP2A bertujuan untuk memberdayakan kaum perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak diseluruh bidang kehidupan masyarakat, yang gilirannya akan meingkatkan peranan mereka dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai wahana pemberdayaan perempuan P2TP2A juga diharapkan merupakan pusat berbagai data dan informasi tentang situasi dan kondisi perempuan dan anak. Oleh karenanya dalam operasional P2TP2A seyogyanya mengembangkan system jejaring dan jaringan kerja hubungan dan kerjasama dijalin sebaik mungkin agar tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri, karena idealnya P2TP2A menjadi wadah yang menghimpun institusi yang telah ada, setidaknya sebagai pusat informasi.

P2TP2A harus membentuk jejaring kelembagaan dan organisasi non pemerintah dan masyarakat; memperkuat peran aktif masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan dalam setiap tahap dan proses pembangunan melalui peningkatan jaringan kemitraan dengan masyarakat.

Pemberdayaan perempuan yang di kembangkan oleh P2TP2A senantiasa dilaksanakan melalui kemitraan dari semua pihak terkait antar sector

pemerintah, organisasi perempuan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat termasuk swasta dan organisasi profesi baik dalam maupun luar negeri. Karena itu, kemitraan dan jaringan kerja yang efektif dan efisien perlu disiapkan dan dikembangkan.

P2TP2A juga harus melibatkan peran serta masyarakat, tujuan peran serta masyarakat adalah meningkatkan peran dan kemandirian, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga non pemerintah yang memiliki visi pemberdayaan perempuan; meningkatkan kuantitas dan kualitas sesuai dengan arah strategi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, maka kegiatan-kegiatan peran serta masyarakat dalam program-program pemberdayaan perempuan diarahkan kepada upaya untuk merespon dan melakukan penajaman terhadap isu-isu kritis yang dihadapi sekarang ini.

Tindak kekerasan terhadap perempuan yang telah terjadi dalam kurunwaktu yang cukup lama, telah membuat banyak kaum perempuan Indonesia menjadi pihak yang selalu dirugikan dan telah membuat mereka mengalami kekecewaan sepanjang hidupnya. Keadaan seperti ini apabila dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan penderitaan perempuan yang berkepanjangan, yang menjadikan kaum perempuan kurang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta ikut menikmati hasil pembangunan negaranya.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) diharapkan mampu menjadi tempat rujukan laporan bagi perempuan dan anak jika lembaga ini hadir di Provinsi Banten, anak-anak dan perempuan korban kekerasan bisa memanfaatkannya. Adapun penanganan yang dapat dilakukan oleh P2TP2A

terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah bertindak sebagai pemediasi, pendampingan, rujukan dan konseling terhadap korban.

Dengan keberadaan ini P2TP2A memiliki peranan yang penting untuk menampung laporan. Kekerasan yang dahulunya dianggap wajar atau sebagai masalah ranah domestik (rumah tangga) seolah tabu bagi orang lain ikut campur. Saat ini kekerasan terhadap perempuan atau juga anak-anak bukan lagi sebagai isu domestik. P2TP2A harus mampu menumbuhkan kekuatan local-untuk tangani kekerasan terhadap perempuan. Bagaimanakah membantu perempuan dan anak-anak korban kekerasan yang berada jauh dari lokasi pelayanan korban kekerasan?

Apakah mereka harus berjalan jauh, mengeluarkan tenaga, energy dan keberanian, mendatangi sebuah tempat yang tidak akrab dengan mereka, bertemu dengan orang-orang yang dalam anggapan para korban adalah orang-orang asing? Lebih jauh dari soal jarak dan perasaan diterima oleh petugas ditempat pelayanan, hal yang tidak kurang penting adalah kualitas pelayanan itu sendiri. Seorang korban kekerasan membutuhkan bukan hanya pengobatan secara fisik, tetapi juga penanganan masalah psikososial dan hukum dengan pendampingan untuk mengatasi trauma.

Dengan akata lain penanganan korban kekerasan memerlukan layanan terpadu multidisiplin. Potensi P2TP2A mengenai peran P2TP2A sebagai tempat layanan korban kekerasan dengan tuntutan membangun jaringan dengan lembaga-lembaga lain untuk penanganan yang terpadu, sangat memungkinkan bagi P2TP2A untuk menjadi rujukan, wadah perlindungan, rehabilitasi dan pembinaan.

Melihat kondisi realitas saat ini, dimana jumlah perempuan korban kekerasan terus bertambah, sementara pelayanan untuk penanganan korban masih amat terbatas. Sehingga inisiatif masyarakat tetap penting dalam ikut menurunkan kejadian kekerasan terhadap perempuan. "Karena itu, pekerja social menjadi penting. Bila selama ini pekerja social lebih banyak menangani anak yatim dan piatu atau orang jompo, kini kami ingin memperluas aktivitas social itu juga untuk Membantu penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan", dalam kenyataannya, peran masyarakat sangat besar dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Lembaga swadaya masyarakat tumbuh di masyarakat dengan tingkat kepedulian yang tinggi, seperti lembaga swadaya masyarakat mitra perempuan, lembaga bantuan hukum untuk asosiasi perempuan indonesia untuk keadilan ( LBH Apik).

Peran dalam menangani kasus KDRT. Peran P2TP2A provinsi Banten adalah dari untuk dan oleh masyarakat, dalam hal penanganan kasus KDRT P2TP2A telah melakukan program sosialisasi UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam berumah tangga dan pelayanan kasus KDRT P2TP2A dengan melakukan pendampingan klie- klien dalam kasus- kasus yang menyimpannya, baik pendampingan penyelesaian tindakan hukum kepada pihak-pihak terkait serta dalam lembaga peradilan, yaitu pengadilan, kejaksaan serta pendampingan medis bagi kasus klien yang perlu mendapatkan penanganan medis di rumah sakit dan memberikan konsultasi baik konsultasi sosial, psikologi terhadap klien.

Dalam UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam berumah tangga, terdapat salah satu upaya yaitu upaya perlindungan/pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, maksudnya setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang termasuk perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan dan kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan penelantaran rumah tangga. Dalam hal ini, pemerintah telah berupaya melakukan pengaturan yang mengatur agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan korban tetapi dalam kenyataannya KDRT itu tetap terjadi dalam kondisi seperti ini P2TP2A lah yang memiliki peran dalam hal tersebut.

Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat antara lain tentang keberadaan P2TP2A yang ada di Provinsi Banten, jenis pelayanan yang tersedia serta fasilitas-fasilitas yang dimilikinya, kegiatan ini semacam kegiatan pemasaran, kegiatan sosialisasi dianggap penting dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pelayanan, upaya pengadaan sarana dan prasarana serta kepedulian semua pihak, yaitu: masyarakat sebagai klien yang memanfaatkan wahana untuk memperoleh pelayanan yang diperlukan, kelompok masyarakat sebagai penyedia pelayanan agar senantiasa siap untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, masyarakat keseluruhan yang senantiasa memelihara dan memelihara tempat pelayanan menjadi aset bersama. P2TP2A Provinsi Banten telah melakukan sosialisasi tentang UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam berumah tangga ke 8 kabupaten/ kota di Provinsi Banten.



P2TP2A Provinsi Banten yang merupakan bagian atau unsur pemerintah daerah telah berhasil memberikan kontribusi penilaian signifikan hingga membawa Provinsi Banten mendapatkan penghargaan anugerah Parahita Ekaphraya yang ditemukan oleh peneliti bahwa pendapat tersebut berbeda dengan I3 dan I2 yang menyatakan keberhasilan P2TP2A Provinsi Banten karena masih terdapatnya korban baik anak maupun perempuan yang belum mengetahui keberadaan P2TP2A Provinsi Banten dan keinginan mau atau mampu menyatakan keluhan atau masalahnya kepada orang lain apalagi melapor pada yang berwajib, dan peneliti menemukan dari data-data kasus perkasus tidak ditemukan dalam laporan dan dokumen yang dimiliki oleh P2TP2A Provinsi Banten dan dari data kasus pelapor KDRT, pelapor terbanyak berdomisili di kawasan terdekat dengan lokasi P2TP2A Provinsi Banten saja.

Namun disatu sisi program dan sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A Provinsi Banten belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan kecenderungan sosialisasi P2TP2A Provinsi Banten yang tidak merata dan terpusat di daerah perkotaannya saja. Permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang saat ini diwarnai oleh kecenderungan peningkatan kompleksitas yang bersumber dari masalah-masalah keterbelakangan, ketinggalan serta masalah kemiskinan, sehingga perlu ditangani oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada masyarakat dikalangan menengah kebawah atau yang berpendidikan dan berekonomi rendah belum mengetahui keberadaan P2TP2A Provinsi Banten serta program-program P2TP2A Provinsi Banten harus menyeluruh dan tepat sasaran

hingga ke kalangan masyarakat menengah ke bawah atau yang berpendidikan dan berekonomi rendah.

Selanjutnya berkaitan dengan pelayanan, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing melakukan upaya penyediaan unit pelayanan perempuan dan anak, penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani, pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban, oleh karena itu proses pelayanan kasus KDRT harusnya diperlakukan konsistensi secara maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap korban kasus KDRT secara baik dan maksimal sehingga dapat menekan angka kasus KDRT di Provinsi Banten yang semakin meningkat.

Pada prakteknya P2TP2A Provinsi Banten melakukan pelayanan dengan baik namun hanya saja masih banyaknya salah persepsi antara lembaga dan masyarakat akan tugas pokok dan fungsinya dalam penanganan pelayanan kasus, perlu adanya kesepahaman dan kejelasan antara lembaga dan korban ( klien ) batasan –batasan dan koridor yang dilakukan oleh P2TP2A Provinsi Banten dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Banten. Dan dalam memberikan konseling kepada klien P2TP2A Provinsi Banten haruslah memberikan kenyamanan bagi korban dalam menyampaikan masalahnya, membantu mereka agar sanggup menghadapinya sehingga mampu mengambil keputusan serta pilihan yang diperlukan agar kembali berdaya

## **Hambatan Dan Upaya P2TP2A Dalam Penanganan Perempuan Dan Anak Korban KDRT Di Provinsi Banten**

Berdasarkan latar belakang pendidikan, sebagian besar pengurus P2TP2A Provinsi Banten memiliki tingkat pendidikan sarjana dan dua orang staf masih berpendidikan SMA. Selain latar belakang pendidikan, faktor lainnya yang juga berpengaruh terhadap organisasi yaitu pertama, sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia sangat dibutuhkan dalam melaksanakan program kerja P2TP2A Provinsi Banten baik dalam memberikan perlindungan korban. Sebab kualitas pegawai tercermin dari keahlian yang dimiliki oleh para pegawai tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya para pengurus harus dapat memahami tentang pekerjaannya. Oleh karena itu, beban pekerjaannya tersebut harus disesuaikan dengan visi dan misi serta strategi dari P2TP2A tersebut. Sehingga, target kuantitas pekerjaannya dapat tercapai. P2TP2A dituntut untuk memiliki pengurus dan relawan yang ahli dalam bidang-bidang tertentu yang berhubungan dalam pemberdayaan perempuan dan anak. Para pengurus yang memiliki latar belakang yang sesuai dengan penempatan tugasnya itu sangat penting dalam menunjang keberhasilan P2TP2A Provinsi Banten.

Latar belakang pendidikan pengurus dan relawan sangat berpengaruh terhadap kinerja P2TP2A Provinsi Banten, factor lainnya yang juga berpengaruh terhadap keahlian seseorang adalah pengalaman.

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa jabatan yang diberikan merupakan sebuah tanggungjawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sumber daya manusia yang handal menjadi sebuah keharusan dalam sebuah organisasi.

Bidang pelayanan terpadu yang bertanggung jawab atas pelayanan medis, pelayanan hukum, pelayanan psikis dan pelayanan rehabilitasi sosial tentunya harus memiliki staf yang dapat menjalankan tugas dan melaksanakan setiap kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan terpadu. Kualitas staf selain ditunjang oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman juga harus ditunjang melalui berbagai pelatihan.

Sistem pelatihan peningkatan pelayanan terpadu sangat tergantung dengan anggaran dan P2TP2A Provinsi Banten belum pernah menyelenggarakan pelatihan sendiri. Oleh karena itu kesempatan mengikuti pelatihan merupakan suatu hal yang perlu dilakukan karena untuk meningkatkan kualitas dan profesional dalam mengemban tugas terlebih untuk para pengurus, staff dan relawan.

**a. Sosial budaya masyarakat yang menganggap bahwa KDRT merupakan Urusan Domestik Keluarga**

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang korban KDRT, bahwa korban merasa segan untuk mengungkapkannya kepada pihak terkait meskipun bukti fisik kerap terlihat oleh masyarakat sekitarnya.

Adapun dampak dari kekerasan ini yaitu:

1. Rasa sakit

2. Jatuh sakit
3. Luka berat
4. Ketakutan
5. Hilangnya rasa percaya diri
6. Hilangnya kemampuan untuk bertindak
7. Rasa tidak berdaya
8. Penderitaan psikis berat pada seseorang
9. Menghambat kemajuan seseorang dan anggota keluarga lainnya.

Berbicara mengenai status dan posisi perempuan tidak lepas dari ajaran agama, nilai, norma, dan tradisi budaya masyarakat di sekelilingnya. Secara turun temurun ajaran agama, nilai, norma yang berlaku di dalam masyarakat ini diajarkan kepada anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan oleh para orang tua nya sebagai bekal dalam upaya menjaga kelanggengan dan kemantapan kehidupan hingga dewasa menjadi tua, seluruh ajaran ini akan dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menjadi acuan dalam berfikir, bersikap, berperilaku terhadap sesama, termasuk kepada istri atau suaminya karakteristik perempuan pada umumnya di:

### **1. Patuh dan Taat**

Dalam tradisi Jawa misalnya, perempuan dibatasi oleh tradisi keperempuanan ideal yang mengutamakan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Nilai ini sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Islam yang menginterpretasikan laki-laki sebagai pemimpin sehingga mengharuskan perempuan atau istri patuh kepada suaminya. Bahkan kepatuhan ini direfleksikan dalam ungkapan ‘swarga nunut nra ka katut’

yang artinya seorang istri harus patuh dan mengikuti suaminya dengan setia. Nilai kepatuhan ini nampaknya ada pada hampir seluruh masyarakat Indonesia tidak hanya terbatas pada masyarakat yang beragama Islam saja.

## **2. Milik Suami**

Bila seorang perempuan menikah, maka ia menjadi milik suaminya dan orang tua tidak mempunyai kekuasaan lagi atas anak perempuannya. Istri harus merahasiakan keadaan rumah tangganya termasuk tabiat suaminya, kepada orang lain di luar keluarga. Seorang istri harus menjalankan perannya dalam rumah tangga seperti mengurus rumah, mengasuh anak dan melayani suami sesuai dengan peran yang ditentukan secara sosial dan tuntutan dari suami. Sejak saat itu perempuan cenderung lebih sibuk dalam urusan rumah tangga dan tidak memikirkan keinginan pribadinya, apalagi upaya mengembangkan potensi diri yang dimilikinya untuk berkisah dalam kehidupan sosial di luar rumah tangga. Kehidupan istri atau perempuan bukan lagi menjadi miliknya, tetapi lebih ditentukan oleh suaminya.

## **3. Nrimo dan Pasrah**

Hidred Geertz yang meneliti mengenai keluarga Jawa dan tulisannya yang diterbitkan pada tahun 1983, mengungkapkan bahwa laki-laki dan perempuan biasanya berbagi rata kekuasaan dan tanggung jawab dalam perkawinan, meskipun ada pembagian tugas yang tegas dalam urusan keluarga. Meskipun demikian, memang masih ada kepercayaan tentang karakteristik yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang menyebabkan diterimanya perbedaan hak laki-laki dan perempuan.

Sebagai contoh, hubungan di luar nikah atau perselingkuhan akan lebih ditoleransi pada laki-laki daripada bila dilakukan oleh perempuan. Hal ini dianggap secara alami tidak mempunyai tanggung jawab moral dibanding perempuan dan lebih bersemangat. Perempuan atau istri cenderung menerima kelakuan suami (Nrimo) karena nilai kepatuhan yang diyakini dan bahkan pasrah tanpa usaha untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan ini dengan suami. Perempuan atau istri lebih banyak diam dan menerima semua perlakuan ini sebagai jalan hidupnya. Sebagai perempuan tidak berani menanyakan apalagi membahasnya karena merasa takut mendapat ancaman dan perlakuan kasar secara fisik dari suaminya.

### **Kerjasama Tim**

*Pertama*, kerjasama internal. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pengurus dan staff P2TP2A Provinsi Banten, mereka mengatakan bahwa budaya organisasi ditekankan pada rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan sesama teman kerja. Selain nilai-nilai tersebut, nilai yang juga diterapkan dalam bidang pajak daerah adalah keterbukaan, tanggung jawab, kerjasama dan taat asas. Dengan menerapkan budaya organisasi tersebut maka diharapkan akan menciptakan iklim kerja yang kondusif. Kerjasama dalam sebuah organisasi adalah suatu hal yang harus membudaya dalam setiap diri staf atau pegawai. Dengan kerjasama, pekerjaan menjadi cepat selesai karena bisa berbagi tugas dengan teman kerja yang lain. Kerjasama yang baik tidak bisa dilepaskan dari hubungan yang baik pula antara sesama staf.

Berdasarkan fakta dilapangan masih ada ketidaksepahaman diantara pengurus satu dengan pengurus lainnya. Hal tersebut dapat menyebabkan

terhambatnya pelaksanaan organisasi. Diharapkan di setiap pengurus menanamkan bahwa kerjasama adalah sebuah kebutuhan yang ada dalam diri setiap manusia. Manusia tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan orang lain. Begitu pula dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, para staf memiliki persepsi bahwa kerjasama merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pekerjaan mereka. Oleh karena itu harus adanya komunikasi dan toleransi antara sesama pengurus.

*Kedua*, kerjasama eksternal. P2TP2A juga dapat melakukan dalam kerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam memudahkan pelaksanaan kegiatan. Misalnya kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pembimbing rohani, tenaga kesehatan, lembaga psikologi, lembaga sosial lainnya dan juga pemerintah. Dalam hal ini P2TP2A belum menjalin kerjasama eksternal secara tertulis, baru dalam langkah penyusunan drafnya saja.

Hal tersebut merupakan salah satu pemicu terhambatnya kinerja P2TP2A Provinsi Banten. Kerjasama ini dilakukan untuk memaksimalkan kinerja dan untuk terwujudnya tujuan penghapusan KDRT. Kerjasama ini dilakukan lembaga tidak sanggup untuk melakukan sesuatu hal yang dilakukan instansi lain dengan persetujuan korban.

Usaha yang dilakukan oleh P2TP2A untuk mewujudkan kesetaraan gender dan untuk melindungi perempuan dari sikap diskriminasi. Legitimasi lembaga sosial untuk ikut serta dalam memberikan perlindungan perempuan dari sikap diskriminasi. Legitimasi lembaga sosial untuk ikut serta dalam memberikan perlindungan korban KDRT ialah UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan



kekerasan dalam rumah tangga, PP No 4 tahun 2006 tentang komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan.

Dari fakta yang ada sebenarnya langkah yang ditempuh P2TP2A masih belum layak dan terkesan P2TP2A tidak mau mengembangkan ide-ide dalam menghadapi korban KDRT. Langkah yang seharusnya ditempuh dalam menghadapi korban KDRT yaitu dengan cara melakukan pencegahan KDRT, merupakan segala upaya yang dilakukan lembaga sosial dengan tujuan untuk tidak terjadinya KDRT. Upaya pencegahan KDRT yang dilakukan lembaga sosial dilakukan mengadakan seminar, pendidikan dan penyuluhan hukum, sosialisasi peraturan, penyebaran buklet dan brosur tentang KDRT, pelatihan perempuan (secara khusus) untuk tidak menjadi korban KDRT. Dalam upaya ini, lembaga sosial berfungsi untuk menyadarkan masyarakat (perempuan) tentang hak-hak asasi yang dimilikinya baik dalam lingkup publik maupun dalam lingkup keluarga dan hak asasi tersebut harus dilindungi.

Upaya pendampingan atau perlindungan korban merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada korban KDRT. Selain itu, pendampingan korban dilakukan lembaga sosial bertujuan untuk mendampingi korban menindak pelaku KDRT dengan sesuai hukum yang berlaku atau menghindari terjadinya penyelesaian masalah dengan melawan perbuatan hukum. Upaya pemulihan yaitu upaya untuk menguatkan korban KDRT agar lebih berdaya baik secara fisik maupun secara psikis. Selain tujuan ini, P2TP2A juga membantu korban untuk menuntut hak-haknya akibat perbuatan pelaku KDRT. Dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT, P2TP2A harus menanamkan

sikap responsif dan sensitif yang berarti peka dan tanggap dalam menangani kasus KDRT.

## SIMPULAN

- a. Program yang dilakukan P2TP2A Provinsi Banten dalam hal menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah dilakukan oleh P2TP2A Provinsi Banten yaitu melakukan sosialisasi UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan dalam hal pelayanan kasus KDR P2TP2A melakukan pendampingan klien atas kasus-kasus yang menyimpannya, baik pendampingan penyelesaian tindakan hukum kepada pihak-pihak terkait serta di lembaga peradilan, yaitu pengadilan, kejaksaan serta pendampingan medis bagi klien yang perlu mendapatkan tindakan medis dirumah sakit dan memberikan konsultasi baik konsultasi sosial, psikologis terhadap klien. Selanjutnya selama kurun tiga dua tahun P2TP2A terbentuk dari banyaknya kegiatan yang telah direncanakan, baru sedikit sekali kegiatan yang telah dijalankan oleh P2TP2A Provinsi Banten dan dalam hal penanganan kasus KDRT Hal ini terlihat masih belum maksimal dan optimalnya program kerja yang dilakukan oleh P2TP2A Provinsi Banten.
- b. Keberadaan ini P2TP2A memiliki peranan yang penting untuk menampung laporan. Kekerasan yang dahulunya dianggap wajar atau sebagai masalah ranah domestik (rumah tangga) seolah tabu bagi orang lain ikut campur. Saat ini kekerasan terhadap perempuan atau juga anak-anak bukan lagi sebagai isu domestic. P2TP2A harus mampu menumbuhkan kekuatan lokal- Untuk tangani

kekerasan terhadap perempuan. Peran P2TP2A sebagai tempat layanan korban kekerasan dengan tuntutan membangun jaringan dengan lembaga-lembaga lain untuk penanganan yang terpadu, sangat memungkinkan bagi P2TP2A untuk menjadi rujukan, Wadah perlindungan, Rehabilitas dan Pembinaan perekonomian bagi para perempuan dan anak korban kekerasan/ konflik. Melihat kondisi realistis saat ini, dimana jumlah perempuan korban kekerasan terus bertambah, sementara Pelayanan untuk penanganan korban masih amat terbatas Sehingga inisiatif masyarakat tetap penting dalam ikut menurunkan kejadian kekerasan terhadap perempuan.

- c. Hambatan P2TP2A dalam penanganan KDRT di Provinsi Banten antara lain :
  1. Berdasarkan latar belakang pendidikan, selain latar belakang pendidikan, faktor lainnya yang juga berpengaruh terhadap organisasi yaitu, pertama, sumberdaya Manusia. Sumberdaya Manusia sangat dibutuhkan dalam melaksanakan program kerja P2TP2A Provinsi Banten baik dalam memberikan perlindungan korban. Sebab kualitas pegawai tercermin dari keahlian yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Dalam menjalankan tugasnya para pengurus harus dapat memahami tentang pekerjaannya. Oleh karena itu, beban pekerjaannya tersebut harus disesuaikan dengan visi dan misi serta strategi dari P2TP2A tersebut. Sehingga, Target kuantitas pekerjaannya dapat tercapai.
  2. Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang korban KDRT, bahwa korban merasa segan untuk mengungkapkannya kepada pihak terkait meskipun fisik kerap terlihat oleh masyarakat sekitarnya.

3. Kerjasama Internal. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pengurus staff P2TP2A Provinsi Banten, mereka mengatakan bahwa budaya organisasi ditekankan pada rasa kekeluargaan dengan sesama teman kerja. Selain nilai-nilai tersebut, nilai yang juga diterapkan dalam bidang pajak daerah adalah keterbukaan, tanggung jawab, kerjasama dan taat asas.
4. Kerjasama Eksternal. P2TP2A juga dapat melakukan dalam kerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam memudahkan dalam pelaksanaan kegiatannya misalnya kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pem-bimbing rohani, tenaga kevehatan, lembaga psikologi, lembaga sosial lainnya dan/atau pemerintah. Dalam hal ini P2TP2A belum menjalin kerjasama eksternal secara tertulis. Baru dalam langkah penyusunan drafnya saja.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.Chaedar Alwasilah, 2006, *Pokoknya Kualitatif*, Pustaka Jaya: Jakarta
- Black, James A dan Dean J Champion, 2001, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Press

Lexy J Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung

Prasetya, Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI

Sumber Lain

<http://www.bps.go.id>

Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2009 Tentang mekanisme Pelayanan terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Banten.

Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Menteri Kesehatan RI Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian Negeri RI tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Profil Gender Banten Tahun 2009.

Petunjuk Teknis Tentang Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Anak Provinsi Banten.

## **Peran Mantri Tani Desa (MTD) Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Kabupaten Lebak**

**Widi Januar Ghafur**

STISIP Setia Budhi Rangkasbitung  
idijanuar@gmail.com

### **ABSTRAK**

Kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Lebak adalah kesenjangan antara jumlah penyuluh pertanian dan jumlah desa yang dibina, artinya masih terdapat penyuluh yang membina lebih dari satu desa, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Lebak mengambil kebijakan dengan merekrut mantri tani desa sehingga diharapkan dapat membantu penyuluh yang ada. Disisi lain ini merupakan sebuah kebijakan yang inovatif, namun kebijakan ini dirasakan tumpang tindih, terlebih BP4K yang menaungi penyuluhan digabung kembali ke Dinas Pertanian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dan alat analisis yang digunakan adalah George Edward III dalam Widodo (2010:96), Adapun hasil penelitian ini adalah Sumber Daya, Tidak semua sumber daya dalam mantri tani desa berkeahlian sesuai kebutuhan, selanjutnya dalam pelaksanaan wewenang, kapasitas mantri tani disini tidak bisa sebagai eksekutor, Dalam hal komunikasi tidak semua mantri tani memahami apa yang harus dilakukan artinya konsistensi serta pemahaman terhadap juklak sangat minim, Struktur birokrasi kerja pada mantri tani adalah sama seperti penyuluh pertanian lainnya, yang membedakan adalah mantri tani berada dibawah kepala desa, hal ini yang mejadi tidak maksimalnya peranan mantrai tani desa, mulai dari pembinaan mauppun pelatihan sehigga dampaknya adalah sering ditemukan hambatan dalam penyampaian informasi terlebih mantri tani desa berada pada hierarkhi organisasi yang berlapis-lapis

Kata Kunci : MTD, Ketahanan Pangan

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan pertanian dapat diartikan sebagai penyebaran dari inovasi teknologi pertanian bagi para petani, sehingga diharapkan produktivitas usaha pertanian dapat meningkat. Meningkatnya hasil pertanian diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan khususnya dikabupaten Lebak. terlebih kabupaten

Lebak merupakan salah satu daerah yang akan diprioritaskan menjadi lumbung pangan Nasional<sup>20</sup> Disisi lain ini merupakan sebuah kebijakan yang inovatif, dikarenakan hanya kabupaten lebak yang melakukan kebijakan seperti ini, namun kebijakan ini dirasakan sangat tumpang tindih, disisi lain mantra tani desa berada di bawah kepala desa, dan hanya melakukan koordinasi dengan Badan Penyuluhan terlebih pada tahun 2016 BP4K yang menaungi penyuluhan telah digabung kembali ke Dinas Pertanian, sehingga Dinas Pertanian mendapatkan tambahan tanggung jawab, belum lagi dengan adanya rotasi kepegawaian di kabupaten lebak yang berdampak kepada pembinaan terhadap mantra tani desa, ibarat anak yang kehilangan induknya. Selain itu dampak dari hasil rekrutmen tersebut ada beberapa mantra tani yang lolos seleksi tetapi ditolak oleh desanya, dengan beranggapan bukan berasal dari domisili atau pihak desa merasa keberatan karena bukan orang yang direkomendasikan oleh desa tersebut, hal ini mengakibatkan banyak mantra tani desa yang menginginkan pindah desa, bahkan mengundurkan diri, sehingga terjadi kekosongan di desa tersebut.

Hasil pengamatan penulis serta berdasarkan latar belakang diatas diketahui beberapa fenomena yang mengindikasikan peranan dari mantri tani desa yaitu masih rendahnya kontribusi mantri tani desa dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga hal ini dapat mempengaruhi dalam proses pencapaian ketahanan pangan di Kabupaten Lebak, selain itu ada beberapa kepala desa yang masih kurang memahami tugas pokok dan tanggung jawab dari mantri tani desa sehingga

---

<sup>20</sup> <https://banten.antaranews.com/berita/26717/mantri-tani-sumbangkan-produksi-pangan-di-lebak>

berdampak terhadap peranan mantri tani desa itu sendiri dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Lebak.

Peran dari pemerintah baik dari pemerintah desa atau Dinas Pertanian sangatlah penting agar peranan mantri tani desa dapat berjalan maksimal, mereka harus selalu melakukan koordinasi, serta komunikasi, dan menghilangkan ego masing masing, agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Dari pernyataan masalah diatas, yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peranan Mantri Tani Desa dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Lebak?

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui peranan mantri tani desa dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Lebak, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Dinas Pertanian serta Pemerintahan Desa dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Lebak, serta dari segi akademisi adalah menambah teori dan konsep serta data maupun informasi yang dibutuhkan dan Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menangani masalah-masalah kebijakan publik, khususnya inovasi kebijakan.

## KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori George Edward III dalam Widodo (2010:96) yang membagi menjadi empat indikator, diantaranya adalah (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

### 1. Komunikasi



Komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*trasmision*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

## 2. Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan

a. Sumberdaya Manusia Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Edward III dalam Widodo (2010:98)

b. Sumberdaya Anggaran terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Selain itu terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. , dimana terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

c. Sumberdaya Peralatan, sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang

meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

- d. Sumberdaya Kewenangan, Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan.

### 3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Dan terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”*Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi*”.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif, Metode penelitian kualitatif. Keabsahan data dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti sangat bergantung kepada keahlian, kecakapan dan pengalaman peneliti. Fokus penelitian sangat erat hubungannya dengan perumusan masalah, dimana masalah penelitian dijadikan sebagai acuan dalam menentukan fokus penelitian.

Adapun yang dijadikan informan adalah Mantri Tani Desa, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Kepala Desa, serta Kelompok Tani selanjutnya untuk Teknik Pengumpulan data melalui Teknik pengumpulan data dengan Studi dokumentasi, observasi (pengamatan), wawancara mendalam. Teknik keabsahan data dengan triangulasi dilakukan untuk pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Komunikasi**

Wahyuddin (2012:166) mendefinisikan komunikasi interpersonal adalah Pertukaran informasi antara seseorang dengan atasan, teman sejawat dan bawahan dalam setiap aktivitas agar tercapai tujuan pelaksanaan pekerjaan. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Dalam implementasinya Kebijakan ini telah disampaikan tidak hanya kepada pelaksana (implementors) namun kebijakan mengenai mantri tani desa juga telah disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara

langsung maupun tidak langsung, Khomsahrial Romli (2011:2) menyatakan bahwa komunikasi sebagai proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling bergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah – ubah.

Namun ada beberapa hal permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan mantri tani ini, mulai dari sistem kerja, status, system penggajiannya hingga surat Keputusannya yang dikeluarkannya, ini menandakan bahwa Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika kebijakan ini dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal, hal ini dikarenakan tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor sehingga mempengaruhi implementasi kebijakan, hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan George C. Edward III dalam Nugroho (2011 :636) dimana salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan adalah komunikasi.

Sejatinya agar implementasi berjalan efektif, harus tahu betul siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya, selanjutnya dalam dimensi kejelasan (clarity) kebijakan mengenai mantri tani desa ini telah ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

Dalam proses rekrutmen dilakukan oleh BP4K mulai dari pemberkasan administrasi hingga kepada tahap pelaksanaan tes dimana pelamar meminta

rekomendasi kepada pihak desa, dan setelah dinyatakan lulus, mantri tani desa mendapatkan honor dari desa, hal ini lah yang menjadi masalah kedepannya ketika peserta yang direkomendasikan oleh pihak desa tidak lulus seleksi, namun desa menggaji mantri tani yang tidak direkomendasikan, sehingga dampak yang terj adi adalah ada beberapa mantri tani desa yang tidak diakui oleh desanya, dan diperparah ketika mantri tani desa tidak sesuai dengan domisili, hal ini dikarenakan dalam satu dasa ada beberapa mantri tani desa yang lulus seleksi sedangkan ada pula yang tidak lulus di satu desa tersebut sehingga terjadi kekosongan, atau kesenjangan jumlah desa dengan kapasitas mantri tani desa, ini menandakan kurangnya komunikasi serta koordinasi antara pemerintah daerah dengan kepala desa, maka dalam hal ini komunikasi organisasi sangatlah diperlukan, bahkan ada beberapa kepala desa yang kebingungan oleh keberadaan Mantri Tani di wilayahnya. Bukan masalah kinerjanya, namun dikarenakan ada dua Mantri Tani yang kini bertugas di satu wilayah tersebut 21

Dilihat dari keterangan diatas kita sadar bahwa organisasi merupakan suatu kesatuan atau perkumpulan yang terdiri atas orang-orang/bagian-bagian yang di dalamnya terdapat aktivitas kerja sama berdasarkan pola dan aturan-aturan untuk mencapaitujuan bersama sehingga diperlukan komunikasi yang baik di dalamnya.

Menurut Himstreet dan Baty dalam Purwanto (2011:4) komunikasi organisasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa (lazim), baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun

---

<sup>21</sup> <http://www.tangeranghits.com/mega-metropolitan/berita/44228/badan-penyuluh-pertanian-diminta-bertanggung-jawab-soal-mantri-desa-di-lebak>

perilaku atau tindakan. Tujuan dari komunikasi adalah menciptakan dan saling memberi pengertian (*understanding*) antara sesama komunikator (pengirim) dan komunikan (penerima), mengandung kebenaran, lengkap, mencakup keseluruhan hal yang menarik dan nyata.

Dapat disimpulkan bahwasanya dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan mantri tani desa ini amat ditentukan dari beberapa unsur yang terdapat dalam komunikasi, seperti penyampai pesan, isi pesan, media yang digunakan, serta sasaran penerima pesan, serta perubahan sebagai akibat komunikasi, peran pemerintah disini sangat penting dalam hal komunikasi, agar semua mantri tani memahami apa yang harus dilakukan mulai dari pelaksanaan tugas ,pembuatan proses laporan, dan yang lebih utama adalah mantri tani paham mengenai juklak dan juknisnya.

### **Sumber Daya**

Sumber Daya Manusia merupakan satu satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya ( Sutrisno, 2012: 3), sehingga sumber daya manusia ini merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi, maju atau mundurnya suatu organisasi salah satunya adalah ditentukan oleh bagaimana kualitas sumber daya manusia di dalamnya sehingga tujuan dari organisasi tersebut bisa tercapai. Hal yang paling dasar adalah bagaimana suatu organisasi melakukan rekrutmen dan seleksi. Namun pada kenyataannya tidak semua sumber mantri tani desa berkeahlian sesuai kebutuhan, walaupun kualifikasi SLTA dengan jurusan IPA termasuk dalam kualifikasi, tetapi keahlian yang sangat dibutuhkan dalam hal ini adalah jurusan

pertanian, dalam hal ini kompetensi Mantri Tani Desa sangatlah penting. Wibowo (2013 ; 324) menjelaskan kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Mantri tani harus mampu mentrasfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan dalam situasi apapun. Terlebih bagi mereka yang memiliki kualifikasi SMA serta mereka yang baru lulus, jika tidak segera diatasi ini akan mengakibatkan proses pembinaan terhadap petani oleh mantri tani desa terganggu terlebih ketika BP4K digabung kembali ke Dinas pertanian, maka pembinaan berada dibawah dinas Pertanian dan menambah tanggung jawab, sehingga pengamat pertanian Kabupaten Lebak, mengaku heran dengan BP4 Lebak, yang melakukan diklat Mantri Tani Desa, harusnya yang menjadi penyuluh sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam bidang pertanian<sup>22</sup>. Menurut Singodimejo dalam Sutrisno (2012 : 45) rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Artinya dalam hal ini proses rekrutmen tidak boleh diabaikan agar menjaga tidak terjadinya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Walaupun di tingkat desa ada Penyuluh tetapi teknik pendekatan, serta senioritas menentukan maksimal atau tidaknya dalam proses pembinaan, dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah agar peningkatan kapasitas mantri tani desa bisa secepatnya dilakukan, minimal dengan melakukan pelatihan teknis,

---

<sup>22</sup> <https://bantenday.com/mantri-tani-desa-di-lebak-baru-dididik-pengamat-harusnya-sudah-siap-kerja/>

Pelatihan merupakan usaha yang direncanakan oleh perusahaan (organisasi) untuk memfasilitasi pembelajaran kompetensi karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan. (Noe, Raymond, 2002 :4) ini sangat penting agar peran mantri tani desa sebagai penyuluh dapat berjalan maksimal serta dapat melakukan tupoksinya sebagai penyuluh sehingga berdampak pada ketahanan pangan di desa tersebut, yang berimbas kepada ketahanan pangan di Kabupaten Lebak, namun hal ini terbentur dengan anggaran terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program, hal ini pun akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Dalam pelaksanaan wewenang, kapasitas mantri tani disini tidak bisa sebagai eksekutor, mereka harus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan penyuluh pertanian dan kepala desa, sehingga memerlukan waktu yang relative lama dalam melaksanakan keputusan.

### **Disposisi**

Disposisi adalah tentang komitmen, lebih dari kompetensi dan kapabilitas (Nugroho 2015: 226). Disposisi merupakan “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata



terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

Sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan Perbup No. 27 tahun 2015 di kabupaten Lebak cukup baik. Dalam hal ini pelaksana kebijakan tersebut menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti yang diharapkan sesuai dengan intruksi dari kabupaten. Karena ketika pelaksana memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Hal ini sejalan dengan hasil yang dicapai bahwasanya Kehadiran mantri tani desa mampu meningkatkan keterampilan petani di Kabupaten Lebak, dan membantu petugas penyuluh lapang (PPL) mendongkrak produksi pertanian. Selain itu Kehadiran mantri tani desa sangat membantu kelompok tani untuk mendongkrak produksi pangan<sup>23</sup>. Saat ini jumlah petugas mantri tani desa tercatat 340 orang terus ditingkatkan kompetensinya sebagai pembantu penyuluh pertanian. Keberadaan mantri tani desa tersebut untuk mendukung program swasembada pangan, karena mantri tani lah yang langsung berhadapan dengan petani sebagai pelaku usaha pertanian. Ini menjadi sebuah pencapaian yang sangat positif sebagai kebijakan yang inovatif, namun ini juga

---

<sup>23</sup> <https://banten.antaraneews.com/berita/26717/mantri-tani-sumbangkan-produksi-pangan-di-lebak>

menjadi pekerjaan yang harus dipertahankan khususnya untuk kedepannya, agar pembinaan terhadap mantri tani bisa berjalan maksimal.

### **Struktur Birokrasi**

Menurut Winarno (2012: 205) Birokrasi merupakan salah satu badan yang sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Selanjutnya ada dua karakteristik utama dalam birokrasi yaitu SOP (Standard Operating Procedures) serta fragmentasi. Sama seperti penyuluh pertanian lainnya dimana Mantri Tani Desa ini harus membuat Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) serta Program pertanian, namun pada kenyataannya ada beberapa dari mereka yang kurang paham mengenai program serta rencana tahunan bahkan ada yang tidak membuatnya sama sekali, hal ini sangat dilematis mengingat program serta RKTP merupakan kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi yang akan memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya. Selain itu ada beberapa kepala desa yang kurang memahami tupoksi dari mantri tani, sehingga berdampak pada tugas dari Mantri Tani Desa itu sendiri disisi lain mereka penyuluh desa tetapi disisi lain mereka menjadi staff pembantu dalam mengelola administrasi di desa.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada dasarnya mantri tani desa sama seperti penyuluh pertanian lainnya, yang membedakan adalah bahwa mantri tani berada dibawah kepala desa, dan

berkoordinasi dengan BP4K yang sekarang di gabung ke Dinas Pertanian, hal ini yang mejadi tidak maksimalnya peranan mantrai tani desa, kurangnya koordinasi antara instasni maka tidak jarang sering ditemukan Mantri Tani yang ikut serta dalam penagihan pajak, dimana itu merupakan bukan wewenang dari mantri tani tersebut, ini merupakan salah satu hambatan dalam penyampaian informasi terlebih mantri tani desa berada pada hierarkhi organisasi yg berlapis-lapis.

## SIMPULAN DAN SARAN

Peningkatan komunikasi anatar Dinas Pertanian dan Kepala desa sangatlah penting, agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan, selain itu dalam pelaksanaannya mantri tani desa harus diberikan pelatihan tambahan agar mereka lebih mngerti mulai dari teknis penyuluhan hingga Teknik administrasi, Dalam pelaksaan wewenang kapasitas mantri tani disini tidak bisa sebagai eksekutor, mereka harus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan penyuluh pertanian dan kepala desa, selanjutnya dalam struktur biroksasi Mantri Tani Desa disisi lain mereka penyuluh desa tetapi disisi lain mereka menjadi staff pembantu dalam mengelola administrasi di desa.

### **Saran**

1. Dinas Pertanian dan Kepala Desa harus selalu malakukan komunikasi serta kordinasi agar tidak terjadia tumpeng tindih kebijakan.

2. Aparat Dinas Pertanian perlu peningkatan kompetensi mantri tani desa melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas dan fungsinya dalam menunjang pelaksanaan kebijakan
3. Diberikannya kewenangan terhadap mantri tani desa, untuk mengkoordinir program atau kegiatan yang berhubungan dengan

#### Daftar Pustaka

- Budi Winarno. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS
- Edy Sutrisno. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. Kencana.
- Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
- Wibowo. 2013. Manajemen Kinerja. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Nugroho, Riant. 2011. Public Policy Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- \_\_\_\_\_. 2015. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta. Pustaka Pelajar
- Purwanto. 2011. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Romli, Khomsahrial. 2011. Komunikasi Organisasi Lengkap. Jakarta: PT Grasindo
- Sugiyono, 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Latunreng, Wahyuddin., 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. IPPSDM-WIN. Jakarta

Sumber Lain:

<https://banten.antaranews.com/berita/26717/mantri-tani-sumbangkan-produksi-pangan-di-lebak>

<https://bantenday.com/mantri-tani-desa-di-lebak-baru-dididik-pengamat-harusnya-sudah-siap-kerja/>

<http://www.tangeranghits.com/mega-metropolitan/berita/44228/badan-penyuluh-pertanian-diminta-bertanggung-jawab-soal-mantri-desa-di-lebak>

<https://banten.antaranews.com/berita/26717/mantri-tani-sumbangkan-produksi-pangan-di-lebak>

## **Fungsi Partai Politik Dalam Mendorong Ketahanan Wilayah Di Provinsi Banten**

**Suwaib Amiruddin dan Agus Aan Hermawan**

Prodi Ilmu Administrasi Publik Untirta  
Ilmu Pemerintahan STISIP Setia Budhi Rangkasbitung  
agus.aan.h@gmail.com

### **ABSTRAK**

Partai politik merupakan pilar kehidupan dalam berdemokrasi. Dengan adanya partai politik, aspirasi dan keinginan masyarakat dapat disalurkan dan diperjuangkan. Jika partai politik tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan mempengaruhi ketahanan wilayah di daerah. Penelitian ini terfokus pada fungsi partai politik dalam mendorong ketahanan wilayah di Provinsi Banten. Adapun, partai politik yang diteliti yaitu partai politik nasional pada peserta pemilu tahun 2014. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana fungsi partai politik dalam mendorong ketahanan wilayah yang dilihat dari persepsi kalangan pemuda. Metode penelitian yang digunakan kualitatif, pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa berdasarkan pandangan kalangan pemuda, partai politik peserta pemilu tahun 2014 di Banten dipandang mengancam ketahanan wilayah di Provinsi Banten. Hal tersebut, karena partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Sehingga partai politik kurang mendorong perbaikan kehidupan masyarakat di Provinsi Banten.

Kata Kunci: Partai Politik dan Ketahanan Wilayah

### **PENDAHULUAN**

Keberadaan partai politik tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip kehidupan berdemokrasi. Partai politik merupakan pilar kehidupan dalam berdemokrasi. Dengan adanya partai politik, aspirasi dan keinginan masyarakat dapat disalurkan dan diperjuangkan. Namun, fungsi partai politik banyak mengalami penyimpangan (*deviation*).

Fenomena partai politik yang dipandang masyarakat kurang begitu dipercaya membuat partai politik terancam ditinggalkan masyarakat. Keberadaan tersebut

dipandang mengancam stabilitas negara khususnya di daerah. Ketahanan politik bangsa dituntut untuk selalu tangguh dan kuat menghadapi segala tantangan dan problema yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika pilar kehidupan politik dengan sistem demokrasi salah satu tiangnya adalah partai politik kurang mendapat dukungan masyarakat, maka ancaman stabilitas politik negara sudah mulai siaga yang harus dicermati secara serius oleh pemerintah.

Pengelolaan partai politik yang buruk di Indonesia menjadi salah satu faktor melemahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Misalnya, sumber keuangan partai politik yang belum jelas dan hanya didasarkan pada sumbangan kadernya serta simpatisan yang menimbulkan kecurigaan publik atas maraknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum politisi. Di tingkat daerah misalnya, tingkat akuntabilitas dan transparansi partai politik yang ada di Provinsi Banten sangat rendah, (Danhil Anzar, 2011). Dengan demikian profesionalitas dalam mengelola partai politik dituntut untuk lebih maju dan kembali diuji kredibilitasnya di hadapan masyarakat.

Masyarakat sudah cerdas menilai kinerja partai politik yang baik dan buruk. Beberapa partai politik yang masuk dalam peserta pemilu 2014 komitmennya masih diragukan masyarakat, karena dianggap partai politik tidak peduli dengan permasalahan masyarakat dan hanya mementingkan kepentingan golongan partai politiknya saja. Partai politik peserta pemilu 2014 yang sudah ditetapkan KPU berjumlah 15 papol, 3 di antaranya partai politik lokal di Aceh.

Penelitian ini terfokus pada partai politik dalam mendorong ketahanan wilayah di Provinsi Banten. Partai yang diteliti adalah partai peserta pemilu tahun 2014.

Penelitian ini akan mengkaji terkait bagaimana partai politik dalam mendorong ketahanan wilayah yang dilihat dari persepsi kalangan pemuda.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Riset yang dipandang relevan bisa dilihat seperti yang dilakukan Yohanes (2006) tentang “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2004 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta,” Sekolah Pascasarjana UGM. Gambaran hasil penelitiannya menyatakan bahwa partisipasi politik pada Pemilu 2004 lebih demokratis dibanding Pemilu masa Orde Baru, namun struktur kepartaian dinilai masyarakat masih terlalu banyak sehingga membingungkan khususnya bagi masyarakat di pedesaan yang tingkat sosial-ekonominya belum begitu maju seperti di kota. Letak perbedaannya dengan riset peneliti adalah lebih mengkaji pada partisipasi politik pemilih.

Tinjauan pustaka lain yang bisa dirujuk mengenai keberadaan partai politik dalam mendorong ketahanan politik wilayah, seperti riset yang dilakukan Yulianto Dwi Saputro (2015) tentang “Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi di DPD II Partai Golongan Karya Kota Malang Jawa Timur Tahun 2009 - 2014)” Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM. Hasil penelitiannya ditemukan bahwa peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada kader maupun kepada masyarakat masih rendah. Metode serta materi pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik masih sangat konseptual dan kurang aplikatif. Metode evaluasi dalam pemberian pendidikan politik tidak



berjalan dengan efektif, sehingga peran partai politik dalam memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara menjadi rendah. Selain itu, berakibat rendahnya tingkat kualitas kader partai politik dalam mendorong perbaikan kehidupan masyarakat. Implikasi peran partai politik dalam pendidikan politik generasi muda terhadap ketahanan politik wilayah berdampak pada rendahnya partisipasi politik masyarakat dan rendahnya tingkat peran serta masyarakat dalam pembuatan serta pengawasan kebijakan publik.

#### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sebuah penelitian yang didasarkan pada fenomena, gejala, fakta, atau informasi sosial. Adapun penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada bagaimana persepsi pemuda terhadap partai politik peserta pemilu 2014 dan ketahanan politik wilayah. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Banten. Informan penelitian adalah anggota organisasi KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Provinsi Banten. Penentuan lokasi penelitian pada para aktivis pemuda yang menjadi pengurus dan anggota KNPI Banten. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk memudahkan kegiatan pengumpulan data. Karena KNPI merupakan organisasi kepemudaan yang bisa dikatakan representatif dari semua organisasi kepemudaan. Analisis data dilakukan tidak hanya setelah pengumpulan data, melainkan juga pada waktu proses pengumpulan data. Setiap aspek pengumpulan data, peneliti senantiasa sekaligus melakukan analisis. Bahwa analisis data terdiri

dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles dan Huberman, 1992:16).

## HASIL PENELITIAN

### **Fungsi Parpol Peserta Pemilu 2014**

Secara garis besar fungsi partai politik dalam internal organisasi adalah melakukan pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latarbelakang pendirian partai politik tersebut. fungsi keluar yang berhubungan dengan masyarakat luas untuk kepentingan bangsa dan negara. Adapun, Miriam Budiardjo (2008:163) yang berpendapat bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik. Dari beberapa fungsi parpol tersebut akan diuraikan mengenai persepsi pemuda terhadap fungsi tersebut pada parpol peserta pemilu 2014.

#### **1. Pola Rekrutmen Kader oleh Parpol Peserta Pemilu 2014**

Pola rekrutmen kader parpol parpol peserta pemilu 2014 dianggap sudah ada yang terbuka dan dipandang juga masih tertutup. Dalam keterbukaan tersebut masih kurang. Hal tersebut dianggap keterbukaan baru secara formalitas ketika diinformasikan melalui media masa, baik elektronik maupun cetak. Kedekatan dan kepemilikan modal serta masa yang banyak masih menjadi pilihan utama dalam pertimbangan merekrut kader oleh parpol. Partai partai lama masih dianggap lebih

tertutup dari pada partai baru. Dengan alasan partai baru lebih terbuka, karena mereka masih membutuhkan kader dan masa yang banyak.

Persepsi pemuda menunjukkan bahwa kader Partai Gerindra, PDIP dan Hanura dan Nasdem dianggap lebih berkualitas kader-kadernya. Hal tersebut dianggap menjunjung integritas sebagai kader yang berpihak memperjuangkan bangsa dan negara. Kasus korupsi sedikit sekali menimpa partai-partai tersebut. Partai lain dianggap kadernya masih buruk, dengan fakta banyak terjebak kasus korupsi. Dari pandangan tersebut pemuda memandang dua sisi, yaitu kader partai sebagian sudah baik dan masih banyak yang buruk jauh dari berkualitas. Tetapi persinya mereka memandang masih banyak yang belum berkualitas.

## **2. Pendidikan Politik oleh Parpol Peserta Pemilu 2014**

Persepsi fungsi pendidikan politik yang dilakukan parpol peserta pemilu 2014 dianggap masih dinilai buruk. Karena parpol belum menunjukkan peranannya yang diharapkan oleh masyarakat untuk melaksanakan tugasnya memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat. Seperti politik uang dan perilaku yang melanggar moral masih menghiasi perilaku politisi kita. Namun, harapan kualitas itu masih ada meski masih relatif kecil. Dari sebegini besar parpol hanya beberapa parpol saja yang sedikit konsisten, seperti PKS, PDIP, Gerindra dan Hanura. Sementara partai lain dipandang masih jauh dari yang diharapkan sesuai fungsi parpol yang dikatakan dalam undang-undang parpol.

## **Persepsi Pemuda Terhadap Pola Penjaringan Pejabat Publik Oleh Parpol Peserta Pemilu 2014**

Persepsi pemuda terhadap pola penjaringan calon pejabat publik dipandang banyak yang tidak berkualitas seperti penjaringan calon anggota DPRD/DPR/kepala daerah dan wakilnya/ menteri/ presiden dan wakilnya) yang diusung parpol. Persepsi pemuda dari pandangan di atas menunjukkan bahwa parpol dalam merekrut kadernya untuk dijadikan calon pejabat publik tidak serta merta berdasarkan kualitas yang diharapkan oleh masyarakat. Terutama dalam hal pola penjaringan calon legislatif yang harus mengeluarkan sejumlah uang untuk duduk menjadi caleg, terlebih harus menduduki nomor urut yang strategis. Tidak berbeda dengan calon kepala daerah, menteri bahkan calon presiden dan wakilnya, yang dipertimbangkan adalah seberapa besar dia memiliki finansial yang banyak. Untuk kemudian mengkondisikan para pimpinan partai dan bisa membiayai kos politik partai. Selain itu punya masa dan pendukung yang tinggi pula, menjadi ukuran yang diutamakan dan kedekatan dengan petinggi partai. Bahkan bisa sebagai anggota keluarga, bisa anak, istri atau suami dan lainnya.

### **Kepercayaan Pada Pemerintah**

Prilaku pemerintah yang mengalami banyak deviasi (penyimpangan) membuat masyarakat semakin *geram*. Merajalelanya perilaku korupsi yang semakin mengikis tingkat kepercayaan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kepercayaan generasi muda. Pemuda merupakan generasi yang akan menentukan warna dan arah bangsa kedepan. Persepsi pemuda terhadap kepercayaan pemerintah saat ini sudah semakin menurun. Rendahnya kepercayaan pemuda terhadap moralitas pemerintah dikarenakan banyak pelaku pemerintah yang terjerat kasus

korupsi dan kasusu hukum yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan konstitusi negara.

### **Kepercayaan Terhadap Pejabat Publik**

Persepsi pemuda saat ini terhadap kepercayaannya pada pemeintah sudah bisa dikatakan menurun. Para pemuda banyak yang tidak percaya kepada pejabat publik yang mengemban amanah dan tugas pemerintahan. Persepsi pemuda pada pemerintah memiliki kecenderungan negatif. Mereka menyatakan ketidakpercayaan kepada pemerintah tidak sepenuhnya menggeneralisir semua pejabat publik. Namun, mereka menyebut hanya kejahatan yang dilakukan oleh oknum pemerintah tersebut yang kemudin mencemari citra pemerintah. Sayangnya oknum pemerintah yang mencederai hati masyarakat ini jumlahnya tidak sedikit. Karena hampir setiap hari dalam pemberitaan media massa cetak maupun media elektronik. Terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum pemerintah.

“Saya sudah tidak percaya pada mereka politisi korup dan pejabat pemerintah yang busuk dan selalu menipu rakyat. Satu kuncinya menurut saya, bahwa penegak hukum dan pemeritah harus tegas dalam menindak para koruptor, bila perlu buat aturan bahwa koruptor itu di hukum mati biar jadi perhatian mereka yang mau berniat korup” (Anggraeni, Kelompok OKP Nasionalis, Wawancara 9 Januari 2014).

“Saya seudah tidak percaya pada pemerintah yang menjabat sekarang. Karena mereka yang datnnyag menjadi pejabat pemerintah dari partai mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya saja. Mereka berkuasa hanya untuk mengamankan jabatan mereka biar langgeng dan mereka bisa mengamankan kekayaan bisnis dari hasil korupsi mereka” (Lela Nurlalela, Kelompok OKP Religius, Wawancara 21 Desember 2013).

Berdasarkan persepsi pemuda terhadap kepercayaan kepada pejabat publik atau pejabat pemerintah bila dibiarkan akan mengancam keberlangsungan jalannya roda pemerintahan. Kewibawaan pemerintah dimata masyarakat semakin menurun,

bahkan bisa pada titik pembangkangan masyarakat terhadap pemerintah. Pembangkangan terhadap pemerintah bisa dilakukan secara halus dengan tidak ikut serta dalam kegiatan sebagai kewajiban warga negara. Pembangkangan juga bisa dilakukan secara anarkis secara fisik atau perlawanan kepada pemerintah secara benturan fisik, baik berupa demonstrasi di jalanan maupun serangan teror untuk melawan kepada pemerintah yang dianggap buruk.

### **Kepercayaan Terhadap Kebijakan Yang Dibuat Pemerintah**

Kepercayaan publik masyarakat terhadap pemerintah menggambarkan perasaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, sehingga jika tingkat kepercayaan tinggi menunjukkan bahwa masyarakat sedang dalam keadaan senang, nyaman, aman dan akhirnya akan mendukung kebijakan pemerintah. Tindakan pejabat meskipun tidak mewakili lembaganya juga sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan. Hal tersebut terlihat jika pejabat yang bersangkutan melakukan tindakan yang tidak disukai oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Krisis kepercayaan terhadap pejabat tersebut mengakibatkan pula merosotnya kepercayaan terhadap institusi dimana pejabat tersebut menduduki jabatannya.

“Kebijakan pemerintah saya lihat masih jauh dari harapan rakyat, terkait kebijakan kesejahteraan kepada masyarakat khususnya di Banten masih jauh dari harapan, masih banyak masyarakat miskin dan terlantar. Kebijakan saat ini hanya berpihak pada investor asing dan mereka para kroni pemerintah yang berkuasa” (Lia Kusmayati Heliana, Kelompok OKP Religius, Wawancara 8 Februari 2014).

“Saya rasa ya.. kebijakan pemerintah saat ini masih jauh dari harapan masyarakat, terutama kaum masyarakat marginal, kebijakan yang ada lebih

cenderung pada pengusaha. Contohnya kebijakan investasi asing kalau ga salah investasi asing bisa menguasai separuhnya tanah Indonesia, ya ini jelas sangat bertentangan dengan semangat UUD'45 yang condong pada sosialisme Indonesia. Logikanyakan berarti bangsa Indonesia sengaja mengundang para penjajah untuk menjarah kekayaan Indonesia. Ya maaf saya agak kasar "kebijakan total" kalau benini caranya" (Agus Maulana, Kelompok OKP Nasionalis, Wawancara 12 Desember 2013).

Persepsi pemuda terhadap kebijakan publik yang dibuat pemerintah akan berdampak pada keberhasilan kebijakan itu sendiri. Jika kebijakan tidak didukung oleh pemuda dalam hal ini sebagai bagian dari masyarakat maka kebijakan sangat sulit untuk maksimal dikatakan bisa berhasil. Ancaman yang muncul dari para pemuda yang berpersepsi negatif terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah bisa mengancam kelangsungan pembangunan negara, baik di daerah maupun di tingkat pusat.

### **Kepercayaan Terhadap Pelayanan Publik Yang Dilakukan Pemerintah**

Pelayanan publik dikatakan sebagai pemenuhan hak, maka ini akan berkolerasi dengan kewajiban sebagai warga negara. Jika haknya dilayani dengan baik oleh pemerintah. Maka kewajibannya sebagai warga negara akan dilakukan baik pula. Namun, realita pelayanan tidak demikian. Pelayanan publik buruk sementara pemerintah memaksa warga negaranya untuk memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak dan lain sebagainya. Kondisi tersebut jika dibiarkan akan terjadi perlawanan dan pembangkangan bahkan penuntutan atas hak-hak warga negara kepada pemerintah, bisa dengan cara halus bahkan kasar.

Persepsi pemuda terhadap parpol peserta pemilu 2014 yang buruk menyebabkan ketahanan politik yang buruk pula. Salah satu indikator ketahanan politik adalah baiknya pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat atas

layanan yang diberikan oleh pemerintah. Berikut ini pandangan pemuda terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah dan sikapnya terhadap pelayanan tersebut. Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Pelayanan publik terus terang saja saat ini belum memuaskan, infrastruktur dibanten banyak yang rusak, pelayanan kesehatan banyak yang tidak lengkap, pendidikan gedungnya banyak yang roboh, jalan-jalan raya rusak semua. Bagamaina mau puas terhadap pelayanan pemerintah ini. Ini dirasakan dan kasat mata bisa dilihat oleh semua orang. Ada misalnya program pemerintah seperti PNPM, dan itu habis dimanfaatkan oleh oknum untuk dimanfaatkan proyeknya, hasil pekerjaannya hanya formalitas belaka” (Eko Waluyo, Kelompok OKP Nasionalis, Wawancara 25 Desember 2013).

“Jauh dari harapan, dia bukan abdi negara tapi abdi atasan. Tapi tidak menggeneralisir juga, ada sebagian memang sudah baik. Ini persoalan sistem bukan perseorangan, orang baikpun bisa dipaksa jahat dengan sistem buruk seperti ini. Misal perekrutan sebagai pegawai pemerintah” (Topari, Kelompok OKP Religius, Wawancara 10 Februari 2014).

Sikap pesimistis dari persepsi pemuda yang muncul merupakan kondisi yang harus diwaspadai oleh pemerintah dalam menyikapi pelayanan publik kedepan agar ada peningkatan yang lebih baik. Dalam posisi tersebut pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepadamasyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat. Jika hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dari pemerintah tidak terpenuhi dengan baik. Maka tidak mustahil masyarakat akan melakukan perlawanan, misalnya dengan melakukan tindakan yang melawan aturan pemerintah seperti tidak membayar pajak dan lain sebagainya. Bahkahn yang paling ekstrim merampas kekayaan negara dengan melakukan penjarahan atau sejenisnya terhadap kekayaan negara, karena menuntut hak yang tidak dilayani dengan baik oleh pemerintah.



## **Kepercayaan Terhadap Penegakan Hukum**

Pandangan mengenai penegakan hukum/keadilan di Indonesia, khususnya di Banten dianggap belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Artinya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum belum dirasakan sesuai prinsip keadilan. Karena masih banyak diskriminasi dalam penegakan hukum. Banyak oknum penegak hukum yang terkena penyuapan untuk meringankan hukuman. Adapaun di tingkat pusat dianggap sudah relatif baik, seperti yang dilakukan KPK. Sepak terjang KPK di pusat cukup baik menekan para koruptor untuk terus berkembang. Dengan sikap KPK itu cukup baik bertahap menegakan hukum dan keadilan di Negara Indonesia

“Ya gimana ya, kalau menyangkut penegakan supermasi hukum dan keadilan saya rasa di Indonesia secara umum masih jauh ya, apalagi di Provinsi Banten yang sudah terkenal korup. Ya saya rasa publik tau bagaimana wajah supermasi hukum di Banten, terlebih gubernurnya saja Ratu Atut Chosiah tersangkut kasus penyuapan pilkada Kabupaten Lebak dan korupsi alat kesehatan yang sedang diproses di KPK itu. Ya saya rasa penegakan hukum di Banten masih jauh api dari panggang. Logikanya masa korupsi yang menggurita di Banten kok gak ketauan oleh kepolisian, dan kejaksaan Banten OKP-nya Ormas-nya di Banten pada madul. Tapi kalau saya dan teman-teman aktiflah mengkritik kemandulan hukum di Banten walau harus berhadap-hadapan dengan para jawara Banten yang sok jagoan” (Agus Maulana, Kelompok OKP Nasionalis, Wawancara 21 Februari 2014).

“Belum ada penegakan hukum yang adil, terbukti koruptor masih masih sangat berkeliaran bebas. Kemudian orang yang berkuasa selalu mendominasi dan selalu kebal dalam hukum” (Jalaludin, Kelompok OKP Religius, Wawancara 12 Februari 2014).

Kepercayaan pemuda terhadap penegakan hukum tidak sepenuhnya meyakini dari kinerja para penegak hukum. Fenomena penegakan hukum kita yang masih jauh dari rasa keadilan tersebut bisa membuat perlawanan dari masyarakat terutama para kaum muda untuk melawan dan melanggar hukum. Karena mereka

menganggap penegak hukum sudah tidak konsisiten dalam menegakan hukum. Kondisi penegakan hukum saat ini menghadapi pesimisme masyarakat terhadap penegakan hukum. Hal ini semakin mendorong sikap apatis terhadap penegakan hukum. Jika sudah terjadi sperti demikian maka sikap kritis dan kontrol masyarakat sudah tidak ada dan terjadi masa bodoh dengan tanggungjawab atas keberlangsungan kegidupan negara yang sehat.

### **Kepercayaan Terhadap Sisitem Politik atau Sisitem Demokrasi Di Indonesia**

Gerakan demokratisasi kehidupan politik telah menjadi fenomena yang tidak terelakan dalam mengubah persepsi sejarah tentang bagaimana menyelenggarakan kekuasaan secara etis, rasional, dan bertanggung jaawab. Jelas bahwa demokrasi mempunyai potensi untuk memberikan yang terbaik bagi manusia, terutama dalam melindungi hak-hak individu dalam menghadapi kekuasaan-kekuasaan yang lebih perkasa, seperti kekuasaan negara dan pemerintah misalnya (Jaenudin dalam Nurtjahjo, 2006: 2).

“Saya ingin kembali pada demokrasi yang diletakan oleh para pendahulu negara kita, para founding father kita. Jadi demokrasi yang ada di Indonesai saat ini hanya perlu konsistensi saja untuk melaksanakannya. Karena demokrasi saat sekarang baru demokrasi procedural saja belum menyentuh pada esensi demokrasi yang sebenarnya. Ini tugas kita bersama untuk mendorong semuanya, baik masyarakatnya harus sadar dan faham demokrasi, para elit partainya, negarawan dan unsur lainnya. Semua harus sepakat dan mau melakukannya. Saya yakin kalu semua sejalan dan seirama negara kita bisa maju” (Dwi Nopriyadi, Kelompok OKP Religius, Wawancara 6 Desember 2013).

“Saya masih percaya demokrasi ini merupakan sistem yang baik dari sisitem yang ada. Hanya saja untuk kasus di negara kita perjalanannya tidak mulus, sesuai harapan yang diinginkan.. kenapa saya katakana saya masih yakin demokrasi ini yang lebih baik, karena secara pemahaman demokrasi itu bisa mendorong siapa saja untuk bisa menjadi penguasa dan memberikan kebebasan politik kepada siapapun tanpa ada kekangan. Sayangnya demokrasi di kita itu kebablasan, yang eforia yang tadinya dikekang di rejim orde baru dan sekarang

diberi kebebasan sebeb-bebasnya. Yang ada malah konflik terus berkepanjangan, rasa persaudaraan antar bangsa semakin menurun karena perang melawan bangsa sendiri. Dan seolah kita tidak punya wibawa di hadapan bangsa lain” (Eko Waluyo, Kelompok OKP Nasionalis, Wawancara 23 Desember 2013).

Demokrasi masih menjadi sistem politik yang diharapkan oleh masyarakat untuk bisa membawa perubahan dan menghantarkan pada cita-cita bangsa Indonesia. Meski ada beberapa kritikan yang mendorong untuk ada perombakan atau revisi atas nilai-nilai demokrasi yang dianut sekarang. Mereka berharap demokrasi yang harus diterapkan di negara Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan hasil perumusan dari para pendiri bangsa. Bukan nilai-nilai demokrasi yang liberal yang mendasakan pada penilaian kapital dan materi semata. Akan tetapi nilai-nilai demokrasi bisa diambil dari nilai-nilai bangsa yang sesuai dengan nilai budaya bangsanya sendiri.

## PENUTUP

### **Simpulan**

Lemahnya realisasi pelaksanaan fungsi partai politik oleh peserta pemilu 2014 membuat kepercayaan masyarakat melalui persepsi pemuda menjadi lemah. Kondisi tersebut mengakibatkan hilangnya kepercayaan pada pemerintah semakin menurun dan dipandang akan mengancam ketahanan wilayah di Provinsi Banten. Kondisi tersebut disebabkan banyak oknum pejabat publik atau politisi yang menduduki jabatan publik melakukan tindakan korupsi dan menyalahgunakan wewenang serta kekuasaannya. Kondisi lain yang terjadi akibat kebijakan publik dan

pelayanan public serta penegakan hukum yang masih dipandang belum berpihak pada masyarakat.

### **Saran**

Fungsi partai politik sebagai saran sosialisasi politik, rekrutmen politik, pendidikan dan sarana aspirasi masyarakat belum mampu direalisasikan oleh parpol peserta pemilu 2014 menyebabkan lemahnya kepercayaan terhadap parati, sehingga ketahanan wilayah terancam tidak stabil. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dari pengelola partai politik untuk melaksanakan fungsinya dengan baik, agar ketahanan wilayah terjaga dengan baik di Provinsi Banten.

### **Daftar Pustaka**

- Anzar, Dahnil., 2011, Akuntabilitas Keuangan Partai Politik di Banten, Serang: *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011*, LAB-ANE FISIP Untirta.
- Budiardjo, Miriam., 1998, *Partisipasi Politik dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Firmanzah., 2008, *Mengelola Partai politik; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman., 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: Univesitas Indonesia (UI Press).
- Nurtjajo, Hendra., 2006, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Saputro, Yulianto Dwi. 2015. *Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi di DPD II Partai Golongan Karya Kota Malang Jawa Timur Tahun 2009 - 2014)*. Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM.
- Yohanes. 2006. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2004 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*, Sekolah Pascasarjana UGM.

UU No 2 Tahun 2011 *Tentang Partai Politik.*

## **Partisipasi Pemuda Dalam Pelestarian Seni Budaya Tradisional Debus Banten**

**Agus Hiplunudin**

Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Setia Budhi Rangkasbitung-Banten  
agus.hiplunudin@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi pemuda di UKM Pandawa Untirta dalam pelestarian seni tradisional *Debus*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berlandaskan fenomenologi, dengan cara menggali informasi berdasarkan penghayatan pengalaman para pendebus, sebab *Debus* dapat difahami dari sudut pandang para pendebus itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan prosedur penelitian sebagai berikut (1) observasi, (2) wawancara dan menganalisisnya, (3) mengumpulkan dokumen-dokumen, dan (4) mengumpulkan materi audio visual yang mendukung data penelitian hingga penyajian menjadi sebuah jurnal penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemuda menjadikan debus kian lestari, hal tersebut terwujud dari bertahannya nilai-nilai yang terkandung dalam Debus. 1) *Debus* memiliki pesan budaya bahwa masyarakat Banten merupakan masyarakat religius, 2) *Debus* membudayakan manusia sebagai manusia, bukan membudayakan manusia berperilaku layaknya hewan, 3) *Debus* dengan konsep *ngeubleung* mengandung pesan tersirat, bahwa manusia sejatinya harus senantiasa *eling* (ingat) berhati-hati dalam *tindak tanduk*, perbuatan. 4) *Mucuk*, berpuasa yang hanya berbuka dengan pucuk-pucuk tumbuhan dan sekepal nasi serta seteguk air, *Debus* memberi pesan sejatinya manusia tidak berjiwa hewani, pelarangan makan daging hewan bukan hewan secara jasmani, namun hewan dalam makna ruhani. 5) *Weuduk* atau kekebalan memiliki esensi keberanian

Kata Kunci: Partisipasi, Pemuda, Pelestarian, Seni Budaya, Tradisional, Debus Banten.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang memiliki suku dan budaya yang beranekaragam. Namun, keanekaragaman suku budaya tersebut dapat dipersatukan, dengan filosofi *Bhinneka Tunggal Ika*. *Bhina* mengandung makna pecah, *ika*

bermakna itu dan tunggal atau satu, dalam hal ini *behinneka tunggal ika* memiliki makna; terpecah itu satu atau berbeda-beda, namun satu tujuan.

Sekilas mengenai budaya, kata “budaya” secara etimologis berasal dari kata Sanskerta yakni *budhayah* yaitu bentuk jamak dari *budhi* yang bermakna budi atau akal (Koentjaraningrat, 2002). Karenanya, dalam hal ini budaya dapat dimaknai sebagai segala aktivitas tingkah dan laku manusia yang bersumber dari budi atau akalnya, sebab hal itu dapat difahami bahwa hampir seluruh aktivitas manusia merupakan perwujudan dari budaya, kerana segala aktivitas manusia itu pada hakikatnya bersumber dari budi atau akalnya tersebut.

Seiring dinamika sosio kultural masyarakat, maka secara perlahan tetapi pasti budaya Indonesia dari waktu ke waktu terus-menerus mengalami perkembangan atau bahkan perubahan sejalan dengan laju kemajuan masyarakatnya, baik dalam tataran *nation* maupun tataran masyarakat global. Adapun setiap budaya tradisi yang dimiliki senantiasa berbeda-beda, sesuai dengan latar belakang sejarah dan karakter masyarakat daerah itu sendiri. Bangsa Indonesia yang multikultur dan multietnis, tentunya memiliki karakter budaya yang berbeda-beda pula, juga karakter yang khas dari kebudayaan tersebut dan itu dikenal dengan istilah kesenian tradisional.

Kesenian tradisional merupakan pantulan atau refleksi dari kejiwaan dan batin masyarakat setempat, biasanya bersumber dari sejarah masa lampau ataupun dari kehidupan masyarakat sehari-hari pada suku bangsa yang bersangkutan. Kesenian tradisional tumbuh dari mitos-mitos, legenda-legenda yang berkembang dalam masyarakat, sejarah rakyat setempat, ataupun dalam bentuk cerita rakyat

yang beredar luas dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai bersifat profan atau adikodrati diwariskan secara transmisi—turun-temurun, dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi secara berkesinambungan.

Kesenian tradisional sebagai warisan leluhur, tentu saja harus dipertahankan kelestariannya, sebab dalam kesenian tradisional tersimpan nilai-nilai tradisi yang akan menjadi khas suatu bangsa, kesenian tradisional baik disadari ataupun tidak dapat dipastikan akan memberikan identitas kultural pada para pelakunya secara khusus serta secara otomatis akan memperkuat karakter masyarakat itu sendiri dan pada akhirnya kesenian tradisional dapat memperkuat karakter bangsa itu sendiri.

Pada era informasi seperti dewasa ini, dalam konsepsi kebudayaan tentunya istilah globalisasi bukan merupakan istilah yang asing, ditandai di mana batas-batas negara seakan telah menghilang, sebab arus informasi sebagai manifestasi dari perkembangan teknologi informasi yang kian berkembang dengan cepat juga pesat, hal ini tentu dapat merubah paradigma atau cara berpikir dan berdampak pada berbuat manusia yang sangat mungkin menyebabkan melemahnya keberlangsungan kesenian tradisional dari akar masyarakatnya dalam hal ini seni dan tradisi yang meluntur dan bahkan menghilang. Kesenian tradisional harus bersaing dengan kebudayaan baru (populer) dan kebudayaan asing yang dapat mudah diakses melalui perkembangan media yang terjadi sangat cepat, dalam waktu singkat media elektronik audio visual seperti radio, film, dan televisi menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, Toffler (Wibowo, 2007).



## KAJIAN TEORI

Istilah partisipasi dapat diartikan sebagai hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan (Depdikbud, 1993). Dalam hal ini partisipasi berarti memiliki makna paralel dengan peran atau keterlibatan individu/ kelompok dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Partisipasi menurut (Isbandi, 2007), adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif, solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan serta upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi dapat difahami berupa keterlibatan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang hendak dicapai, entah itu sosial, politik, agama, organisasi baik privat maupun sosial dan budaya, partisipasi lebih menuntut keterlibatan mental, spiritual, dan emosional, karena dengan demikian partisipasi akan dijiwai oleh kesadaran pribadi tanpa paksaan namun dilakukan penuh kesukarelaan, yang disertai tanggung jawab, sebab sejatinya bila partisipasi digerakan oleh sebuah kekuatan dari luar diri seseorang maka hal tersebut bukanlah partisipasi yang sejati melainkan mobilisasi.

Menurut (Hasibuan, 2008), pemuda adalah sebagai individu yang dilihat secara fisik sedang mengalami pertumbuhan jasmani dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional.

Menurut (Alfian, 1986) pemuda adalah suatu fenomena yang kompleks dan rumit karena walaupun mereka diklasifikasikan berddasarkan umur yang sama,

mereka tetap individu yang berbeda dengan berbagai ragam latar belakang sosial, pendidikan, agama, hoobi, dan tempat tinggal.

Dalam konteks pembangunan kebudayaan berdasarkan UU No. 41/ 2009 Tentang Kepemudaan, pada pasal **19** poin **F** disebutkan bahwa pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan ketahanan budaya nasional yang di dalamnya termasuk budaya daerah.

Mengenai seni budaya tradisional; Menurut (Shils, 1981), seni tradisi rakyat/ tradisional merupakan karya seni yang tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat yang berkaitan erat dengan adat-istiadat, kepercayaan, dan kesenian. Begitu pula dengan (Kayam, 1987), menjelaskan bahwa seni tradisional bukan merupakan hasil kreativitas individu, melainkan tercipta secara anonim yang bersifat kolektif/ komunal dengan masyarakat penunjang kesenian tersebut. Kayam menambahkan bahwa seni tradisional cenderung dikenal di lingkungan wilayah itu saja dan apabila masyarakat penunjang seni tradisional tersebut tidak aktif maka kemungkinan besar eksistensi kesenian tersebut akan berkurang atau bahkan menghilang, punah.

Seni budaya tradisional tersebut, demi keberlangsungannya serta eksistensinya di tengah-tengah masyarakat, maka dipentaskanlah dalam bentuk seni pertunjukan. Dalam hal ini (Soedarsono, 1998) menjelaskan bahwa seni pertunjukan memiliki tiga fungsi primer, yakni; 1) seni pertunjukan sebagai upacara ritual yang banyak berkembang di daerah agraris dan biasanya dengan latar belakang masyarakat beragama yang di dalam kegiatan ibadahnya melibatkan pertunjukan seni, 2) seni pertunjukan sebagai hiburan seni semata, dinikmati secara pribadi, sebenarnya jenis pertunjukan ini tidak memerlukan penonton karena

penikmat seni ini melibatkan diri dalam pertunjukan tersebut, dan 3) seni pertunjukan sebagai presentasi estetis, biasanya jenis seni pertunjukan ini melibatkan banyak pendukung dan menghabiskan dana yang tidak sedikit, sehingga biasanya para penonton diharuskan membeli tiket untuk bisa menyaksikan jenis seni pertunjukan tersebut.

#### METODE DAN LOKASI PENELITIAN

Pemilihan lokasi penelitian ini, didasarkan pada tuntutan kajian mengenai kepemudaan, sebab UKM Pandawa Untirta merupakan organisasi kemahasiswaan yang notabene anggotanya kaum muda berdasarkan stratifikasi usia, dan UKM Pandawa Untirta tepat dijadikan sebagai tempat studi, sebab pada kiprahnya mereka menjalin kerjasama dengan padepokan tempat *Debus* dikembangkan yang terdapat di Banten. Adapun dalam penelitaian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif berlandaskan fenomenologi. (Raco dan Tanod, 2012), menjelaskan bahwa; menurut fenomenologi adanya dunia alami atau dunia nyata tidak disangkal keberadaannya, sejalan dengan aliran rasionalisme, fenomenologi juga mengakui adanya dunia nyata, hanya saja dunia tidak hanya menghadiri dirinya sendiri, dunia atau sesuatu dihadirkan atau dikenal lewat orang yang menyadari.

#### HASIL PENELITIAN

Pemuda memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi pelestarian seni tradisional *Debus* Banten. Hal tersebut teramati dari partisipasi pemuda yang dilakukan oleh UKM Pandawa Untirta; Berdasarkan data wawancara dengan para

pendebus yang tergabung di UKM Pandawa Untirta, dalam *Debus* terdapat ritual puasa *mucuk*, mereka dilarang makan-makanan yang berungsur daging. Namun, mereka makan-makanan yang berungsur tumbuhan atau nabati saja, dan itu pun harus jelas halal dan haramnya, bila perlu tumbuhan yang dimakan tersebut berasal dari hasil tanaman sendiri sehingga kehalalannya tidak lagi diragukan. Dalam konteks *Debus* bahwa puasa tersebut secara budaya *Debus* membudayakan— bahwa makanan yang dimakan harus betul-betul halal atau memiliki kepastian hukum secara syariat Islam, juga secara filosofis pelarangan makan-makanan yang berungsur daging atau hewani, bahwa *Debus* hendak membudayakan kehidupan yang beradab, kehidupan yang syarat dengan watak dan jiwa manusia, bukan kehidupan penuh kebebasan seperti binatang yang hidup di dalam hutan belantara yang memiliki hukum siapa yang kuat dialah yang menang di mana yang kuat memangsa yang lemah dan hewan memiliki watak hanya memuaskan tubuh jasmaninya saja tanpa mengindahkan pemusan secara ruhani.

Dalam ritual *Debus* terdapat puasa tujuh hari, dan pada hari ketujuh disebut *ngeubleung* di mana orang yang sedang puasa tersebut tidak diperkenankan makan dan minum, serta tak boleh tidur selama 24 (dua puluh empat) jam secara total, kalau tertidur walau hanya sedetik, puasa itu dianggap batal dan gagal karenanya harus mengulangi puasa dari awal. Berdasarkan kajian peneliti dengan data yang didapat dari para informan bahwa *ngeubleung* sesungguhnya memberikan didikan bahwa kita harus senantiasa waspada dan terjaga, berupa kewaspadaan, itulah yang hendak dibudayakan dalam *Debus* ditransformasikan pada masyarakat, sebab sebenarnya orang yang waspada lebih baik dari pada orang yang lengah.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi pemuda turut melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam *Debus*. Menurut (Horton dan Hun, 1999), nilai adalah gagasan mengenai apakah suatu pengalaman berarti atau tidak berarti. Dalam pengertian ini, nilai berhubungan dengan apakah sesuatu itu memiliki makna atau tidak, nilai berarti sesuatu yang dianggap penting dan berharga. Bila pemaknaannya diluaskan kedalam konteks suatu masyarakat, nilai merupakan sesuatu yang bermakna dan berharga, sehingga nilai merupakan sesuatu yang dianggap penting, diperjuangkan, dan menjadi patokan untuk bertingkah laku pada sebuah masyarakat atau pada seluruh penduduk yang menjunjung tinggi nilai yang bersangkutan. konsep nilai-nilai yang termuat dalam *Debus* tersebut disarikan menjadi sebagai berikut: 1) *Debus* memiliki pesan budaya bahwa masyarakat Banten merupakan masyarakat religius, 2) *Debus* membudayakan manusia sebagai manusia, bukan membudayakan manusia berperilaku layaknya hewan, hal itu tercermin dari pantangan 5M, yakni pelarangan *mabok, madon, madat, maen, dan mateni*. 3) *Debus* dengan konsep *ngeubleung* mengandung pesan tersirat, bahwa manusia sejatinya harus senantiasa *eling* (ingat) dengan kata lain senan tiasa selalu berhati-hati dalam *tindak tanduk*, perbuatan. 4) *Mucuk*, berpuasa yang hanya terbuka dengan pucuk-pucuk tumbuhan dan sekepal nasi serta seteguk air, *Debus* memberi pesan sejatinya manusia tidak berjiwa hewani, pelarangan makan daging hewan bukan hewan secara jasmani, namun hewan dalam makna ruhani. 5) *Weuduk* atau kekebalan tubuh, bermakna keberanian heronisme/ patriotisme.

Dalam hal ini; Partisipasi pemuda dalam pelestarian seni tradisional *Debus*, merupakan sesuatu yang khas dalam rangka mempertahankan, melestarikan, dan

mengembangkan seni budaya daerah yang terhimpun dalam *Debus* guna ketahanan budaya daerah sebagai cikal-bakal dari akumulasi yang dapat memperkokoh kebudayaan Nasional.

Fenomena yang terjadi, bahwa seni budaya tradisional terancam kelestariannya, sejalan dengan globalisasi kebudayaan yang ditandai dengan menderasnya internetisasi, yang memicu penyeragaman budaya, munculnya budaya hedonisme, materialisme, dan konsumerisme hingga merembas ke desa-desa, dan desa yang pada awalnya merupakan tempat di mana seni tradisional dipelajari dan ditransmisikan. Namun, kini orang-orang desa lebih tertarik pada *pop art* dan *mass art* yang dapat mereka saksikan via saluran internet dan televisi, hal tersebut membuat seni budaya tradisional terancam kelestariannya.

Di samping melajunya globalisasi kebudayaan, seiring dengan kebijakan desentralisasi yang dapat mencuatkan kesadaran identitas yang berlebihan, yang tak jarang melahirkan panatisme kedaerahan atau primordialisme yang kuat yang dapat menimbulkan atau membuka keran desintegrasi bangsa membuat seni budaya tradisional mengalami gerakan masyarakat daerah seperti yang pernah terjadi di Papua dan Aceh, dan lebih ekstrimnya keluarnya Timor-timor dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kendati keluarnya Timor-timor dari Indonesia bukan hanya semata digerakan oleh kesadaran identitas kultural. Namun, dipengaruhi juga oleh kekuatan politik baik nasional maupun internasional pada zamannya.

Berdasarkan fenomena tersebut partisipasi pemuda dalam pelestarian seni tradisional sangat diperlukan untuk menjamin keutuhan bangsa dan negara dengan menciptakan ketahanan budaya daerah yang dapat mengembangkan kebudayaan

Nasional dan menciptakan ketahanan Nasional, oleh karena itu para pemuda di UKM Pandawa Untrita melakukan aksi strategi dengan cara, 1) penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam *Debus* Benten, 2) ritual dan pementasan *Debus*, 3) Mentransmisi seni budaya tradisional *Debus*, 4) pemanfaatan seni tradisional *Debus* guna memenuhi kebutuhan pelestarian seni tradisional *Debus*, dan 5) melakukan inovasi yang tidak merusak esensi *Debus* sehingga *Debus* lestari hingga kini, karena dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sebagai dampak dari inovasi dalam pelestarian *Debus*.

Demi mewujudkan hal tersebut, para personil UKM Pandawa mengimplementasikan program kerja dalam bentuk, 1) penyelenggaraan seminar tentang seni tradisional *Debus*, 2) mengikuti perlombaan-perlombaan seni tradisional *Debus*, 3) melakukan pelatihan dan inovasi-inovasi dalam pelestarian seni tradisional *Debus*, dan 4) melakukan pementasan-pementasan seni tradisional *Debus* baik di dalam kampus maupun di luar kampus.

Partisipasi pemuda melalui aksi startegi, dan aksi nyata berupa implementasi program kerja tersebut, keberhasilannya ditandai dengan tertanamnya nilai-nilai yang terkandung dalam *Debus* yang menjadikan ketahanan budaya daerah menguat, sehingga *Debus* memiliki daya tangkal yang kuat terhadap budaya yang datang dari luar, memperkuat identitas kultural dalam penguatan jatidiri sebagai bangsa yang berbudaya.

## SIMPULAN DAN SARAN

### **Simpulan**

UKM Pandawa Untirta turut berperans erta dalam pelestarian seni tradisional *Debus*, adapun langkah-langkah strategis yang dipakai dalam pelestarian; pertama penanaman nilai-nilai dalam *Debus*. Hal tersebut terlihat dari penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam *Debus* itu sendiri 1) *Debus* memiliki pesan budaya bahwa masyarakat Banten merupakan masyarakat riligijs, 2) *Debus* membudayakan manusia sebagai manusia, bukan membudayakan manusia berperilaku layaknya hewan, hal itu tercermin dari pantangan 5M, yakni pelarangan *mabok, madon, madat, maen, dan mateni*. 3) *Debus* dengan konsep *ngeubleung* mengandung pesan tersirat, bahwa manusia sejatinya harus senantiasa *eling* (ingat) dengan kata lain senan tiasa selalu berhati-hati dalam *tindak tanduk*, perbuatan. 4) *Mucuk*, berpuasa yang hanya berbuka dengan pucuk-pucuk tumbuhan dan sekepal nasi serta seteguk air, *Debus* memberi pesan sejatinya manusia tidak berjiwa hewani, pelarangan makan daging hewan bukan hewan secara jasmani, namun hewan dalam makna ruhani. 5) *Weuduk* atau kekebalan tubuh, bermakna keberanian heronisme/ patriotisme.

### **Saran**

Partisipasi pemuda dalam pelestarian *Debus* Banten sangatlah diperlukan, supaya seni budaya tradisional tersebut tetap lestari, oleh karena itu peneliti merekomendasikan:

1. Pemerintah daerah harus memfasilitasi kaum muda salah satunya dengan cara pembuatan sanggar seni dari level desa, kabupaten/kota, hingga provinsi.



2. Pemerintah daerah harus mengapresiasi minat pemuda terutama dalam bidang seni budaya tradisional Debus Banten. Usaha tersebut merupakan salah satu upaya pembinaan agar partisipasi pemuda dalam pelestarian seni budaya tradisional bertahan atau bahkan menguat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian .1986. *Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Penerbit UI
- Depdikbud .1992. *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Depdikbud
- Hasibuan, M.U Syahadat .2008. *Revolusi Politik Kaum Muda*, Jakarta: YOI
- Horton dan Hunt .1999. *Sosiologi*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Isbandi, Rukminto A .2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari pemikiran Menuju Penerapan*, Depok: FISIP UI Pess
- Kayam, Umar .1987. *Seni Tradisi Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan
- Koentjaraningrat .2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Shils, Edward .1981. *Tradition*, Chicago: The University of Chicago
- Soedarsono .1998. *Seni Pertunjukan Indonesia di Era Globalisasi*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan
- Tanod, Revi RHM dan Raco, Zosef R .2008. *Fenomenologi Aflikasi pada Entrepreneurship*, Jakarta: Grasindo
- Wibowo, Fred. .2007. *Kebudayaan Menggugat*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher
- UU No.40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

# **PROSIDING SEMINAR NASIONAL**

**Laboratorium Administrasi Publik 2017**

**"Pengembangan Kawasan Berbasis  
Pembangunan Berkelanjutan"**



**PENERBIT :**

**UNTIRTA PRESS**

ISBN 978-602-5587-12-2



9 786025 587122